

# BIANGLALA BUDAYA

*100 Tahun (1918-2018)  
Kongres Kebudayaan  
Menuju Kemajuan  
Kebudayaan Bangsa*

## KONGRES KEBUDAYAAN

*Nunus Supardi*

1/5



BIANGLALA BUDAYA

KONGRES KEBUDAYAAN

**Jilid**  
**satu** 01/05

NUNUS SUPARDI

**Bianglala Budaya Jilid 1:**

**Kongres Kebudayaan**

©Nunus Supardi

**Cetakan Pertama, November 2018**

**Penyunting**

Ninus Andarnuswari

**Perancang Sampul & Ilustrasi**

Febrian Adi Putra

**Perancang Infografis**

Ashief Mutammimul Husna

**Penata Letak**

Teguh Pandirian

Foto untuk ilustrasi sampul diolah dari koleksi KITLV

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit

SUPARDI, Nunus

**Bianglala Budaya Jilid 1:**

**Kongres Kebudayaan**

Jakarta; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

XVIII + 240hlm.; 21 cm x 15 cm

**Untuk memperingati 100 tahun Kongres Kebudayaan (1918-2018)  
menuju kemajuan kebudayaan bangsa**

## Daftar Isi

Sekapur Sirih	VI
Pengantar Edisi ke 2	IX
Prakata Pemulung	XIII
<b>Bab 1: Pendahuluan</b>	<b>02</b>
Pengertian Kongres	04
Sekilas Kebudayaan Masa Penjajahan	08
Peristiwa Sejarah yang Terpinggirkan	15
<b>Bab 2: Kongres Kebudayaan Prakemerdekaan</b>	<b>20</b>
Kongres Kebudayaan 1918	22
Pembahasan Kongres	27
Perdebatan	42
Kongres Kebudayaan 1919	54
Kongres Kebudayaan 1921	60
Serba-serbi Kongres	60
Pentas Loetoeng Kasaroeng	65
Di Balik Peristiwa	67
Kongres Kebudayaan 1924	71
Kongres Kebudayaan 1926	74
Kongres Kebudayaan 1929	79
Satu Dasawarsa Java-Instituut	80
Perdebatan dalam Kongres	83
Kongres Kebudayaan 1937	88
Kesimpulan	94
<b>Bab 3: Kongres Masa Awal Kemerdekaan (1945-1965)</b>	<b>100</b>
Jumlah dan Urutan Kongres Kebudayaan Indonesia	102
Kongres Kebudayaan 1948	107
Kongres di Sela-sela Perang	107

Persiapan dan Pelaksanaan	111
Pembentukan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)	124
Kongres Kebudayaan 1951	126
Pembentukan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)	138
Kongres Kebudayaan 1954	146
Kongres Kebudayaan 1957	159
Kongres Kebudayaan 1960	166
<b>Bab 4: Kongres Kebudayaan Masa Pembangunan</b>	<b>174</b>
Tuntutan Masyarakat	176
Pelaksanaan Kongres Kebudayaan 1991	179
Beberapa Catatan Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991	192
<b>Bab 5: Kongres Kebudayaan Masa Reformasi</b>	<b>198</b>
Kongres Kebudayaan 2003	200
Persiapan	201
Temu Budaya Daerah dan Temu Budaya Regional	206
Prakongres Kebudayaan di Denpasar, Bali	206
Pelaksanaan Kongres Kebudayaan 2003	210
Beberapa Catatan Pelaksanaan Kongres Kebudayaan 2003	215
Kongres Kebudayaan Indonesia 2008	221
Kebudayaan dan Industri Kreatif	221
Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008	226
Pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI)	229
Kongres Kebudayaan 2013	231
Daftar Pustaka	236
Tentang Penulis	239

Sekapur Sirih

Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan

Republik Indonesia

**B***ianglala Budaya* karya Nunus Supardi ini sudah diterbitkan beberapa kali dalam versi-versi yang terus dimutakhirkan, mengikuti perkembangan penyelenggaraan kongres-kongres yang membahas permasalahan dan visi pembangunan kebudayaan Indonesia. Buku ini merupakan sebuah kompilasi catatan penting, yang telah berhasil memaparkan runutan periodik tentang bagaimana berbagai pemikiran dan perdebatan soal kebudayaan mengemuka pada setiap zaman. Buku ini tentunya merekam berbagai usaha menjawab tantangan zaman seiring dengan perkembangan masyarakat dan institusi negara. Sebagai kompilasi catatan, buku ini menyediakan pintu-pintu ke ratusan sumber sejarah untuk terus kita gali kembali dalam upaya merumuskan visi besar pemajuan kebudayaan Indonesia masa depan.

Penerbitan *Bianglala Budaya* dalam versi yang diperbarui tahun 2018 ini merupakan penanda bagi tiga momen penting dalam kronik panjang perjalanan kongres kebudayaan di Indonesia.

Momen pertama adalah peringatan 100 tahun diselenggarakannya *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* pada 5-7 Juli 1918 di Surakarta. Kongres tersebut kemudian disepakati sebagai kongres pertama (masa prakemerdekaan) yang membicarakan, mengulas, dan memperdebatkan permasalahan-permasalahan budaya dari perspektif kebangkitan nasional, meski hanya spesifik kebudayaan Jawa. Dipengaruhi imbas besar *Ethische Politiek* dasawarsa sebelumnya, kongres ini mengedepankan pembahasan tentang kesadaran akan “ketimuran”, kebutuhan untuk mengejar peradaban Barat, pentingnya pendidikan terbuka bagi rakyat, sampai perumusan visi

pengembangan budaya Jawa. Kongres yang diketuai oleh R. Sastrowidjono ini telah membuka kotak Pandora wacana kebudayaan di kalangan para pendiri republik ini.

Momen kedua adalah peringatan 70 tahun diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pertama setelah berdirinya Republik Indonesia, yang terjadi di Magelang pada 20-24 Agustus 1948. Diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dengan dukungan Mr. Ali Sastroamidjojo (sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan RI), kongres diselenggarakan tidak lama sebelum agresi militer Belanda kedua pada akhir 1948. Bisa dibayangkan betapa tidak stabilnya keadaan saat itu, dan tetap saja kongres ini dilaksanakan dengan fasilitas serba terbatas; dengan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, segenap anggota kabinet, serta budayawan dan seniman. Kongres inilah yang berhasil memberikan rekomendasi awal tentang pentingnya kebudayaan dalam pembangunan manusia Indonesia dan bagaimana posisi negara dalam mewujudkan hal tersebut.

Momen ketiga adalah diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Jakarta, 5-9 Desember 2018. Kongres ini adalah kongres kebudayaan pertama yang diselenggarakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya undang-undang tersebut mengubah posisi negara dan relasinya dengan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa Strategi Kebudayaan harus disusun dari proses pendataan dan perdebatan secara *bottom-up* dari tingkat kabupaten/kota, naik ke tingkat provinsi, untuk

kemudian dirumuskan di tingkat nasional. Kali ini, Strategi Kebudayaan tidak dilahirkan oleh para pemikir besar, tapi merupakan hasil konsolidasi pemikiran atau hasil kecerdasan kolektif para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dari seluruh pelosok negeri. Dalam kongres ini juga untuk pertama kalinya Strategi Kebudayaan yang dirumuskan memiliki kekuatan hukum melalui penetapan oleh Presiden, yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen teknokratik kerja pemerintah seperti RPJPN, RPJMN, sampai RKP dan RKPD. Dengan kata lain: untuk pertama kalinya perspektif kebudayaan menjadi dasar pembangunan nasional.

Ketiga momen penting ini layak kita rayakan bersama. Melalui buku yang disunting kembali menjadi lima jilid ini, saya berharap kita semua dapat mempelajari riwayat kongres kebudayaan di Indonesia dan ikut merayakan ketiga momen penting itu lewat partisipasi dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Jakarta, 10 November 2018

## Pengantar

Edisi kedua

Prof. Dr. Fuad Hassan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1985-1993

Banyak pendekatan dilakukan oleh para pemikir dan filosof untuk menjelaskan pembeda utama antara manusia dan hewan. Ada yang menekankan pembeda utama itu pada kecerdasan, ada pula yang menekankan pada ketangkasan-ketangkasan yang membuat manusia bisa melompat dari satu tahap kesanggupan ke kesanggupan lainnya. Namun, pada analisa akhirnya, pembeda utama antara kedua makhluk ini adalah adanya dimensi budaya dalam perkembangan manusia sebagai umat masyarakat maupun sebagai perorangan.

Hewan adalah makhluk alamiah murni. Mereka lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kaitan dengan lingkungan alamnya (*nature*). Manusia lahir, tumbuh, berkembang tidak hanya dalam kaitan dengan lingkungan alamnya, akan tetapi juga di bawah pengaruh lingkungan budayanya (*culture*). Demikian, maka ada alasan untuk menyebutkan, karena dalam kehidupan manusia itu berorientasi pada nilai budaya, maka hal itu menjadi keunggulannya di atas hewan. Kalau pada hewan orientasi itu ditekankan pada nilai bertahan diri (*survival*) belaka, pada manusia kehidupan dimaknai lebih dari sekedar bertahan diri; pada manusia orientasi dalam kehidupan diperluas oleh dimensi-dimensi yang memperkaya wawasan hidupnya seperti keindahan, keadilan, kesenangan.

Oleh karena adanya acuan pada nilai budaya itu, maka setiap bentuk kebersamaan manusia (misalnya dalam suku, masyarakat, bangsa), cenderung untuk berpedoman pada ukuran-ukuran (*nomos*) yang kemudian menjadi norma perilaku dalam kehidupan kebersamaan itu. Gagasan tentang baik-buruk, indah dan tidak indah, adalah gagasan-gagasan tentang skala

nilai-nilai, dan diterjemahkan dalam ukuran-ukuran norma sosial. Dengan demikian perikehidupan manusia mengacu pada aturan-aturan yang menjadi dasar konformisme sosial. Misalnya, ukuran tentang penggunaan tangan kiri dan tangan kanan adalah ukuran norma. Secara umum gambaran inilah yang menjadi pendukung dari sejarah peradaban.

Demikianlah, maka keunggulan manusia sebagai makhluk budaya menjelma dalam kehidupan yang beradab. Kita sebagai bangsa yang kebetulan atau ditakdirkan (*by incident*) meliputi beratus suku bangsa yang menggunakan beratus ragam bahasa dan menampilkan gaya hidup yang berakhir pada tradisi beragam, niscaya akan terus-menerus disibukkan oleh pemikiran tentang ikhtiar pengembangan kebudayaan Indonesia. Berpikir tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia tidak akan berhenti dalam satu dua generasi. Kita harus menjalani kehidupan yang multikultural, dengan kesanggupan menyaksikan bahwa keberagaman itu justru kekayaan. Dasar yang diperlukan untuk sampai pada kesanggupan menjalani hidup dalam keberagaman adalah kesanggupan untuk menempatkan keberagaman sebagai kekayaan, kesanggupan untuk saling kenal, saling mengerti dan saling menerima. Dengan kenyataan ini kita sudah betul-betul diwajibkan untuk tidak melepaskan perhatian kita terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam hal ini patut kita junjung tinggi wawasan para pendiri bangsa yang mencantumkan Pasal 32 dan Penjelasannya dalam UUD 1945. Dengan pencantuman itu menunjukkan bahwa sejak semula para pendiri bangsa telah menempatkan urusan pengembangan kebudayaan sebagai komitmen konstitusional.

Perlu dijelaskan di sini, komitmen itu tidak dapat diabaikan oleh karena alasan pengembangan kebudayaan nasional harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang bisa dipersoalkan adalah bagaimana cara-cara komitmen itu diwujudkan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita semua yang berminat terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Dalam kaitan ini kita harus menyadari bahwa proses pengembangan kebudayaan bukan berarti sekadar beralih dari segala yang lama ke segala yang baru.

Dinamika kebudayaan bukan merupakan proses singkir-menyingkirkan apa yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Menarik sekali untuk dicermati bahwa dinamika kebudayaan merupakan penjelmaan dari pertentangan antara dua daya, yaitu daya pelestarian (*preservative*) dan pengembangan (*progressive*). Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang kebudayaan nasional kita perlu mencurahkan perhatian pada berbagai ikhwal kebudayaan, yaitu mana yang perlu dilestarikan dan bagian lain yang mana yang perlu dimajukan. Misalnya, dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan adalah upaya itu dapat “*mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*”

Dalam hubungan dengan berbagai permasalahan kebudayaan seperti digambarkan di atas, dapat dimengerti jika dalam rentang waktu yang panjang (1918-2003) telah terselenggara beberapa kali Kongres Kebudayaan. Himpunan dari berbagai kegiatan kongres yang pernah diselenggarakan, dalam sebuah buku, merupakan ikhtiar untuk menyajikan perkembangan pemikiran tentang kebudayaan Indonesia secara umum dari waktu ke waktu. Kalau kita cermat membaca perkembangan pemikiran itu, akan terlihat adanya benang merah, adanya harapan dan cita-cita yang selalu diungkap kembali di samping memperbincangkan hal baru yang kontemporer. Namun demikian, terdapat pula kesan bahwa usulan-usulan dan saran-saran yang lagi-lagi muncul, menunjukkan karena usulan itu tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi dan fihak-fihak yang seharusnya usulan itu dapat dijadikan andalan. Dalam pelaksanaan Kongres Kebudayaan yang terakhir (2003) juga terdapat kesan bahan yang telah diuraikan dan disepakati merupakan ulangan dari kongres sebelumnya. Ulangan-ulangan pembahasan itu menggambarkan bahwa bahan-bahan yang telah terhimpunkur ang dijadikan acuan, sehingga berlangsungnya kongres itu dapat merupakan forum yang memperbincangkan bab-bab baru yang terlepas dari bab sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau kemudian pada bidang-bidang kebudayaan diadakan kongres secara terpisah, seperti kongres Bahasa, Kongres Kesenian, yang fokusnya lebih jelas.

Dengan diupayakannya penerbitan buku ini patut disambut oleh khalayak pembaca yang berminat terhadap ikhtiar besar dalam mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan dihimpunnya bahan-bahan dokumenter Kongres Kebudayaan sepanjang 1918-2003, maka buku ini bisa menjadi sumber acuan yang komprehensif bagi peminat masalah budaya.

Jakarta, 6 Mei 2005

## Prakata Pemulung

Pada 2018 ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2018, Kongres Kebudayaan (Jawa) yang pertama resmi dibuka satu abad yang lalu. Kongres itu diberi nama *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, atau Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa. Pada dasarnya, inilah Kongres Kebudayaan (KK) I. Gagasan untuk menyelenggarakannya muncul dari seorang bumiputra, Pangeran Prangwadana atau Mangkunegoro VII. Kegigihan kaum bumiputra untuk mengganti perintah Batavia menyelenggarakan Kongres Bahasa (Jawa) menjadi Kongres Kebudayaan (Jawa) mencerminkan tumbuhnya kesadaran kaum terpelajar bumiputra untuk melawan hegemoni budaya penjajah Belanda yang berabad-abad mencengkeram pikiran kaum bumiputra.

Pilihan pada kongres, sebagai ajang para pemangku kebudayaan untuk membahas berbagai permasalahan kebudayaan guna menghasilkan suatu kesepakatan pada masa penjajahan Belanda, mencerminkan betapa besarnya kesadaran kaum pergerakan dalam menyiapkan lahirnya bangsa baru yang berjiwa kebangsaan baru, kebudayaan Indonesia. Tumbuhnya kesadaran berbangsa ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908, sedangkan kesadaran berbudaya ditandai dengan KK 1918. Sepuluh tahun kemudian, bibit kesadaran itu tumbuh semakin besar dan membulat kuat. Melalui Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, hal itu secara bersama-sama diikrarkan sebagai suatu “sumpah” bersama untuk “mengaku berbangsa satu, Indonesia”, “bertanah air satu, Indonesia”, dan “menjunjung bahasa persatuan, Indonesia”. Tujuh belas tahun kemudian bangsa baru itu mencapai titik kulminasi, dengan gagah berani memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka, tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Seratus tahun perjalanan KK kini telah meninggalkan rekam jejak yang sarat dengan konsep, kebijakan, dan strategi dalam memajukan kebudayaan bangsa, seirama dengan kemajuan zaman. Tujuan utama penulisan buku ini, selain untuk memperingati 100 tahun berlangsungnya KK pertama, juga untuk mengangkat dan memperkenalkan berbagai kongres sebagai peristiwa budaya yang selama ini masih terabaikan. Kongres maupun konferensi kebudayaan luput dari perhatian kita, baik dalam hal makna keputusan kongres maupun tindak lanjut sebagai bentuk realisasi keputusan kongres. Banyak sekali ide, gagasan, saran, dan pendapat yang pernah dilontarkan oleh para pendahulu kita yang dapat dijadikan bahan renungan dalam menyusun konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan masa-masa selanjutnya.

Bukti bahwa kebudayaan dan KK memiliki peran penting dalam membangun rasa kebangsaan dan memajukan kebudayaan bangsa bertebaran di mana-mana. Pemulungan data dimulai sejak 1991 pada saat diselenggarakan KK di Taman Mini Indonesia Indah. Hasilnya diterbitkan dalam bentuk cetak sederhana, "Kongres Kebudayaan 1918-2003", sebagai bahan bacaan KK 2003 di Bukittinggi. Setelah itu, pemulung terus memulung dan merevisi buku tersebut. Selain telah berlangsung enam belas kali KK, ada kongres berbagai unsur kebudayaan, seperti: bahasa (Indonesia dan daerah), sastra (Indonesia dan daerah), linguistik, kesenian, sejarah, arkeologi, prehistorisi, perbukuan, perpustakaan dll. Berikutnya juga kongres bidang-bidang lain yang bukan unsur kebudayaan tapi terkait erat dengan masalah kebudayaan, misalnya kongres Pancasila, kongres pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, diaspora Indonesia, kebudayaan pemuda, kebudayaan daerah, dll. Dari rekaman jejak berbagai kongres itu dapat diidentifikasi berbagai konsep, kebijakan, dan strategi untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Kesemuanya itu merupakan serpihan-serpihan yang dapat dijadikan bahan pelengkap untuk menggambarkan perjalanan sejarah kebudayaan bangsa. Maraknya kongres dan konferensi kebudayaan dan unsur-unsurnya,

setelah memasuki era Reformasi, menunjukkan peningkatan kesadaran para pemangku kebudayaan. Masing-masing suku bangsa seperti saling berlomba untuk menyelenggarakan kongres sendiri-sendiri: Jawa, Sunda, Minangkabau, Madura, Bali, Banjar, Aceh, dll. Di bidang bahasa berlangsung kongres bahasa Aceh, Lampung, Madura, Cirebon, Tegal, Makassar, Gorontalo, Inyong Banyumas dll. Di bidang sastra berlangsung kongres sastra Indonesia, sastra Jawa, kongres cerita pendek Indonesia, dll. Selain itu, juga ditemukan berbagai data baru baik dalam bentuk teks, foto, atau gambar. Pada 2013 terbitlah buku edisi III berjudul *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-20013* dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Indonesia 2013. Untuk memperingati “100 Tahun Kongres Kebudayaan” dan menyambut KK 2018, pemulung pun menyiapkan data tambahan untuk melengkapi buku sebelumnya. Judul buku edisi IV ini mengalami penyesuaian menjadi *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 100 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2018*.

Melalui penghimpunan data ini, diharapkan peristiwa-peristiwa budaya itu dapat diakui sebagai peristiwa bersejarah. Namun, masuk ke dalam buku sejarah atau tidak, KK tetap merupakan peristiwa sejarah yang penting. Putu Wijaya mengatakan dalam bukunya, *NgEH*, sebuah peristiwa bisa menjadi penting kalau dia mendapat ekspos. Tetapi sebuah peristiwa penting tidak dengan sendirinya menjadi tidak penting kalau tidak diekspos. Peristiwa budaya, meskipun tidak diekspos, menurut Putu, akan tetap penting. Suatu peristiwa budaya, meski telah berlangsung lama dan tidak diketahui banyak orang, akhirnya suatu saat akan diakui sebagai peristiwa penting, karena ia lebih merupakan pengalaman spiritual. Tanpa publikasi, ia bisa menunggu waktu, merambat terus perlahan-lahan, membangun sesuatu dalam diri manusia, kadangkala tanpa disadari oleh manusianya sendiri, sampai pada suatu saat sejarah akan “mendusin, terkejut dan buru-buru mencatatnya, kemudian diakui sebagai salah satu prasasti penting.”

Berbeda dengan edisi 2007 yang penyajiannya dalam satu buku, edisi baru ini, dengan pertimbangan kepraktisan, terbagi menjadi lima buku, yaitu

Jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Jilid 1 berjudul *Kongres Kebudayaan*. Isinya memaparkan KK masa penjajahan (1918-1945), KK sesudah Indonesia merdeka, dimulai dari masa awal kemerdekaan (1945-1965), masa pembangunan (1969-1998), dan masa Reformasi (1998 hingga sekarang). Jilid 2 berjudul *Dari Kongres Pancasila hingga Kongres Kebudayaan Pemuda*. Dalam buku ini dipaparkan hasil-hasil Kongres Pancasila 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2018. Jilid 3 berjudul *Dari Kongres Kebudayaan Daerah hingga Kongres Kesenian*. Bagian ini berisi gambaran tentang kongres-kongres yang berkaitan dengan kebudayaan seperti: kebudayaan daerah (Jawa, Sunda, Bali, Madura, Banjar, Minangkabau, dll), sejarah, arkeologi, antropologi, kesenian, perpustakaan, perbukuan, dll. Jilid 4 berjudul *Kongres Bahasa dan Sastra*. Pada buku ini dipaparkan seluruh kongres bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang pernah berlangsung, juga Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu yang diselenggarakan oleh pemerintah Malaysia. Terakhir, Jilid 5 berjudul *Catatan Rekam Jejak*. Setelah menjelajahi 100 tahun Kongres Kebudayaan beserta kongres-kongres lainnya, buku ini memaparkan benang merah yang menghubungkan seluruh kongres.

Beberapa kesulitan dalam menghimpun data akhirnya dapat teratasi berkat bantuan berbagai pihak. Berkat bantuan rekan-rekan di Museum Sonobudoyo, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPNST) Bandung, BPNST Pontianak, BPNST Banda Aceh, Balai Bahasa Aceh, Balai Bahasa Jawa Timur, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Pusat Dokumentasi H.B. Jassin, Balai Bahasa Lampung, Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS), Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan, Lembaga Sensor Film, Badan Kerja sama Kesenian Indonesia (BKKI) Jakarta, Lingkar Budaya Indonesia (LBI), KITLV di Belanda, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, dan Perpustakaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, buku ini menjadi semakin kaya. Kepada semua lembaga itu pemulung mengucapkan terima kasih.

Dalam kesempatan ini pemulung secara khusus sekali menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada almarhum Prof. Dr. Fuad Hassan, yang atas kehendak beliau sendiri memberikan “Pengantar” untuk buku Edisi II, yang sengaja pemulung kutip lagi untuk edisi ini. Dengan suara parau dan sambil berbaring sakit di tempat tidur, beliau mendiktekan kata demi kata dan baris demi baris pengantar tersebut. Juga secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adiwoso, Sdr. Sudarmadji Damais, Sdr. Chandra Halim yang dengan sabar dan tulus membantu meluruskan dan menerjemahkan teks dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Ucapan terima kasih juga pemulung sampaikan kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan yang telah mengapresiasi dengan penerbitan buku ini. Selain itu, terima kasih pula kepada tim penyunting: Ninus Andarnuswari, Isaiyas Ining, Fitri Ratna Irmalasari, dan Dewi Kharisma Michellia yang telah bekerja keras merapikan halaman demi halaman, berikut tim desain yang dipimpin oleh Febrian Adi Putra. Terakhir, kepada istriku tercinta, anak dan cucu-cucu, juga pemulung ucapkan terima kasih yang paling dalam karena, selain terus memberikan semangat untuk menyelesaikan buku ini, juga telah merelakan suami, ayah, kakek selama berbulan-bulan”menikahi” komputer dan buku.

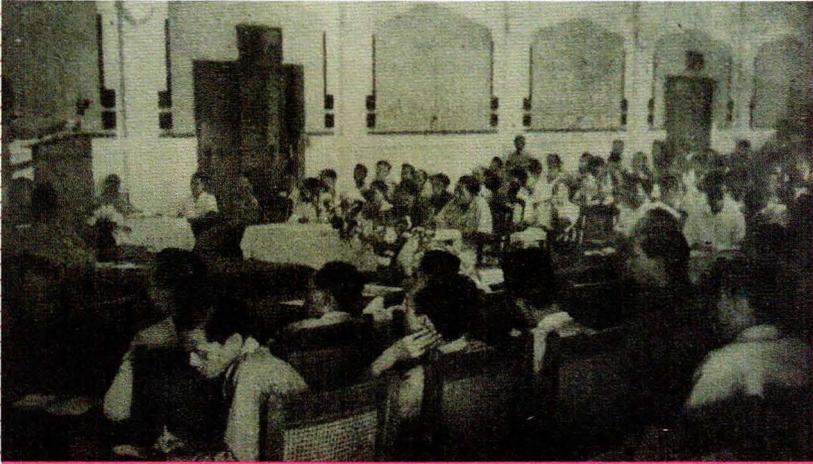
Angan-angan untuk terus merevisi buku edisi pertama 2003 yang tebersit lima belas tahun lalu akhirnya pada 2018 dapat tercapai. Diiringi ucapan syukur “Alhamdulillah Robbi” buku ini dapat terbit meskipun masih banyak kekurangan dan kelemahannya, terutama kelengkapan data dari beberapa kongres. Mudah-mudahan buku ini dapat membuat kita mendusin dan mengakui seluruh perjalanan KK selama 100 tahun sebagai peristiwa penting bagi sejarah kebudayaan Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2018

**Pemulung**  
**Nunus Supardi**

**Jilid**  
**satu 01/05**

---



Sidang Kongres Kebudayaan pertama di Magelang pada Agustus 1948 yang diketuai Mr. Wongsonegoro. (Dari *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia, 1945-1949*, Kementerian Penerangan, 1949)



Sidang rapat untuk Seksi Kritik Seni di dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan ke-II. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



BAB

01

# PENDAHULUAN

---

**B**erdirinya Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908 dikenal sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Organisasi ini dianggap sebagai perwujudan semangat nasional yang mulai menyala untuk membasmi penyebab pokok kemiskinan, yaitu penjajahan. Saat itu tumbuh kesadaran intelektual tentang peningkatan kecerdasan anak bumiputra. Dalam kongres BO yang diselenggarakan di Jakarta pada 3-5 Oktober 1908, dibahas tentang pencerahan akal budi yang dimungkinkan oleh pengembangan pendidikan dan budaya kemajuan. Dengan kata lain, sepak terjang para pemuda-pelajar pendiri dan penggerak BO memotori satu gerakan budaya

yang secara sadar dan sengaja mengarah ke pembentukan masa depan. Masa depan ini bermuara pada pembentukan satu negara-bangsa yang ketika itu masih disebut "Hindia-Belanda", tanpa membedakan asal-usul, keturunan, agama, dan keadaan kaya atau pun miskin. Tujuan BO dirumuskan sebagai langkah menuju kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan bidang-bidang kebudayaan (kesenian dan ilmu), pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, dan industri.

Untuk mencapai tujuan itu, ternyata diperlukan waktu 20 tahun untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Pada 28 Oktober 1928, tampil satu gerakan budaya lain di Batavia, lagi-lagi digerakkan oleh sekumpulan pemuda-pemudi pelajar. Melalui ikrar "Soempah Pemoeda", mereka menyatakan tekad berupa pilihan kesatuan wilayah (bertumpah darah satu), pilihan kesatuan politik (berbangsa satu), dan pilihan kesatuan budaya (menjunjung tinggi bahasa persatuan) yang semuanya disebut "Indonesia". Peristiwa itu sekarang telah diakui sebagai tonggak sejarah kedua, setelah tonggak pertama yang ditandai dengan berdirinya BO 1908. Kedua tonggak itu mencerminkan tahapan perjuangan menuju Indonesia merdeka, yang dimulai dengan penanaman nilai, pemupukan kesadaran berbangsa, menuju titik kulminasi berupa ikrar atau sumpah.

Namun, di antara kedua tonggak itu sebuah peristiwa menarik lain berlangsung. Pada 1918, tokoh-tokoh muda bersepakat menolak keinginan Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa, dan menggantinya dengan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa (KKJ). Diselenggarakan tepat sepuluh tahun setelah berdirinya BO dan sepuluh tahun sebelum Sumpah Pemuda, kongres ini layak menjadi satu lagi tonggak sejarah terkait kesadaran bangsa dengan identitas budayanya sendiri.

Kongres Kebudayaan (KK) Jawa diselenggarakan sebagai *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, atau kongres pengembangan kebudayaan Jawa. Gagasan untuk menyelenggarakan KK itu muncul dari seorang bumiputra, Mangkunegoro VII. KK pertama itu disusul oleh kongres-kongres berikutnya hingga tujuh kali selama sebelum Indonesia merdeka.

Bahkan, KK tersebut juga menjadi motor penggerak diselenggarakannya kongres-kongres kebudayaan berikutnya setelah Indonesia merdeka, berikut kongres-kongres lain yang membahas berbagai unsur kebudayaan, seperti kongres kebudayaan daerah, bahasa Indonesia dan daerah, sastra Indonesia dan daerah, cerita pendek, linguistik, kesenian, sejarah, arkeologi, ilmu pengetahuan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, pendidikan dan kebudayaan serta diaspora, dll.

Selain kongres sebagai ajang dialog budaya, telah berlangsung juga konferensi-konferensi guna membahas masalah kebudayaan maupun unsur kebudayaan. Kesemuanya patut ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan sejarah kebudayaan bangsa. Pencatatan mengenai latar belakang, penggagasnya, materi yang diperdebatkan, dan kesimpulan serta rekomendasi yang disepakati ada baiknya dihimpun menjadi satu. Tujuannya adalah siapapun dapat dengan mudah menelusuri pokok masalah, pemecahan masalah, dan benang merah pemikiran para budayawan, seniman, cendekiawan, dalam merumuskan tentang konsep, kebijakan, dan strategi memajukan kebudayaan bangsa dari masa ke masa.

### **Pengertian Kongres**

Kata kongres berasal dari kata *congressus* dalam bahasa Latin, yang diadopsi ke dalam bahasa Belanda menjadi *congres*, dan dalam bahasa Inggris menjadi *congress*. Dalam “Dokumen Kongres Bahasa Indonesia” (1938), bahasa Indonesia mengadopsinya sebagai konggres. Selanjutnya, kata ini dimasukkan ke dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1965) sebagai kong(g)res. Di bawah ini adalah artinya dalam bahasa Inggris, yang menjadi acuan dalam bahasa Indonesia:

	Referensi	Definisi
Congress	<i>The Australian Concise Oxford Dictionary</i>	<i>A coming together, meeting; formal meeting of delegates for discussion, esp. of persons belonging to a particular body or engaged in special studies.</i>
Congress	<i>Webster's New World College Dictionary</i>	<i>A meeting; a coming together; sexual intercourse; social interaction; an association or society; an assembly or conference; a formal assembly of representatives, as from various nations or churches, to discuss problems (...).</i>
Kongres	<i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>	(Rangkaian) pertemuan para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah.

Selain kata kongres, kadang digunakan juga kata konferensi:

	Referensi	Definisi
<i>Conference</i>	<i>Webster's New World College Dictionary</i>	(1) <i>The act of conversing or consulting on a serious matter;</i> (2) <i>a formal meeting of a number of people for discussion or consultation;</i> (3) <i>a meeting of committees from both branches of a legislature to reconcile the differences between bills passed by branches.</i>
Konferensi	Kamus Besar Bahasa Indonesia	Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai sesuatu masalah yang dihadapi bersama.

Bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya:



Dalam buku ini, tujuan kongres atau konferensi adalah membahas masalah-masalah yang dipandang penting demi kesepakatan mengenai cara mengatasinya. Materi yang didiskusikan, misalnya, masalah-masalah kesenian, bahasa, sejarah, pendidikan, dan lain-lain. Masalah-masalah itu

dapat dipersempit lagi berdasarkan tema, subtema, dan topik yang dinilai penting dan mendesak untuk dibahas. Misalnya, ada kongres mengenai pendidikan kebudayaan; kebudayaan dan pembangunan masyarakat; seni dan hak cipta; konsep, strategi, dan kebijakan pengembangan kebudayaan, dll. Peserta yang hadir di dalam kongres (dalam bahasa Belanda disebut *congressist*) sangat bervariasi, tetapi biasanya adalah para ahli dan wakil-wakil dari profesi dan organisasi atau perkumpulan.

Hasil kongres atau konferensi merupakan bagian terpenting. Hasil itu dapat berbentuk keputusan, kesimpulan, rumusan, saran, usul, dan rekomendasi. Peserta kongres memiliki kewenangan yang tinggi dalam memberikan pendapat dan memutuskan hasil-hasilnya. Hasil itu merupakan kesepakatan bersama para peserta, dan memiliki kekuatan moral dan politis sebagai penentu arah penyelesaian masalah. Hasil kongres menjadi acuan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Biasanya, perkembangan hasil pelaksanaan keputusan kongres yang lalu akan dilaporkan pada kongres berikutnya.

Kongres atau konferensi kebudayaan amat penting maknanya bagi sebuah bangsa seperti Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, beranekaragam budaya, bermacam-macam bahasa, dan multimental (mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Kong Hu Tzu; kebudayaan para kolonialis, dll.) Bangsa Indonesia lahir sebagai hasil kesepakatan dari seluruh suku bangsa. Maka, perlu dilakukan kesepakatan-kesepakatan pula dalam upaya mengembangkan kebudayaannya, baik secara nasional maupun lokal atau kedaerahan. Kongres menjadi ajang yang sangat tepat karena di sana bertemu para budayawan, seniman, cendekiawan, wartawan, pemangku adat, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah untuk bersama-sama memperbincangkan kebudayaan. Namun, dalam sejarahnya, penamaan kongres kebudayaan yang pernah berlangsung belum seragam. Kongres tahun 1948, 1951, 1954 1957 dan 1960 disebut "Kongres Kebudayaan Indonesia", sementara kongres tahun 1991 dan 2003 disebut "Kongres Kebudayaan" saja. Di kalangan masyarakat

juga terjadi kerancuan sehingga ada yang menyebutnya sebagai “Kongres Kebudayaan”, “Kongres Kebudayaan Nasional”, “Kongres Kebudayaan Indonesia”, dan “Kongres Kebudayaan Nasional Indonesia”. Di samping itu, ada masalah inti yang akan selalu muncul dalam setiap KK, yaitu mencari jawab pertanyaan “Ke mana arah kebudayaan kita?” Ini diungkapkan oleh Bung Hatta dalam majalah *Indonesia* pada 1952. Karena itu, amat tepat bila KK disebut sebagai “arena refleksi perjalanan bangsa.” Perhelatan ini bisa menjadi catatan mengenai kegiatan kemanusiaan, terutama kemajuannya, bukan langkah mundur atau kemerosotan mutu sebagai bangsa.

Selain kongres, konferensi kebudayaan juga telah beberapa kali diselenggarakan. Serupa dengan KK, konferensi membahas masalah-masalah kebudayaan dan unsur-unsurnya (misalnya bahasa, sastra, perpustakaan, kesenian, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, arkeologi, dll). Seluruh penyelenggaraan kongres dan konferensi kebudayaan dalam jangka waktu selama 100 tahun, mulai dari 1918 hingga 2018, mencapai 283 kali.

### Sekilas Kebudayaan Masa Penjajahan

Keberadaan Nusantara di persilangan antara negara-negara di belahan Barat dan Timur, Selatan dan Utara, telah menjadi “titik temu” antarbangsa. Pertemuan diawali dengan bangsa-bangsa tetangga di benua Asia seperti India, Thailand, Arab, Persi, dan Cina, disusul kemudian oleh hubungan dengan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Berbagai pertemuan antarbangsa itu meninggalkan jejak dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia yang masih dapat ditelusuri sejarahnya.

Minat bangsa-bangsa Barat untuk berkontak dengan berbagai suku di Nusantara awalnya adalah untuk berdagang. Mata dagang yang diburu saat itu adalah rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, selain kapur barus dari Sumatra yang diminati oleh bangsa-bangsa Timur Tengah. Persaingan dagang antara Portugis, Spanyol, dan Belanda di wilayah Nusantara berlangsung sejak tahun 1500-an. Persaingan ini dimenangkan Belanda yang

kemudian menguasai monopoli dan eksploitasi di hampir seluruh Nusantara hingga abad ke-20, disusul bangsa Jepang selama 3,5 tahun saja sejak 1942.

Masing-masing bangsa penjajah memiliki kebijakan politik yang berbeda-beda. Meskipun kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang relatif singkat dibandingkan dengan Belanda, pengaruh sistem pemerintahan dan kebudayaan masing-masing sedikit-banyak masih membekas hingga sekarang. Belanda, sebagai penjajah terlama, meninggalkan jejak mendalam, baik berupa benda budaya, budaya yang bersifat nonfisik atau tak benda, hasil penelitian, perlindungan, pengembangan, maupun kelembagaan kebudayaan.

Untuk menyatukan berbagai perusahaan dagangnya, Belanda mendirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), atau Persekutuan Dagang Hindia Timur, pada 1602. VOC melakukan berbagai cara dan strategi dalam upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak hanya lewat komoditas rempah-rempah tetapi juga pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan. VOC memiliki banyak kewenangan, misalnya membentuk angkatan perang, mengawasi para raja, menyatakan perang, menerima perdamaian, membuat perjanjian, dan memaksa raja tunduk. Selain itu, VOC juga berwenang membuat undang-undang dan peraturan, serta membentuk pengadilan dan mahkamah agung.<sup>1</sup> Ketika VOC bangkrut, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengambil alih monopoli dagang atas Nusantara. Kehadiran Belanda dengan seperangkat kewenangan meninggalkan pengaruh besar di bidang kebudayaan, baik secara alami maupun lewat tekanan terhadap segala aspek hidup masyarakat.

Salah satu contoh pengaruh Belanda dalam bentuk tekanan adalah penandatanganan Perjanjian Giyanti yang mengatur wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dan Pakubuwono VII dari Surakarta. Dengan perjanjian ini, terbukti bahwa posisi raja sebagai pemegang kekuasaan lemah di hadapan Belanda. Sejarawan Darsiti Soeratman menyatakan bahwa perjanjian itu

---

1. M. Adnan Amal, *Portugis dan Spanyol di Maluku* (Depok: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 262.

“telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kekuasaan dan pemerintahan keraton Surakarta selama satu abad.”<sup>2</sup> Terjadi intervensi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang semakin mendalam dan terus berjalan selama masa-masa pemerintahan berikutnya. Pada masa Pakubuwono X, kekuasaan dalam bidang hukum bahkan sepenuhnya jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda (1903). Akibatnya, Sunan Pakubuwono lebih banyak mencurahkan perhatian pada budaya, di mana kewenangannya relatif utuh. Pada periode-periode seperti inilah seni dan budaya keraton berkembang pesat. Sunan Pakubuwono pun sering menyelenggarakan upacara dan pesta di keraton secara besar-besaran, yang sesungguhnya cenderung meniru budaya Belanda. Di samping itu, ia sangat sering bepergian ke luar daerah, menampakkan diri di muka umum, mendatangi tokoh-tokoh daerah, sebagai usaha untuk menunjukkan wibawa dan kebesarannya.

Kenyataan seperti itu tidak hanya terjadi di Kasunanan Surakarta. Hampir di seluruh kerajaan atau kesultanan di Nusantara, kekuasaan setempat dilemahkan lewat perjanjian dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat semata-mata hanya untuk mengekalkan penjajahan. Tidak aneh bila kehidupan rakyat menjadi sengsara dan, sebaliknya, kehidupan penjajah penuh kemewahan. Politik diskriminasi diterapkan dengan ketat sehingga kehidupan masyarakat ditindas dalam segala hlm. Masyarakat dibagi menjadi tiga kelas. Masyarakat kulit putih (Eropa) menempati posisi paling terhormat. Yang menduduki posisi terhormat kedua adalah apa yang disebut masyarakat “Timur Asing,” yakni orang-orang yang berkebangsaan non-Eropa seperti Cina, India, dll. Kelas ketiga ditempati oleh masyarakat “pribumi” yang secara turun-temurun dan berabad-abad mendiami wilayah Nusantara. Perlakuan di ruang publik terhadap ketiga kelas ini pun berbeda-beda. Dengan demikian, pembagian kelas ini berpengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat dan perkembangan kebudayaan bangsa.

---

2. Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000), hlm. 396.

Kaum “pribumi” yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dididik menjadi kebarat-baratan dan tercabut dari akar kebudayaannya. Bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pengantar, dan dengan demikian bahasa lokal terpinggirkan. Dalam bidang kesenian, penyajian seni tradisional digantikan oleh kesenian Barat, seperti yang terjadi pada bidang seni rupa, seni musik, seni suara, dan seni pertunjukan. Di bidang seni bangunan (arsitektur) banyak berdiri bangunan dengan gaya “kolonial” atau menurut sejarawan Djoko Sukiman disebut gaya “Indis”.<sup>3</sup> Indis mengacu pada gejala percampuran antara gaya hidup aristokrat Jawa dan gaya hidup orang Belanda di Hindia Belanda, yang mulai subur pada abad ke-18 di Jawa dan tecermin dalam gaya perumahan. Muncul pula istilah “*mooi indie*” dalam dunia seni lukis. Pada mulanya, *Mooi Indie* adalah judul reproduksi sebelas lukisan pemandangan cat air karya Du Chattel yang diterbitkan di Amsterdam (1930). Istilah itu menjadi populer semenjak S. Sudjojono memakainya untuk mengejek pelukis-pelukis pemandangan dalam tulisannya pada 1939. Menurutnya, lukisan-lukisan pemandangan yang serba bagus, serba enak, romantis bagai di surga, tenang dan damai, tidak lain hanya mengandung satu arti: *Mooi Indie* atau *Hindia Belanda yang Indah*.<sup>4</sup>

Pada masa pemerintahan Inggris yang singkat (1811-1816), tradisi keilmuan yang telah berkembang dalam bangsa-bangsa Eropa oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles dilanjutkan dan dikembangkan. Raffles mengubah Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW), lembaga seni dan kebudayaan, yang didirikan pada 1778 menjadi Literary Society. Ini diikuti dengan memindahkan kantor BGKW dari Jalan Pintu Besar Selatan ke Jalan Majapahit, dekat gedung Societeit Harmonie (1815). Posisi Literary Society ada di bawah Letnan Gubernur Jawa, yang dijabat oleh Raffles. Misi lembaga itu dititikberatkan pada upaya penelitian, pencatatan,

3. Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)* (Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, Yayasan Adikarya Foundation, dan Ford Foundation, 2000).

4. Pauline D. Milone, “Indische Culture and Its Relationship to Urban Life” dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 9, Juli-Oktober 1967, hlm 427-436.

**KAUM “PRIBUMI” YANG  
MENDAPAT KESEMPATAN  
MENGIKUTI PENDIDIKAN  
DIDIDIK MENJADI  
KEBARAT-BARATAN DAN  
TERCABUT DARI AKAR  
KEBUDAYAANNYA.**

---

**BAHASA BELANDA  
DITETAPKAN  
SEBAGAI BAHASA  
PENGANTAR, DAN  
DENGAN DEMIKIAN  
BAHASA LOKAL  
TERPINGGIRKAN.**

---



dan pemeliharaan kebudayaan demi penyusunan buku sejarah. Lahirlah buku sejarah yang terkenal, *History of Java*, yang disebut-sebut sebagai “mahakarya,” yang berisi topografi Jawa yang benar-benar penting. Setelah Konvensi London 1814, Inggris menyerahkan wilayah Hindia Belanda kembali kepada Belanda sehingga kebijakan kebudayaan yang telah diletakkan oleh Raffles dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berbeda dengan bangsa Barat, Jepang datang dengan cita-cita membangun imperium di benua Asia menjadi Asia Timur Raya. Bangsa Barat yang menjajah di negara-negara Asia dipukul mundur oleh Jepang. Politik penjajahan yang diterapkan oleh Jepang sangat keras. Dalam tempo tiga setengah tahun, rakyat Indonesia dibuat menjadi sangat menderita baik fisik maupun batin. Rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Pemuda-pemuda dipaksa menjadi tentara, dilatih dengan disiplin yang keras. Tidak sedikit rakyat yang meninggal karena dihukum, dipaksa perang, kerja rodi, sakit, dan kelaparan.

Meski demikian, di balik segala penderitaan itu terselip nilai positif bagi bangsa Indonesia. Kehadiran Jepang “secara tidak langsung lebih membantu mendorong perkembangan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa, drama, musik, seni rupa.”<sup>5</sup> Di mata penulis Sanoesi Pane, tentara Dai Nippon “sanggup mengenyahkan imperialis Belanda dan kita sekarang dapat kesempatan memperbaiki taman kebudayaan kita kembali.”<sup>6</sup> Sikap pemerintah Jepang yang antikebudayaan Barat menjadi pelajaran berharga dalam mengubah pola pikir rakyat Indonesia, dari bangsa “kuli,” “jongos,” dan “inlander” menjadi bangsa yang memiliki rasa percaya diri dan berani melawan. Bangsa ini kini memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan kebudayaannya, bangkit menegakkan harkat dan martabatnya.

---

5. “Pokok-pokok Kebijakan Kebudayaan”, Ditjen Kebudayaan, 1973, hlm. 10.

6. E. Ulrich Kratz, *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 117.

### Peristiwa Sejarah yang Terpinggirkan

Selama ini perhatian terhadap KK sebelum Indonesia merdeka (1918) praktisnya tidak ada. Padahal, beberapa kongres lain yang sama-sama diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka sudah tercatat dalam buku sejarah sebagai tonggak-tonggak penting perjalanan bangsa. Contohnya: Kongres Boedi Oetomo 1908, Kongres Pemuda 1926 dan 1928, Kongres Perempuan 1928, Kongres Pendidikan 1935 dan 1937, dan Kongres Bahasa 1938.

Walaupun dalam buku-buku sejarah tidak tercatat, KK 1918 melahirkan hasil-hasil yang terbukti menjadi penentu arah pengembangan kebudayaan bangsa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kaum terpelajar bumiputra sudah berpikir tentang hari depan kebudayaan bangsanya. Banyak keputusan kongres yang memiliki makna strategis dan politis, dan jejak realisasinya masih membekas hingga sekarang. Keputusan Pangeran Prangwadono itu sendiri, untuk memilih menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Jawa dan menolak instruksi Batavia untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa, merupakan langkah bersejarah.

Pada era kolonial, pemakaian nama Jawa untuk KK menanamkan semangat nasionalisme. Sebelumnya, identitas bangsa putrabumi yang berdiri sendiri nyaris tak terbayangkan. Pada 1908, Boedi Oetomo menebarkan benih-benih kesadaran itu, yang gaungnya merambat hingga sepuluh tahun kemudian. Pada gilirannya, keberanian Pangeran Prangwadono untuk menolak keinginan pemerintah Hindia Belanda menjadi motor penggerak kongres-kongres kebudayaan.

Tulisan yang memuat tentang KK 1918 masih terbatas. Dalam buku *Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952*, kongres itu hanya disinggung sedikit saja, terutama mengulas keterlibatan Dr. Radjiman sebagai seorang tokoh pergerakan nasional dalam kongres itu. Selanjutnya, dalam buku itu diuraikan peran kaum terpelajar lainnya yang juga terlibat dalam kongres: Pangeran Mangkoenegoro VII, P.A. Hadiwidjojo

(Ketua Bale Agung Keraton Surakarta), R.M.A. Woerjaningrat (Ketua Pengurus Besar BO), Dr. Hoesein Djajadiningrat, dan lain-lain.

Sebuah buku lain tentang periode yang kira-kira bersamaan dengan buku di atas, *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*, tidak menyebutkan KK 1918. Djoko Soekiman, penulisnya, menguraikan panjang-lebar tentang munculnya kebudayaan yang berkembang dalam lingkungan sekelompok masyarakat di Hindia Belanda, yang disebutnya sebagai kebudayaan “Indis”. Hanya disinggung sedikit mengenai KK tahun 1921 di Bandung, yang membahas tentang pendidikan seni, persisnya musik dan tari, di sekolah.

Dalam *Catatan Tentang Konggres Kebudayaan Tahun 1948, 1951, dan 1954*,<sup>7</sup> Sapardi Djoko Damono juga tidak menyinggung adanya KK sebelum Indonesia merdeka. Secara khusus, Sapardi mengulas perbantahan mengenai kebudayaan tetapi hanya menyatakan bahwa perbantahan itu telah berlangsung “sejak beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaan.” Yang dimaksud adalah perbantahan di kalangan pemuda terpelajar pada masa Sumpah Pemuda 1928 dan masa Pujangga Baru. Namun, perbantahan itu telah dimulai sejak KK 1918 di antara tokoh-tokoh seperti Soetatmo dengan Tjipto Mangoenkoesoemo, dan antara Satiman dengan Radjiman. Demikian pula halnya dengan Eka Budianta. Dalam sebuah makalahnya, “Dari Kongres ke Kongres” (1993), Eka Budianta juga sama sekali tidak menyinggung KK yang diselenggarakan sebelum Indonesia merdeka. Yang juga patut dicatat adalah *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926: Terbentuknya Suatu Pola* yang ditulis oleh Drs. W. Poespoprodjo LPh,SS (1984). Buku ini menyimpulkan bahwa masa 1908-1926 ditandai oleh langkah-langkah pertama pergerakan nasional, juga saat-saat penentuan dasar dan asas pergerakan. Namun, isinya sama sekali tidak menyinggung pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh KK 1918, 1919, dan 1924.

---

7. Sapardi Djoko Damono, *Catatan Tentang Konggres Kebudayaan Tahun 1948, 1951, dan 1954* (Jakarta: Seminar Budaya Universitas Indonesia, 1987).

Kealpaan tentang KK 1918 berlanjut hingga belakangan ini. Dalam KK 2003 di Bukittinggi, panitia kongres menyebar angket untuk mengetahui wawasan dan pengetahuan peserta tentang kongres yang pernah diselenggarakan, hasil, dan manfaatnya. Pada pertanyaan “Kapan Kongres Kebudayaan I diadakan?” pilihan jawaban yang ada sama sekali tidak menyebut KK sebelum Indonesia merdeka. Opsi jawaban ada tiga, yaitu tahun 1945, tahun 1948, atau tahun 1950. Ini berarti panitia KK 2003 juga belum mengetahui bahwa sebelum Indonesia merdeka pernah ada kongres kebudayaan.

Melalui KK di Bukittinggi 2003, saya mulai mencoba memperkenalkan sekilas tentang KK sebelum Indonesia merdeka kepada peserta melalui buku berjudul *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan (2003)* dan makalah berjudul “*Sekilas tentang KK sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka: konsep, strategi dan kebijakan.*” Dalam sidang itulah peserta baru mengetahui peristiwa tersebut. Informasi baru ini menjadi berita baik bagi surat kabar dan majalah yang meliput kegiatan kongres. *Tempo* menurunkan artikel khusus tentang KK sebelum Indonesia merdeka itu dengan judul “Misi Budaya di Kapal Op ten Noort,” sedangkan dalam edisi bahasa Inggris dengan judul “Remembering the Op ten Noort’s Cultural Voyage” (28/10/2003).

Melalui berbagai upaya, pihak-pihak lain juga mengumpulkan pengetahuan tentang KK prakemerdekaan. Salah satunya dilakukan oleh Wasino lewat tesisnya yang berjudul “Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX – Pertengahan Abad XX).” Tesis untuk memenuhi persyaratan Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada tahun 1994 itu mengulas peran Mangkunegoro VII dalam pengembangan kebudayaan Jawa, termasuk perannya mulai dari KK 1918 dan seterusnya, serta perannya di dalam lembaga Java Instituut. Ada pula buku yang ditulis oleh Jaap Erkelens, meski sebagai katalog pameran foto. Buku berjudul *Java Instituut dalam Foto (2001)* ini memuat foto beberapa KK sebelum Indonesia merdeka dan dapat disebut

sebagai pembuka kunci “peti sejarah” KK prakemerdekaan yang selama ini tersimpan rapat di Perpustakaan Museum Sonobudoyo, Yogyakarta.

Setelah diperkenalkan kembali kepada publik dalam KK 2003 di Bukittinggi, kini peristiwa budaya tersebut mulai dikenal orang. Beberapa buku yang mulai mengutip peristiwa itu antara lain *Mengindonesia: Entitas dan Identitas Bangsa* (2007) karya Prof. Dr. H.A.R. Tilaar dan *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (2011) karya Yudi Latif. Yudi Latif menyepakati kesimpulan yang menyatakan bahwa berlangsungnya KK pertama tahun 1918 menunjukkan tumbuhnya kesadaran budaya bangsa yang berjalan seiring dengan atumbuhnya kesadaran berbangsa. Kesadaran ini artinya bahwa kemerdekaan Indonesia juga dipandang sebagai kemerdekaan kebudayaan.<sup>8</sup> Peran KK dalam memberi warna bagi sejarah perjalanan kebudayaan Indonesia juga dibahas dalam *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1960* (2011) yang disunting oleh Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem. Dalam buku *Indonesia dalam Arus Sejarah* yang terdiri atas sembilan jilid, KK telah diakui sebagai salah satu “arus” dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Sayang, dalam buku *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (2010) sama sekali tidak dimasukkan kegiatan berbagai kongres kebudayaan sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia. Satu-satunya kongres yang disebut dalam jilid VI, yang membahas tentang “Bahasa, Sastra dan Aksara,” adalah Kongres Bahasa Indonesia. Itu pun terbatas pada Kongres Bahasa Indonesia I (1938, Surakarta) dan II (1954, Medan). Yang agak mengherankan, ada penjelasan dalam buku tersebut yang menyatakan: “Ihwal Kongres Bahasa III dan seterusnya tidak dijabarkan di sini, karena pertemuan-pertemuan itu belum lagi menjadi sejarah, melainkan merupakan bagian dari pengalaman kita sekarang.”<sup>10</sup> Kongres Bahasa III diselenggarakan pada 1978. Pertanyaan

---

8. Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 353.

9. Susanto Zuhdi, *Indonesia dalam Arus Sejarah 8* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 591-597.

10. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Akhdiati Ikram (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 16.

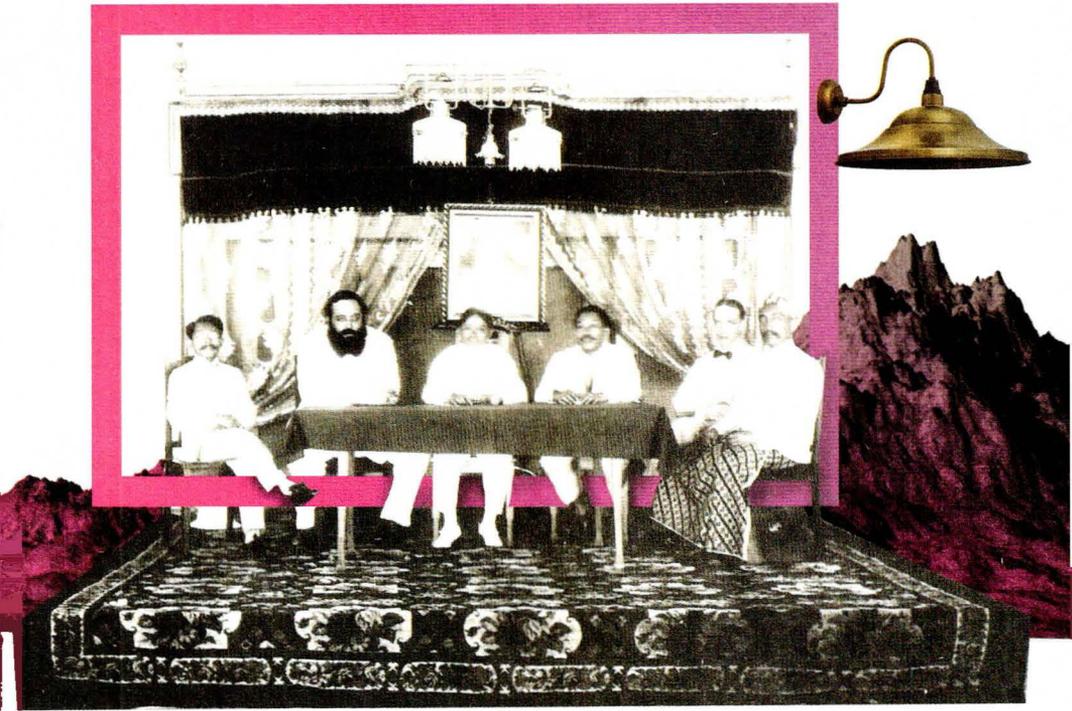
saya, apa betul Kongres Bahasa Indonesia 1978, 1983, 1988, 1991, dst. belum menjadi bagian dari sejarah? Lalu, berapa lama berlalunya suatu peristiwa sehingga dapat digolongkan sebagai sejarah?

## BAB 02

# KONGRES KEBUDAYAAN PRAKEMERDEKAAN

---

Sumber data penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (KK) sebelum Indonesia merdeka dapat ditemukan antara lain di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Majalah *Djawa*, yang terbit pertama kali pada 1921, memuat kegiatan-kegiatan kongres kebudayaan dan kongres bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa dipakai oleh kaum terpelajar saat itu, bahasa Belanda. Majalah itu terbit empat kali dalam setahun, dengan edisi terakhir terbit pada 1941. Dari majalah itu dan sumber lainnya dapat diketahui bahwa pada masa sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan tujuh kali Kongres Kebudayaan. Selain itu, telah diselenggarakan juga tiga kali Kongres Bahasa Jawa dan dua kali Kongres Bahasa Sunda.



Congres voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Java di Surakarta, Desember 1919. (Dari Jaap Erkelens, *Java Instituut dalam Foto*, 2001.)

KK pertama diselenggarakan pada 1918 sedangkan yang terakhir 1937. Enam dari tujuh kongres disiapkan dan diselenggarakan oleh lembaga penelitian kebudayaan, Java Instituut, yang didirikan atas inisiatif kaum terpelajar. Lembaga itu sendiri berdiri berdasarkan rekomendasi KK 1918. Artinya, perhatian kaum terpelajar tentang penelitian kebudayaan Jawa melalui suatu lembaga kebudayaan pada saat itu sudah cukup tinggi. Hasil kegiatan mereka tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian kebudayaan melainkan juga berkontribusi pada bidang politik dan mendorong tumbuhnya kesadaran berbangsa. Topik bahasan tentang arah, konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan, pendidikan, hingga dampak sosial,

politik, dan ekonomi telah dijadikan bahan diskusi yang cukup seru pada saat itu. Bagian berikut ini merupakan gambaran singkat dari ketujuh KK tersebut.

### **Kongres Kebudayaan 1918**

Awalnya, seorang teosof terkenal bernama D. Van Hinloopen Labberton mengusulkan agar diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa. Usul tersebut disetujui oleh pihak pemerintah pusat (Batavia), yang membentuk panitia penyelenggara. Panitia itu terdiri atas empat orang: Dr. Hoesein Djajadiningrat, Dr. F.D.K. Bosch, Dr. B. Schrieke dan Dr. Hazeu. Namun, kalangan kaum terpelajar bumiputra, tepatnya anggota Boedi Oetomo (BO) di Surakarta, berpendapat bahwa yang perlu diselenggarakan bukan Kongres Bahasa Jawa, melainkan Kongres Kebudayaan untuk memperbincangkan masalah kebudayaan Jawa. Pemikiran itu datang dari Pangeran Prangwadono, yang kemudian dinobatkan menjadi Mangkunegoro VII.<sup>11</sup> Menyikapi reaksi seperti itu, pihak Batavia memutuskan untuk membiarkan para anggota BO di Surakarta mengambil langkah sendiri dalam mengatur penyelenggaraan kongres. Mereka justru mengusulkan supaya Pangeran Prangwadono menjadi Ketua Kongres.

Akhirnya, diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Jawa, bukan Kongres Bahasa Jawa. Perdebatan di antara kaum terpelajar bumiputra ketika menentukan pilihan apakah kongres bahasa atau kongres kebudayaan, berikut penentuan tema, pemrasaran, peserta, sampai pembahasan isi kongres itu sendiri menjadi peristiwa penting. Pakar sejarah dan pemerintahan Asia dari Jepang, Prof. Dr. Takashi Siraishi, mencatat bahwa perdebatan antara pemrasaran Soetatmo dan Tjipto Mangoenkoesoemo tentang paham nasionalisme menjadi perbincangan banyak ahli.<sup>12</sup>

Maka, dapat dibayangkan betapa besarnya pengaruh kaum pergerakan dan kaum terpelajar bumiputra lainnya. Bagaimanapun kuatnya gagasan

11. Jaap Erkelens, *Java Instituut dalam Foto* (Jakarta: KITLV, 2001), hlm. 2.

12. Takashi Siraishi, "The Disputes Between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria vs Pandita" dalam *Indonesia* vol. 32, 1991, hlm 93.

itu datang dari pihak Belanda dan telah disetujui oleh pemerintah Batavia, mereka harus mengalah pada keputusan BO cabang Surakarta. Dalam pelaksanaan kongres pun, kelompok “Wederopbouw” terlihat jelas dominasinya.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan kelompok “Wederopbouw” adalah kelompok yang menghendaki kebangkitan “bangsa Jawa,” yang dimotori oleh kaum terpelajar bumiputra. Peserta kongres kebanyakan memang datang dari kaum terpelajar bumiputra, tapi tidak hanya dari Jawa, meskipun namanya KK Jawa.

Perdebatan seru terjadi antara lain saat pemilihan tema dan peserta dalam rapat persiapan kongres. Semula kehadiran para intelektual bangsa Eropa dalam kongres dapat diterima untuk memberikan saran-saran. Namun, dalam rapat kedua sebagian peserta rapat menolak intelektual asing untuk ikut mencampuri urusan kebudayaan Jawa. Setelah menemui jalan buntu, Pangeran Prangwadono tampil memberikan penjelasan dan akhirnya disetujui. Para intelektual asing dapat ikut terlibat dalam kongres tetapi dibatasi hanya sebagai penasihat. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata mereka tidak hanya hadir sebagai penasihat tetapi malahan sebagai pemrasaran.

Terjadi pula adu argumentasi di antara kaum terpelajar bumiputra mengenai tema kongres. Dr. Radjiman Wediodiningrat bersikeras menghendaki agar materi yang dibahas adalah pendidikan yang menitikberatkan pada kebudayaan Jawa asli saja. Sementara itu, R. Sastrowidjono cenderung pada pendidikan pro-Barat. Lain halnya Pangeran Prangwadono dan Wurjaningrat yang memilih jalan tengah. Perdebatan itu akhirnya mencapai jalan kompromi setelah Pangeran Prangwadono menyimpulkan bahwa, mengingat besarnya pengaruh dari luar, kongres sebaiknya membahas tentang bagaimana memajukan kebudayaan Jawa.<sup>14</sup>

---

13. Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat: Perjalanan Seorang Putra Bangsa* (Jakarta: Yayasan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, 1994), hlm. 62.

14. Wasino, “Kebijakan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi Tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX-

Tokoh lain yang terlibat dalam persiapan kongres adalah Hoesein Djajadiningrat, putra Bupati Banten bergelar doktor dari Universitas Leiden di Belanda (dengan judul disertasi “*Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*” atau Pandangan Kritis Tentang Sejarah Banten). Sebagai cendekiawan non-Jawa, berada di tengah-tengah cendekiawan Jawa untuk membahas kebudayaan Jawa, Hoesein menggiring agar perbincangan kongres tidak hanya terpusat pada budaya Jawa. Ia memang tidak sendirian sebagai peserta non-Jawa, ada pula peserta orang Sunda, Madura, dan Bali. Hoesein juga punya pendapat tentang kebudayaan Jawa: “...keinginan terbesarnya adalah menyelenggarakan kongres di mana para ilmuwan dapat bertemu untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif baru agar budaya Jawa dapat dihidupkan kembali dalam wujud modern.”<sup>15</sup>

Kongres Kebudayaan Jawa diselenggarakan di Solo, tanggal 5-7 Juli 1918, dengan nama resmi *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* atau Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa. Kongres inilah yang dapat dicatat sebagai KK I sebelum Indonesia merdeka. Kongres yang berlokasi di Bangsal Kepatihan Keraton Surakarta ini berlangsung sukses, dengan dihadiri delegasi lebih dari lima puluh asosiasi di Jawa dan Eropa. Jumlah seluruh peserta yang menghadiri kongres lebih dari seribu dua ratus orang.<sup>16</sup>

Yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara adalah seorang anggota BO, R. Sastrowidjono. Sebelum acara dimulai, para peserta berkumpul di Kepatihan Keraton Surakarta lalu berkeliling melihat Keraton dan Taman Sriwedari. Setelah itu, mereka menuju *Societëit Harmonie* untuk beramah-tamah sembari menyaksikan pertunjukan tari dan mendengarkan musik. Acara pembukaan diselenggarakan di Kepatihan Mangkunegaran. Dalam sambutannya, Sastrowidjono menyatakan bahwa, di tengah tingkat intelektualitas rakyat Jawa yang begitu menurun, sekarang terlihat Pertengahan Abad XX) (Yogyakarta, tesis Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 252-253.

15. Helle S. Hasse, pengantar untuk Madelon Djajadiningrat, *Vorst Tussen Twee Werelden* (Groet: Uitgeverij Conserve, 2006), hlm. 193

16. *Ibid*, hlm. 188.

kemunculan sekelompok kecil yang sudah mulai terpanggil untuk bekerja sama meningkatkan ekonomi dan politik negara. Kendati harus diakui bahwa kesadaran itu masih dalam tingkat yang teramat awal, saat itu rakyat Jawa sedang didorong oleh perkembangan zaman untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan Barat agar dapat berdiri sederajat dengan bangsa-bangsa maju lain. Memang sebagian besar rakyat cenderung masih kurang memahami dan meminati kebudayaannya sendiri. Oleh sebab itu, kongres itu perlu sekali mengusahakan terwujudnya keseimbangan antara kebudayaan Timur dan pengaruh kebudayaan Barat di kalangan masyarakat.

**Kutipan Pidato Sambutan Ketua Panitia Kongres  
Kebudayaan Jawa 1918, R. Sastrowidjono**

“Kami berkeyakinan bahwa kini sudah tiba saatnya untuk terlepas dari tujuan-tujuan politik, menyadarkan rakyat bahwa di samping peningkatan ekonomi dan politik, sebuah **bangsa baru** akan mampu memiliki jati dirinya (nasionalismenya) apabila bangsa itu bertumpu pada sejarah sendiri serta warisan budayanya sendiri. Memiliki kebudayaan sendiri merupakan salah satu unsur penting agar dapat mengungkapkan kesadaran nasional serta jati diri rakyat. Apabila sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta tidak menghargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka bangsa itu tidak layak untuk maju.

Oleh karena itulah maka Komite dengan mantap mengambil langkah pertama, yaitu mengimbuai seluruh rakyat Jawa, baik mereka dari Sunda, Madura atau Jawa Tengah, agar bersama-sama membahas ke arah mana bangsa kita akan ditumbuh-kembangkan dalam kurun waktu ini.

Dengan tetap menghormati kebudayaan Barat, yang sudah bermanfaat bagi kemajuan kita semua, komite berpendapat bahwa sudah tiba waktunya untuk meletakkan garis-garis besar bagi

perkembangan kebudayaan kita sendiri. Kita berbesar hati bahwa dalam hal ini masyarakat Eropa juga menghargai dan berperan-serta aktif dengan memberikan prasaran mereka masing-masing.”

*Java Instituut dalam Foto, 2001*

Selain itu, R. Sastrowidjono menyinggung tentang pentingnya landasan sejarah dan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Ia mengatakan: “...telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.”<sup>17</sup> Menurut Sastrowidjono kebudayaan milik suatu bangsa merupakan cerminan paling sempurna dari kesadaran



R. Sastro Widjono, ketua panitia penyelenggara kongres. (Dari [www.collectie.wereldculturen.nl](http://www.collectie.wereldculturen.nl))

nasional dan jati diri bangsa yang bersangkutan. Untuk itu, ia menyerukan kepada seluruh bangsa di Jawa, tanpa membedakan antara orang Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan Bali untuk “membahas bersama jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.”

Laporan tentang penyelenggaraan kongres dimuat dalam majalah *Djawa*, *Sri Poestaka* terbitan Balai Pustaka, dan koran *De Locomotief*. Sementara itu, prosiding kongres diterbitkan di Semarang dengan judul *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling: Programma en Tekstboekje Prae-Adviezen, 1918*

17. Jaap Erkelens, 2001, hlm. 2.

dicetak oleh Stoomdrukkrij CA. MISSET, Semarang. Di dalam prosiding kongres dimuat agenda kongres, paparan pemrasaran, dan perdebatan secara lengkap, melebihi buku-buku prosiding kongres masa-masa sekarang.

### **Pembahasan Kongres**

Dalam kongres ada sembilan orang pemrasaran: lima orang bumiputra dan empat orang bangsa Belanda. Mereka adalah: (1) dr. Satiman Wirijosandjojo; (2) R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo; (3) Tjipto Mangoenkoesoemo; (4) R. Ng. Wediodipoero (dr. Radjiman); (5) R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah; (6) D. van Hinloopen Labberton; (7) A. Muhlenfeld; (8) J. Rottier; dan (9) Z. Stokvis. Topik-topik yang disepakati untuk dibahas adalah di bawah ini:

1. Ke arah mana perkembangan bangsa Jawa dibawa dan bagaimana bangsa Jawa dapat membangun kembali peradabannya yang tinggi di masa lampau?
2. Dalam usaha pembangunan kembali bangsa Jawa itu, apakah peranan peradaban Barat dan kebudayaan Jawa?
3. Dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar ke dalam masyarakat Jawa masa kini, ke mana perkembangan kebudayaan Jawa harus diarahkan?
4. Sejauh mana mutlak diperlukan dasar pendidikan Barat untuk mengembangkan masyarakat Jawa atas?

Pengetahuan-pengetahuan dan metode Barat mana yang perlu mendapat perhatian untuk diajarkan dalam rangka mengembangkan masyarakat Jawa masa kini?

Sejauh mana kebudayaan Jawa masa kini, yang dengan sadar dan tidak sadar hidup dalam jiwa (*psyche*) penduduk, dapat digunakan pada pendidikan (suku) bangsa Jawa?

Mungkinkah dan diinginkankah menghidupkan kembali kebudayaan Jawa yang telah punah?

Berkenaan dengan perkembangan, apa yang perlu diubah dalam sistem pendidikan?

Dalam membahas topik-topik di atas, penulisan dan penyajian prasaran dalam KK I berbeda dengan makalah masa sekarang. Prasaran ditulis dalam bentuk butir-butir yang saat itu disebut *stelling*. Setelah Indonesia merdeka, *stelling* diterjemahkan menjadi dalil, seperti yang tertulis dalam Kongres Kebudayaan 1948, 1951, dan 1954. Butir dalil-dalil itu kemudian dielaborasi secara langsung oleh pemrasaran saat tiba gilirannya untuk berbicara. Pemrasaran pada masa itu istilahnya *prae-advieser*.

1) Dr. Satiman Wirijosandjojo

Menurut dr. Satiman, bangsa-bangsa Timur berjuang untuk kemandiriannya masing-masing dengan tujuan untuk membuat perhitungan akhir dengan Eropa yang sudah melakukan begitu banyak dosa. Ujarnya, “Memanglah Eropa perlu dihajar,” yang disambut dengan gelak tawa hadirin. Awalnya, bangsa Eropa hendak diusir dengan cara-cara yang primitif tetapi hasilnya selalu nihil. Oleh karena itu, Barat harus dilawan dengan menggunakan senjata Barat pula, yaitu dengan intelektual.

Kongres merupakan suatu usaha peremajaan diri (bangsa Jawa) untuk melawan Barat. Sistem pendidikan untuk mempertinggi intelektual bangsa Jawa perlu diperbaiki. Semua ilmu pengetahuan Barat harus dapat dikuasai, dan untuk itu menguasai bahasa Belanda merupakan keharusan. Di masa depan, bahasa-bahasa setempat dapat dikembangkan melebihi bahasa Belanda, karena bahasa Belanda tidak akan dapat diserap oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang Jawa tidak perlu takut akan kehilangan kebudayaannya sebab hal itu sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Orang Jawa harus membuktikan bahwa tiga ratus tahun masa tertidur hanya sekadar waktu beristirahat.

### Dalil-dalil Prasaran dr. Satiman Wirijosandjojo

1. Usaha pengembangan kebudayaan Jawa yang sungguh-sungguh untuk mengejar ketinggalan dilakukan dengan menyerap ilmu pengetahuan Barat dan melakukan upaya melalui cara-cara Barat, guna mencapai kedaulatan dan kemerdekaan dalam waktu dekat.
2. Cara-cara Timur yang digunakan di sini dan di seluruh Asia tidak dapat mengimbangi cara-cara Barat dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan. Cara-cara Barat telah berkembang ke arah bentuk yang sempurna, sedangkan dari Timur dalam kondisi statis, bahkan cenderung mengalami kemunduran karena tidak dirawat.
3. Proses perkembangan ke arah Barat dapat terjadi karena adanya gerakan hati (inisiatief) dan desakan dari dalam, sehingga terjadi kesesuaian dengan perubahan yang terjadi di alam sekeliling kita.
4. Perjuangan untuk kebebasan tanpa pertumpahan darah hanya dapat dicapai melalui “peperangan” antara kemampuan intelektual melawan intelektual, dan kemampuan intelektual kita harus dibuat sama dengan intelektual Eropa.
5. Pendidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan Barat dapat diserap oleh peserta didik. Di samping penguasaan bahasa asing (Belanda) bahasa Ibu wajib diajarkan di semua lembaga pendidikan.
6. Pertemuan peradaban Barat dan Timur harus saling mengisi bagi keduanya.

*(Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918)*

## 2) R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo

Soetatmo menekankan pada perlunya upaya pembimbingan dalam mengembangkan kebudayaan (Jawa) menuju arah jalan yang pernah dilalui oleh para leluhur, yang memang diakui memiliki sikap budaya yang terbuka bagi masa kini. Ia berpendapat bahwa kebudayaan bertumpu pada pemahaman diri sendiri, pada kemanusiaan. Kebudayaan Timur terutama didasarkan pada aturan dan kaidah kehidupan rohani, sementara kebudayaan Barat bertumpu pada kaidah alam. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa akan mengembangkan kehidupan rohani seseorang. Pemrasaran menghimbau agar hak rohani diakui, begitu pula humanisme dan altruisme, yaitu faham yang mementingkan kepentingan orang lain.

Di bagian lain, Soetatmo juga menyinggung tentang nasionalisme, meskipun cenderung pada nasionalisme Jawa. Dalam hal mendidik bangsa, bagian pertama yang harus dilakukan adalah menyadarkan tentang keberadaan bangsa, dengan memberikan pengetahuan sejarah dan pengetahuan kebudayaannya sendiri. Sebagai orang Jawa sejati, ia memandang wayang sebagai salah satu media pendidikan yang amat baik karena penuh dengan ajaran moral, etika, estetika, dan ilmu pengetahuan lahir dan batin. Ia juga memandang pentingnya memajukan kebudayaan dengan cara memberikan jiwa baru atau nilai-nilai baru, yang berarti menghendaki adanya perubahan dalam kebudayaan.

### **Dalil-dalil Prasaran R.M. Soetatmo Soerjokoesoemo**

1. Pendidikan yang didirikan menurut dasar Barat perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi bangsa dan negeri kita. Jangan dilupakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan intelek – daya pikir – akal budi manusia Jawa.
2. Perlu dikembangkan ilmu pengetahuan teknik guna memajukan industri dan pertanian sendiri, juga ilmu kedokteran yang paling utama untuk diajarkan.
3. Sebelum kebudayaan yang lain, kebudayaan sendiri harus

menjadi dasar pendidikan bangsa kita. Mungkin cara yang mudah untuk mencapai tujuan itu adalah menggunakan media wayang.

4. Perlu mempertahankan keberadaan kebudayaan kita dan memberikan jiwa baru untuk memajukan kebudayaan kita.

(*Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, 1918)

### 3) Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo

Menurut pandangan Tjipto, pengembangan kebudayaan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan sifat kebudayaan bersangkutan. Pemrasaran menggarisbawahi keunggulan kebudayaan Jawa seperti wayang, gamelan, teknik persawahan, yang semuanya itu tidak berasal dari bangsa Hindu tetapi memang berasal dari kebudayaan Jawa sendiri. Dalam hal ini, penyajian Tjipto dinilai tidak dapat memberikan jawaban tegas apakah kebudayaan Jawa di masa depan harus bertumpu pada kebudayaan di masa lampau, atau harus mengambil dari kebudayaan lain, atau mungkin perlu mengambil sebuah jalan tengah.

Ia juga mengingatkan agar kelompok Jong Java tidak sampai menumbuhkembangkan chauvinisme atau kebanggaan berlebihan pada budaya dan bangsa sendiri. Ia mengingatkan mereka pada apa yang dilakukan Jerman terhadap Belgia. Apabila nasionalisme Jawa tumbuh seperti itu, maka pemrasaran akan menolak kebudayaan Jawa. Pemrasaran juga berpendapat bahwa rakyat Jawa kurang memperhatikan ilmu pengetahuan eksakta dan teknik, dan hanya memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan humaniora. Itu sebabnya bangsa Jawa kehilangan kemandiriannya. Diingatkan pula agar jangan terlalu terpukau pada keindahan masa lampau tanpa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Dalam hal ini, Tjipto Mangoenkoesoemo cenderung memilih nasionalisme (Jawa) yang tidak sempit tetapi meluas.

Menurutnya, bangsa Jawa harus menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup terpisah dan menyendiri, tetapi merupakan bagian dari dunia yang

lebih luas. Ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa dari dahulu sudah ada pemisahan antara berbagai golongan masyarakat. Sistem kenengratan telah didorong dan ditumbuhkembangkan oleh para penguasa dan dipertahankan secara semu saja.

#### 4) Dr. Radjiman Wediodiningrat

Dr. Radjiman menyatakan bahwa kebudayaan Jawa memang telah surut, tetapi bekas-bekas dan sisa-sisanya masih ada hingga kini dan terdapat dalam berbagai cabang kesenian. Kebudayaan Jawa bertumpu pada agama dan masyarakat, pada keyakinan akan adanya hubungan antara dunia roh dan dunia manusia. Pada masa lampau bangsa Jawa memiliki satu kebudayaan dengan tujuan yang jelas. Akibat bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka kesatuan budaya itu terganggu, tetapi tidak sirna sama sekali. Kini masih ada kesempatan untuk mempersatukan usaha-usaha rakyat. Berbagai kekuatan baru yang berkembang harus diusahakan agar sejalan dengan perkembangan jati diri rakyat. Yang perlu dikembangkan bagi rakyat Jawa bukan hanya akal melainkan juga rasa. Bangsa Jawa harus dapat menemukan kembali jati dirinya dan setelah itu baru kemudian dapat berdiri sederajat dengan bangsa-bangsa maju lain. Artinya, hubungan antara keadaan saat itu dengan kebudayaan lama dan dengan kebudayaan yang datang dari Barat perlu tetap dijalin.

Dalam pidatonya, dr. Radjiman Wedyodiningrat menyatakan

“Pada waktu sekarang tidaklah hanya diinginkan, melainkan diperlukan bahwa bangsa Jawa bereaksi positif lagi terhadap rangsangan dari luar, kali ini datang dari Barat untuk menemukan kembali semangat dan kesadaran akan tujuan murni yang lebih menjiwai kebudayaan Jawa di masa lampau. Sekali masyarakat Jawa menjadi muda kembali maka ia akan memberi sumbangannya yang unik bagi peradaban dunia, sumbangan yang sesuai dengan bakat leluhur yang bertahan terus, tempat masing-masing orang merasakan harmoni dan kegunaan bagi

dirinya, serta bagi kesenian dan kepercayaan yang terjalin dengan sangat eratnya dan yang berada di tengah-tengah kegiatan manusia.<sup>18)</sup>

#### **Dalil-dalil Prasaran dr. Radjiman Wediodiningrat**

1. Kebudayaan Jawa Kuno berdasarkan sosiologi keagamaan.
2. Dasar ini ditemukan kembali dalam jiwa bangsa masyarakat Jawa meskipun banyak yang tidak menyadarinya.
3. Kebudayaan Jawa Kuno diperlukan untuk menjadi penggugah kesadaran masyarakat pribumi (*karaktervorming*).
4. Pengaruh baru mutlak diperlukan untuk berhubungan secara internasional guna menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin.
5. Pendidikan harus berlangsung serasi dalam bentuk penanaman nilai etika dan estetika dan yang bersifat mendidik, serta harus memperhatikan dasar adat istiadat bangsa.
6. Latihan dan penggunaan bahasa Jawa, seni budaya, dan sejarah harus mendapat tempat yang besar dalam pendidikan.
7. Kesempatan mempelajari bahasa Belanda harus terbuka lebar untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang memungkinkan diterapkan dalam hubungan internasional.

5) R.A. Notosoedirdjo geb. Karlinah

Ia menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ia menyimpan sejumlah pertanyaan tentang bidang kebudayaan dan pendidikan. Ke mana arah dan kebijakan pembangunan bangsa Jawa yang akan dijalankan, padahal rakyat sangat bersemangat untuk menata masa depannya? Terkait pendidikan, nyaris tidak ada sekolah yang baru dibuka dan yang ada telah penuh sesak oleh siswa. Bagaimana pendidikan mereka yang tidak sempat bersekolah? Bagi yang bersekolah, pertanyaannya, apa gunanya kalau

18. Soebaryo Mangoenwidodo, *Dr. K.R.T. Wediodiningrat, Perjalanan Seorang Putra Bangsa 1879-1952* (Jakarta: Yayasan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, 1994), hlm. 63-64.

semuanya ingin belajar bahasa Belanda tanpa tujuan apa pun? Apa yang akan anak-anak dapatkan? Apa yang bisa mereka capai dengan pendidikan seperti itu?

Menurutnya, yang penting adalah pengembangan karakter. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk ujian saja tetapi juga pengembangan etika dan moral. Ia mengingatkan akan peran seorang ibu dalam melakukan penanaman nilai-nilai budaya kepada anak. Tugasnya berat dan sulit tetapi selalu dilakukan penuh kesungguhan. Itulah yang membangun fisik maupun rohani anak. Ibu yang memperkenalkan berbagai dongeng, cerita, permainan, nyanyian, dan sejarah kepada anaknya.

#### 6) Dirk van Hinloopen Labberton

Menurut van Hinloopen Labberton, adalah kenyataan bahwa tidak hanya Jawa yang memiliki kesatuan kebudayaan melainkan di seluruh Indonesia. Kebudayaan Jawa merupakan yang paling kuat di Indonesia sehingga bangsa Jawa memiliki kewajiban terhadap kemajuan kebudayaan bangsa-bangsa lain. Bangsa Jawa perlu menguasai ilmu pengetahuan Barat; berpaling ke Timur maupun Barat, dikembangkan secara horizontal maupun vertikal. Perlu pula dibangun sebuah pusat kebudayaan dan dilaksanakan pemberantasan buta huruf. Sekolah-sekolah desa dinilai sudah memadai, selanjutnya setiap orang Jawa yang sudah maju akan menyebarkan pengetahuannya kepada sesama. Perlu ditiru apa yang terjadi di Jepang, di mana kebudayaan Barat dialihkan ke dalam kebudayaan Jepang. Dengan demikian maka bangsa Jawa akan tetap mempertahankan jati dirinya.

### Kesimpulan Prasaran Dirk van Hinloopen Labberton

1. Mengingat masuknya pengaruh Barat saat ini di Jawa, diperlukan sebuah pendidikan berbasis Barat untuk anak-anak yang memenuhi syarat pengembangan kemampuan dan penguasaan teknologi barat, baik secara teoretis maupun praktis.
2. Selain pendidikan pengetahuan Barat, anak-anak harus ditingkatkan kepribadiannya dengan pelajaran membaca dan menulis Jawa, tradisi, termasuk pelajaran bahasa Kawi. Melalui gerakan membaca dan menulis di kalangan orang Jawa, serta berpikir kritis dan mengasah analisis ilmiah kritis terhadap bahasa dan huruf Jawa di sebuah pusat yang ditujukan untuk itu, maka bahasa Jawa akan lestari dan bahasa Jawa berkembang lebih maju.
3. Guru sekolah rakyat dapat digantikan oleh "Goeroe-djâwâ" keliling yang bertugas mengajar anak-anak abjad "Adji Sâkâ" (*tjatjarakan*), diikuti dengan perbanyak sastra Jawa asli. Di Sekolah Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Hukum, dan Sekolah Seni, harus diajarkan sastra Jawa Baru dan Jawa Kuno. Berikutnya di Universitas untuk sastra Jawa, bahasa Jawa Kuno dan Sanskerta harus diajarkan di Fakultas Sastra.  
(Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, 1918)

#### 7) A. Muhlenfeld

Menurutnya, orang Jawa harus menyambung kembali hubungannya dengan masa lampau yang telah terputus. Bila hal ini tidak diperhatikan, orang Jawa akan kehilangan jati dirinya. Boedi Oetomo telah membangkitkan intelektualitas orang yang telah tertinggal oleh kemajuan ekonomi dan politik. Ia menyatakan tidak benar bahwa bangsa Jawa selalu terjajah, oleh karena itu pemahaman tentang sejarah menjadi amat perlu. Bahasa ibu

tidak boleh diabaikan, kendati bahasa Belanda tetap harus dipertahankan agar kita dapat memahami pengetahuan Barat. Di masa depan mungkin diperlukan sebuah *lingua franca* baru, mungkin bahasa Inggris atau Eropa lain. Bahasa ibu harus dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah dan untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga di tingkat pusat, dan sebuah lembaga ilmu pengetahuan Timur (Oriental) di Solo yang bermanfaat tidak hanya untuk sekolah-sekolah menengah tetapi juga untuk rakyat.

Perlu dikembangkan bahan bacaan Jawa yang bermutu tetapi juga harus diperhatikan agar tidak tumbuh rasa kebangsaan berlebihan (chauvinisme). Ia menghimbau perlunya toleransi terhadap kelompok-kelompok agama lain. Terlepas dari perbedaan-perbedaan, yang harus diutamakan adalah pemulihan kesatuan dan persatuan bangsa Jawa. Juga ditekankan agar Jawa tidak mengekor saja pada Barat, dan tidak bermimpi mengembalikan kejayaan kerajaan Majapahit. Walau demikian, kebangkitan budaya Jawa tua tetap dapat dilakukan. Ia menggarisbawahi bahwa rakyat Bali, Sunda, dan Madura serta rakyat Jawa merupakan kesatuan yang alami dan tradisi lama perlu dijunjung tinggi. Dengan rakyat dari daerah-daerah lain perlu dibina suatu hubungan yang bersifat federasi.

#### Dalil-dalil Prasaran A. Muhlenfeld

1. Dipandang dari sudut politik Hindia Belanda, di negeri ini sebagian pemimpin gerakan Jawa makin menyadari bahaya gerakan Hindia Belanda terhadap pertumbuhan bangsa Jawa yang sehat dan harus diadakan upaya pertahanan.
2. Pembangunan kembali bangsa Jawa hanya mungkin berhasil apabila dilandasi oleh dasar (fondamen) kebudayaan sendiri yang telah berabad-abad diabaikan.
3. Untuk membangkitkan kesadaran terhadap kebudayaan sendiri itu di seluruh wilayah, maka pengajaran dan pengkajian sejarah bangsa merupakan sarana yang terbaik, terkuat, dan terpenting. Untuk sebuah “*natie*” atau bangsa, juga

perorangan atau individu, tuntutan pertama adalah mengenal dirinya sendiri sehingga mereka memiliki perangai dan watak (karakter), serta mendapatkan kembali rasa percaya diri kembali setelah kehilangan selama berabad-abad.

4. Harus dijaga benar agar pengajaran dalam bahasa sendiri (Jawa) tidak terdesak oleh pengajaran bahasa Belanda dan Melayu.
5. Bahasa Belanda tidak boleh dijadikan satu-satunya pintu gerbang memasuki pengetahuan Barat. Usaha sadar dari orang Jawa yang nasionalis wajib mengarah pada pemakaian bahasa Jawa secepat mungkin menjadi bahasa pengantar bagi jenis pengajaran apa pun. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga yang diurus oleh orang Jawa berpendidikan Barat, yang menerjemahkan buku-buku pelajaran kajian Eropa ke dalam bahasa Jawa.
6. Tentang posisi bahasa Belanda yang sementara masih sangat berarti, bahasa Melayu dapat menjadi bahasa pengantar antarsuku bangsa. Lebih baik menguasai sebuah bahasa dunia seperti bahasa Inggris untuk masa kemudian, dan untuk daerah-daerah yang memang telah menggunakan bahasa Melayu bahasa Belanda tidak diajarkan terlalu banyak.
7. Perlu ada perhatian besar pada pengajaran sejarah dan bahasa Jawa, namun pelajaran jangan terlalu menyimpang dari cara yang dianut oleh negara-negara beradab lainnya.
8. Dalam mengajarkan sejarah Jawa, pelajaran sejarah kebudayaan harus berperan penting supaya para pelajar menyadari betapa besarnya arti peradaban kuno sendiri dan kemampuan nenek moyang.
9. Perlu juga diajarkan sejarah abad-abad yang baru berlalu agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi bangsa yang berselisih dan bercerai-berai.

10. Bahwa pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan juga pulau-pulau lain di Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh. Hanya atas dasar kesatuan nasional maka bangsa Jawa akan mampu mempertahankan kedaulatan itu, dan untuk hal ini harus ditanamkan melalui pendidikan.
11. Pengajaran harus meliputi pendidikan yang mutlak diperlukan untuk menjadikan warga dunia. Untuk ini diperlukan metode yang sama dengan yang digunakan di negara Barat yang demokratis, dengan pengertian bahwa perhatian pada perkembangan fisik tidak dikurangi seperti yang ada di koloni-koloni Inggris dan Amerika.
12. Pengajaran teknik (pertukangan) dan pertanian sangat diperlukan oleh tanah Jawa, yang banyak bagiannya harus diperbaiki, dan hal ini belum diberikan di sekolah rendah. Perlu ada pengetahuan dasar tanpa merugikan jumlah pelajaran yang demikian banyak. Sekolah-sekolah lanjutan, kursus-kursus malam, dan sebagainya diselenggarakan untuk mengisi kekurangan.
13. Dengan pertimbangan masih banyaknya kekurangan pengetahuan teknis pada tiap-tiap bidang, perlu diperluas secepat mungkin sekolah-sekolah kejuruan tingkat menengah dan tingkat tinggi, termasuk dalam masalah perdagangan.
14. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut di atas harus diperlakukan sama dengan pendidikan dasar, yaitu harus ada perhatian pada pelajaran lanjutan tentang sejarah dan bahasa negeri di samping tentang ekonomi, karena pengetahuan ekonomi orang Jawa masih terbatas.
15. Kebudayaan Jawa sekarang, kecuali pergelaran musik, merupakan perwujudan kebudayaan yang semakin melemah bila dibandingkan dengan abad-abad pertengahan. Tingkat peradaban sejak 1500-an mulai menurun bila dihubungkan

- dengan kondisi sekarang, dan hanya dengan menggunakan media wayang dapat diajarkan nilai-nilai peradaban yang dulu.
16. Agama, dalam bentuk apa pun di sekolah-sekolah umum, kurang tepat walaupun tidak dapat dihindari bahwa karya-karya sastra Jawa Kuno dan juga penulis-penulis abad kini banyak menggugah kembali perhatian pada aturan-aturan lama.
  17. Tidak menjadi keharusan untuk menghidupkan kembali kebudayaan Jawa Kuno yang mulai punah, cara lain yaitu melalui pelajaran umum dalam sejarah dan memberikan lebih banyak perhatian pada pendidikan dalam bahasa sendiri.
  18. Akhirnya, pengajaran dalam bahasa dan sejarah negeri harus dijaga, dan pada tingkatan yang lebih tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Perlu diadakan pula sekolah tinggi tentang studi pengetahuan sastra Timur di Solo dan Yogya, di mana sehari-hari memang diajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan seni budaya bangsa Jawa, dan merupakan tempat jiwa bangsa Jawa menimba kekuatan hidup lebih banyak.  
(Sumber: *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling*, 1918, hlm. 32-35)

#### 8) J. Rottier

Ia merasa sayang dalam makalahnya tidak dapat membahas sama sekali tentang bangsa Sunda dan Madura, karena panitia hanya minta pandangannya tentang pengembangan kebudayaan Jawa. Namun, apa yang ditulisnya tentang bangsa Jawa juga berlaku bagi bangsa Sunda dan Madura. Ia tidak setuju apabila persatuan Insulinde (Nusantara) menghalangi setiap suku bangsa untuk berkembang dan menapaki kehidupannya sendiri. Sebanyak mungkin mereka perlu berjalan bersama, tetapi apabila perlu boleh juga berjalan sendiri. Bangsa Timur perlu belajar melihat dan memahami kenyataan hidup praktis. Kendati memang ada perbedaan hakiki antara

orang Barat dan Timur, seperti dalam jiwa dan semangat, hendaknya yang menjadi perhatian utama adalah intelektualitas, dan untuk itu diperlukan kebudayaan Barat, terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

Bahasa Belanda diperlukan untuk memahami dan menyebarkan perkembangan Barat dan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Ini adalah tugas kaum cendekiawan yang pada gilirannya juga perlu menguasai bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahasa Belanda diperlukan agar mampu memperkaya bahasa ibu, dan bahasa Belanda akan menjadi satu-satunya bahasa pengantar. Rottier tidak memilih pembelajaran bahasa Melayu karena dianggap akan menghambat pendidikan sehingga orang Jawa akan ketinggalan. Di samping itu, ia berpendapat bahwa pendidikan agama dan budi pekerti merupakan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk perkembangan, tetapi tidak perlu diajarkan di sekolah. Yang perlu diajarkan adalah kesusastraan dan musik. Melalui kesusastraan dapat dipelajari kegagalan dan keberhasilan suatu bangsa.

#### 9) Z. Stokvis

Stokvis menyarankan supaya bangsa Jawa mempertahankan apa yang baik dalam ilmu pengetahuan dan metode Barat, agar bangsa Jawa tidak menjadi bangsa yang tertinggal. Menurutnya, banyak pemrasaran mengungkapkan keengganan bahkan ketakutan terhadap kebudayaan Barat, dan hanya ingin memanfaatkan teknik saja. Sebagai misal, ada keengganan untuk membandingkan wayang dengan bioskop. Wayang hanya boleh disamakan atau dibandingkan dengan seni drama Barat. Perlu dimaklumi bahwa dari kebudayaan Barat yang sering dicemoohkan itu ada juga hal-hal yang dapat diteladani. Bukankah ada juga peradaban rohani dalam kebudayaan Barat? Mengapa orang terlalu takut akan kebudayaan Barat, bukankah berbagai kebudayaan di dunia selalu saling mempengaruhi secara positif? Oleh sebab itu, kesenian Barat juga perlu dihormati, dan bahkan sebagian orang Belanda juga perlu melakukan hal ini terhadap kebudayaan bangsa lain.

Menurut Stokvis, apabila orang Jawa menutup mata atau menjauhi kesenian Barat, kesenian Jawa tidak akan dapat meremajakan diri. Kemandegan kesenian tidak hanya terjadi karena dikuasai bangsa atau budaya lain. Bukankah bangsa Polandia mengalami cengkeraman budaya



Komite Congres voor Javaansche Cultuurontwikkeling. Baris pertama: R.M.A. Woerjaningrat, Pangeran Hadiwijoyo, R. Sastro Widjono (Ketua), Dr. Radjiman Wediodipoero, Z.H. Pangeran Adipati Ario Praboe Prangwedono (kehormatan), S. Koperberg (Sekretaris). Baris kedua: Dr. Satiman Wirjosandjono, Z. Stokvis, D. van Hinloopen Labberton, Dr Tjipto Mangunkusumo, J. Rottier, A. Mühlenfeld, R.M.S Soeriokoesoemo.

(Dari [www.kitlv.pictura-dp.nl](http://www.kitlv.pictura-dp.nl))

dari bangsa lain, tetapi tetap mampu menumbuh-kembangkan kebudayaan mereka sendiri? Begitu pula dengan bangsa Jawa. Masih banyak yang dapat disumbangkan pihak Barat kepada bangsa Jawa.

Ia kemudian menguraikan tentang sekolah menengah Hindia Belanda. Dikatakan bahwa HBS tidak cocok untuk menjadi sarana pendidikan tinggi bagi orang Jawa, sebab HBS teramat khas Belanda dan dicangkok secara utuh dari Belanda untuk diterapkan di Hindia Belanda. Itu sebabnya mengapa

banyak orang Jawa tidak berhasil menuntaskan pendidikan HBS mereka. Sekolah menengah Hindia Belanda yang baru akan menjadi kenyataan pada 1919, menjadi kelanjutan sekolah MULO, yang pembagiannya mencakup sastra Timur, sastra Barat, dan ilmu pasti. Bagian sastra Timur akan berhasil apabila ada murid-murid dari kalangan Jawa yang kemudian menyebarkan pengetahuan mereka kepada sesama anak bangsa. Dampaknya, akan terjadi penyegaran bahasa dan kebudayaan Jawa sehingga berkembang menjadi unsur yang hidup dalam masyarakat. Bahasa dan kebudayaan Hindia Belanda akan diajarkan agar kebudayaan lama dapat diremajakan dan ini amat diperlukan oleh sebuah bangsa yang kukuh dan bebas.

#### Conclusies (Kesimpulan) Prasaran Z. Stokvis

1. Apabila orang Jawa mau membentuk suatu bangsa di bawah kekuasaan sendiri dan dihormati, maka harus melatih diri dalam hal pengetahuan dan teknologi yang dapat diperoleh dari Barat, yang dapat berkontribusi pada pengembangan kepribadian nasional dan sosial.
2. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan antara lain sistem pengajaran yang sedekat mungkin berhubungan dengan dasar kebudayaan dan lingkungan yang dikenal sejak lahir.

#### Perdebatan

Presentasi para pemrasaran mendapat tanggapan ramai sehingga timbul perdebatan yang kemudian dimuat di koran *De Locomotief*. Peserta yang terlibat dalam perdebatan cukup banyak dan permasalahan yang diperdebatkan amat mendasar dan aktual hingga kini.

*De Locomotief* edisi 6 Juli 1918, hari kedua kongres, memuat pandangan arkeolog Belanda, **Stein Callenfels**. Menurut Stein, dalam prasaran dapat dilihat betapa sebuah garis pemisah yang tegas diambil antara ilmu pengetahuan eksakta dan kebudayaan Jawa. Menurut pandangannya, dalam penelitian tentang kebudayaan Jawa kuno diperlukan metode Barat,

dan untuk penilaian hasil penelitian diperlukan pula ilmu pengetahuan Barat. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya salah paham seputar kebudayaan Jawa kuno seperti yang masih terjadi sekarang.

Sementara itu, **Soetopo** yang berbicara atas nama pengurus pusat BO, bercakap dalam bahasa Belanda dan bahasa Jawa, menyatakan bahwa BO gembira kendati ada aneka ragam cara dan pendapat para pemrasaran. Ia sepakat bahwa kebudayaan Jawa perlu dipertahankan apabila bangsa Jawa ingin berhasil mempertahankan eksistensinya. Salah paham terjadi ketika BO yang menyebut dirinya demokratis dinilai seolah bermain mata dengan kelompok aristokrat yang bantuannya memang dibutuhkan. Dalam hal ini, Soetopo menegaskan bahwa BO berdiri di belakang rakyat banyak, dengan tujuan mengembangkan secara seimbang baik kelompok aristokrat sebagai kelompok menengah maupun kaum proletar. BO bertujuan agar tercapai kerja sama dari semua pihak dengan mengakui hak-hak istimewa masing-masing dan menghindari terjadinya perpecahan.

Di antara peserta kongres, hadir pula romo Jesuit **Pastoor van Lith**. Pastoor berpendapat bahwa sebagian besar makalah terlalu muluk, terlalu mendalam, terlalu luas, dan terlalu samar-samar. Baginya, lebih baik dibicarakan hal-hal yang praktis. Dalam hal pengajaran bahasa, menurut Pastoor yang sangat berpengalaman dalam pendidikan ini, sebagian murid mempunyai masa depan yang baik jika mahir berbahasa Belanda, sedangkan yang lain lebih cocok apabila mengutamakan pelajaran bahasa daerah. Tetapi ada suatu tuntutan agar bahasa yang digunakan untuk menangani kebudayaan Jawa memakai bahasa Belanda. Sementara itu, ada di antara orang Jawa yang mempunyai keinginan agar sekolah normal menjadi pendukung utama dalam menumbuhkan nasionalisme. Sebab, di sekolah itu telah dipersiapkan para guru bantu. Kendalanya adalah kekurangan dana. Maka, jika pemrasaran minta agar keberadaan sekolah normal diakui demi pengembangan sekolah nasional nanti, Pastoor van Lith menggarisbawahi pendapat itu.

Selain itu, Pastoor juga bercerita bahwa para pribumi di sekolah pendidikan guru merasakan betapa indahnya bahasa ibu, tetapi mulai tergerus oleh pemakaian bahasa Jawa dalam buku-buku yang disusun dengan pengaruh bahasa Belanda. Dikatakan oleh Pastoor bahwa orang Jawa belum memiliki tata bahasanya sendiri dan sedang menyusunnya berdasarkan tata bahasa Belanda. Oleh karena itu, amatlah perlu untuk meningkatkan sekolah normal, selain diberikan pelajaran bahasa daerah, juga diberikan pelajaran tambahan dalam bahasa Belanda, diikuti dengan pembagian lebih lanjut dalam jenjang pendidikannya. Perlu juga diusahakan adanya buku pelajaran yang ditulis dalam bahasa Jawa yang bebas untuk sekolah dasar.

Dalam bagian lain *De Locomotief*, dimuat pendapat **Darmakoesoema**, yang merasa kecewa karena tidak sempat mempelajari prasarana secara mendalam. Sebagai orang Sunda, ia menggarisbawahi penyesalan Tjipto Mangoenkoesoemo, mengapa kongres tidak mengundang pemrasaran dari kalangan Sunda. Mengapa tidak mengundang Dr. Hoesein Djajadiningrat yang sudah menulis buku tentang Pasundan? Sejumlah pemakalah membahas tentang jiwa atau roh rakyat Jawa yang tidak seluruhnya sesuai dengan orang Sunda. Umpamanya, di tanah Sunda wayang kurang dipahami. Di sekitar Bandung juga tidak ada candi atau sisa-sisa bangunan Hindu. Menurut Darmakoesoema, di tanah Sunda kepercayaan animisme langsung berlanjut kepada Islam, tidak diselang oleh agama Hindu terelebih dahulu. Oleh sebab itu, cerita-cerita wayang tidak cocok untuk diajarkan di sekolah Sunda karena wayang tidak dikenal. Ia mengakui bahwa kerja sama antara orang Jawa bagian Tengah dan orang Sunda kurang lancar, yang sebagian besar disebabkan adanya salah pengertian yang perlu segera diluruskan. Di Bandung, ada masyarakat Sunda dan masyarakat yang berasal Jawa bagian Tengah. Dalam BO terdapat bagian khusus yang menangani orang Jawa, mengapa? Ia sedih, sebab bukankah BO tidak membedakan antara Jawa dan Sunda.

Dalam kesempatan itu, Darmakoesoema juga menyerahkan satu kopi tulisan dari kelompok “Kaoem Moeda” di Jawa bagian Barat, yang diharapkan

dapat menjadi masukan untuk dibahas lebih dalam lagi. Terhadap komentar Darmakoeseoema ini, Ketua Sidang atas nama BO mengatakan bahwa masalah pergesekan sudah juga dimaklumi dan pengurus BO Pusat akan mengadakan rapat khusus di Bandung untuk membahas hal ini.

Peserta lain dari Sunda, **Soeria Amidjaja**, menyatakan bahwa sebagai warga Sunda dan atas nama Pasundan, ia menyambut baik maksud tujuan kongres, namun ia mengingatkan akan adanya slogan besar yang sudah dicanangkan, yaitu "Jawa untuk Bangsa Jawa". Menurut Soeria Atmadja, tujuan ini sangat sukar dicapai sebab perlu ada kerja sama, tidak hanya tertulis, tetapi juga dalam kenyataan. Disayangkan oleh Soeria Atmadja, sepertinya tak ada tempat untuk bangsa Sunda. Maka dapat dimengerti apabila ada perasaan kurang percaya di antara orang-orang Sunda dan curiga bahwa bangsa Jawa hendak mengikuti apa yang dilakukan bangsa Prussia di Jerman sekarang. Terhadap pendapat ini, Ketua Sidang memohon agar pembicara tidak menyimpang ke ranah politik dan tetap pada ranah kebudayaan. Terhadap jawaban itu, Soeria Amidjaja menyatakan: "Kami, bangsa Sunda tidak terlampau senang dengan kebudayaan Jawa. Kami lebih cenderung mengikuti Islam...." dan pendapatnya tidak diteruskan.

Bagaimana pendapat **Dr. Von Romer** tentang isi makalah? Von Romer yang mengaku juga berdarah Jawa mengatakan bahwa sejumlah orang Jawa justru mencederai kebudayaan mereka sendiri dengan menganjurkan orang Jawa agar menutup diri dari kebudayaan Eropa. Sebuah kebudayaan akan eksis apabila sebanyak mungkin berhubungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Ia mengatakan amat menyukai mistik Yunani, tetapi tidak ingin hidup kembali dalam zaman itu. Orang Jawa mengagungkan masa lampau tetapi hendaknya mereka berpaling ke depan, jangan ke belakang. Ia juga menyayangkan tentang apa yang diungkapkan sebagai jiwa atau roh Eropa. Juga disayangkan perseteruan besar yang sedang berkecamuk di Eropa dan pelecehan terhadap bangsa Jerman, sebab bukankah ada banyak musik Jerman yang indah, falsafah Jerman yang tak kalah tangguh, yang semuanya sudah berpengaruh positif pada bangsa-bangsa lain?

Dalam komentarnya, **Rijkee** menyangkan bahwa terlalu sedikit pembahasan tentang pengembangan karakter dan terlalu banyak tumpuan pada kesejahteraan. Orang bermimpi tentang keberadaan sebuah bangsa yang mandiri tetapi lupa bahwa untuk mencapai itu diperlukan berabad-abad lamanya. Rakyat Jawa masih bagaikan seorang anak yang masih harus belajar berjalan. Orang Jawa perlu berorientasi dulu, pengaruh Barat mana yang baik, mana yang jelek. Sukar untuk menentukan arah. Dari sebuah biji mangga tidak akan tumbuh sebuah pohon jeruk. Maka, lebih baik menggarap lahannya dulu, yaitu jiwa rakyat. Kebudayaan merupakan tenaga rohani atau batin yang berasal dari dalam sehingga harus bijaksana ketika berpaling pada Barat. Ada bahaya besar apabila mengekor pendidikan Barat, terlalu banyak tujuan terlampau sedikit sarana. Kesejahteraan material tanpa pendidikan merupakan kehancuran sebuah bangsa.

Sebagai peserta kongres, **Dr. Hoesein Djajadiningrat** (yang disayangkan oleh Darmakoesoema karena tidak dipilih menjadi pemrasaran) juga menyampaikan pendapatnya. Ketika ia berdiri, serentak para peserta memberikan tepuk tangan yang riuh. Hoesein menyatakan setuju dengan pendapat Pastoor Van Lith. Ia juga mengatakan terdapat banyak hal yang samar dalam prasaran-prasaran yang ada. Juga terdapat kekurangpahaman pemrasaran mengenai kebudayaan Jawa kuno, bahkan ada sejumlah kesalahan dalam makalah Muhlenfeld. Pemrasaran lain seperti dr. Tjipto dan Stokvis juga telah menyebutkan berbagai hal yang tidak benar, dan yang paling membuatnya terperanjat adalah ceramah Van Hinloopen Labberton, yang menyebutkan banyak hal yang dapat dipertentangkan.

Hoesein membantah pandangan yang menyiratkan seolah kebudayaan Jawa kuno sekarang tidak lagi hidup dalam kebudayaan dewasa ini. Orang terlalu terpukau pada tidak adanya bangunan monumental. Lagi pula, para pemrasaran hanya menonjolkan beberapa aspek saja dari kebudayaan Jawa, umpamanya Tjipto hanya menyoroti kesenian. Yang perlu diperhatikan bukan hanya mengikuti kebudayaan lama melainkan membangkitkan minat terhadap yang lama demi membangun masa depan. Yang harus diperhatikan

bagaimana agar tidak terlalu berpihak pada satu sisi saja seperti yang diingatkan oleh Stokvis.

Terhadap pendapat Hoesein, J.E. **Stokvis** menjelaskan tentang maksud penguasaan kebudayaan lain. Menurut Stokvis seolah-olah kebudayaan Jawa itu selalu mendapat hantaman: dari kebudayaan Hindu, dari orang Arab, dari orang Eropa. Yang dialami kebudayaan Jawa tidak hanya penguasaan dalam arti sempit tetapi penguasaan dalam arti lebih luas, dan hal ini memang merupakan suatu keniscayaan sejarah. Pihak yang menguasai tidak melakukannya dengan sengaja. Penguasaan Belanda hanyalah akibat ditemukannya jalur laut menuju ke Hindia Belanda. Apabila jalur itu ditemukan beberapa abad lebih dulu, maka tidak akan ada penguasaan atau pengaruh Hindu atau Melayu. Harus disadari bahwa penguasaan diakibatkan oleh sebab-sebab ekonomi.

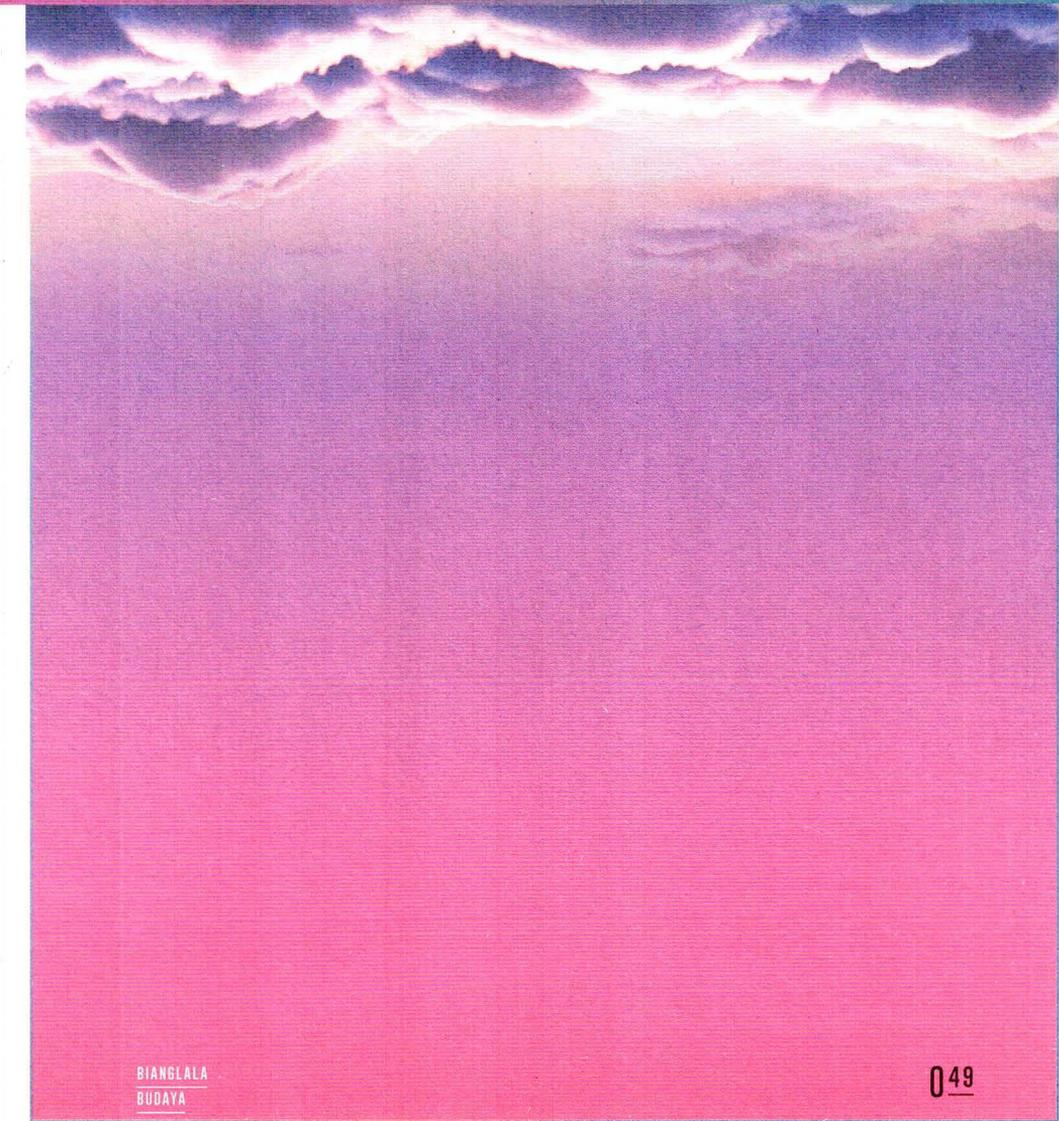
Stokvis tidak setuju kalau dikatakan bahwa peradaban Barat hanya mendatangkan kemudahan. Kemajuan teknologi juga berdampak pada kehidupan jiwa sebuah bangsa. Contohnya jasa perkeretaapian, selain mengangkut barang dan orang, juga memungkinkan terselenggaranya kongres seperti yang sekarang ini. Atau, dunia percetakan misalnya, memiliki kekuatan budaya amat besar. Tetapi pembicara tidak mengingkari bahwa masuknya kebudayaan Barat ke Hindia Belanda sering juga mendatangkan kerusakan berat. Selanjutnya, diharapkan bahwa dari kongres ini akan lahir usaha agar kebudayaan membawa berkah bagi rakyat. Sebagai dampak langsung dari kongres ini, Stokvis melihat akan tumbuh dan berkembangnya suatu pergerakan yang sebenarnya sudah lama hidup, kendati harus disadari adanya bahaya pertikaian di antara suku bangsa Hindia Belanda. Seyogyanyalah semua pihak menghadapi dengan kepala dingin segala sesuatu yang membedakan serta memisahkan mereka, dengan tetap berpegang teguh pada segala yang mempersatukan mereka.

Dalam KK 1918 hadir tokoh yang kemudian dikenal berhaluan kiri, **Mas Marco Martodikromo**. Mas Marco tampil berbicara dalam bahasa Melayu. Ia menilai kongres ini merupakan sebuah perhelatan antara orang Eropa dan



“Ajarkan  
kepada  
kami ilmu  
pengetahuan  
Barat, tetapi  
jangan sentuh  
jiwa nurani  
kami.”

*Abi Koesoemo (salah seorang penanggap), 1918*



kalangan ningrat Hindia Belanda, dan pihak-pihak lain tidak dilibatkan. Menurutnya, walaupun dibicarakan juga tentang pemerintahan mandiri, hal itu hanya dilakukan demi mendapatkan anggota saja.

Sebagai penanggap terakhir, **Van Bergen** menentang serangan terhadap VOC. Menurutnya, VOC memang bukan lembaga kebajikan, kompeni memang hanya ingin berdagang dan hal ini didukung oleh para raja pribumi. Kompeni bertindak sebagai majikan yang lebih baik ketimbang raja-raja Jawa. Van Bergen kemudian memberikan sejumlah bukti sejarah. Bangsa Belanda datang ke sini atas bimbingan Tuhan untuk memainkan sebuah peran. Ia tidak sepakat dengan tuduhan bahwa Belanda merusak kebudayaan Jawa, sebab kerusakan itu terjadi justru akibat peperangan di antara para rakyat Jawa sendiri.

Suasana perdebatan semakin seru walaupun diselang oleh istirahat. **Hasan Soemardi**, sebagai seorang Sunda, ingin menyingkirkan sejumlah prasangka kurang enak antara orang Jawa dan Sunda yang sempat dikemukakan oleh pembicara sebelumnya. Diakui bahwa bangsa Jawa dan Sunda menempuh jalan kebudayaan masing-masing tetapi di antara kedua suku bangsa itu ada kerja sama yang baik dan saling menghargai. Memang, bagi orang Sunda, akan lebih baik apabila ada makalah dari orang Sunda. Selanjutnya, atas nama perkumpulan para pegawai negeri Hindia Belanda yang diketuainya ia menghimbau untuk memperhatikan nasib para wanita, dengan menghapus poligami dan memajukan pendidikan bagi putri-putri demi peran mereka di masa depan dalam masyarakat.

**Dr. Van Andel** tidak setuju dengan pandangan bahwa bangsa Jawa tidak memerlukan ilmu pengetahuan kerohanian dari Barat. Menurutnya, bangsa Jawa juga memetik manfaat dari peradaban rohani Barat. Bahkan agama Nasrani juga merasakan dampak baik dari kebudayaan Jawa. Pertanyaannya adalah, apakah agama Nasrani tidak menyumbang pada pembangunan kebudayaan Jawa (dalam hal ini sama sekali tidak diartikan: bagaimana membuat orang Jawa menjadi Kristen!). Pandangan Nasrani dapat juga memberikan berkah kepada bangsa Jawa. Ada peluang untuk membina persatuan bangsa kendati ada perbedaan dalam keyakinan beragama.

Tentang orang Jawa, **Abi Koesoemo** berpendapat bahwa setiap orang Jawa berkewajiban turut membantu pencapaian kemajuan bangsanya sendiri. Caranya adalah dengan memomorduakan kepentingannya sendiri dan tidak mengejar keuntungan bagi dirinya sendiri. Kepada orang Barat, pembicara mengimbau, “Ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan Barat, tetapi jangan sentuh jiwa nurani kami.”

Pemrasaran Dirk van Hinloopen Labberton mendapat tanggapan dari **dr. Schriecke**. Ia amat tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh van Hinloopen Labberton, terutama bahwa ilmu pengetahuan Barat hanya mengantarkan kemudahan. Menurut penanggap, ciri utama ilmu pengetahuan Barat adalah pemakaian metode dan mengajarkan logika yang mencegah orang berkhayal. Ilmu pengetahuan juga menumbuhkembangkan kecintaan terhadap kebenaran, dan dengan memahami diri sendiri seseorang akan menjadi rendah hati dan menahan diri. Bangsa Jawa masih harus belajar banyak dari pemakaian metode Barat, juga demi kepentingan organisasi masyarakat. Kita belajar mengritik diri sendiri dan sadar bahwa kebudayaan lama harus diperbaharui dan kembali disegarkan. Harus juga disadari bahwa semua peradaban harus saling membangun.

Demikianlah, dari silang pendapat di atas dapat dibentangkan sebuah ilustrasi tentang ragam pemikiran yang berkembang di tengah-tengah situasi penjajahan yang menekan secara lahir maupun batin. Tidak mengherankan jika KK 1918 pantas disebut sebagai peristiwa budaya yang bersejarah. Di dalamnya didialogkan “kesadaran tentang nasib budaya bangsa” dan “kesadaran berbangsa”. Sebagai peristiwa yang berlangsung di tengah-tengah antara lahirnya dua tonggak sejarah besar, yaitu berdirinya Boedi Oetomo dan dicituskannya Sumpah Pemuda, KK 1918 adalah sebuah tonggak sejarah lain yang tidak dapat diabaikan. Mungkin dapat dikatakan bahwa inilah “manifesto kebudayaan” saat kita masih di bawah penjajahan. Dari laporan-laporan *De Locomotoef* secara keseluruhan dapat ditarik beberapa catatan penting. *Pertama*, ide menyelenggarakan KK yang semula hanya terbatas pada kebudayaan Jawa mendorong tumbuhnya keinginan

untuk menyelenggarakan KK yang cakupan materinya lebih luas lagi, termasuk Sunda, Madura, dan Bali dan bahkan masalah kebudayaan Indonesia. *Kedua*, berkembangnya pemikiran untuk memajukan kebudayaan Jawa, yang dinilai mendapat dampak negatif dari pertemuannya dengan kebudayaan Barat. *Ketiga*, seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, tumbuh pula kesadaran untuk menyongsong masa depan kebudayaan bangsa.

### Siapa Dirk van Hinloopen Labberton?

Dirk van Hinloopen Labberton berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah Batavia agar diselenggarakan Kongres Bahasa Jawa, walaupun kemudian ditolak oleh kaum terpelajar bumiputra yang bernaung di dalam BO. Siapa sebenarnya sosok ini?

Van Hinloopen Labberton (1874-1961) adalah putra seorang pedagang buku yang mendalami kebudayaan Jawa dan Melayu. Di Hindia Belanda, ia bekerja sebagai seorang analis kimia yang kemudian menjadi kepala pabrik gula di Jawa Timur. Ia juga pendukung politik etis sekaligus tokoh teosofi, gerakan yang bertujuan untuk menjembatani filsafat, agama, dan ilmu demi menjawab segala pertanyaan di dunia.<sup>19</sup> Interaksinya dengan para tokoh terpelajar hingga taraf tertentu memengaruhi BO. Van Hinloopen Labberton, yang dikenal luas dan menjadi guru bahasa Jawa di Gymnasium Belanda Willem III, bahkan diberi julukan sebagai “kiai santri” oleh orang-orang Jawa.

Pandangan Van Hinloopen Labberton yang penting antara lain adalah ceramahnya pada 16 Januari 1909 di Batavia yang dihadiri oleh 300 anggota BO. Dalam ceramah itu, ia menguraikan tujuan himpunan dan bagaimana hubungannya dengan hari depan bangsa

19. Irfan Teguh, “Teosofi dan Pergerakan Nasional,” <https://tirto.id/teosofi-dan-pergerakan-nasional-cl8i> diakses pada 2 Oktober 2018.

Jawa. Ia mengemukakan gagasan tentang kebangkitan nasional dengan mengatakan bahwa ada dua golongan bangsa di dunia, yaitu bangsa-bangsa besar yang sadar akan tugas yang harus ditunaikan di dunia, dan bangsa-bangsa kecil yang tidak sadar. Sebagai contoh, dikemukakannya peristiwa ketika Belanda mendapatkan kemerdekaannya dari Spanyol. Pada peristiwa itu ia melihatnya sebagai sumber kebangkitan Belanda, yang kemudian dapat tampil dengan kedudukan sebagai bangsa besar.

Pada bagian kedua ceramahnya mengenai BO, ia mengartikannya himpunan itu sebagai “kesadaran moral”. Sebagai seorang teosof, ia mengutamakan kebutuhan akan keselarasan antara moral nasional dan pembangunan peradaban material, suatu pendirian yang sangat mirip dengan pidato dr. Radjiman pada kongres pertama BO. Menariknya, seluruh ceramahnya disampaikan dalam bahasa Melayu, yang kelak akan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu saat itu tidak digunakan di kalangan pimpinan BO, yang lebih sering menggunakan bahasa Belanda. Sebagai guru bahasa Jawa, van Hinloopen Labberton sangat mahir baik berbahasa Jawa maupun Melayu. Nampaknya, Labberton ingin menyadarkan dan membuka pikiran penduduk pribumi lebih luas. Orang memang memerlukan pengetahuan dasar tentang bahasa Belanda, tetapi bagi mereka untuk mendapatkannya sangat sukar. Dalam masalah pendidikan bahasa, Labberton menilai BO tetap sangat berorientasi kebarat-baratan.

Labberton juga menekankan pada masalah yang disebutnya dengan istilah “swawinaya” atau *self-discipline* demi kepentingan bangsa. Ia mendorong agar penduduk pribumi meninggalkan tujuh kejahatan, yang semuanya berawal dengan aksara Jawa ꦩꦲ (ma): **main** (bermain kartu/berjudi), **madon** (bermain perempuan), **minum** (bermabuk-mabukan), **madat** (mengonsumsi candu), **maling** (mencuri), **mada** (menyumpahi), dan **mangan** (rakus). Slogan ini

berbeda dengan yang biasa dikenal di kalangan orang Jawa, yakni “ma lima”: **main**, **madat**, **maling**, **mabuk**, dan **madon** saja. Slogan-slogan yang berpurwakanti ini melengkapi cita-cita BO yang abstrak dengan sasaran-sasaran praktis dan bisa dikerjakan. Slogan-slogan tersebut juga memukau daya angan-angan orang Jawa melalui permainannya yang lembut terhadap bahasa pribumi.

### Kongres Kebudayaan 1919

Kongres Kebudayaan 1919 dapat disebut sebagai Kongres Kebudayaan II, diselenggarakan di Solo pada Desember 1919. Sayangnya, data tentang KK 1919 secara lengkap belum ditemukan. Materi yang dibahas dalam kongres adalah sejarah dan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali.

Sebelum kongres diselenggarakan, kaum terpelajar berkumpul di Yogyakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disepakati dalam penutupan Kongres Kebudayaan I (1918), yaitu tentang pembentukan sebuah lembaga penelitian kebudayaan. Hasilnya, pada 4 Agustus 1919 didirikanlah lembaga penelitian yang diberi nama Java-Instituut yang berkantor di Surakarta. Lembaga ini dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Surat Keputusan No. 75 tanggal 17 Desember 1919. Berdasarkan Pasal 2 AD disebutkan bahwa masa hidup Java-Instituut dibatasi, yaitu hanya untuk waktu selama 29 tahun dihitung mulai dari 4 Agustus 1919. Tepat pada 4 Agustus 1948 Java-Instituut harus menyatakan diri bubar demi hukum.

Dengan penyelenggaraan KK II, Java-Instituut secara resmi menjadi organisasi yang aktif dalam bidang kebudayaan. Sejak saat itu, Java-Instituut menjadi pihak yang menyiapkan dan melaksanakan kongres, yang pada awalnya bertajuk *Congres voor de taal-, Land-, en Volkenkunde van Java* (Kongres tentang Ilmu Bahasa, Ilmu Bumi dan Ilmu Bangsa-bangsa). Namun, tujuan dasar kongres masih tetap sama, yakni mengembangkan kebudayaan (*cultuur onwikkeling*), dan tidak hanya terbatas pada kebudayaan Jawa saja. Gambaran tentang status, tugas, fungsi, dan susunan organisasi lembaga itu

tercantum dalam Anggaran Dasar Java-Instituut seperti yang tertera berikut ini.

#### ANGGARAN DASAR JAVA INSTITUUT

##### Pasal 1

Perhimpunan itu bernama Java-Instituut, berkedudukan di Surakarta.

##### Pasal 2

Perhimpunan ini didirikan untuk masa waktu 29 tahun dimulai pada tanggal 4 Agustus 1919.

##### Pasal 3

Maksud dan tujuan perhimpunan ini ialah untuk mengembangkan kebudayaan pribumi dalam arti yang seluas-luasnya dari Jawa, Madura, dan Bali.

##### Pasal 4

Perhimpunan ini berusaha mencapai tujuan:  
mengumpulkan data selengkap mungkin tentang bentuk dan karya kebudayaan Jawa, baik dari sekarang maupun yang telah berkembang dari waktu ke waktu.  
memajukan pengetahuan dan pengertian kebudayaan Jawa dengan mengadakan kongres-kongres, pameran, ceramah, diskusi, kursus, pertanyaan berhadiah (kuis), dan karang-mengarang.  
membantu tiap usaha yang mengarah pada kegiatan seperti yang dilakukan oleh perkumpulan Java-Instituut.  
mengupayakan ikhtiar lain yang sah yang bermanfaat bagi Java-Instituut dan dapat membantu dalam mencapai tujuan.

##### Pasal 5

Perhimpunan terdiri atas anggota-anggota biasa, anggota kehormatan, anggota dengan surat-menyurat, dan sebagai

penyumbang. Perkumpulan-perkumpulan, badan-badan bersifat apa pun, dapat masuk sebagai anggota atau penyumbang atau simpatisan.

#### Pasal 6

Keanggotaan biasa dan anggota penyumbang atau simpatisan dapat diminta dengan mendaftar pada pengurus. Anggota melalui surat-menyurat diangkat oleh pengurus. Kepada orang-orang yang berjasa dalam hal menggerakkan perhimpunan ini dapat dijadikan Anggota Kehormatan, diputuskan dalam rapat umum.

#### Pasal 7

Pengurus terdiri atas paling sedikit lima anggota, dipilih dalam Rapat Umum dari anggota-anggota biasa dan anggota-anggota kehormatan. Ketua dipilih secara itu. Ditambah lagi perkumpulan-perkumpulan dan badan sebagai anggota atau penyumbang diberi kuasa untuk menunjuk wakilnya paling banyak dua orang untuk duduk dalam pengurus setelah dipilih melalui Rapat Umum. Keputusan dapat diambil apabila disetujui  $\frac{3}{4}$  suara yang diambil. Mereka yang ditunjuk oleh perkumpulan atau badan sebagai wakil untuk duduk dalam pengurus perhimpunan Java-Instituut akan menjadi anggota sejak mulai menjabat. Jumlah anggota yang dipilih Rapat Umum sebagai anggota pengurus selalu harus paling sedikit seorang dari sejumlah wakil yang duduk dalam pengurus. Kewajiban-kewajiban pengurus dibagi antara seluruh anggota. Untuk pimpinan sehari-hari dipilih oleh pengurus di antara mereka, terdiri paling sedikit tiga orang, di antaranya ketuanya.

#### Pasal 8

Pengurus mewakili perhimpunan di dalam dan di luar hukum dan berwenang bertindak atas namanya. Atas nama Pengurus, Ketua, dan Penulis.

#### Pasal 9

Organisasi dan tata kerja perhimpunan diatur kemudian dalam

Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Anggaran Dasar. Peraturan ditetapkan dalam Rapat Umum dengan suara terbanyak. Suara berhenti, nasib ditentukan.

Pasal 10

Tidak dapat diadakan perubahan dalam Anggaran Dasar dan tidak dapat diadakan pembubaran Perhimpunan untuk sementara kecuali atas keputusan Rapat Umum, atas usul Pengurus dengan sedikit-dikitnya dihadiri  $\frac{1}{4}$  dari anggota dan diambil sedikit-dikitnya  $\frac{3}{4}$  dari suara rapat. Keputusan pembubaran hanya berlaku apabila mayoritas mutlak anggota menyetujui.

Pasal 11

Dalam hal pembubaran perhimpunan dikuatkan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan milik Perhimpunan dalam suatu Rapat Umum

(Sumber: *Djawa*, 1921: hlm. 65-66).

Untuk operasionalisasi lembaga, anggaran belanja didapatkan dari subsidi Pemerintah Batavia dan keempat kerajaan, yaitu: Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan dan Puro Pakualaman di Yogyakarta. Di samping itu juga dari pendapatan lain, berupa: iuran anggota, uang langganan majalah, dan tiket masuk Museum Sonobudoyo. Sese kali terdapat pemasukan dari undian dan subsidi dari perusahaan besar dan beberapa pemerintah kotapraja.

Pendiri Java-Instituut adalah Pangeran Prangwadono, Dr. R. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, dan Dr. F.D.K. Bosch. Dewan Pengurus pertama terdiri atas Dr. R. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua, S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara, dan beberapa anggota, antara lain Dr. F.D.K. Bosch, R. Ng. Poerbatjaraka, Ir. Th. Karsten, dan beberapa wakil dari perkumpulan lain, seperti Boedi Oetomo dan Sentral Sarekat Islam.

Dalam perjalanan hingga menyatakan diri bubar tanggal 4 Agustus 1948, Java-Instituut telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi

sejarah dan perkembangan kebudayaan di Indonesia. Di samping melakukan penelitian, pengkajian, pencatatan, dan perekaman, Java-Instituut melakukan banyak kegiatan yang amat berguna bagi pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Kegiatan itu antara lain penelitian, penyelenggaraan kongres, pameran, ceramah, sayembara, pertunjukan tari, wayang wong, wayang kulit, pendirian lembaga pendidikan kerajinan, juga penerbitan majalah dan buku. Contohnya pameran kerajinan tangan di Cirebon (1937), pameran kerajinan tangan dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok bersamaan dengan sekaten (1939), sayembara sistem pencatatan musik Jawa (1921), sayembara buku pegangan dan pelajaran sejarah (1921), penyusunan tatakrama Jawa, Sunda, dan Madura (1928), penerjemahan Serat Wedhatama (1935), penulisan roman Jawa, Sunda, dan Madura (1937).

Salah satu warisan penting Java-Instituut adalah pendirian Museum Sonobudoyo yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono VIII pada 6 November 1935, yang sekaligus menjadi Pelindung Museum. Ia menghibahkan sebidang tanah di sebelah Alun-alun Lor Keraton Kasultanan Yogyakarta untuk museum ini.

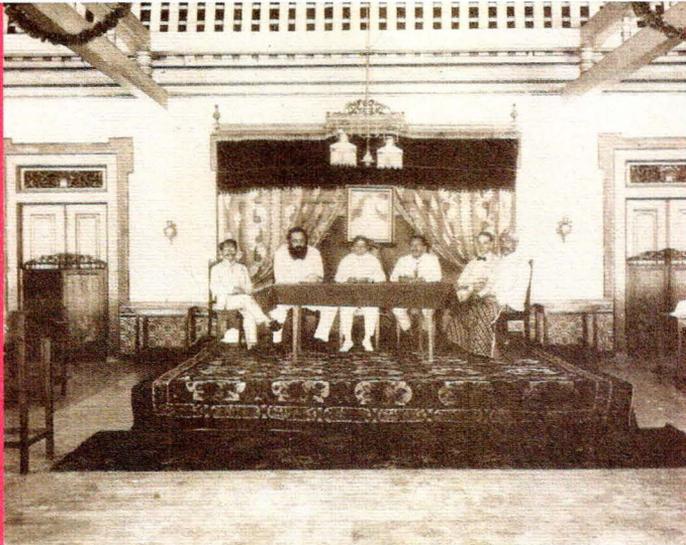
### **Museum Sonobudoyo, Saksi Sejarah Sekaligus Warisan Java-Instituut**

Museum Sonobudoyo dibangun untuk menyimpan dan melestarikan hasil pengumpulan data kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali oleh Java-Instituut. Dewan pengurus harian pertama terdiri atas: P.H. Hadinegoro sebagai Ketua, J.L. Moens sebagai Wakil Ketua, dan S. Koperberg sebagai Sekretaris merangkap Bendahara.

Bentuk arsitektur bangunan museum dirancang menurut gaya bangunan Jawa oleh seorang arsitek terkenal bernama Ir. Thomas Karsten dari Semarang, yang kemudian diperluas pada 1939-1940. Saat ini, kompleks museum terdiri atas dua unit, yaitu Unit I yang terletak di Jalan Trikora 6, Yogyakarta, dan Unit II yang terletak di

Wijilan, sebelah timur Alun-Alun Lor Keraton Yogyakarta.

Museum ini sangat berjasa dalam menyelamatkan berbagai macam benda koleksi peninggalan sejarah dan budaya. Koleksi yang dikumpulkan antara lain berupa wayang, keris, alat musik, pakaian adat, topeng, berbagai macam ukiran, barang-barang seni kerajinan, patung, arca, dan berbagai macam buku yang dihimpun sebagai bukti sejarah perkembangan kebudayaan di Pulau Jawa dan Bali. Koleksi ini dikenal sebagai yang paling lengkap setelah Museum Nasional. Pada 1974, Museum Sonobudoyo diserahkan kepada pemerintah pusat, tepatnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, pada 2001, museum ini bergabung dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DIY.



Kongres Java-Instituut di Surakarta pada Desember 1919. (dari Jaap Erkelens, *Java Instituut dalam Foto*, 2001.)

Java-Instituut juga memperhatikan masalah pendidikan kesenian. Pada 1939, lembaga ini mendirikan Sekolah Kerajinan Tangan (Kunst Ambachts School), dengan bantuan dana dari Batavia dan Den Haag. Peresmiannya

dilaksanakan pada 1 Maret 1941. Bertindak sebagai pelindung adalah K.G.P.A.A. Praboe Soeradilaga, yang juga menjabat sebagai pengurus Java-Instituut. Gedung sekolah dan sebuah asramanya berlokasi di belakang Museum Sonobudoyo. Sekolah itu bertujuan memberikan pendidikan kepada anak berbakat di bidang pandai emas, perak, dan ukiran kayu. Melalui pendidikan itu, anak-anak belajar menguasai teknik dan artistik pembuatan ukiran dan perhiasan. Salah satu di antara pengajarnya, yakni M.J. Katamsi menjadi perintis Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta (kini ISI). Java-Instituut juga menerbitkan majalah antara lain *Djawa*, *Poesaka Djawi*, *Poesaka Soenda*, dan *Poesaka Madhoera*.

### Kongres Kebudayaan 1921

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan di Bandung pada 1921 merupakan kongres III. Topik yang dibahas adalah pendidikan musik dan sejarah, khususnya untuk siswa-siswa bumiputra. Meski tidak ada data tentang jalannya pembahasan kongres secara terperinci, di bawah ini akan dipaparkan seluk-beluk kongres tersebut dalam beberapa aspeknya.

#### **Serba-serbi Kongres**

Kongres pada 1921 ini mengangkat tema seputar pendidikan sejarah dan musik untuk kaum bumiputra, dengan masing-masing pemrasaran yaitu:

	<b>Pendidikan Sejarah</b>	<b>Pendidikan Musik</b>
Pemrasaran	1. R. Darna Koesoema	1. I.S. Brandes
	2. M.W. Dwidjosewojo	2. R.T. Djodjodipoero
	3. Nyonyah W. Mees-Mees	3. Nyonyah S. Holland (Linde Bandara)
	4. R. Hassan Sumadipradja	4. J. Kats
	5. R.M. Soetatmo Soeriokoesoemo	5. R.M.A. Soerjo-Poetro
	6. Z. Stokvis.	6. R.M. Wreksodiningrat

<p>Pertanyaan untuk dibahas</p>	<p>a. Andaikan mungkin dan diinginkan untuk melakukan penyebaran pengetahuan sejarah Jawa demi perkembangan suku Jawa, bagaimana maksud ini dapat diupayakan, baik secara umum maupun khusus dalam pendidikan?</p> <p>b. Dengan nama apa dalam pendidikan pengetahuan ini disampaikan dan diatur menurut cara dan isinya?</p> <p>c. Tentang kategori-kategori mana lembaga pendidikan harus membentangkan pelajaran ini?</p> <p>e. Dengan cara apa penelitian sejarah Jawa dapat dimajukan dan peraturan mana yang diperlukan baik untuk tercapainya hasil-hasil pengetahuan maupun terhadap perluasan ilmu yang sudah didapat?</p>	<p>a. Apakah pendapat Anda tentang keadaan seni nada masa kini di Jawa, dibandingkan dengan yang dahulu. Oleh sebab-sebab yang mana keadaan sekarang ini berkembang dari yang terdahulu?</p> <p>b. Apa yang dapat diharapkan dari seni nada ini dalam waktu yang akan datang dan arah perkembangannya menurut pendapat Anda?</p> <p>c. Apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan menjamin perkembangan seni nada ini?</p> <p>d. Adakah peraturan khusus demi kepentingan seni nada di Jawa, dari pemerintah atau atasan Lembaga Jawa, atau badan-badan umum lainnya, dan aturan manakah itu?</p>
---------------------------------	---	--

Di samping pokok bahasan di atas, kongres membahas mengenai masuknya pengaruh kesenian asing. Pengaruh itu menimbulkan sikap pesimistis terhadap kelangsungan hidup seni yang akan datang, yang diwakili dengan pertanyaan: “Bolehkah diharap kepandaian seni itu akan hidup kembali pada masa yang datang?”<sup>20</sup> Andaikan kepandaian seni Hindia Belanda yang asli diubah sifatnya, dengan meniru kepandaian seni Eropa, umpamanya seni wayang ditukar dengan *toneel* (komedi), gamelan ditukar dengan musik, lukisan Jawa diganti dengan gambar Eropa, maka perubahan itu bukannya menyegarkan hidup *cultuur* (kehalusan budi dan adat) Hindia Belanda, melainkan mengubah sifatnya sehingga lambat laun seni itu akan lenyap. Menurut mereka, memasukkan kepandaian seni asing semata tidak baik. Harus dapat dipilih di antara tiga jalan: pertama kultur atau budaya lama dibuang selekas-lekasnya dan dibangun kultur baru; kedua, kultur lama dipelihara seperti sedia kala; ketiga, kultur baru itu disesuaikan dengan kultur lama. Akhirnya, disepakati bahwa jalan yang dipilih adalah yang ketiga. Jalan pertama akan menimbulkan kerugian besar sekali, sementara jalan kedua akan memundurkan kesenian. Jika jalan ketiga yang dipilih, ragam-ragam baru disesuaikan dengan ragam lama, dan kultur tidak akan berkurang nilainya. Dengan membuka jalan baru, akan bertambah teguhlah semangat masyarakat disebabkan oleh yang baru itu.<sup>21</sup>

Tanggapan arsitek Ir. Karsten

**“...KONGRES INI PATUT DISEBUT CULTUURKONGRES YANG SEBENARNYA. KONGRES INI LEBIH MENDEKATI TEMPAT YANG DITUJUNYA.”**

(*Sri Poestaka*, th. III, 1921, hlm. 187).

20. *Sri Poestaka*, no. 12/1921, hlm 320.

21. *Ibid.*

Walikota Bandung, S.A. Reitsma sebagai tuan rumah, memberikan sambutan. Ia menyinggung pengembangan kebudayaan nasional, antara lain dengan menyatakan:

“Java-Instituut sebagai perkumpulan muda, tetapi telah mampu mengadakan kongres di Bandung yang pertama, yang tujuannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional yang dalam keadaan tertindas, akan dihidupkan kembali berkembang di daerah-daerah, seperti yang dikatakan oleh Soeriokoesoemo yang telah menyampaikan prasaran tentang pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional. Untuk ke depan harus dipilih garis-garis yang tetap kukuh, karena masa kini adalah akibat-akibat dari masa lalu, yang sebabnya dapat ditemukan kembali.”<sup>22</sup>

Perumpamaan S.A. Reitsma dalam sambutannya

**“POHON TREMBESI TUMBUHNYA CEPAT, TAPI SEKALI KENA BADAI PATAH. POHON JATI TUMBUHNYA LAMA, TETAPI AWET SEPANJANG ABAD.”**

(*Djawa*, 1921, hlm. 232)

Wakil Direktur Pendidikan dan Agama, Hardeman, juga memberikan sambutan. Ia menyatakan simpatinya bahwa bangsa Timur telah berupaya untuk mendapatkan kemajuan lebih tinggi daripada Barat tanpa meninggalkan budaya sendiri. Yang baik dari budaya dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan evolusinya. Diharapkan akan terjadi asosiasi harmonis antara kebudayaan Jawa dan Belanda. Pemerintah (Hindia Belanda) tidak tinggal diam dan telah mendirikan Algemene Middelbare School (AMS). Sekarang giliran masyarakat Jawa untuk membawa pengembangan dan kejayaan organisasi muda ini.<sup>23</sup>

22. *Djawa*, 1921, hlm. 231.

23. *Ibid*, hlm. 233.

Yang menarik, kabarnya, perhatian masyarakat cukup besar terhadap kongres yang pertama kali diselenggarakan di kota itu, lebih-lebih terhadap kegiatan pameran dan pertunjukan seninya. Majalah *Sri Poestaka* banyak menurunkan liputan tentang perhelatan budaya ini. Misalnya, dalam edisi Tahun III, 1921, 187, diberitakan bahwa:

“Pada tanggal 17,18, dan 19 Juni 1921 telah diadakan kongres Java-Instituut yang pertama di kota Bandung, dikunjungi oleh beratus-ratus orang, ya beribu-ribu orang. Dalam kongres itu dibicarakan Sejarah dan Bunyi-bunyian Jawa. Tetapi lain dari pada membicarakan kedua perkara yang tersebut, kongres itu mempertunjukkan juga: Tari Banyuwangi, Ukir-ukiran, Tonil Sunda dan Wayang Wong. Maka inilah lebihnya kongres ini dari pada kongres yang telah diadakan di kota Solo. Dalam kongres ini orang tidak tinggal pada perkataan saja, melainkan cita-cita itu dibuktikan pula.”

KK 1921, selain membahas permasalahan kebudayaan lewat pemrasaran, memang menyelenggarakan pertunjukan kesenian pula. Bersama Wiranatakusumah, J. Kunst yang pakar etnomusikologi mempresentasikan makalah “Een En Ander Over Soendaneesche Muziek,” (rintisan awal mengenai teori musik Sunda). Seni musik yang ditampilkan antara lain: pertunjukan calung, karinding, doger, rengkong-hatong, gondang, kecap, orkes tarawangsa, celempung, angklung, renteng, dan degung. Adapun sajian tari yang diiringi musik adalah: Gandrung Banyuwangi (batal), Bali-balian, Salatun, Giru Bali, Ayah Samirah, Gunung Sari, Angleng, Lebak-lebak, Rembe, Dril, Thèthèl-thèthèl, Ugo-ugo, Cap Gomeh, dan Lia-liu. Beberapa di antaranya dewasa ini sudah punah.

Pameran ukiran kayu juga diselenggarakan secara besar-besaran, diikuti oleh berbagai daerah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Bali dan Palembang. Pameran ini diselenggarakan di sebelah kanan gedung kabupaten Bandung. Barang-barang yang dipamerkan dikirim dari seluruh tanah Jawa dan Madura, Bali, dan Palembang. Didatangkan ke sana berbagai karya seni ukir, termasuk karya yang dibuat tahun 1400 berupa mimbar mesjid Paromosono yang berasal dari Keraton Demak. Ada pula barang seni yang diperjualbelikan.

“Di antara segala kiriman itu yang terutama ialah Mimbar Mesjid Paromosono di Solo. Asal mimbar ini dari istana Demak. Kata orang diperbuat kira-kira pada tahun 1400. Ukiran mimbar ini bukan saja bagus rupanya, melainkan sangat dalam pula artinya. Kabongan (Pelaminan) Tengku Besar Istana Jokja, dipertunjukkan juga. Pelbagai benda kiriman dari Karangasem, menghiasi pertunjukan itu. Sebuah bilik hanya diisi dengan kiriman KGP Paku Alam saja. Kiriman dari Jepara sangat halus ukirannya, laku sekali. Orang berebut-rebut membelinya.”<sup>24</sup>

### **Pentas Loetoeng Kasaroeng**

Untuk meramaikan KK III ini, diselenggarakan pertunjukan kesenian yang tonil (dari bahasa Belanda, *toneel*) dengan lakon berjudul “Loetoeng Kasaroeng” Bentuknya drama kolosal dan ditampilkan di atas panggung raksasa yang khusus dibangun untuk itu di depan pendopo kabupaten. Tonil adalah pertunjukan bentuk baru yang sedang berkembang di Eropa dan belum pernah digelar di Hindia Belanda. Dilukiskan pertunjukan itu telah memukau ribuan penonton.<sup>25</sup>

Cerita “Lutung Kasarung” telah melegenda di tataran Sunda tetapi oleh kalangan masyarakat Sunda dianggap sakral dan jarang diketahui orang. Konon, orang yang mengetahui bunyi ceritanya jarang yang berani menceritakan kembali karena takut tertimpa “daulat marhu” alias kena bala. Jangankan orang biasa, tukang pantun sekalipun jarang yang berani menceritakan lakon itu.<sup>26</sup> Mereka yang berani menuturkannya biasanya telah melakukan beberapa ritual terlebih dulu untuk menghindari bala. Lewat panggung inilah, untuk pertama kalinya “Lutung Kasarung” dipopulerkan di depan khalayak ramai.

Tonil yang juga disebut “komidi” tersebut dibagi menjadi 18 bagian dan dimainkan berdasarkan skrip, tidak seperti pertunjukan teater tradisional biasa. Tiap-tiap bagiannya dimainkan dengan diiringi musik sesuai dengan

24. Sri Poestaka, th. II, 1921, hlm. 187.

25. “R.A.A. Wiranatakusumah, ‘Raja Sunda’ Terakhir”, diakses dari <https://serbasejarah.wordpress.com/2010/03/01/r-a-a-wiranatakusumah-%E2%80%99Craja-sunda%E2%80%9D-terakhir/> pada 2 Oktober 2018.

26. Sri Poestaka, th. II, 1921, hlm. 188.

suasana cerita. Musiknya dimainkan dengan degung, renteng, angklung, tarawangsa, dan celempung. Kostum yang digunakan disebut-sebut sebagai “pakaian Sunda purba” menurut adat Badui. Karena bertempat di atas panggung darurat di halaman kabupaten, pergelaran itu disebut sebagai “komidi halaman”.

“...tempat itu bertingkat tiga, tingkat jang kedou lebih tinggi dari pada tingkat jang pertama, dan yang ketiga (yang tertinggi) sampai ke pagar batoe (kota) kaboepaten. Lebar muka tooneel itu 25 M dan lebar tingkat (kebelakang) 2-3 M saja. Tanah sekeliling tempat permainan itu, selainnya yang sebelah belakang, digali, semangkin djauh semangkin naik, sehingga menjadi lereng jang landai. Lereng ini untuk tempat penonton jang lebih suka bersila. Pada sekeliling lereng ini diletakkan kursi berderet-deret, jadi setengah bulat bangunnja, dan sekeliling tempat ini ada beberapa batang pohon-pohonan. Tingkat jang ketiga, djadi jang tertinggi dan jang belakang sekali, pertengahannja dihiasi dengan kasang (tenunan Sunda), dan disitu didirikan sebuah singgasana. Sebelah depannya dikiri ada gambar hiasan hutan, dikanan gambar hiasan gunung. Tempat permainan ini banyak lagi yang perlu diperbaiki, tetapi untuk permulaan boleh disebut telah amat baik.”

Menurut sejarawan Djoko Soekiman, panggungnya merupakan panggung *proscenium* pertama, yaitu model panggung pertunjukan pada zaman Yunani dan Romawi, dengan bidang yang membatasi antara panggung dan penonton dibuka dan ditutup dengan layar.<sup>27</sup> Sementara itu, tata lampu diatur seperti tata panggung “modern” dengan menggunakan lampu listrik. Ada lampu yang dapat digerakkan arahnya untuk menyinari bagian penting sehingga penonton dapat melihatnya dengan jelas. Seperti yang ditulis dalam majalah *Sri Poestaka*, penerangan panggung diatur “...dengan lampu listrik yang besar dan yang dapat diputar-putar, disinari bagian tempat orang sedang bermain pada suatu waktu, ya’ni singgasana, hutan atau gunung; maka pada waktu itu tempat itu sajalah yang diterangi benar-benar dan tempat-tempat yang lain dibiarkan gelap.”

Lakon “Lutung Kasarung” itu baru pertama kali dipentaskan dan pemainnya pun bukan pemain yang profesional. Secara keseluruhan,

---

27. Djoko Soekiman, 2000, hlm. 85.

pertunjukan ini dinilai sangat berhasil.

“Akan permainan boleh dikatakan untung benarnya telah dapat dikumpulkan orang-orang yang suka dan berani bermain, lagi bagus pula permainannya. Hal ini terutama jasa R. Kartabrata, Kdj. Regent Bandoeng, tuan D.K. Ardiwinata dan M. Judadibrata.

Adapun hal permainan Lutung Kasarung itu, umumnja bagus, bagus sekali, meskipun baharu sekali ini dipertunjukkan, dan lakonnya amat sukar akan dilakukan dan yang bermain bukan tukang main.

Akan kesucian riwayat itu nyata benar-benar pada bahagian 13, pada waktu hendak memotong padi. Pada bahagian itu, tatkala beberapa orang dewa turun dari kayangan, membawa segala keperluan untuk memotong padi, seorang-seorang berlutut dan menyembah dengan tertib dan saksama; kesucian lakon itu terasa meresap kedalam tulang sumsum, menghentikan napas dan debar jantung... [tak terbaca, karena sebagian dari halaman ini sobek] orang yang beribu-ribu itu diam tidak berkata, sehingga dikomidi halaman itu... dan sepi sekali rasanja. Inilah bagian permainan Lutung Kasarung yang amat bagus sekali.”<sup>28</sup>

Kongres Kebudayaan 1921 menjadi sangat istimewa karena pertunjukan seninya dihadiri oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, lengkap dengan para pengawalnya. Pertunjukan itu amat menarik perhatian masyarakat Bandung yang sedang haus hiburan. “Barang siapa yang melihat permainan itu, sekaliannya mendapat belaka perasaan kehalusan, dan didalam hatinya terbit keinginan akan mengenal diri. Sebab itulah permainan Lutung Kasarung itu besar sekali artinya bagi orang Sunda...”

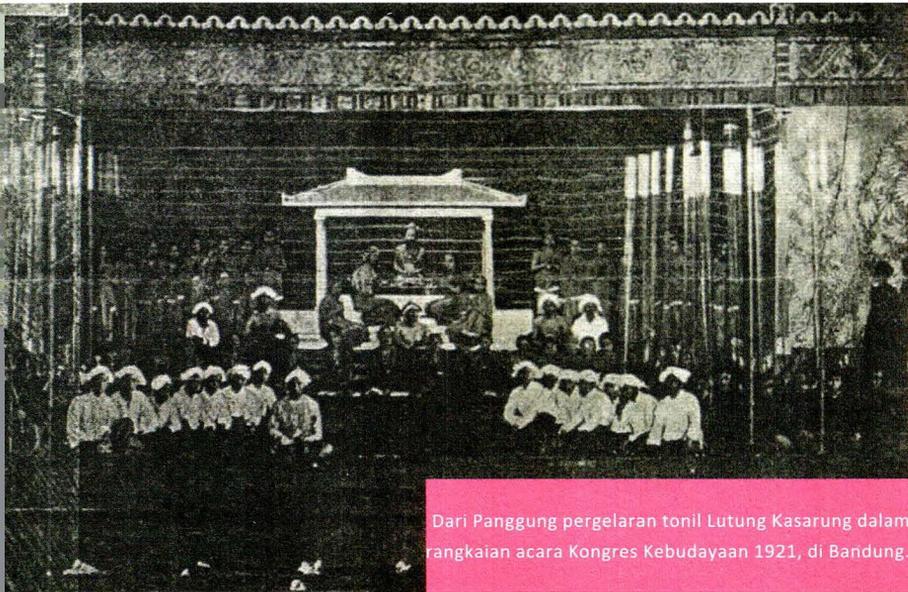
#### **Di Balik Peristiwa**

Di balik kesuksesan pertunjukan “Lutung Kasarung” ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, pertunjukan itu dapat berlangsung sukses karena didorong oleh Bupati Bandung Wiranatakusumah yang terobsesi oleh pertunjukan wayang orang dan tari Srimpi yang dilihatnya dalam kongres-kongres di Surakarta sebelumnya. Pertunjukan tari itu telah menumbuhkan tantangan bagi sang bupati yang memang sangat tertarik pada pertunjukan seni. Untuk dapat menampilkan pertunjukan khas Sunda, ia mengusulkan

28. *Sri Poestaka*, th. III, 1921, hlm. 189.

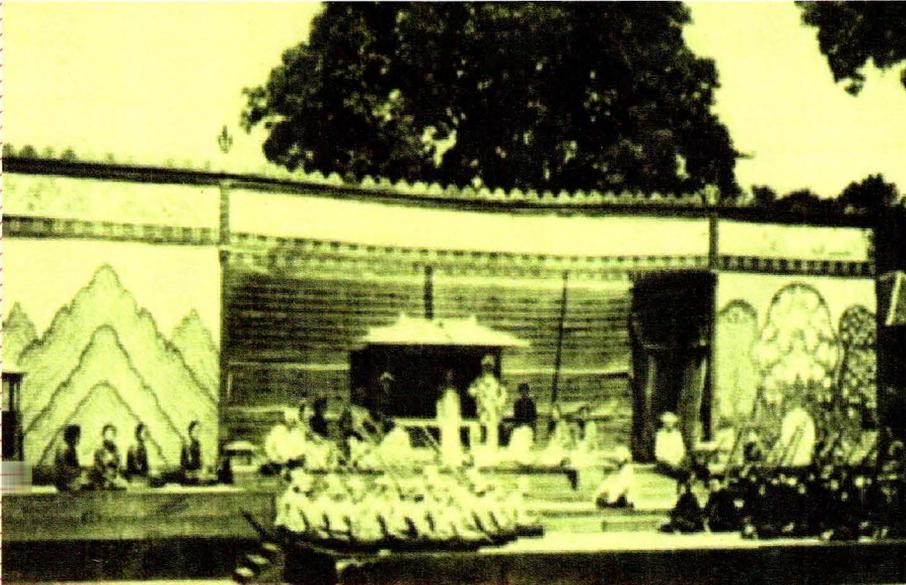
agar pada acara kongres ditampilkan tonil Sunda. Dari hasil olahan Kiewiet de Jonge bersama Mr. Pleyet, dipilihlah cerita rakyat Sunda “Lutung Kasarung” menjadi tonil atau sandiwara. Persiapan sebelum pementasan memakan waktu lebih-kurang satu tahun. Pementasannya dianggap bersifat kolosal dengan melibatkan 150 pemain.

Kedua, di balik kesuksesan itu, menjelang pergelaran dimulai terjadi ketegangan yang hampir-hampir membuat pertunjukan batal. Para gadis Priangan yang diajak main tidak bersedia tampil dengan membuka bagian atas badannya, termasuk para gadis priyayi Sunda yang memegang peran utama. Bupati bahkan sampai turun tangan memberikan penjelasan dan meminta persetujuan dari pihak keluarga. Setelah melalui pendekatan dan penjelasan cukup lama serta sedikit modifikasi, akhirnya para gadis itu bersedia tampil. Ketiga, “...lampu listrik yang besar dan yang dapat diputar-putar, disinari bagian tempat orang sedang bermain pada suatu waktu” itu dapat diwujudkan berkat bantuan dan pinjaman dari kesatuan Zeni.



Dari Panggung pergelaran tonil Lutung Kasarung dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan 1921, di Bandung.

diikuti dengan kesuksesan pertunjukan itu, cerita “Lutung Kasarung” dan lagu-lagu tradisional yang diiringi musik Sunda menjadi semakin populer. Pergelaran sandiwara “Lutung Kasarung” dimainkan di seluruh kabupaten. Di tiap kabupaten berdiri perkumpulan musik Sunda hingga paling tidak masing-masing daerah memiliki lima perkumpulan.<sup>29</sup> Bahkan popularitas “Lutung Kasarung” kemudian melahirkan film berjudul yang diproduksi pada 1926. Motornya pun sama, Wiranatakusumah, dengan sutradara G. Kruger dan L Heuveldrop serta dibintangi pemeran orang Sunda. *Lutung Kasarung* menjadi salah satu tonggak perfilman Indonesia karena merupakan film pertama yang dibuat di bumi Nusantara.



Babak tonil “Loetoeng Kasarung” pada Kongres Kebudayaan 1921 yang menggambarkan raja Pasir Batang dikelilingi oleh para putrinya, penasihat dan prajurit bersenjata tombak (Koleksi Irawati Durban Ardjo, dikutip oleh Tatang Abdulah, dkk.:2013)

29. Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 64.

Setelah difilmkan pun kiprah pertunjukan tonil “Lutung Kasarung” tidak berhenti. Setelah tahun 1921, dibentuklah organisasi Perkumpulan Tonil Lutung Kasarung, lengkap dengan pengurusnya. Perkumpulan ini menggelar pentas di beberapa tempat, antara lain Tasikmalaya, Manonjaya, Indihiang, Ciawi, dan Banjar. Tahun 1927, bertempat di Societeit Concordia, Jalan Braga, Bandung, perkumpulan itu mementaskan tonil dengan lakon “Sangkuriang,” legenda tentang terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu. Legenda itu sangat dikenal oleh masyarakat luas. Pertunjukan yang satu ini bukan pertunjukan komersial, melainkan untuk menyambut Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkunjung ke Bandung. Masih pada 1927, Perkumpulan Tonil Lutung Kasarung mementaskan tonil dengan lakon “Mantri Jero” karya R. Memed Sastrahadiprawira, Gending Karesmen, dll.<sup>30</sup>



Pengurus Perkumpulan Tonil Lutung Kasarung: 1. R.M. Karta Brata (pimpinan); 2. R. Martonana, Ketua; 3. R.A. Danamihardja-Wakil Ketua; 4. R. Sukaesih – Komisaris Utama; 5. R. Rain Soegandaatmadja-Komisaris I; 6. R. Kartawirja-Komisaris II; 7. R.P. Surjaatmadja-Sekretaris; 8. R. Kartawisastra-Anggota merangkap pemain; 9. Atmawinata –Anggota merangkap pemain. (*Parahiangan*, No. 48 Taoen Ka 1, 28 November 1929).

30. *Parahiangan*, no. 48, 1929.

Pada Kongres Kebudayaan 1921 juga dipertunjukkan wayang wong tetapi hanya berupa “*pethilan*,” atau adegan-adegan pilihan dari keseluruhan lakon. Karena satu lakon dinilai terlalu panjang, diambilah (*dipethil*) adegan-adegan tertentu saja. Hasilnya, pertunjukan dengan model “*pethilan*” itu dinilai sebagai “aturan baru.” Ada pula pertunjukan tarian Jawa dari Yogyakarta, tarian halus dan gemulai hasil dari “pengajaran istana Jokja,” yang dipentaskan oleh dari murid-murid sekolah menengah di Yogyakarta, dipimpin oleh Pangeran Soerjodiningrat. Tarian itu telah membuat para penonton terpesona, “Gerak badan yang halus dan gemulai, diiringi bunyi gamelan yang merdu dan menyenangkan hati, melukiskan kebagusan yang lama telah tercapai, terdiri bercaya-caya, indah berseri menyedapkan penglihatan.”

Terakhir, rencana pertunjukan tari Gandrung Banyuwangi urung dilaksanakan meskipun foto penari dan teks lagu pertunjukan sudah dimasukkan ke dalam agenda dan buku acara. Ketua Kehormatan Institut Java meminta agar tarian itu bisa ditampilkan pada saat kongres. Namun, penari gagal datangkan karena saat itu masih terlalu jauh jarak antara Banyuwangi dan Bandung dan penari tidak terbiasa mempertunjukkan tari di luar daerah, ditambah masih ketatnya izin dari orangtua untuk melepaskan anak gadisnya, seperti halnya kasus gadis Priangan yang akan memainkan lakon “Lutung Kasarung.”

#### **Kongres Kebudayaan 1924**

Tiga tahun setelah Kongres Kebudayaan 1921, pada Desember 1924 diselenggarakan Kongres Kebudayaan lagi, di Gedung Kepatihan Yogyakarta. KK IV ini berlangsung pada 24-27 Desember 1924. Topik yang dibahas adalah sejarah bangunan kuno di Jawa dan manfaatnya bagi kehidupan dan pengembangan kebudayaan Jawa masa itu maupun masa yang akan datang. Dibahas pula mengenai cara bagaimana agar kebudayaan daerah mendapat perhatian lebih banyak dalam penyelenggaraan pendidikan. Kongres ini memandang penting muatan sejarah dan nilai yang terkandung dalam

bangunan-bangunan kuno tinggalan leluhur, bagi pendidikan anak negeri.

#### Pembahasan dalam Kongres

	Sesi I Penyajian Prasaran	Sesi II Penyajian Prasaran
Topik	Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri?	Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang?
Pemrasaran	1. W.D.P. Corporaal 2. Pastoor van Lith 3. M. Soeridiradja 4. R. Sasrasoeganda	1. Ir. K.J.H. Van Leeuwen 2. Dr. F.D.K. Bosch 3. dr. Radjiman 4. Ir. Maclaine Pont

Selain itu, diselenggarakan juga ceramah “De Prambanan Temple” (Candi Prambanan) di oleh F.D.K. Bosch. Ceramah kedua adalah “De waarde der Ietere Javaasche bouwkunst,” (Nilai Bangunan Jawa) oleh Ir. Thomas Karsten. Sebagai pelengkap, diselenggarakan *excursie* ke candi Prambanan dipandu oleh Lembaga Purbakala (Oudheid-kundige Dienst) dan ke Kota Gede dipimpin oleh Ir. Thomas Karsten dan Ir. H. Maclaine Pont.

Dalam ceramahnya, Dr. F.D.K. Bosch secara khusus membahas arti peninggalan sejarah dan purbakala bagi bangsa dan kebudayaan Indonesia saat itu maupun yang akan datang. Antara lain, ia mengemukakan pendapatnya bahwa arti yang penting sekali dari bangunan-bangunan kuno itu terkandung dalam tenaga dorongnya yang luar biasa untuk meluhurkan dan memberi inspirasi pada perkembangan kesadaran serta alam pikiran Indonesia. Ditegaskan oleh Bosch, betapa kelirunya orang yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah terputus hubungannya dari masa silamnya. Yang terjadi justru sebaliknya karena bangsa Indonesia sendirilah

yang memegang peranan utama dalam pembangunan candi-candi di Jawa ini. Menurut Bosch, tidak adalah jurang yang secara mutlak memisahkan masa sekarang dari masa silam. Ia sangat menekankan betapa pentingnya pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan purbakala itu untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah-sekolah menengah. Pandangannya pun menjadi perintis ke arah perkembangan baru ilmu purbakala Indonesia.<sup>31</sup>

**Dalil-dalil Prasaran Ir. A. van Leeuwen**

- a. Ketika pendidikan nasional Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada penghormatan, kebanggaan, dan pemuliaan warisan budaya lama yang telah bersemi, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai sejarah dan budaya Indonesia, saat itulah kesadaran nasional akan berkembang, didorong oleh kekuatan kesadaran berbangsa.
- b. Ketika Kesadaran Nasional terbangkitkan, warisan budaya bangsa akan menjadi pusat kehidupan dan mengilhami semua lapisan masyarakat sebagai sumber inspirasi.
- c. Ketika api inspirasi itu dinyalakan, maka semangat rakyat akan menggelora untuk menciptakan dan mengaktualisasikan cita-cita, dan akan mendorong maju kebudayaan bangsa atas dasar pengetahuan mereka yang didapat dari warisan budaya masa lalu.
- d. Dengan berlandaskan pada warisan budaya lama, akan lahir kebudayaan baru yang indah, sebagai wujud kejeniusan dan kekuatan masyarakat Indonesia.
- e. Arti kebudayaan lama (bukan wujudnya melainkan hakikatnya) adalah dasar lahirnya kebudayaan baru.

(Sumber: *Djawa*, 1924, hlm. 197.)

31. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977, hlm. 4.

Hal lain yang menarik dari kongres ini adalah masalah biaya penyelenggaraan, yang ternyata tidak tersedia banyak. Untuk meringankan beban panitia penyelenggara, antara lain telah disampaikan permohonan keringanan ongkos transportasi kereta api bagi peserta kongres. Permohonan itu dikabulkan oleh pihak Nederlandsch-Indie Spoorweg Maatschappij (NIS) dan Staatsspoorwegen (SS), perusahaan-perusahaan kereta api, sehingga kepada para peserta diberikan potongan (*reductie*) harga karcis sebesar 50%. *Reductie* itu berlaku sampai 1 Januari 1925, dengan cara menunjukkan bukti pemberian potongan itu kepada kondektur yang bertugas. Dalam sambutannya, Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut mengucapkan, "Atas nama Dewan Java-Instituut, terima kasih kepada dewan-dewan SS dan NIS atas keringanan yang diberikan kepada peserta dalam hal ongkos kereta api."<sup>32</sup>

#### Kongres Kebudayaan 1926

Kongres Kebudayaan V diselenggarakan di Surabaya pada 23-27 September 1926, tepatnya di Gedung Kesenian, Embong Malang, no. 63-65, Surabaya. Temanya adalah: bahasa, bumi, dan suku bangsa Jawa, Timur, dan Madura. Dalam kongres ini antara lain disajikan makalah tentang musik Hindu-Jawa; sejarah, musik, dan sastra Madura; dan makna sisa-sisa bangunan Majapahit. Laporan kongres dimuat dalam *Djawa* edisi 1927.

Penyajian prasaran Sesi I, pada 23 September 1926, disampaikan oleh dua orang yaitu: J. Kunst, tentang musik Hindu-Jawa khusus Jawa Timuran, dan J.S. Brandes Buys, tentang musik Madura, diikuti dengan demonstrasi menyanyi, menari, dan bermain musik. Sementara itu, penyajian prasaran Sesi II pada 24 September 1926 adalah: John Scholte dengan "Tari Gandrung Banyuwangi," Abdul Azis dengan "Meninjau Madura Zaman Dulu," dan R. Sosrodanoekoesoemo dengan "Kesusastraan dan Seni Budaya Madura."

---

32. *Djawa*, 1925, hlm. 150.

### Pokok Penting dalam Prasaran J. Kunst

Menurut J. Kunst, musik Jawa Timur menunjukkan perbedaan dengan musik Pasundan yang dikategorikan masih sederhana, tetapi justru karena itu sangat menarik. Instrumen yang terbuat dari bambu sangat mendominasi musik Sunda, seperti celempung, calung, angklung, rengkong, dan hatong, sedangkan di Jawa Timur musik dengan instrumen perunggu lebih beragam dan memiliki kesamaan dengan yang ada di lingkungan kerajaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Sementara itu, mengenai musik Hindu-Jawa tidak begitu banyak yang dapat disampaikan, tetapi dapat diidentifikasi terutama tentang instrumen yang dipakai dengan menyelidik relief candi, patung perunggu, terakota, dinding belanga perunggu, gong, dan naskah kuno dari tulisan Cina kuno, Jawa kuno, Bali, dan Sumatra.

Diselenggarakan pula ceramah dengan judul "Seni Budaya Jawa Timur" oleh Dr. W.F. Stutterheim. Pertanyaan yang muncul dalam kongres kemudian adalah: a) Nilai apa yang dimiliki monumen-monumen Jawa Kuno untuk kebudayaan Jawa masa kini dan masa datang? b) Dengan cara apa kebudayaan daerah dijadikan bahan ajar pendidikan anak negeri?

Hari-hari berikutnya diisi dengan acara kunjungan ke lapangan untuk melihat bekas kerajaan Majapahit dengan dipandu Ir. H. Maclaine Pont, ke pelabuhan untuk melihat berbagai jenis perahu Jawa Timur dan Madura, ke Pasar Tahunan (*Jaarmarkt*) yang memamerkan hasil seni kerajinan Jawa Timur dan Madura, serta ke Bangkalan untuk menyaksikan Karapan Sapi dan Lomba Layar dan Dayung.

Walikota Surabaya, Mr. Ir. G.J. Dijkerman, dalam sambutannya dalam pembukaan kongres menyatakan terima kasih atas diselenggarakannya kongres di Surabaya dan berharap kongres akan dapat menghidupkan kembali perhatian dan pengembangan kerajinan di Jawa Timur. Ia juga

mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mangkunegoro VII dan Ratu Timur, Residen Yogyakarta, Pekalongan, Pasuruan, Besuki, Madura, I Goesti Bagoes Djelantik, Raja Karangasem, anggota Volksraad (Dewan Rakyat), Wakil Susuhunan Surakarta, dan Sultan Yogya.

**Kutipan Sambutan Mr. Ir. G.J. Dijkerman, Walikota Surabaya**

“Suatu kepuasan karena, dengan diadakannya kongres di Surabaya, salah satu dari keinginan saya terwujud. Jawa Timur yang dikenal sebagai Java’s Oosthoek (Sudut Timur) dan khususnya kota Surabaya, sangat memerlukan kongres ini. Ketika pada zaman kebesaran kebudayaan Jawa bersinar di pusat-pusat kerajaan seperti Kediri, Singasari, Blambangan, dan terutama Majapahit, Surabaya telah memiliki tempat tersendiri di antara lainnya. Sedangkan Jawa Timur sendiri dalam banyak hal sekarang banyak mundur dibandingkan dengan Tanah Sunda dan Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.

Terus terang, Jawa Timur benar-benar bekerja keras dan terus melakukan kegiatan di bidang kebudayaan, tetapi dalam hal seni dan kerajinan tidak lagi memiliki tempat terhormat. Bagi para pengrajin kuningan yang dulu sangat terkenal, pengrajin seni batik, bahkan di bidang seni tari Jawa, sekarang tinggal sedikit dari kebesaran zaman dulu. Dan yang paling parah ialah bahwa tidak hanya masyarakat Eropa, bahkan penduduk asli sendiri sebagian besar tidak tahu betapa besar kejayaan masa lalu, dan kini hilang atau terancam akan hilang.

Syukurlah, ada tanda-tanda juga untuk Jawa Timur, akan terjadi perubahan yang baik. Dari banyak pihak diusahakan untuk menghidupkan kembali perhatian pada yang dulu, yang begitu tinggi tingkatannya. Berbagai karya seni penduduk asli, seperti ukiran, kerajinan kuningan, anyaman, baik, dsb., dengan segala kelebihan atau kekurangannya akan diusahakan demi menghidupkan kembali seni kerajinan, mengembangkan bakat seni

penduduk asli yang besar dan sekarang sedang ‘tidur ayam.’ Saya berpendapat bahwa seni dapat berkembang apabila didukung oleh semangat dan kegairahan hidup bangsa yang sedang berkembang. Seni berkembang kuat pada saat bangsa itu sedang dalam kondisi kuat. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyadarkan bangsa Indonesia (*Indonesische volkeren*) dan khususnya penduduk Jawa (*Java bevolken*) supaya memperhatikan masalah pengungkapan seni mereka sendiri. Apa yang masih tinggal dari kebesaran orang-orang Jawa Timur ialah kehebatan mereka sebagai pelaut yang gagah berani.

Benar juga bahwa pada zamannya orang-orang Jawa sebelum abad ke-17, dengan kapal-kapal mereka, berlayar sampai ke Tanjung Harapan (Afrika Selatan) dan Madagaskar. Juga pelaut besar dari Madura dan Bawean sangat penting artinya karena mereka berlayar sampai Banjarmasin dan Makassar. Bagi mereka, perahu sangat berarti dan sangat disayangi dan dibuat demikian baik dengan hiasan pada haluan dan buritannya. Barang siapa mengenal kegiatan pelaut di Jawa Timur, dan terutama di Madura, harus setuju dengan saya bahwa di dalamnya masih terdapat ungkapan atau simbol-simbol penting dari bumi kelahirannya, yang menjadi dasar yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan seni dan kerajinan yang dimilikinya. Karena itu, saya menganggap bahwa, lebih khusus untuk Jawa Timur, sekaranglah saatnya untuk mengembangkan bakat dan ekonomi masyarakat yang sedang tidur, dan juga saatnya menghidupkan kembali kegiatan seni.

Berbagai bidang studi tentang Indonesia mengkaji seni kerajinan dalam kegiatan mereka. Tetapi kegiatan kajian yang terbaik dan tertinggi maknanya hanya terdapat di Java-Instituut. Dan sekarang, di Surabaya, baik oleh Paguyuban Studi Indonesia maupun Ikatan Lingkaran Seni Budaya Jawa, dilakukan kajian dan kegiatan musik,

tari, dsb. Maka, kongres yang akan datang ini harus menghasilkan stimulasi kuat yang dapat mendorong munculnya kegiatan yang baik dan lebih banyak mengkaji dan mengungkapkan budaya dari waktu yang lalu.

Di samping ceramah-ceramah dan diskusi, harus diadakan juga penyelenggaraan pameran, karena hal ini sangat penting. Badan yang khusus menangani hal ini, dengan tujuan menggelar sebanyak mungkin hasil karya masa lalu dan sekarang, memungkinkan diadakannya kajian tentang faktor-faktor yang mencerminkan kejayaan masa lalu, yang harus diperhatikan dan dipertahankan dari pengaruh baru. Hal itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Satu pertanyaan, apakah tidak perlu sebagian dari pameran dibuat permanen, agar memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati di museum yang selalu terbuka untuk itu. Pertanyaan lagi, apakah tidak diinginkan untuk melakukan pendidikan kerajinan secara sistematis dan untuk itu dibuka sekolah kerajinan seni budaya?

Dan akhirnya mesti diadakan pameran-pameran model perahu, dan lebih baik diselenggarakan di pelabuhan Surabaya sehingga dapat menggugah perhatian tentang apa yang dihasilkan oleh penduduk pribumi dalam hal membangun kapal dan melayarkannya ke laut. Walau pelayaran di sungai-sungai sudah sangat berkurang diganti oleh transportasi darat, walau zaman kejayaan armada perahu di sungai sudah lewat, pelayaran di pantai, pantai penyeberangan, dan penangkapan ikan masih tetap menjadi faktor penting untuk pengembangan ekonomi pribumi yang mandiri. Dalam hal ini, sebuah perjalanan melalui kampung-kampung nelayan di pantai utara Madura lebih baik dibandingkan dengan yang terletak di pantai Sedayu dan Tuban. Di sana ada hidup, kekuatan, dan kegairahan hidup.

Bagian dari kinerja kongres di Surabaya, sebagai kota pusat perdagangan dan lalu-lintas laut tanah Jawa, bahkan Indonesia; Surabaya dengan tanah pedalaman, dengan penduduk bermata pencaharian bertani, sangat memerlukan alat transportasi darat dan air. Bagaimanapun juga, saya mengharapkan supaya kongres ini dapat mendorong diadakannya pengkajian dan latihan keahlian seni dan budaya sebagai bentuk pengungkapan kebahagiaan hidup.”  
(Sumber: *Djawa*, 1926. hlm. 179-181.)

### Kongres Kebudayaan 1929

Tidak banyak sumber yang bisa diandalkan dalam penelusuran sejarah Kongres Kebudayaan prakemerdekaan. Terkadang muncul temuan-temuan yang menciptakan kesangsian, misalnya ketika ditemukan data bahwa pada 1927 pernah diselenggarakan KK, seperti yang tertulis dalam buku *Java-Instituut dalam Foto* yang disusun oleh Jaap Erkelens. Di halaman empat buku tersebut, disebutkan secara singkat bahwa pada Desember 1927 diselenggarakan kongres di Yogyakarta dengan pokok bahasan tentang Arsitektur Jawa. Keterangan ini mengundang pertanyaan, karena dalam buku tersebut tidak ditemukan keterangan lebih rinci seperti halnya KK yang sebelumnya. Terlebih, majalah *Djawa* yang sejak awal aktif mencatat dan memberitakan semua kongres juga tidak memuat apa pun tentang penyelenggaraan KK 1927. Data yang ditemukan adalah Kongres Bahasa Jawa pada 1927. Jadi, apakah pada 1927 pernah diselenggarakan KK sebagaimana ditulis oleh Jaap Erkelens?

Majalah *Djawa* terbitan 1930, yang memuat sambutan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat selaku Ketua Java-Instituut, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-10 Java-Instituut pada 1929, juga sama sekali tidak menyebut tentang KK tahun 1927. Sebagai Ketua Java Instituut, Prof. Hoesein Djajadiningrat menyampaikan laporan tentang perjalanan lembaganya selama 10 tahun, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilannya sejak 1919 hingga 1929. Di dalamnya hanya disebutkan tentang penyelenggaraan KK 1919 di

Surakarta, 1921 di Bandung, 1924 di Yogyakarta, dan 1926 di Surabaya. Dengan ini, saya tetap berpegang pada pendapat bahwa KK VI adalah KK 1929.

#### **Satu Dasawarsa Java-Instituut**

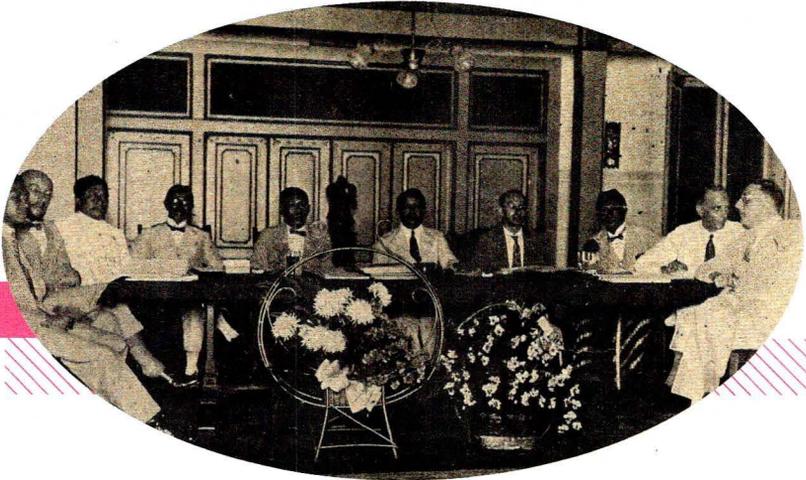
KK 1929 ini adalah kongres kelima yang diselenggarakan oleh Java-Instituut dan KK keenam, dihitung sejak kongres pertama 1918, dan diselenggarakan di Kepatihan Puro Mangkunegaran, Surakarta. Sebagaimana disebutkan di atas, kongres ini diselenggarakan sekaligus sebagai acara peringatan ulang tahun ke-10 Java-Instituut (1919-1929). Kongres 1929 bersifat khusus dan mendapatkan perhatian sangat besar dan sangat meriah, serta dihadiri banyak undangan baik dari kalangan pejabat, masyarakat, maupun pengusaha. Kongres membahas tentang pendirian perguruan tinggi jurusan sastra, filsafat, dan budaya Timur.

Dalam pidato sambutannya, B.K.P.A. Koesoemojoedo (Kepala Paprentahan Keraton Surakarta) sebagai panitia penerimaan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas pemilihan Solo sebagai tempat kongres. Ia juga mengatakan:

“...apabila diingat, 10 tahun yang lalu (1918) Kongres Kebudayaan Jawa diadakan di sini dan sebagai hasilnya berdiri Java-Instituut. Ingatan kita menerawang pada saat kelahiran lembaga ini. Betapa besar antusiasme pada pembicaraan topik dan betapa perhatian kita pada waktu itu. Java-Instituut telah berdiri 10 tahun dan kita percaya bahwa selama ini telah diuji penampilannya. Maka, harus dikatakan bahwa kongres ini dengan perhatian yang besar dari masyarakat merupakan tanda keberhasilan Java-Instituut dalam mengembangkan kebudayaan.”<sup>33</sup>

Selanjutnya dilaporkan bahwa besarnya perhatian terhadap kongres tidak hanya diungkapkan dengan kehadiran tetapi juga sumbangan dana dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran kerajinan emas dan perak, sumbangan tarian dari perkumpulan Mardi Laras, pembuatan taman untuk minum teh, dan pertunjukan permainan anak-anak. Memang sengaja ditampilkan pertunjukan permainan anak-anak Jawa karena dulu permainan merupakan faktor penting dalam pendidikan tetapi pada saat itu mulai diabaikan.

33. *Djawa*, 1930, hlm. 7.



Para anggota dewan pengurus Kongres Java Instituut 1929 di Kepatihan Mangkunegaran, Surakarta. (Dari "Verslag van het Vijfde Congres" dalam *Djawa: Tijdschrift van het Java-Instituut*, Th. 10, No. 1-2, 1930)

Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Ketua Java-Instituut menyampaikan terima kasih karena beberapa kali kongres yang diselenggarakan Java-Instituut telah dinilai sebagai prestasi dan mendapatkan sambutan dan perhatian besar dari masyarakat. Ia mengajak hadirin untuk berdiskusi tentang masalah kebudayaan Timur sambil memperingati 10 tahun berdirinya Java-Instituut. Dilaporkan pula tentang hasil-hasil yang dicapai oleh Java-Institut selama 10 tahun.

"Usia 10 tahun untuk sebuah perkumpulan belum termasuk lama, dan belum cukup lama untuk mengadakan peringatan secara besar-besaran. Ditambah lagi ada pertimbangan bahwa usaha Java-Instituut tidak selalu berhasil, setidaknya hasilnya yang bersifat langgeng. Memang benar dalam Anggaran Dasar telah ditetapkan bahwa tujuan Java-Institut adalah meningkatkan pengembangan kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, dalam arti kata yang seluas-luasnya,

namun pada umumnya sukar dan harus secara berangsur-angsur dan tidak langsung dapat memberikan pengaruh.”<sup>34</sup>

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan Bali menghadapi hambatan. Contoh yang disampaikan oleh Prof. Hoesein adalah masalah penerbitan majalah. Majalah *Djawa* terbit tahun 1921 lalu tiga bulan kemudian terbit majalah bahasa Jawa *Poesaka Djawi* dan bahasa Sunda *Poesaka Soenda*, yang disusul majalah bahasa Madura tahun 1924, *Poesaka Madoera*. Setelah beberapa kali terbit, *Poesaka Madoera* dihentikan, begitu pula *Poesaka Soenda*. Hanya *Poesaka Djawi* yang masih dapat bertahan, sementara *Djawa* yang berbahasa Belanda sudah mendapatkan tempat sebagai berkala ilmu pengetahuan dan budaya yang dikenal di luar negeri. Dengan demikian, majalah merupakan keberhasilan kecil Java-Instituut.

Keberhasilan lain yang dicapai oleh Java-Instituut selama sepuluh tahun adalah penyelenggaraan Kongres Kebudayaan (1919, 1921, 1924, dan 1926) dan Kongres Bahasa Jawa dan Sunda (1924 dan 1927). Tercatat juga penyelenggaraan berbagai pameran benda hasil kerajinan yang terbuat dari emas, perak, kayu, anyaman, dan seni ukir, serta berbagai pertunjukan kesenian. Program yang dianggap masih menjadi “utang” Java-Instituut adalah penelitian tentang kerajinan dan pertukangan serta tata cara pergaulan di lingkungan bumiputra, karena belum dapat diselesaikan.

### Susunan Kepanitiaan Kongres

Posisi	Nama
Pelindung	Sri Paduka Susuhunan Surakarta
Ketua Kehormatan	Prof. Dr. B.J.O. Schrieke Raden Adipati Djojonegoro
Ketua Kongres	Prof. Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat S. Koperberg

34. *Djawa*, 1930, hlm. 87.

Bidang Umum	B.K.P.A. Koesoemojoedo
Ketua	R.M.A. Woerjaningrat
Sekretaris	K.P.A. Hadiwidjaja, R.T. dr. Wediadinigrat, Dr.
Anggota	Soemeroe, R. Ng. Doetadilaga, M. Ng. Jasawidagda, J.E. Van Naersen
Bidang Penerimaan	
Ketua	M. Ng. Jasawidagda
Sekretaris & Bendahara	Hr. Soehoed A.W. Karjasa, Hr. Hadisepoetra, Hr. Sasrasoedigda,
Anggota	M. Ng. Hardjasoekasta, M. Ng. Tjitrahoebaja
Bidang Logistik	
Ketua	Dr. Soemeroe
Sekretaris	S. Sastrakarjana
Anggota	R.S. Koesoemadirdja, R. Ng. Sarasoedaka
Bidang Pameran	
Ketua	K.P.A. Hadiwidjaja
Sekretaris	J.E. Van Naersen
Anggota	KPA. Soerjaamidjaja, M. Ng. Tjitrahirandja, Dr. L. Adam, dan Ir. J.L. Moens

Dari susunan panitia kongres tampak sekali semua bidang kegiatan telah dipegang sendiri oleh kaum terpelajar bumiputra. Demikian pula, dalam penyajian makalah para cendekiawan dan budayawan pribumi telah banyak mengambil peran.

#### **Perdebatan dalam Kongres**

Penyajian prasaran dan debat dimulai pada 28 Desember 1929. Topik utama berjudul Pengajaran Kesusastraan Timur di Perguruan Tinggi, yang dibahas

oleh tiga orang pemrasaran, yaitu: Dr. G.W.J. Drewes, DR. S.J. Esser, R.A.A. Soejono, dan L. van Rijckevorsel. Beberapa pertanyaan mendasar diajukan oleh L. van Rijckevorsel: (1) Haruskah dilakukan pengajaran kesusastraan Timur dan filsafat di perguruan tinggi di Hindia Belanda? (2) Haruskah dilakukan pengajaran sejarah? (3) Apa tujuan praktis dari pengajaran itu? Perdebatannya berlanjut hingga 29 Desember 1929. Sebelum ditutup, disampaikan ceramah tentang perlunya menguasai kepandaian membuat barang-barang seni.

#### Dalil-dalil Prasaran R.A.A. Soejono

- a. Studi dalam bahasa tertentu akan menjadi yang paling tepat, di mana bahasa itu adalah bahasa nasional.
- b. Verifikasi bahasa Indonesia diperlukan agar bisa memenuhi tuntutan waktu. Selain itu, sejauh menyangkut bahasa Jawa, harus dilakukan pertimbangan serius apakah penyederhanaan memang diinginkan—terutama dengan membatasi jumlah bahasa hingga satu saja, bahasa Krāmā?
- c. Dalam pengayaan dan pengembangan bahasa-bahasa ini, di samping Kantor Sastra Rakyat dan Kantor Linguistik yang mungkin perlu didirikan, sebuah pusat studi mengenai bahasa nasional yang didominasi bumiputra akan dapat berguna bagi kebutuhan-kebutuhan terkait pertanian.
- d. Dengan pengajaran bahasa, sebanyak mungkin orang harus dipercayakan dengan pengetahuan alami tentang bahasa.
- e. Suatu ujian oleh sebuah fakultas sastra Hindia yang akan didirikan di negara mereka sendiri, Hindia Belanda, bolehlah, dibuat wajib: kemahiran penggunaan bahasa secara tertulis dan lisan dipilih sebagai subjek utama.

- f. Untuk tingkat yang lebih tinggi, B.B. semakin lama menjadi sebuah pelatihan akademik; maka, direkomendasikan adanya sebuah studi Indonesia di Hindia, yang didasarkan pada penyatuan fakultas hukum dan sastra.
- g. Pembentukan fakultas sastra Indonesia di Hindia tidak hanya diinginkan tetapi, dengan memperhatikan tersedianya jumlah guru yang sesuai untuk guru dan materi studi yang tersedia secara luas di Masyarakat Batavia, juga mungkin.

(Sumber: *Djawa*, 1938, 286).

#### **Dalil-dalil Prasaran Dr. G.W.J. Drewes**

- a. Penciptaan kesempatan atas pendidikan sastra dan filsafat Timur, yang sebelumnya berulang kali diadvokasikan berdasarkan pertimbangan ideal di pengadilan, telah sepenuhnya memenuhi keabsahannya dan menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.
- b. Pendidikan ini akan terwujud sebaik-baiknya dengan sendirinya di Fakultas Sastra yang independen, dan jika mungkin dipersatukan dengan sekolah menengah Batavia dan di universitas.
- c. Sesuai dengan tujuan semua perguruan tinggi, Fakultas Sastra yang baru dibentuk harus melatih siswa mempraktikkan mata pelajaran mereka, yaitu ilmu budaya Hindia, secara mandiri. Dengan demikian, pandangan mereka tidak hanya terfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada realitas hidup saat ini sehingga pendidikan itu juga dapat digunakan untuk membentuk dan mempersiapkan segala jenis ikatan sosial.
- d. Dengan pemikiran ini, pendidikan di Fakultas Sastra di Batavia pada prinsipnya mesti mencakup hal-hal yang sama dengan yang ditentukan dalam Statuta Akademik Belanda untuk kajian dalam Linguistik dan Sastra Hindia Timur Nusantara, namun

- menghindari perbedaan yang terlalu besar dan kelemahan yang menciptakan jurang dalam pendidikan bumiputra.
- e. Kombinasi Fakultas Sastra dan pusat studi bahasa dan etnologi, seperti yang diumumkan dalam pidato Gubernur Jenderal saat membuka pertemuan Dewan Rakyat yang terakhir, akan memanfaatkan sepenuhnya pendidikan yang akan diberikan, dan oleh karena itu dapat disambut dengan sangat baik.
  - f. Dalam perancangan pembentukan biro linguistik ini, perangkat modern untuk penelitian bahasa yang eksperimental jangan dihapuskan demi kepentingan pendidikan.
- (*Djawa*, 1938: hlm. 287).

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara yang juga hadir di kongres menyampaikan tanggapan, khususnya atas prasaran L. van Rijckevorsel dan R.A.A. Soejono. Dalam *Djawa*, Th. X, Januari 1930, dimuat laporan stenografi dalam bahasa Belanda tentang tanggapan itu, yang berkenaan dengan adat dan bahasa, terutama bahasa Indonesia. Cuplikan terjemahan steno tersebut adalah sebagai berikut:

“Pembicara [Ki Hajar Dewantara] memulai pidatonya dengan menyatakan kekaguman terhadap pemrasaran yang dengan kata-kata berapi-api menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia oleh dunia cendekiawan dan merasa terharu akan adanya kenyataan bahwa telah ada sementara orang Eropa yang mulai mengerti jiwa orang Jawa dan mulai mendekatinya. Misalnya Pastoor van Rijckevorsel. Pembicara berpendapat, bahwa dari prasaran dan keterangannya telah bisa dimengerti, bahwa ia (R) lebih mengerti orang Jawa dan jiwa orang Jawa daripada banyak orang lain. Ini terutama dinyatakan oleh Pastoor van Rijckevorsel dengan menyatakan bahwa kita terutama harus bekerja dengan bahasa hidup. Tetapi pembicara berpendapat bahwa orang-orang Jawa telah mampu menetapkan sendiri materi hidup bagi bahasa mereka, sehingga dengan demikian dengan senang hati mereka ingin memikul sendiri tanggung jawabnya.

Dengan pembicaraannya tentang penyederhanaan bahasa Jawa, yang telah dikupas juga oleh Tuan Sujono, sebetulnya Dr. Radjiman telah mendahului maksud

pembicara. Berlawanan dengan gerakan Jawa Dwipa, pembicara berpendapat, bahwa usaha Tuan Sujono untuk meniadakan Jawa Ngoko dan menyederhanakan bahasa Krama, yang disebut gerakan Krama Dewa itu, kurang memperhatikan kenyataan, sebab bahasa Jawa telah berkembang sedemikian rupa hingga orang Jawa menganggap bahwa adanya kedua macam bahasa itu merupakan suatu kekayaan, hingga orang tak akan mudah menyederhanakannya.

Selanjutnya, pembicara sependapat dengan Tuan Sujono ialah bahwa kesukaran dalam penggunaan bahasa merintangi evolusi bangsa. Pergerakan Jawa Dwipa, kata pembicara selanjutnya, adalah suatu gerakan rakyat demokratis. Rakyat sekali bangun, merasa bahwa dengan adanya kedua bahasa semangat demokrasi kurang dapat kesempatan untuk bergerak secara leluasa; oleh karenanya ia terpaksa mempergunakan Jawa Dwipa. Demikian pula halnya dengan gerakan Krama Dewa. Itu adalah suatu pernyataan kaum bangsawan.

Bila orang ingin mencapai hasil-hasil yang lebih baik mengenai evolusi rakyat, hendaknya orang lebih memperhitungkannya dengan kenyataan. Mereka yang mengira bahwa pembicara adalah seorang idealis, hendaknya sekarang maklum, bahwa ia adalah seorang realis. Nah, bahasa itu adalah suatu bagian dari adat dan bila adat itu berubah, bahasa pun akan berubah juga. Kini telah tampak gejala-gejala ke arah perubahan itu. Kini dengan sadar rakyat telah mulai meniadakan beberapa bentuk adat dan dengan demikian akan hilang pulalah bentuk-bentuk bahasa kuno sedikit demi sedikit. Sederhanakanlah bentuk-bentuk adat dan dengan begitu saudara dengan sendirinya menyederhanakan bahasa.

Pembicara memberikan pertimbangan, agar demi kepentingan penyederhanaan adat itu Java-Instituut suka menghubungi Pemerintah dan memohon agar Pemerintah melarang segala macam bentuk adat yang beku, yang merintangi jalannya evolusi. Hal ini bukanlah melulu pendapat pembicara, melainkan juga pendapat seorang kolega Tuan Soejono di Jawa Timur, sebab Pemerintah telah memberitahukan melalui Residen, bahwa sirkuler Bupati Probolinggo mendapat simpati Pemerintah. Oleh karena pembicara di sini menganjurkan lenyapnya segala macam bentuk adat yang merintangi, maka sebetulnya ia adalah juru bicara Pemerintah. (Tawa, tepuk tangan).

Selanjutnya, diusulkan agar Pemerintah mewajibkan para pegawai, insinyur, guru-guru, terutama kepala-kepala sekolah HIS untuk mengenal satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka yang karena jabatannya bergaul dengan rakyat, haruslah mengenal bahasanya, sebab tanpa itu mereka hanya akan dapat mengenal bagian

luarnya saja dan tidak mungkin lebih mendalam lagi.

Bila orang ingin agar pelajaran bahasa itu hidup, hendaknya orang dapat melihat bahasa itu sebagai alat kebudayaan rakyat yang hidup, dan bila segala proses kematian, maka dengan begitu evolusi bisa dipupuk. Pembicara menekankan pentingnya usaha untuk membasmi kebiasaan-kebiasaan yang sudah usang, dan segala yang merintang jalannya evolusi.”

(Sumber: Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan II*, 1994, hlm. 285-287)

### Kongres Kebudayaan 1937

KK VII diselenggarakan di Pulau Bali. Jarak waktu penyelenggaraan antara KK VI (1929) dan KK VII (1937) cukup lama, yaitu delapan tahun, bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres sebelumnya. Penyebabnya, pada awal 1930-an pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis keuangan, masa yang lebih dikenal dengan sebutan “zaman malaise.” Pemerintah terpaksa melakukan penghematan di berbagai bidang kegiatan. Di samping itu, ada faktor lain yang menyebabkan absennya kegiatan kongres, yaitu politik menjelang pecahnya Perang Dunia II.

Setelah lama tidak diadakan, ada yang istimewa dengan kongres kali ini. Para peserta dari Jawa datang ke Bali dengan menggunakan kapal laut bernama *Op ten Noort*. Karena pelabuhan Padangbai tidak terlalu dalam, sementara ukuran dan bobot kapal cukup besar, terpaksa kapal tidak merapat ke tepi dermaga pelabuhan. Para peserta diangkut dengan sekoci menuju daratan. Yang menarik, peserta selama mengikuti kongres tidak menginap di hotel atau penginapan, tetapi di atas kapal tersebut. Di atas kapal itu pula sebagian dari kegiatan kongres dilaksanakan.

Lebih jauh lagi, berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya, KK 1937 di Bali lebih banyak diisi dengan pidato, ceramah, dan kunjungan ke berbagai tempat penting dan pameran. Para peserta, misalnya, mengunjungi Kertagosa dan pameran barang-barang seni di Klungkung. Mereka melihat-lihat Pura Besakih dan makan siang di Puri Karangasem kemudian meninjau pameran kerajinan, antara lain ukiran kayu dan tenun dari, Tenganan serta

menikmati tarian Legong, Rejang, dan lakon “Calon Arang.” Berikutnya, mereka meninjau Goa Gajah, Jeh Pulu, Pura Pejeng, dan Gunung Kawi, dipandu oleh arkeolog Dr. W.F. Stutterheim. Di Pura Gelgel, peserta menyaksikan pameran seni kerajinan tenun dari Kamasan dan Nusa Penida, kerajinan perak dari Kamasan, dan kerajinan besi, sekaligus menonton tari Janger dan Barong. Tak lupa, mereka mengunjungi Museum Bali dengan dipandu oleh Ir. T. Resink dan menonton fragmen tari Ramayana sebelum makan siang di Hotel Bali.

Acara makan malam perpisahan diselenggarakan di atas kapal *Op ten Noort*, sembari diiringi dengan pertunjukan musik Bali, konser piano, dan pameran lukisan oleh Colin McPhee dan Walter Spies. Pada 24 Oktober 1937, dengan kapal tersebut, peserta meninggalkan Padangbai menuju Surabaya.<sup>35</sup>

#### Tentang Colin McPhee

Colin McPhee adalah seorang komposer dan etnografer kelahiran Kanada (1900) yang tinggal di New York. Setelah mendengarkan piringan hitam gamelan Bali yang dibuat oleh perusahaan rekaman The Odeon pada 1920, Colin McPhee muda sangat tertarik dan ingin sekali mendengarkan langsung musik itu. Ia datang ke Bali 1931 dan kemudian tinggal di Bali untuk mempelajari gamelan, sampai 1939. Bertiga dengan antropolog Margaret Mead dan pelukis Walter Spies, ia ikut berjasa dalam mendorong pengembangan gamelan di Bali. Pada 1936 ia mendapat Pulitzer Prize di bidang musik. Colin McPhee meninggal 1964 beberapa minggu setelah menyelesaikan karya besarnya yang berjudul “Music in Bali.”<sup>36</sup>

Penyajian makalah hanya ada dua, yaitu “Bangunan Tua di Bali,” yang disampaikan oleh Dr. W.F. Stutterheim dan “Bangunan Pura di Bali” oleh Dr. R.

35. *Djawa*, 1938, hlm. 1.

36. Michael Tenzer, *Balinese Music* (Singapura: Periplus Editions, 1991), hlm. 16-17.

Goris. Sambutan-sambutan diberikan oleh Ketua Java-Instituut, Prof. Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat, Residen Bali dan Lombok, wakil Susuhunan Kraton Surakarta, Wakil Sultan Yogyakarta. Ada pula uraian berjudul "Kehidupan Sosial Masyarakat Bali," oleh Bupati Karangasem dan "Kehidupan Keluarga Masyarakat Bali," oleh Bupati Gianyar. Ceramah utama, berjudul "Kerajinan dan Perkembangannya di Bali," disampaikan oleh Ir. P.H.W. Sitsen. Dalam kesempatan itu, peserta mendapat penjelasan tentang keanekaragaman dan keunikan seni kerajinan Bali.

Ir. P.H.W. Sitsen menguraikan berbagai cabang perkembangan seni kerajinan di Bali. Bagian yang disorot adalah seni kerajinan tenun (*weefnijverheid*), seni ukir kayu (*houtsnijkunst*), seni yang berkaitan dengan pekerjaan logam (*edel-metaal-bewerking*), seni kerajinan (*houtsnijnijverheid*), seni kerajinan perak (*zilvermeden*), pekerjaan besi (*ijzerbewerking*), dan pekerjaan kulit (*leer-bewerking*). Selanjutnya oleh Sitsen juga disinggung tentang pengaruh perkembangan seni kerajinan tersebut dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Bali, terutama lewat turisme. Pada saat itu, Pulau Bali telah dikenal di mancanegara dan banyak turis yang datang ke Bali. Disebut-sebut bahwa jumlah turis yang datang ke Bali pada 1936 sebanyak 3000 orang, dan pada 1937 meningkat menjadi 5.000 orang. Mereka datang ke untuk menikmati keindahan alam dan keunikan budayanya sembari berbelanja barang-barang seni Bali. Maka, Sitsen menyarankan agar seni kerajinan di Bali terus didorong perkembangannya dan jangan sampai terhambat karena beban pajak. Sementara itu, tata teknis dan tata ekonomi dalam seni kerajinan perlu diatur guna menjadi arahan dalam mengembangkan seni kerajinan Bali. Perlu didirikan sebuah museum yang merupakan bagian dari Museum Bali guna memamerkan produksi kerajinan Bali.

### Kesimpulan Paparan Ir.P.H.W. Sitsen

- a. Diperlukan suatu cara untuk merangsang tumbuhnya industri kerajinan di Bali, untuk menghilangkan tekanan ekonomi yang mengancam budaya tertentu di Bali.
- b. Pengembangan industri kerajinan yang dimulai di kalangan masyarakat Bali dapat didorong lewat pengenalan masyarakat Bali dengan produksi barang di tempat lain.
- c. Perlu didirikan lembaga, misalnya sebuah divisi Museum Bali untuk pameran produksi, yang dapat meningkatkan kegiatan kerajinan Bali.
- d. Perlu disediakan informasi teknis dan komersial untuk cabang industri yang akan dikembangkan.
- e. Harus disediakan sumber pengetahuan lokal agar bisa digunakan sebagai rangsangan untuk peningkatan mutu kerajinan Bali. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas harus dibentuk unit konsultasi dengan komisi industri Bali.
- f. Agar tugas industri yang ada berkembang, pasokan bahan baku harus dipelajari dan diatur.
- g. Untuk menjaga kualitas produksi industri untuk ekspor, penjualan dengan sertifikat direkomendasikan.

(Djawa, 1938, 10.)

Salah satu hasil nyata diselenggarakannya KK 1937 di Bali adalah berdirinya Bali Instituut dan Balai Kirtya di Singaraja yang berhasil menyelamatkan lebih dari 6.000 lontar. Berkat adanya koleksi lontar inilah ahli sastra Jawa Zoetmulder dapat menghasilkan *magnum opus*-nya, yang berjudul *Kalangwan*. Lontar-lontar yang memuat karya Mpu Tantular, Mpu Sedah, dan Mpu Tanakung diselamatkan di tempat itu.<sup>37</sup>

37. *Tempo*, 2 November 2004.

### Catatan tentang Kapal *Op ten Noort*

Pada 12 Februari 1927, perusahaan kapal Nederlandsche Scheepsbouw Mij secara resmi meluncurkan kapal laut yang diberi nama *Op Ten Noort*, artinya 'berlayar ke utara.' Tak seperti namanya, kapal ini kemudian beroperasi di wilayah Selatan, yaitu di perairan Hindia Belanda, meliputi wilayah-wilayah Singapura, Bangkok, Saigon, Manila, Belawan, Deli, Muntok, kepulauan Maluku, Bali, dan tentu saja Batavia. *Op ten Noort* menjadi kapal pesiar yang terkenal karena tergolong mewah pada zamannya. Pada 1937, ketika Bali dipilih oleh Java-Instituut sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Kebudayaan, kapal ini dipilih sebagai wahana transportasi dan akomodasi para peserta kongres.

Di atas kapal ini, penumpang dimanjakan untuk dapat menikmati kemewahan. Tata ruang untuk Kelas Satu dilengkapi dengan *lounge*, bar, ruang merokok, dan beranda untuk menikmati udara dan alam tropis. Selain itu, juga ada dua ruang "Suite Deluxe" yang terletak di depan, yang juga dilengkapi dengan *lounge*, kamar tidur, kamar mandi pribadi, dan dek pribadi yang luas, dengan dinding, lemari, dan perabotan yang semuanya dibalut kayu-kayu kenari gelap, serta lantai berkarpet Persia yang terbaik. Kelas Satu memiliki 130 kabin, baik untuk dua orang ataupun satu, ditambah empat kamar suite, sehingga total ada 134 kabin. Selain itu, *Op ten Noort* juga dilengkapi dengan ruang yang disebutnya *tweendeck*, untuk melayani penumpang jarak pendek yang melakukan perjalanan antarpelabuhan di sepanjang pantai Indonesia. Meskipun harga karcisnya rendah, fasilitas yang disediakan sangat memadai, termasuk 10 jendela untuk melihat pemandangan di luar.

Kapal ini dalam sejarahnya ternyata juga terkait dengan penyair Angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional, Tengkoek Amir Hamzah. Saat belajar di AMS di Surakarta sekitar 1930, Amir terlibat dengan gerakan kaum nasionalis dan memancing

kekhawatiran Belanda. Pihak Belanda lalu mendekati pamannya, Sultan Langkat, dan meyakinkan agar Sultan menarik Amir kembali ke Langkat. Bagi Amir Hamzah, perintah sang paman sekaligus walinya itu sulit untuk ditolak. Pada 1937, Amir bersama dengan dua pengawalnya naik ke atas *Op ten Noort* dari Tanjung Priok untuk kembali ke Sumatra. Setelah tiba di Langkat, ia diberitahu bahwa ia akan dinikahkan dengan putri tertua Sultan Langkat, Tengko Poeteri Kamiliah, seorang wanita yang hampir tak pernah ia temui sebelumnya. Sebelum pernikahannya, Amir sempat kembali ke Batavia untuk menghadapi ujian terakhirnya—sekaligus mengatur sebuah pertemuan terakhir dengan seorang putri bernama Soendari, wanita yang dicintainya.

Bagaimana nasib *Op ten Noort*? Memasuki 1940-an, kondisi politik dunia mulai memanas. Jerman di bawah pemerintahan Adolph Hitler telah membangun militer yang kuat dan ingin menguasai Eropa. Di Asia, Jepang tampil sebagai negara yang ingin menguasai Asia. Pada 1942, Jepang mendarat di Hindia Belanda. Menghadapi situasi yang diprediksi akan sulit itu, pada Desember 1941 pemerintah Belanda mengambil alih *Op ten Noort*, dan oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda kapal itu disulap menjadi kapal rumah sakit. Pekerjaan reparasi dilangsungkan di Surabaya. Pada 22 Januari 1942, pemerintah Belanda secara resmi memberitahu Kementerian Luar Negeri Jepang melalui Kedutaan Besar Swedia di Tokyo bahwa status *Op ten Noort* secara resmi telah berubah menjadi kapal rumah sakit. Bulan berikutnya, tepatnya pada 19 Februari 1942, para pekerja di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya menyelesaikan tugas mereka merombak kapal. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan kapal rumah sakit selesai dibangun.

Pada Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara. Kapal rumah sakit menjadi salah satu aset yang disita Jepang. Pada 5 Juni 1942, nama kapal itu diganti menjadi

menjadi *Tenno Maru*, yang berarti 'Lingkar Kaisar.' Statusnya tetap kapal rumah sakit. Yang menarik, ketika tentara Sekutu mulai dapat menguasai keadaan dan Jepang mendapat tekanan, nama kapal diganti lagi menjadi *Hikawa Maru No. 2* pada 25 Oktober 1944. Beberapa bagiannya pun diubah, misalnya corong asli diperbesar dan cerobong asap tiruan dibuat sehingga tampak seolah kapal memiliki dua cerobong asap. Hal ini diikuti dengan pengumuman kepada Sekutu bahwa kapal *Tenno Maru* telah tenggelam.

Pada 17 Agustus 1945, hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dua hari setelah Jepang menyerah, *Hikawa Maru No. 2* berangkat dari pelabuhan Maizuru, Kyoto, menuju Teluk Wakasa. Di teluk itulah *Hikawa Maru No. 2* sengaja diledakkan dan tenggelam. Dengan demikian, berakhirlah kisah *Op ten Noort*.<sup>38</sup>

### **Kesimpulan**

Dari sejarah penyelenggaraan seluruh KK sebelum Indonesia merdeka, tampak jelas betapa besarnya perhatian kaum terpelajar terhadap permasalahan kebudayaan bangsa. Seiring dengan bangkitnya kesadaran berbangsa, tumbuh pula kesadaran untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Melalui forum kongres, mereka berdebat menyampaikan pandangan-pandangan tentang konsep, strategi dan kebijakan pembinaan, pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kebudayaan. Di samping kaum terpelajar, para raja dan bangsawan di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan Bali juga tidak mau ketinggalan. Besarnya perhatian mereka ditunjukkan dengan kesediaan menjadi pelindung dan bahkan hadir dalam setiap penyelenggaraan kongres. Sementara itu, berbagai keputusan kongres terbukti dengan cepat dan cermat direalisasikan, dengan hasil yang masih dapat kita lihat dan rasakan hingga sekarang. Keberadaan lembaga-lembaga seperti museum, fakultas sastra, jurusan-jurusan bahasa, sejarah, filsafat, sekolah kerajinan, pelajaran sejarah, bahasa asing, dsb. adalah sebagian dari hasil KK sebelum Indonesia merdeka.

38. Diakses dari <http://www.ssmaritime.com/SS-Op-Ten-Noort.htm>.

Hal lain yang patut dicatat adalah pandangan kaum terpelajar terhadap Pemerintah Hindia Belanda dalam mengurus kebudayaan bangsa yang dijajahnya. Pemerintah Hindia Belanda telah banyak melakukan kegiatan dalam upaya memelihara, memajukan, dan mengembangkan kebudayaan, namun oleh kaum pribumi upaya ini tetap dipandang sebagai upaya memecah-belah bangsa secara sistematis melalui pendekatan budaya. Tampilnya kaum terpelajar bumiputra pada saat itu membuktikan bahwa mereka memiliki kepekaan tinggi terhadap nasib budaya mereka. Sikap yang ditunjukkan oleh Pangeran Prangwadono ketika ia menolak perintah Batavia kepada pengurus BO cabang Surakarta, untuk menyelenggarakan Kongres Bahasa Jawa, dan menggantinya menjadi Kongres Kebudayaan Jawa, menunjukkan bahwa mereka tidak menerima begitu saja perintah pusat (Batavia). Pendirian Java Instituut dan lain-lain pun dipandang sebagai upaya memecah-belah kesatuan. Pandangan itu datang antara lain dari Ki Hadjar Dewantara:

“Di jaman Belanda kita dipecah-pecah secara sistematis, hingga daerah yang satu dijauhkan dari daerah yang lain. Usaha memajukan kebudayaan oleh Belanda itu sungguhpun sudah diadakan, namun nampak jelaslah maksudnya, yaitu untuk ‘memurnikan’ kebudayaan-kebudayaan daerah-daerah masing-masing. Untuk itu didirikan Java-Instituut, di samping ada Batak Instituut, ada pula Bali Instituut, dan lain-lain.”<sup>39</sup>

Setelah kongres di Bali berakhir, tidak ada lagi KK berikutnya yang dikoordinasikan oleh Java-Instituut hingga lembaga ini bubar demi hukum pada 4 Agustus 1948. Kondisi politik dan sistem pemerintahan di wilayah Nusantara mengalami perubahan total. Berkat perjuangan gigih dalam bidang budaya, melalui kongres demi kongres, berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah itu, mulai tanggal 17 Agustus 1945, menjelma menjadi bangsa dan negara Indonesia yang bebas dan merdeka. Bebas karena terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain dan merdeka untuk mengatur penanganannya masalah kebudayaannya. Meskipun Java-Instituut dan

---

39. Ki Hadjar Dewantara, *Kebudayaan*, cetakan II (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1994), hlm. 98.

lembaga kebudayaan lain bentukan penjajah belum dibubarkan (antara lain Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Oudheidkundige Dienst, Bataviaasch Kunstkring, dll), aktivitasnya menurun. Penerbitan majalah *Djawa* sebagai corong aktivitas Java-Instituut hanya dapat bertahan hingga 1941.

Setelah berabad-abad menguasai wilayah Nusantara, Belanda pada 7 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat, harus menyerahkan wilayah itu kepada Jepang. Indonesia ganti dijajah oleh Jepang. Langkah yang dilakukan Jepang dalam bidang kebudayaan adalah membentuk Keimin Bunka Sidosho atau Pusat Kebudayaan pada 1 April 1943. Tujuannya adalah membangunkan dan memimpin kebudayaan, serta memelihara kesenian klasik dan kesenian asli Indonesia.<sup>40</sup>

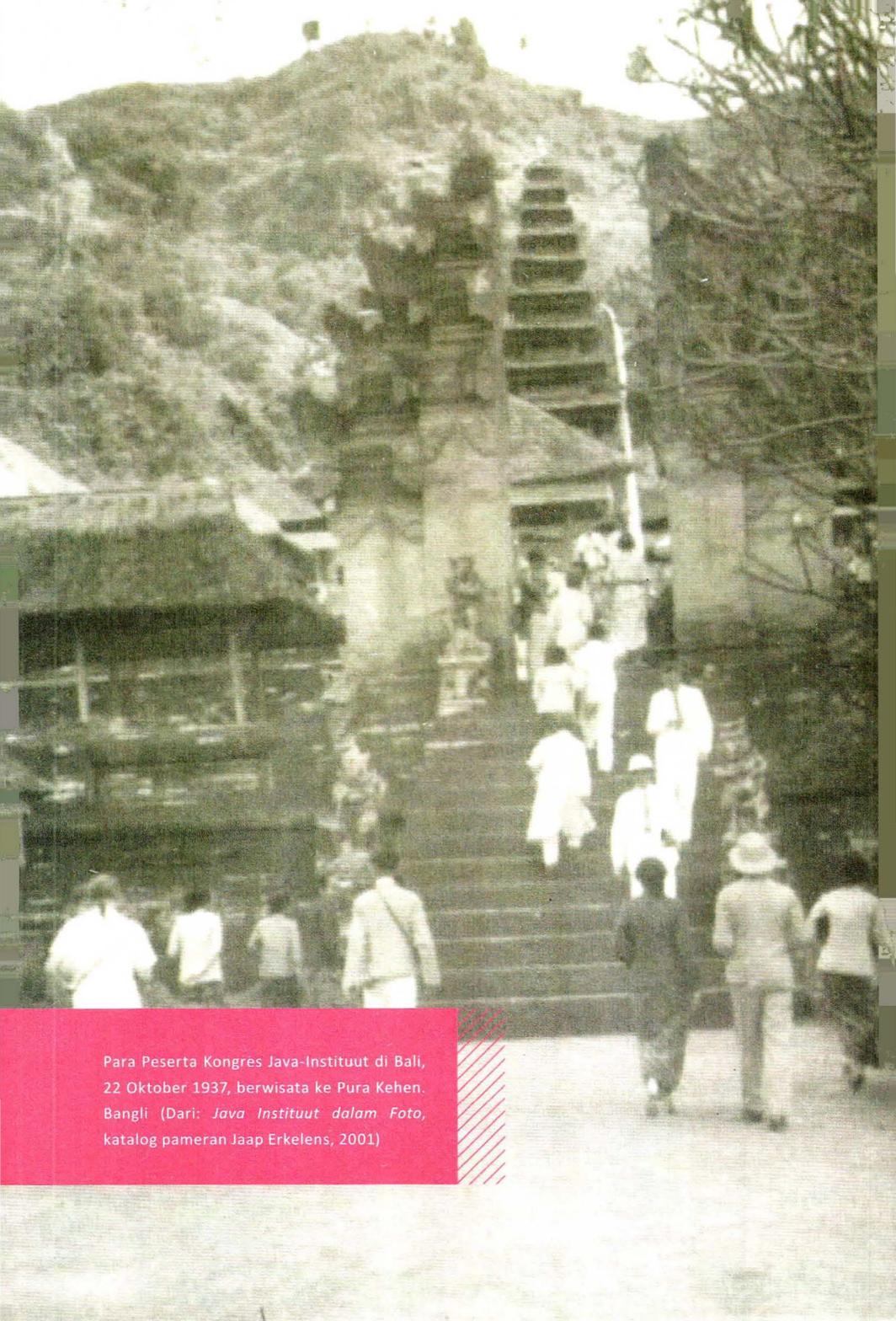
Jepang mempunyai perhatian besar terhadap pelestarian kebudayaan bangsa, tetapi pada masa pendudukannya tidak sempat diselenggarakan KK. Pada 1945 Jepang dikalahkan oleh Sekutu dan sejak 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki babak baru sebagai bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia secara bebas dapat menyusun konsep, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan kebudayaannya, dengan bermodalkan hasil dari tujuh KK yang pernah diselenggarakan dan ditangani sepenuhnya oleh kaum terpelajar bumiputra Indonesia.

---

40. *Jawa Baroe*, no. 8, th, 2603 (1943), hlm. 8



Ketua Java-Instituut, Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat bersama istri di Kongres di Bali, Oktober 1937. (Dari Jaap Erkelens, *Java Instituut dalam Foto*, 2001.)



Para Peserta Kongres Java-Instituut di Bali,  
22 Oktober 1937, berwisata ke Pura Keihen.  
Bangli (Dari: *Java Instituut dalam Foto*,  
katalog pameran Jaap Erkelens, 2001)

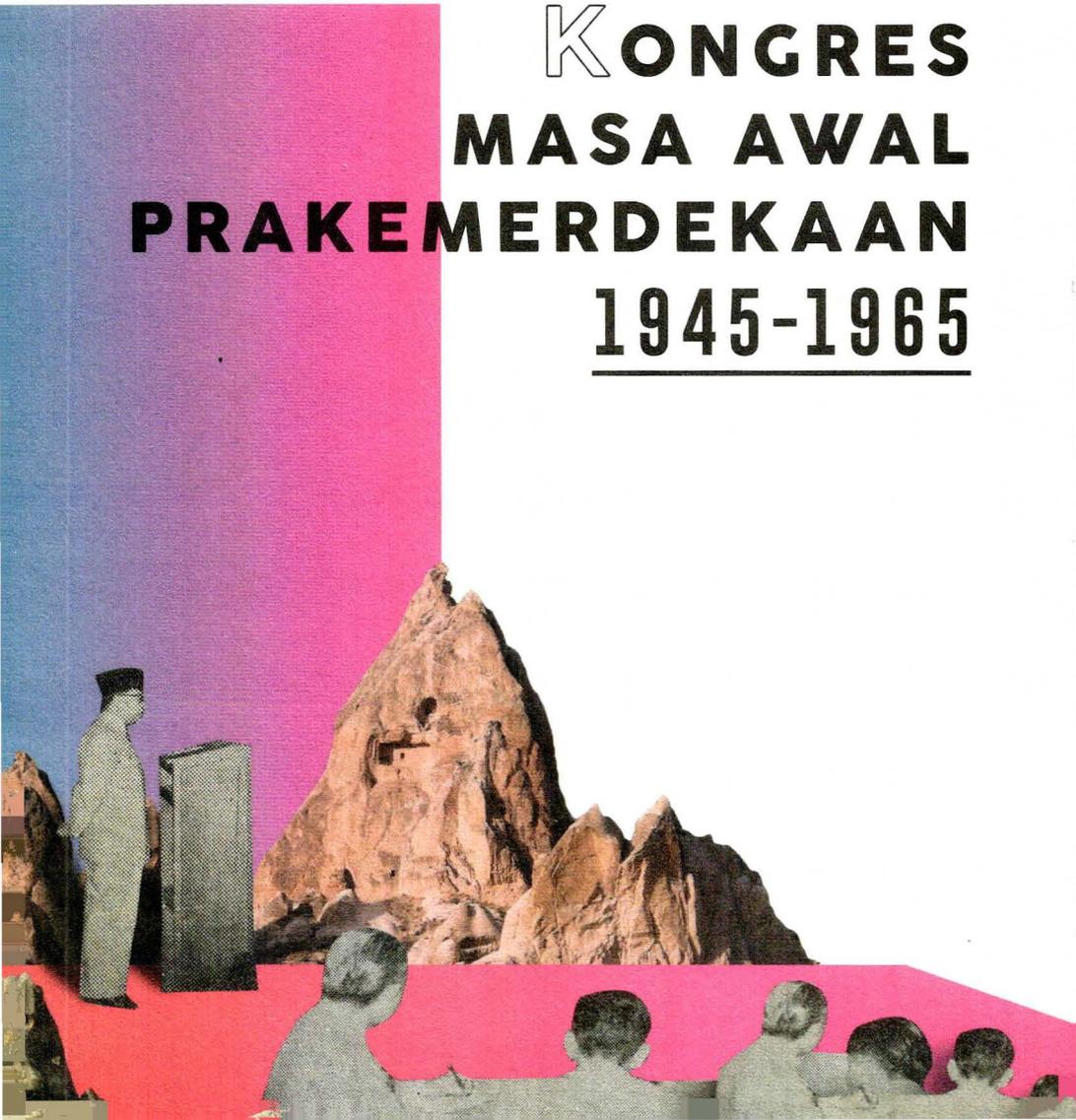


Sampul katalog pameran berjudul *Catalogus van de Tentoonstelling te Soerabaja te Houden vanaf 25 Sept-10 Oct. 1926 door Het Java-Instituut*. (Dari Koleksi Perpustakaan Museum Negeri Sonobudoyo, Yogyakarta)

BAB

03

**KONGRES**  
**MASA AWAL**  
**PRAKEMERDEKAAN**  
**1945-1965**



**T**iga setengah tahun lamanya (1942-1945) Jepang menduduki Indonesia, setelah mengalahkan penjajah Belanda yang bercokol di bumi Nusantara selama 300 tahun lebih. Dominasi singkat itu berakhir setelah Jepang ganti ditaklukkan oleh Amerika, dan Indonesia menjadi bangsa merdeka. Menjadi bangsa merdeka ternyata tidak bejalan mulus. Masa kemerdekaan awal, mulai dari 1945 hingga 1965 merupakan masa-masa penuh berbagai gejala: ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan.

Kekalahan Jepang mendorong Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia. Tersingkirnya Belanda dari Nusantara dirasakan sangat menyakitkan, terutama dari sisi ekonomi. Belanda kehilangan “tambang” yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Maka, pemerintah Belanda ingin membangun kembali “kerajaan” Hindia Belanda di Nusantara. Tentara Belanda pun masuk membonceng tentara Sekutu sehingga pemerintah RI yang baru harus berjuang dengan senjata maupun diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perang mempertahankan kemerdekaan membuat konsentrasi penyusunan pemerintahan baru menjadi terganggu. Bahkan pusat pemerintahan RI harus dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah perlawanan dan perundingan yang panjang, akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada 1949. Pusat pemerintahan pun kembali lagi Jakarta.

Selain harus menghadapi kembalinya pasukan Belanda ke wilayah RI, muncul gejala disintegrasi bangsa dengan adanya pemberotakan, yaitu pemberotakan PKI/Muso (1948), DI/TII di Jawa Barat (dipimpin S. Kartosuwirjo), di Jawa Tengah (dipimpin Amir Fatah), di Aceh (dipimpin T. Daud Beureueh), dan di Sulawesi Selatan (dipimpin Kahar Muzakar), yang berlangsung dari 1949-1962. Di Maluku timbul pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), yang pada 1950 memproklamasikan diri menjadi negara merdeka dan memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur yang saat itu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Belum lagi munculnya gejala politik karena pertikaian masalah ideologi antara kelompok kanan dan kiri,

yang menyita waktu, tenaga, dan pikiran para pemimpin saat itu. Ujian demi ujian yang datang silih-berganti itu mencapai puncaknya setelah meletus pemberontakan G30S tahun 1965.

Meskipun masa kemerdekaan awal itu penuh dengan gangguan dan masalah, bukan berarti keinginan membangun mengendur. Justru di tengah situasi sulit itu para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat dan agama, semua sepakat untuk menyelenggarakan kongres atau konferensi kebudayaan. Tujuannya tidak lain untuk membahas dan mengambil kesepakatan tentang konsep, kebijakan, dan strategi membangun bangsa dan memajukan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 UUD 1945.

### Jumlah dan Urutan Kongres Kebudayaan Indonesia

Sebelum menguraikan jalannya kongres demi kongres, ternyata masalah jumlah dan urutan kongres kebudayaan sesudah Indonesia merdeka telah menjadi perdebatan. Sebagaimana diuraikan sebelum ini, pada masa sebelum Indonesia merdeka telah diselenggarakan tujuh kali KK, yang secara berurutan dimulai 1918 di Surakarta, 1919 di Surakarta, 1921 di Bandung, 1924 di Yogyakarta, 1926 di Surabaya, 1929 di Surakarta, dan 1937 di Bali. Selain itu, telah diselenggarakan pula Kongres Bahasa Indonesia 1938 dan Konferensi Sastra Indonesia 1939. Inisiatif penyelenggaraan kongres dan konferensi itu datang dari kaum pribumi yang telah memiliki semangat kebangsaan dan berkebudayaan.

Dari ketujuh kongres itu, yang disebut dengan jelas sebagai KK adalah yang diselenggarakan tahun 1918 dengan nama resmi *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* atau Kongres Pengembangan Kebudayaan Jawa. Setelah itu, kongres selanjutnya diberi nama *Congres van het Java Instituut* (Kongres Java Instituut), diambil dari nama penyelenggaranya. Meskipun demikian, pada hakikatnya acara itu merupakan KK, sama dengan kongres yang diselenggarakan tahun 1918. Jadi, mengenai jumlah dan urutan kongres sebelum Indonesia merdeka dapat dikatakan tidak ada masalah.

Tidak demikian halnya dengan KK yang diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka. Mengenai jumlah dan urutan KK yang pernah diselenggarakan, muncul dua topik perdebatan. *Pertama*, apakah yang disebut sebagai KK pertama itu acara “Musyawarah Kebudayaan yang diselenggarakan pada 1945 di Sukabumi, atau Kongres Pendidikan 1947 di Solo, ataukah kongres yang diselenggarakan pada 1948 di Magelang? *Kedua*, apakah kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan pada 1957 di Bali dan 1960 di Bandung, yang lebih dikenal sebagai Rapat Umum BMKN atau Kongres BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional), juga merupakan KK? Masalahnya semakin rumit karena muncul pendapat bahwa Konferensi Kebudayaan yang diselenggarakan pada 1950 di Jakarta juga telah disebut-sebut sebagai Kongres Kebudayaan.

Perbincangan tentang jumlah dan urutan penyelenggaraan KK sesudah Indonesia merdeka diawali saat berlangsung KK di Magelang pada 1948. Saat itu dipersoalkan, mana yang benar, KK di Magelang 1948 itu sebagai KK pertama, kedua, atau malahan ketiga? Sebagian peserta menyatakan bahwa KK di Magelang adalah KK kedua, sebagian lagi dari peserta menyebutnya sebagai KK ketiga. Kerancuan tentang hal itu terjadi karena adanya sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Sukabumi pada akhir Desember 1945, yang disebut sebagai “Musyawarah Kebudayaan”.<sup>41</sup> Acara ini dianggap sebagai KK sehingga kongres di Magelang merupakan lanjutannya. Yang menarik, “Musyawarah Kebudayaan” itu pun mengandung silang pendapat. “Musyawarah Kebudayaan”, menurut *Kronik Revolusi I* yang disusun oleh Pramoedya Ananta Toer, diselenggarakan pada 31 Desember 1945 dan beritanya dimuat dalam majalah *Pantja Raja* tanggal 15 Januari 1946.<sup>42</sup> Tetapi, menurut Mr. Wongsonegoro, salah seorang anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), pertemuan itu diselenggarakan pada November 1946 dan disebut sebagai KK.<sup>43</sup> Jadi, mana yang benar, berlangsung

---

41. Pramoedya Ananta Toer, dkk, 1999, hlm. 283.

42. *Ibid.*

43. *Indonesia*, I-II, 1950, hlm. 20

pada akhir Desember 1945 atau November 1946? Apakah musyawarah atau kongres? Pada bagian lain, Mr. Wongsonegoro menjelaskan bahwa KK di Magelang sebenarnya merupakan KK ketiga. Menurutnya, pertemuan di Sukabumi itu adalah KK pertama dan Kongres Pendidikan di Solo 1947 merupakan KK kedua, sedangkan KK di Magelang adalah yang ketiga.

“Pertama kali disebut kongres di Sukabumi dalam tahun 1946 (bulan November) yang diliputi suasana pertempuran. Pada saat itu diterima sebuah resolusi mengenai perubahan (*hervorming*) Kementerian Pengajaran menuju ke Kementerian Kebudayaan. Kedua kalinya adalah di Solo bulan April 1947, yaitu dengan dilangsungkannya Kongres Pendidikan yang dapat pula disebut Kongres Kebudayaan.”<sup>44</sup>

Tetapi muncul kerancuan lebih jauh karena pengantar majalah *Indonesia* yang memuat penjelasan Mr. Wongsonegoro di atas memuat laporan (*verslag*) yang secara jelas menyatakan KK di Magelang sebagai Kongres Kebudayaan kedua, yang diadakan akhir Agustus 1948.<sup>45</sup> Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa kongres di Magelang adalah KK Indonesia pertama, karena pertemuan kebudayaan di Sukabumi belum dipersiapkan secara baik sebagai layaknya sebuah kongres, sedangkan kongres yang diselenggarakan 1947 di Solo adalah Kongres Pendidikan, bukan KK.

Menanggapi kekisruhan itu, Wakil Presiden Moh. Hatta turun tangan menyampaikan pendapatnya. Menurut Hatta, kongres 1948 bukan yang pertama, tetapi ia setuju jika kongres di Magelang dinyatakan sebagai KK pertama. Seperti yang dikatakan dalam sambutan di KK 1948, Hatta memberikan alasan sebagai berikut: “Sebenarnya bukan yang pertama, karena yang pertama telah diadakan sebelumnya ini, akan tetapi boleh juga disebut bahwa ini adalah kongres yang pertama karena persiapan-persiapan dan sebagainya lebih luas daripada yang dahulu, yang diadakan pada permulaan revolusi.”<sup>46</sup> Dengan “sebelumnya ini,” ia merujuk pada “Musyawarah Kebudayaan” yang diselenggarakan di Sukabumi pada 31

---

44. *Ibid.*

45. *Indonesia* I-II, 1950, hlm. 1.

46. *Indonesia* I-II, 1950, hlm. 14.

Desember 1945 dan Kongres Pendidikan 1947 di Surakarta. Penegasan Moh. Hatta membuat para peserta bersepakat bahwa kegiatan kebudayaan di Sukabumi (1945) maupun Kongres Pendidikan di Surakarta (1947) bukan termasuk KK. Dengan demikian, dasar hitungan untuk menentukan urutan KK dimulai dari kongres yang diselenggarakan di Magelang, 20-25 Agustus 1948. Kongres itulah Kongres Kebudayaan pertama era kemerdekaan. Demikianlah, topik perdebatan pertama dapat dianggap terselesaikan.

Silang pendapat tentang topik perdebatan kedua justru berlangsung dalam KK 2003 di Bukittinggi. Dalam sidang keenam dibahas makalah saya, berjudul “Konsepsi, Strategi dan Kebijakan pada Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka.” Ajip Rosidi menanggapi dengan menyatakan bahwa setelah KK 1954 telah berlangsung dua kali pertemuan budaya yang disebutnya sebagai Kongres Kebudayaan juga, yaitu yang diselenggarakan di Bali tahun 1957 dan di Bandung tahun 1960. Selama ini, kedua peristiwa itu memang sering dilupakan orang, padahal di dalamnya terjadi perdebatan yang cukup keras tentang kebudayaan dan paham politik antara kelompok budayawan dan seniman yang berhaluan paham humanisme sosialis atau sosialisme komunis dengan kelompok humanisme universal dan kelompok netral.

Menurut Ajip, dalam KK 1957 di Bali pertikaian antara kedua kelompok itu mulai serius. Salah satu sebab yang membuat suasana memanas adalah beredarnya isu bahwa Sitor Situmorang ingin menjadi Menteri Kebudayaan. Isu itu ditanggapi oleh jurnalis Wiratmo Sukito hingga hubungan antara kedua kubu memanas.<sup>47</sup> Perseteruan itu makin seru dalam KK 1960 di Bandung, ketika perbincangan sampai pada Manifesto Politik (Manipol), isi pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959. Saat itu pihak humanisme sosialis menuduh humanisme universal dan kelompok netral tidak setuju dengan Manifesto Politik. Selanjutnya, dalam sidang pleno terakhir beredar selebaran stensilan berbentuk puisi yang memuat sindiran terhadap mereka

---

47. *Tempo*, 2 November 2004.

yang mempermasalahkan Manipol. Puisi itu ditandatangani oleh Dodong Djiwapradja, Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., Toto Sudarto Bachtiar, dan Saini K.M. Mengenai pertemuan kebudayaan pada 1960 di Bandung, Ajip Rosidi, Rosihan Anwar, dan Saini K.M. juga meyakini sebagai KK, yang diselenggarakan oleh BMKN.

Mengapa kerancuan ini dapat terjadi? Tampaknya sama dengan yang terjadi pada KK 1948, penyebabnya bermuara pada belum adanya kesepakatan mengenai penamaan kegiatan, apakah “pertemuan budaya”, “konferensi budaya”, “Rapat BMKN”, “Kongres BMKN”, ataukah “Kongres Kebudayaan.” Dalam *Warta Kebudayaan* terbitan BMKN, penamaan kegiatan kebudayaan tahun 1957 dan 1960 memang membingungkan orang. Dalam laporan rapat persiapan disebutkan acaranya sebagai “Pertemuan BMKN”, yang disebut juga sebagai “Rapat Umum BMKN,” tapi di bagian lain disebut sebagai “Kongres BMKN”. Penyebutan “rapat” mencerminkan bahwa pertemuan itu dimaknai sebagaimana layaknya oleh suatu organisasi masyarakat, bukan pertemuan kebudayaan. Namun, kegiatan rapat organisasi itu diiringi pula dengan kegiatan yang memperbincangkan masalah kebudayaan hingga acaranya disebut sebagai “pertemuan budaya”, “konferensi kebudayaan”, “simposium budaya” dan “kongres kebudayaan.”<sup>48</sup> Dengan adanya ketidakkonsistenan ini, kerancuan urutan KK tak terelakkan.

Sesungguhnya, dalam rapat-rapat persiapan kongres sudah muncul usul agar rapat organisasi dan kegiatan kebudayaan dipisahkan supaya sasarannya menjadi jelas. Tetapi usul itu tidak disetujui dan dua kegiatan tersebut tetap disatukan. Dalam buku *Prahara Budaya* karya D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, kedua kegiatan itu (pertemuan 1957 dan 1960) disebut sebagai “Kongres BMKN,” bukan Kongres Kebudayaan.<sup>49</sup> Dalam majalah *Ekonomi* yang terbit tahun 1957, kegiatan kebudayaan pada 1957 di Bali bernama “Congres of National Cultural of Indonesia Association,” yang

---

48. *Warta Kebudayaan*, 1957.

49. D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 214.

berarti Kongres BMKN. Pola penyebutan seperti itu mirip dengan pola penyebutan KK sebelum Indonesia merdeka, yakni KK yang diselenggarakan oleh Java Instituut sehingga disebut *Congres van het Java Instituut*.

Ketidacermatan dalam menelusuri sejarah jelas berdampak. Panitia KK 1991 dalam buku pedoman KK 1991 menyatakan: "...sejak Kongres Kebudayaan yang terakhir tahun 1954 tidak ada lagi usaha untuk menyelenggarakan kongres." Pada bagian lain ditulis: "...setelah hampir 40 tahun setelah Kongres Kebudayaan 1954 baru diselenggarakan kongres lagi tahun 1991." Dengan adanya revisi oleh para pelaku sejarah seperti Ajip Rosidi, maka kerancuan yang selama puluhan tahun berjalan bisa diluruskan. Sebagai bentuk aktivitas yang di dalamnya memperbincangkan masalah kebudayaan, bahkan dengan membawa ideologi-ideologi yang sedang berebut pengaruh, maka aktivitas yang berlangsung tahun 1957 dan 1960 pada hakikatnya juga merupakan Kongres Kebudayaan. Dengan ini maka jumlah dan urutan KK sesudah Indonesia merdeka mengalami perubahan seperti yang bisa dilihat di bawah ini.

#### **Kongres Kebudayaan 1948**

Tiga tahun setelah Indonesia merdeka, langkah awal yang dilakukan oleh para budayawan, seniman, dan cendekiawan adalah menyelenggarakan suatu forum dalam bentuk kongres untuk meletakkan dasar pembangunan bangsa yang berwawasan budaya. Kongres ini memiliki posisi yang penting dalam sejarah bangsa dan kebudayaan Indonesia, karena pada awal Indonesia merdeka banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya masalah kerumitan dalam menata administrasi pemerintahan yang menyita seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan harta benda, tetapi juga revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda.

#### **Kongres di Sela-sela Perang**

Masa antara tahun 1945-1950 dikenal sebagai masa-masa sulit bagi pemerintahan RI, yang baru saja berdiri. Belanda ingin merebut kembali

*“Kebudayaan  
tidak dapat  
dipertahankan  
saja, kita harus  
berusaha merobah  
dan memajukan,  
oleh karena  
kebudayaan  
sebagai kultur,  
sebagai barang  
yang tumbuh,  
dapat hilang dan  
bisa maju.”*



wilayah jajahannya dengan cara membonceng pasukan Sekutu, yang masuk ke Indonesia untuk mengawasi proses penyerahan kekuasaan tentara Jepang. Dengan kembalinya Belanda, yang menduduki beberapa wilayah RI dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, ada dua pemerintahan yang saling berperang mempertahankan wilayahnya: pemerintahan RI yang secara *de facto* dan *de jure* lahir pada 17 Agustus 1945 dan pemerintahan Belanda yang mendirikan pemerintahan NICA (Netherlandsch-Indische Civiele Administratie). NICA berhasil menguasai kembali beberapa daerah yang dijadikannya negara-negara boneka. Kedua pihak terlibat perang yang membawa banyak korban harta dan nyawa.

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah dan rakyat Indonesia berjuang habis-habisan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Suasana perang membuat Jakarta sebagai ibukota negara memanas dan mencekam. Konflik dan kontak senjata berlangsung di berbagai tempat. Untuk melindungi kelangsungan pemerintahan, pada 4 Januari 1946, dengan menumpang kereta api khusus, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi berangkat untuk memindahkan pusat pemerintahan, alias hijrah, ke Yogyakarta.

Masa-masa sulit di Yogyakarta dikenal sebagai masa revolusi fisik, masa darurat, masa transisi, masa peralihan, atau masa pemerintahan gerilya. Di tempat baru ternyata keamanan juga tidak menjamin. Serangan Belanda banyak diarahkan ke pusat pemerintahan yang baru. Dapat dipastikan bahwa lembaga pemerintahan tidak dapat berjalan stabil dan optimal. Waktu, tenaga, dan dana dicurahkan untuk berperang mempertahankan kemerdekaan.

Meskipun demikian, kesadaran dan semangat membangun kebudayaan bangsa tetap berkobar. Sebutan “kementerian gerilya” yang disandang oleh kabinet ikut mengobarkan semangat untuk menegakkan jalannya pemerintahan, termasuk dalam mengurus bidang kebudayaan. Di tengah-tengah revolusi fisik itulah, para budayawan, seniman, cendekiawan, dan pemimpin bangsa bertekad menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 1948.

Pemilihan tempat kongres di kota Magelang memantik pertanyaan tersendiri, karena tidak ada penjelasan tertulis yang ditemukan. Mengapa kongres tidak diselenggarakan di Yogyakarta, atau Surakarta? Bukankah segala fasilitas kongres relatif lebih lengkap di kota-kota besar ketimbang Magelang? Tampaknya, pemilihan kota tidak terlepas dari pertimbangan keamanan. Magelang terletak di lembah Gunung Tidar dan dulunya pusat pendidikan militer Belanda, yang juga sangat ideal sebagai hunian dengan hawa sejuk dan pemandangan indah. Nantinya, Magelang menjadi lokasi berdirinya Akademi Militer Nasional (AMN) pada 11 November 1957, sebagai pengembangan dari Militaire Academie (MA) Yogyakarta. Pada 2 November 1945, ketika Yogyakarta dan kota-kota lainnya masih dalam keadaan genting menghadapi serangan Belanda, tentara Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa dan tidak pernah kembali. Mereka dipukul mundur oleh pasukan yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Isdiman.<sup>50</sup> Meski nantinya berlangsung Agresi Militer Belanda I dan II (1947-1949), Magelang dalam kondisi relatif aman karena pertempuran berlangsung di kota-kota lain. Meskipun demikian, kesulitan teknis dalam penyelenggaraan kongres tetap tidak terhindarkan.

### **Persiapan dan Pelaksanaan**

Kongres Kebudayaan yang diselenggarakan tiga tahun sesudah Indonesia merdeka itu berlangsung pada 20-24 Agustus 1948 di Pendopo Kabupaten Magelang. Kongres ini ditetapkan sebagai KK pertama dan merupakan pelaksanaan dari keputusan konferensi persiapan yang diselenggarakan pada 6 Mei 1948. Gagasan untuk menyelenggarakan kongres mula-mula datang dari Pusat Kebudayaan Kedu, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kongres itu berupaya mencari dan menyepakati konsep dan strategi dalam menata kehidupan berbangsa dan berbudaya di masa depan. Panitia meminta kepada para pemrasaran dan pendebat agar memperhatikan dua hal: (1) Bagaimanakah caranya mendorong kebudayaan kita supaya cepat maju?

50. Moekhardi, *Magelang Berjuang* (Magelang: Akabri Darat, 1983), hlm. 69.

(2) Bagaimana caranya agar kebudayaan kita jangan sampai terus bersifat kebudayaan jajahan, tetapi menjadi suatu kebudayaan yang menentang tiap-tiap anasir *cultureel* imperialisme? Penyelenggaraan KK yang sangat strategis itu kemudian diambil alih oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Namun, campur tangan Kementerian itu, menurut Mr. Ali Sastroamidjojo, “campur tangan *passief*” saja.<sup>51</sup>

**Laporan Berita Antara tentang Kongres Kebudayaan 1948,  
Bertanggal 8 Juni 1948**

“Kongres Kebudayaan Indonesia akan berlangsung di Magelang untuk lebih kurang 5 hari lamanya, mulai tgl. 20 Agustus yad. Sebagai acara akan diadakan *praeadvies-praeadvies*, *seteling-seteling* dan *pertunjukan-pertunjukan* yang bersifat nasional. Selain itu pun akan diminta kepada ahli-ahli kebudayaan luar negeri untuk mengadakan *causeri-causerinya*. Dicitakan pula, bahwa kongres dapat membentuk suatu lembaga kebudayaan yang bertugas memikirkan kemajuan-kemajuan di lapang kebudayaan dan memberi *advies-advies* kepada Pemerintah dalam soal-soal kebudayaan. Penyelenggaranya ialah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Juga akan diundang wakil-wakil kebudayaan dari luar daerah Republik maupun dari luar negeri.”

(Sumber: *Berita Antara*, Juni 1948).

Dapat dibayangkan betapa sulitnya panitia mempersiapkan penyelenggaraan sebuah KK dalam situasi pergolakan dan peralihan. Dr. Bahder Djohan menggambarkan kenekatan para tokoh KK sebagai “keberanian dan ketulusan pendekar-pendekar kita yang sangat membanggakan.”<sup>52</sup> Saat Belanda bersiap-siap untuk menghancurkan pusat pemerintahan Republik Indonesia, saat bangsa Indonesia secara halus dapat meraba bahaya yang

51. *Indonesia*, no. I-II, 1950, hlm 13.

52. *Indonesia*, no. 1-2-3, th. III, hlm. 12.

mengancam perjuangannya, saat itulah Kongres Kebudayaan di Magelang diadakan. Kondisi yang serba sulit itu digambarkan oleh Sutarjo, Ketua Panitia Penyelenggara sebagai berikut:

“Betul banyak kesukaran yang telah kami alami. Misalnya Bapak Mr. Wongsonegoro sendiri telah beberapa kali dalam malam gelap gulita mengadakan istirahat yang terpaksa di tengah-tengah sawah, karena mobilnya pun beristirahat, walaupun zonder izin beliau. Begitu pula Bapak Bupati Magelang telah mengerahkan beberapa Lurah membuat balai-balai sekedar untuk menghilangkan kesukaran-kesukaran disebabkan masalah penginapan dsb.”<sup>53</sup>

Wongsonegoro selaku Ketua Kongres juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai situasi saat itu, antara lain mengakui bahwa segala sesuatu masih serba sulit karena adanya blokade politik. Kesulitan transportasi dialami, misalnya, oleh Ki Mangoensarkoro, salah seorang pemrasaran. Ia harus menunda penyampaian prasarannya karena berangkat dari Yogyakarta pagi hari dan tiba di Magelang baru pada sore harinya. Tetapi semua kesulitan itu dapat diatasi berkat bantuan dan gotong royong berbagai pihak. Bantuan tidak hanya datang dari penduduk Magelang tetapi juga penduduk Temanggung dan sekitarnya, mulai dari peminjaman piring, cangkir, sendok, dan kursi, pemasangan lampu-lampu penerang, hingga penyediaan tukang angkut air ke balai-balai para peserta kongres. Bantuan juga datang dari masyarakat Solo dan Yogyakarta.

Saat membuka kongres, Mr. Wongsonegoro mengajak para peserta untuk bersama-sama mengheningkan cipta selama satu menit demi mendoakan pemuda-pemudi yang menjadi korban insiden menjelang perayaan peringatan tiga tahun kemerdekaan RI pada 16 Agustus 1948 di Jakarta. Pada hari itu, sejumlah pemuda-pemudi berusia 11-17 tahun mengadakan api unggun di halaman Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta. Acara hanya berlangsung sebentar saja karena segera diinterupsi oleh tindakan polisionil Belanda. Suasana sukaria berubah menjadi kekacauan karena mereka dikepung dan ditembaki oleh Belanda. Seorang pemuda anggota pandu bernama Soeprapto, yang sedang mengikuti upacara di belakang

53. *Indonesia* no. I-II, 1950, hlm. 7.

Rumah Proklamasi, gugur tertembak Belanda. Jenazahnya dimakamkan pada 17 Agustus 1948. Acara mengheningkan cipta dalam KK merupakan bentuk pernyataan bahwa pemerintah RI turut berduka cita dan menghargai pengorbanan patriot-patriot muda.<sup>54</sup>

Mr. Wongsonegoro juga mengungkapkan tekad Lembaga Kebudayaan Kedu di balik pelaksanaan KK ketika situasi masih dalam keadaan sulit. Yang pertama adalah dorongan untuk turut merayakan tahun ketiga proklamasi kemerdekaan RI. Yang kedua, didasari oleh “hasrat yang bernyala-nyala untuk menyelenggarakan dan memperkembangkan kebudayaan kita, sebagai sumbangan menyelesaikan perjuangan dan revolusi kita.” Alasan yang ketiga adalah adanya “krisis kebudayaan.”<sup>55</sup> Pada masa pergolakan dan peralihan seperti ini kebudayaan mengalami krisis yang sangat hebat sehingga harus ditinjau kembali secara saksama. Kebudayaan kita membutuhkan rekonstruksi dan renaissans agar bisa menjadi motor dan energi segala alat perjuangan. Dengan demikian, kebudayaan menjadi tenaga penggerak segenap usaha perjuangan, yang tidak terbatas pada kesenian saja, seperti yang biasanya ditafsirkan orang. Oleh karena itulah, Lembaga Kebudayaan Kedu menyelenggarakan kongres. Tujuannya adalah

“...mengupas, meninjau, memecahkan segala soal, pula mengumpulkan segala anasir yang berguna sebagai pokok yang mengakibatkan lancarnya perjuangan kita. Titik berat, kita letakkan kepada hari kemudian, untuk itu perlu dipakai pangkalan keadaan sekarang yang sebagai di atas diterangkan tidak pula dapat dilepaskan dengan sekaligus dari keadaan yang telah lampau.”<sup>56</sup>

Mr. Ali Sastroamidjojo selaku Menteri PP dan K memberikan pidato sambutan dan menyinggung “krisis kebudayaan” tersebut. Menurut Mr. Ali, yang menjadi penyebab utamanya bukan saja karena kita sedang dalam situasi revolusi, melainkan karena krisis kebudayaan itu sudah berlangsung lama dimulai sejak jaman penjajahan. Menurutnya,

---

54. *Ensiklopedi Jakarta* (Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Pemprov DKI Jakarta, 2003), hlm. 17.

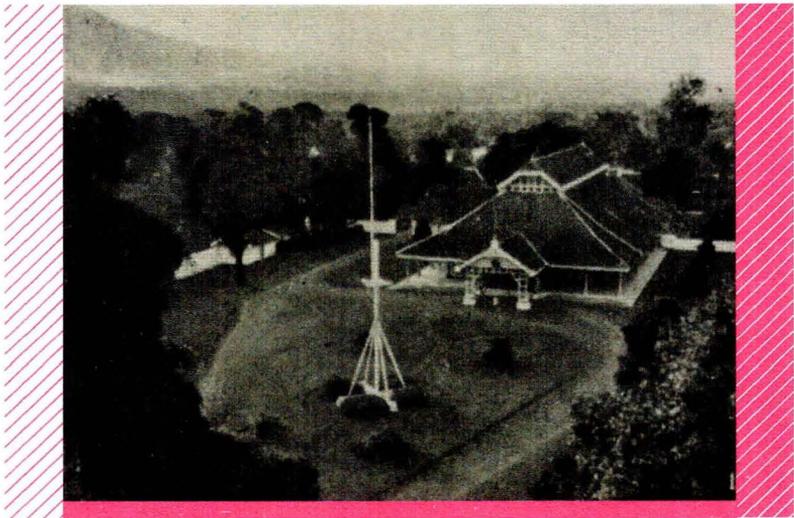
55. *Indonesia*, no. I-II, Juni-Juli 1950, hlm. 8.

56. *Indonesia*, no. I-II, 1950, hlm. 12.

“...tiap-tiap revolusi mempunyai krisis kebudayaan. Pada permulaan ialah rusaknya keseimbangan kebudayaan yang lahir dan kebudayaan yang batin, akan tetapi selain daripada itu saya kemukakan di sini bahwa krisis itu pun disebabkan oleh karena angkatan muda yang berhadapan dengan angkatan tua, yang di dalam riwayat kebudayaan selalu berhadap-hadapan dan menimbulkan pertentangan yang hebat sekali.”<sup>57</sup>

Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden yang hadir dalam kongres menyinggung tentang perlunya memajukan kebudayaan bangsa. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang, kita memiliki riwayat kebudayaan yang hebat, harum, dan tidak kalah dengan kebudayaan negeri-negeri lain.

“Pemerintahan sesuatu negara dapat hidup subur apabila kebudayaan tinggi tingkatnya, karena kebudayaan berpengaruh pula pada sifat pemerintahan Negara. Kebudayaan lambat laun mesti sangat kuat tumbuhnya, karena kebudayaan adalah ciptaan hidup daripada sesuatu bangsa.”<sup>58</sup>



Pendopo Kabupaten Magelang, tempat penyelenggaraan Kongres Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka (1948). (Dari <http://1.bp.blogspot.com>)

57. *Indonesia*, no. I-II, 1950, hlm. 13.

58. *Indonesia*, no. I-II, 1950, hlm. 14-15.

Sementara itu, menurut Presiden Soekarno, KK 1948 di Magelang merupakan kongres pertama kita memperbincangkan masalah kebudayaan nasional. Mengapa demikian? Karena, "...di dalam sejarah kita yang telah lampau ribuan tahun yang telah lalu, belum pernah mengalami kebudayaan nasional, tidak di jaman Belanda, tidak pula di jaman kebesaran kita sebelum jaman Belanda, tidak di jaman Sriwijaya atau di jaman Majapahit."<sup>59</sup> Setelah menjadi satu bangsa dan menjadi bangsa merdeka, kita sekarang memperbincangkan kebudayaan nasional Indonesia.

"Malam Resepsi" diselenggarakan di Pendopo Gubernuran. Gedung Gubernuran ini dulunya kantor Residen Belanda dan tempat di mana Pangeran Diponegoro dikelabui dan ditangkap. Hadirin "Malam Resepsi" antara lain oleh Presiden Soekarno dan Ny. Fatmawati, Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Ny. Rahmi Hatta, Konsul India, Moh. Junus, Panglima Besar Sudirman, dan para pembesar tentara lainnya, Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr. Iksan, Sekretaris Kementerian PP dan K, budayawan, seniman dan pemangku adat serta para pemrasaran. Perhatian terhadap KK amat besar sehingga persediaan tempat duduk 600 kursi kurang; banyak peserta dan undangan resepsi terpaksa berdiri.

#### Agenda KK 1948

##### **Jum'at, 20 Agustus 1948**

Resepsi pukul 19.30 di Pendopo Kabupaten Magelang, di mana diperdengarkan musik Barat dan gamelan:

- Pembukaan oleh Ketua Umum, Mr. Wongsonegoro.
- Ucapan Selamat Datang oleh Ketua Penyelenggara Kongres, Sdr. Soetarjo.
- Lain-lain sambutan.
- Amanat Presiden.

##### **Saptu, 21 Agustus 1948**

59. *Indonesia*, no. I-II, 1950, hlm. 17.

- Pembukaan Stelling Kebudayaan di Gedung Sekolah Guru Negeri (Alun-alun Selatan) pada pukul 09.00 pagi.
- Rapat pertama (Panti Perri pukul 11.00-12.00): Prae-advies (Prasaran) “Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat,” oleh Ki Mangoensarkoro.
- Malam pertunjukan di Panti Perri pukul 19.30: Koor oleh Himpunan Musik Indonesia Yogyakarta dan Sandiwara “Bayangan di Waktu Fajar,” gubahan Usmar Ismail.

#### **Minggu, 22 Agustus 1948**

- Rapat kedua (Panti Perri, pukul 09.00-14.00): Prae-advies “Kebudayaan dan Hukum Negara, oleh Prof. Mr. Djokosoetono” dan “Kebudayaan dan Pembangunan Ekonomi,” oleh Prof. Mr. Soenarjo Kolopaking.
- Rapat ketiga (Panti Perri, pukul 19.30-23.00): Prae-advies “Kebudayaan dan Pembangunan Kota-kota,” oleh Prof. Ir. Poerbaningrat dan “Kebudayaan dan Pembangunan Negara,” oleh Mr. Koentjoro Poerbopranoto.

#### **Senin, 23 Agustus 1948**

- Rapat keempat (Panti Perri, pukul 09.00-14.00): Prae-advies “Kebudayaan dan Pendidikan,” oleh Ki Hadjar Dewantoro dan “Kebatinan Sebagai Alat dalam Pembangunan Negara,” oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, K.K.A. Soerjomentaram, dan Ki Mangoensoedarso.
- Rapat kelima (Panti Perri, pukul 19.30-23.00): Pembahasan tentang 1) Bentuk organisasi penyelenggaraan kebudayaan pada umumnya. 2) Pendirian akademi kesenian. 3) Kesimpulan-kesimpulan pelbagai prae-advies di hari-hari yang telah lalu.

#### **Selasa, 25 Agustus 1948**

- Rapat keenam (Panti Perri, pukul 09-14.00): Pembahasan tentang berdirinya lembaga kebudayaan, prae-advies oleh Armijn Pane.

- “Malam Pertunjukan” di Pendopo Gubernur, pukul 19.30: Musik *Gentono* ciptaan Sastrowidatan oleh Ikatan Seni Musik Surakarta di bawah pimpinan Dr. Padmonegoro; konser oleh Stafmusiek Kepolisian Negara Mertoyudan di bawah pimpinan R.A.J. Soedjasmin; tari Minangkabau oleh Seniman Muda Surakarta di bawah pimpinan Abdulrachman; tari Nusantara, sumbangan P. Surjohamidjojo di bawah pimpinan P. Prabuwinoto; tari Jawa (diperbaharui) sumbangan dari Institut Kebudayaan Indonesia Yogyakarta di bawah pimpinan P. Pakuningrat; pencak silat sumbangan dari IPSI (Ikatan Pencak Seluruh Indonesia); tari Bali, Legong, dan Baris oleh GRISK Yogyakarta; tari Wireng (Salyapati-Jayengsari) sumbangan P. Surjohamidjojo, Surakarta.

## KESIMPULAN-KESIMPULAN

1. Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Negara Terkait dengan Prae-Advies Ki Mangoensarkoro, Prof. Mr. S. Kolopaking, dan Mr. K. Purboparanoto, serta perdebatan mengenai itu.
  - Kemerdekaan nasional adalah syarat mutlak supaya dapat berkembang kebudayaan nasional Indonesia.
  - Ditegaskan bahwa kebudayaan meliputi segenap kehidupan manusia dalam masyarakat (baik lahir maupun batin).
  - Tidak hanya mengenai kesenian saja. Bahwasanya di Indonesia ada kekacauan kebudayaan, terutama akibat penjajahan dan kapitalisme di zaman yang lalu, beserta peralihan sosial yang cepat sekali di waktu yang akhir-akhir ini.
  - Bahwasanya perlu dalam pokoknya diperbaharui jiwa manusia Indonesia guna menciptakan manusia, masyarakat, dan kebudayaan baru, dengan mewujudkan dan memperkembangkan nilai-nilai kebudayaan (*cultuur-*

warden) yang telah dapat kita *sublimeer* (resapkan) dalam Pancasila negara kita.

- Bahwasanya kemakmuran rakyat adalah satu syarat yang amat penting, supaya kebudayaan dapat berkembang secara merata dan demokratis.
- Bahwasanya kebudayaan itu pada pokok-sendinya bersifat *universeel* dari kebudayaan tiap-tiap bangsa mempunyai coraknya sendiri (nasional).
- Bahwasanya berhubung dengan adanya krisis kebudayaan barat di seluruh dunia, maka berkembangnya kebudayaan Indonesia baru itu akan memberikan bantuan yang berharga guna pembangunan dunia dalam lapangan batin dan kebudayaan.

2. Kebatinan dalam Hubungan dengan Kebudayaan Terkait dengan Prae-advies Dr. Radjiman Wediodiningrat, Ki Mangoensoedarso, dan Ki Hageg Soerjomentaram.

- Kemajuan batin manusia adalah salah suatu keharusan untuk memajukan kebudayaan.
- Kebebasan jiwa yang dijalankan dengan tidak mengganggu keselamatan masyarakat, adalah suatu keharusan bagi tiap-tiap orang dalam usahanya menciptakan kebudayaan.
- Kemajuan batin manusia hendaknya jangan semata-mata ditujukan kepada kesempurnaan diri, melainkan hendaknya diperuntukkan guna keselamatan masyarakat seluruhnya.
- Kemajuan batin tidak bertentangan dengan kemajuan lahir: kemajuan kedua-duanya adalah syarat-syarat mutlak dalam kemajuan kebudayaan dan masyarakat.
- Batin manusia yang teguh adalah syarat mutlak dalam perjuangan kemerdekaan negara.

3. Kebudayaan dan Pendidikan Terkait dengan Prae-advies Ki Hadjar Dewantoro.

- Sesuai dengan keputusan Kongres tentang pengertian kebudayaan

(Panitia Satu), maka dapat ditentukan bahwa pendidikan termasuk usaha yang terpenting dalam memelihara, memajukan, dan menyempurnakan kebudayaan.

- Kebudayaan Indonesia adalah nilai-nilai kebudayaan sebagai pancaran jiwa bangsa yang tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.
- Dalam masa peralihan ini maka kewajiban pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat baru adalah menghilangkan segala bekas-bekas dan sisa-sisa kebudayaan penjajahan dan feodal agar supaya benih kebudayaan baru yang telah tumbuh dapat berkembang dengan suburnya.
- Pendidikan kita tujukan langsung kepada kebudayaan dan masyarakat baru dan kita dasarkan pada imbalanced pendidikan lahir dan batin, hingga tercapailah kebudayaan nasional yang harmonis.
- Dalam usaha pendidikan nasional paedagogis maupun metodis kita pergunakan pula segala syarat dan pendapat-pendapat yang ada di seluruh dunia dan yang berfaedah bagi kemajuan hidup dan penghidupan manusia.

4. Kesenian Terkait dengan Prae-advies Sdr. Anas Ma'ruf, Sdr. B. Sitompul, Sdr. B. Resobowo, dan Sdr. Abu Hanifah.

- Kesenian ialah penjelmaan getaran jiwa yang asli.
- Kesenian Indonesia baru sewajarnya memancarkan kesenian yang *representatief universeel*, selaras dengan tujuan pembentukan kebudayaan Nasional.
- Memelihara segala hasil seni serta mengembangkan dengan memakai segala anasir yang bernilai dari semua zaman dan tempat.

5. Pembangunan Kota Terkait dengan Prae-advies Purbodiningrat

- Belum dapat disimpulkan hingga kongres ditutup hanya dengan penjelasan: "Soal ini akan disusun dan ditinjau kembali."

## 6. Lembaga Kebudayaan Terkait dengan Prae-advies Armijn Pane.

- Disetujui berdirinya Lembaga Kebudayaan Indonesia, dengan Ketua (sementara) Mr. Wongsonegoro dan Ketua Muda (sementara) Dr. Aboe Hanifah. Rancangan Anggaran Dasar diserahkan kepada redaksi yang terdiri atas Mr. K. Poerbopranoto, Armijn Pane, dkk. untuk diselesaikan dalam waktu dua bulan.
- Mengusulkan kepada Pemerintah segera berdirinya suatu Akademi Kesenian (*Prae-advies* Sdr. Sindoe Soewarno).
- Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan.

(Sumber: *Indonesia*, I-II, 1950, hlm 14)

Rekomendasi tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan sesungguhnya merupakan pengesahan atas hasil perdebatan para budayawan, seniman, dan cendekiawan, sekitar empat setengah bulan setelah Indonesia merdeka. Dalam Musyawarah Kebudayaan yang diselenggarakan di Sukabumi pada 31 Desember 1945 (kadang disebut juga sebagai Permusyawaratan Kebudayaan atau Konferensi Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan telah menjadi salah satu resolusi.<sup>60</sup> Keputusan musyawarah itu menghasilkan desakan agar pemerintah 1) secepat mungkin menyelenggarakan pertemuan besar antara wakil-wakil pemerintah dengan wakil-wakil perkumpulan kebudayaan, ahli-ahli, dan peminat lapangan tersebut guna meletakkan dasar-dasar Kebudayaan Nasional; 2) mengambil tindakan-tindakan yang tepat supaya secepat mungkin cita-cita nasional dalam lapangan kebudayaan berwujud, misalnya dengan mengadakan Kementerian Kebudayaan lepas dari Pendidikan dan Pengajaran.<sup>61</sup>

Usulan tentang pembentukan Kementerian Kebudayaan yang lepas dari pendidikan dan pengajaran mencerminkan pemikiran para pendiri bangsa

60. *Pantja Raja*, 15 Januari 1946.

61. Pramoedya Ananta Toer, dkk, 1999, hlm. 283.

tentang pentingnya kebudayaan dalam sistem pemerintahan. Kebudayaan sebagai salah satu unsur perekat persatuan kebangsaan dapat menjalankan misinya apabila diwadahi dalam lembaga yang mandiri.

Dalam KK 1948, Dr. Aboe Hanifah diminta untuk membentangkan isi resolusi Sukabumi yang telah disepakati itu. Agak berbeda dengan yang dimuat dalam majalah *Pantja Raja*, menurut Aboe Hanifah, Musyawarah Kebudayaan di Sukabumi menelurkan dua resolusi. Resolusi *pertama*, mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Kementerian Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Resolusi *kedua*, apabila usul pertama tidak dikabulkan maka diusulkan agar “Kementerian PP dan K diubah nama dan susunannya, mengenai tugas masing-masing bagian, dengan diberi nama: Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Pengajaran, dengan mengadakan satu Bagian sendiri untuk Bagian Kebudayaan.”<sup>62</sup>

Berbagai tanggapan dan masukan diberikan oleh para peserta kongres terhadap penjelasan Dr. Aboe Hanifah. Kemudian diputuskan oleh rapat untuk menguatkan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah di Sukabumi. Dr. Aboe Hanifah diminta untuk menyusun resolusi yang akan diajukan kepada Presiden mengenai perubahan sifat Kementerian PP dan K. Demikianlah, maka disepakati seperti yang tercantum dalam kesimpulan poin 6 di atas. Resolusi dalam kesimpulan itu rumusannya mirip dengan yang tercantum dalam buku *Kronik Revolusi I*: “Memajukan kepada Pemerintah untuk mengadakan Kementerian sendiri untuk Kebudayaan.”

Maka, jelas bahwa para pemimpin turun tangan memikirkan, berpartisipasi, bereksperimen dan berdebat mengenai gagasan-gagasan kebudayaan. Mereka mencari apa yang menghubungkan dan memisahkan mereka, menelusuri apa yang membuat mereka menjadi “orang Indonesia”.

“Republik menempatkan kebudayaan di dalam membangun bangsa. Pada masa kacau 1948, ketika Republik dalam keadaan kisruh—di mana wilayah kekuasaannya dikebiri hanya sebatas Aceh, sebagian Sumatra dan Jawa Tengah,

---

62. Pramoedya Ananta Toer, dkk, 1999, hlm. 283.

dengan ketegangan-ketegangan internal memanas dan tak lama kemudian meletus pemberontakan komunis bulan September di Madiun—pemerintah menggelar Kongres Kebudayaan.<sup>63</sup>

Empat bulan setelah kongres berlangsung, pada 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerang Yogyakarta. Malam menjelang 20 Desember 1948, para gerilyawan melaksanakan siasat bumi hangus dengan membakar semua gedung kantor pemerintah, markas-markas, tangsi militer, sekolah-sekolah, dan gedung-gedung yang penting lainnya kecuali tempat-tempat ibadah. Ketika tentara Belanda masuk ke Magelang, keadaan kota sepi sementara pasukan pejuang mundur ke luar kota.

Kini yang tersisa dari KK 1948 adalah kenang-kenangan dari para pendiri Museum Perjuangan di Yogyakarta. Museum itu didirikan di sebagian halaman Ndalem Brontokusuman milik Keraton Yogyakarta atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Museum yang diresmikan pada 17 November 1961 ini memamerkan patung para pahlawan nasional, berbagai artefak bersejarah, miniatur peristiwa bersejarah, perlengkapan perang, dll. Pada sepanjang dinding museum yang mengikuti bangunan utama berbentuk silinder, dipahat relief yang menceritakan berbagai peristiwa sejarah sejak masa lahirnya Budi Oetomo sampai masa bersatunya lagi pemerintahan RI, yaitu dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat pada 1950. Seluruhnya ada 37 peristiwa yang dibuat reliefnya. Menariknya, salah satu dari 37 peristiwa itu adalah KK 1948, tepatnya relief dengan nomor urut 29. Peristiwa bersejarah yang hampir tidak tercatat di buku sejarah manapun itu diabadikan dalam satu panel yang terdiri atas dua adegan. Adegan pertama menggambarkan pameran seni lukis dan patung serta pertunjukan tari Bali sebagai bagian dari KK 1948. Adegan kedua menggambarkan seorang *prae-advieser* sedang menyajikan makalah.

---

63. Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem, *Ahli Waris Budaya Indonesia: Menjadi Indonesia 1950-1960* (Jakarta: Pustaka Larasan dan KITLV, 2011), hlm. 7.

## **Pembentukan Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI)**

Ada baiknya disampaikan pula tindak lanjut para budayawan dan seniman setelah KK 1948 selesai. Langkah ini adalah bagian dari kesepakatan kongres dalam hal pembentukan lembaga kebudayaan yang menjadi wadah kegiatan kebudayaan dan penyelenggaraan konferensi kebudayaan.

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini, dalam kongres dibahas tentang perlunya sebuah lembaga kebudayaan yang secara independen mengelola upaya memajukan kebudayaan bangsa. Disepakatilah sebuah lembaga bernama Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), dengan Ketua (sementara) Mr. Wongsonegoro dan Ketua Muda Dr. Aboe Hanifah. Tugas ketua sementara adalah menyelenggarakan rapat khusus untuk menyelesaikan naskah Anggaran Dasar, yang belum tuntas dibahas dalam kongres, dan menjaring tanggapan dan masukan peserta serta melengkapi nama-nama pengurus LKI.

Dalam perkembangannya, susunan pengurus definitif berhasil ditetapkan dengan Dr. Bahder Djohan sebagai Ketua dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Penulis Umum. LKI sedianya akan diresmikan pada 1 Januari 1949 di Yogyakarta tetapi karena ibukota Republik pada saat itu sedang dalam pendudukan Belanda, maka rencana itu gagal. Akhirnya, LKI baru dapat berdiri secara resmi setahun kemudian, yakni pada 9 Maret 1950 di Jakarta.

### **ANGGARAN DASAR LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA**

#### **Bab I NAMA DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

Badan ini bernama "LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA" dan berkedudukan di Jakarta.

#### **Bab II SIFAT**

##### **Pasal 3**

Tujuan Lembaga ialah:

- a. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah meresap dalam

Pancasila, sehingga terbentuk jiwa budaya Indonesia.

- b. Menyatakan dan menggerakkan jiwa tersebut sehingga dapat berwujud, tumbuh dan berkembang kebudayaan Indonesia, sebagai pancaran jiwa bangsa Indonesia yang hidup dan tumbuh antara segenap golongan di seluruh kepulauan Indonesia.

#### Bab IV USAHA

##### Pasal 4

Lembaga berusaha mencapai tujuan itu di antaranya dengan jalan:

- Menyelenggarakan museum-museum yang menyimpan hasil-hasil kebudayaan daerah-daerah Indonesia, dan kebudayaan-kebudayaan luar negeri, sehingga menjadi bahan menghidupkan jiwa budaya Indonesia.
- Menyelenggarakan *steling-steling* dan pertunjukan-pertunjukan baik yang tetap maupun untuk seketika tentang buah hasil kebudayaan Indonesia.
- Memelihara perpustakaan untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia, dengan orientasi seluas-luasnya.
- Mengadakan penyelidikan dan menggiatkan (membantu) usaha penyelidikan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kesenian.
- Membantu usaha Pemerintah (badan-badan resmi) dan usaha partikelir dalam mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
- Mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah-hadiah tahunan ataupun hadiah kehormatan untuk menggiatkan dan menghargai usaha yang terbaik dalam salah satu lapangan kebudayaan.
- Mencari kerja sama dengan usaha semacam itu di luar negeri, teristimewa di negeri-negeri yang bersamaan dasar kebudayaannya.
- Menyelenggarakan *fonds* kebudayaan dan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi tumbuhnya kebudayaan Indonesia.

- Mengadakan kongres kebudayaan.
- (Sumber: *Indonesia*, No. I-II, 1950, hlm. 124).

Dengan lahirnya Lembaga Kebudayaan Indonesia, tugas Pengurus yang segera dilakukan adalah menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan Indonesia dan melakukan persiapan penyelenggaraan kongres kebudayaan berikutnya. Konferensi Kebudayaan Indonesia yang merupakan lanjutan Kongres Magelang diselenggarakan pada 5-7 Agustus 1950, di Gedung Pertemuan Umum Kotapraja Jakarta. Konferensi ini memilih tema: “Kebudayaan Nasional dan Hubungannya dengan Kebudayaan Bangsa-bangsa Lain.” Bagi sebuah bangsa yang baru merdeka, tema itu dipandang penting untuk mencari kesepakatan tentang konsep, kebijakan, dan strategi dalam rangka menghadapi hubungan Pemerintah RI dengan negara-negara sahabat yang pada hakikatnya merupakan hubungan antarbudaya bangsa.

Konferensi tersebut menyimpulkan beberapa pokok penting, antara lain menguatkan keputusan KK 1948 di Magelang, menegaskan keinginan bangsa untuk mencari isi dan bentuk kebudayaan yang sesuai dengan zamannya, dan menyatakan kemauan untuk membuka diri secara aktif dan kritis dalam rangka menyempurnakan perkembangan kebudayaan nasional. Konferensi ini juga mengeluarkan anjuran kepada masyarakat dan pemerintah, antara lain, untuk berinteraksi secara setara dengan bangsa-bangsa lain dalam kebudayaan dan menyempurnakan perlengkapan berupa konservatoria, laboratoria, musea, akademi, perpustakaan, dan lembaga-lembaga ilmu lainnya.

### Kongres Kebudayaan 1951

Kongres Kebudayaan, yang diselenggarakan di Jalan Naripan 3, Bandung, pada 6-11 Oktober 1951, ditetapkan sebagai Kongres Kebudayaan II. Kongres ini diselenggarakan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Dibandingkan dengan kongres di Magelang, kongres ini lebih mengkhususkan diri pada usaha pemecahan berbagai bidang kesenian, tidak pada kebudayaan secara

umum. Ada empat pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan: (1) hak pengarang atau hak cipta; (2) perkembangan kesusastraan; (3) kritik seni, dan; (4) sensor film. Di samping itu secara khusus dibahas juga tentang organisasi kebudayaan.

### **Agenda KK 1951**

#### **Saptu, 6 Oktober 1951**

- Pukul 19.30 Resepsi di Gedung Concordia: Sambutan-sambutan dan sajian Angklung Modern dan Musik Gentono.

#### **Minggu, 7 Oktober 1951**

- Pukul 09.00 Rapat Pleno I: Usul prosedur Kongres oleh Ketua Panitia, Dr. Djundjuran dan pembagian Seksi-seksi.
- Pukul 17.00 Pembukaan Seteling Sastra.
- Pukul 20.00-23.00 Rapat Seksi-Seksi.

#### **Senin, 8 Oktober 1951**

- Pukul 09.00-12.00 Rapat Seksi-Seksi.
- Pukul 15.00-17.00 Rapat Seksi-Seksi.
- Pukul 20.00-23.00 Malam Seni Suara Dan Deklamasi: Musik Angklung, Gentono dengan irama musik Barat.

#### **Selasa, 9 Oktober 1951**

- Pukul 09.00-12.00 Peninjauan di: Perguruan Tinggi Teknik, Museum Geologi, dll.
- Pukul 15.00-17.00 Rapat Seksi-Seksi.
- Pukul 20.00-23.00 Rapat Pengurus LKI dengan Ketua-Ketua dan Raporteur Seksi-Seksi.

#### **Rabu, 10 Oktober 1951**

- Pukul 09.00-12.00 Rapat Pleno II: Membicarakan usul-usul dari seksi-seksi.
- Pukul 15.00-17.00 Melanjutkan Rapat Pleno II di Jl. Naripan No. 3 Bandung.
- Jam 20.00-22.00 Malam Pertunjukan Seni Drama oleh Sandiwara Ratu Asia di Gedung Concordia.

**Kamis, 11 Oktober 1951**

- Pukul 09.00 Rapat Pleno II: Pembacaan resolusi, kesimpulan, dan keputusan.
- Pukul 20.00 Malam Perpisahan.

Presiden Soekarno direncanakan hadir tetapi ternyata tidak bisa. Dalam acara pembukaan kongres, Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K dan Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Presiden RI memberikan sambutan. Mr. Wongsonegoro berharap agar kongres ini lebih maju ketimbang KK 1948 yang seolah-olah memandang kebudayaan dari segi teori semata. Kongres ini mesti menitikberatkan pada kebudayaan konkret tetapi juga jangan melupakan hakikatnya. Sementara itu, Wakil Presiden Moh. Hatta menekankan bahwa kewajiban kita di samping berjuang mempertahankan kemerdekaan juga membangun kebudayaan dengan jiwa baru. Bung Hatta berpandangan bahwa ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama. Ekonomi dan kebudayaan dapat berkembang dan subur apabila memupuk timbal-balik, ganti-berganti mempengaruhi. Ada kalanya ekonomi meletakkan coraknya pada kebudayaan. Tetapi, sebaliknya, sering pula terjadi bahwa ciptaan manusia, yang dihidupkan oleh perkembangan kebudayaan, membuka pikiran ke jalan baru untuk memperbaiki dasar produksi. Di samping itu, ia menegaskan bahwa dalam “melaksanakan pembangunan, minat kita tidak boleh hanya ditujukan pada satu arah saja. Kita harus berkembang ke segala arah.”<sup>64</sup>

Bung Hatta juga menyinggung kenyataan kita sebagai bangsa yang memiliki berbagai corak kebudayaan. Usaha memajukan kebudayaan agar tidak diarahkan untuk memaksakan menjadi satu, tetapi membangun keselarasan di antara bermacam-macam corak kebudayaan itu. Dengan demikian tercapailah “*bhinneka tunggal ika*” yang diartikannya sebagai “persatuan dalam puspa ragam.” Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal akan semakin besar pengaruhnya terhadap kebudayaan kita, memperbesar persamaan dan menciutkan perbedaan

64. *Indonesia*, no. I-II-III, 1952, hlm. 22.

di antara corak-corak kebudayaan yang ada. Namun, ia tetap yakin bahwa persatuan sama sekali tidak akan tercapai, berbagai perbedaan akan tetap tinggal sebagai tanda hidup dalam masyarakat Indonesia yang begitu luas. Konsep inilah yang seharusnya menjadi acuan dan dijadikan bahan kampanye kepada masyarakat dalam rangka membangun kebudayaan sekaligus persatuan bangsa.

Terakhir, sambutan juga disampaikan oleh Dr. Bahder Djohan yang melaporkan tentang proses pendirian Lembaga Kebudayaan Indonesia dan program-program untuk mendorong dan menggiatkan segala usaha kebudayaan. Dipaparkan pula bahwa LKI telah menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan dengan tema “Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Asing,” juga telah mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan di Bandung.

PUTUSAN-PUTUSAN KONGRES KEBUDAYAAN  
INDONESIA II DI BANDUNG  
(dilangsungkan dari 6 s/d 11 Oktober '51)

KONGRES KEBUDAYAAN INDONESIA memutuskan:

I. Mengenai Hak Pengarang.

1. Istilah Hak Pengarang harus diganti menjadi Hak Cipta.
2. Perlu diadakan dengan segera:
  - a. Perundang-undangan Hak Cipta Nasional yang sempurna.
  - b. Peninjauan kembali sikap Indonesia terhadap Konvensi Bern.
3. Perlu didirikan suatu organisasi antara para pencipta yang berupa badan hukum yang diakui sah, untuk menyelenggarakan segala hubungan dan kepentingan pencipta mengenai ciptaannya.

## II. Mengenai Perkembangan Kesusasteraan.

Menganjurkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia supaya:

1. Bekerja sama dengan badan-badan yang telah ada (seumpama: Balai Pustaka) untuk mengadakan Balai Penterjemah yang mengusahakan:

- terjemahan dari bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah, di antaranya yang mengenai filsafat dan keagamaan.
- pendidikan menterjemah.
- mengadakan hadiah yang tertentu setiap tahun bagi ciptaannya yang terbaik dari sastrawan dan pengarang Indonesia.
- mengumpulkan dan menerbitkan cerita-cerita lama dan lagu-lagu yang hidup di desa-desa, di antaranya juga lagu-lagu yang tumbuh semasa revolusi.
- berusaha menyuburkan kesusasteraan dan bahasa daerah di samping kesusasteraan dan bahasa Indonesia.
- bekerja sama dengan badan-badan kebudayaan di luar negeri, di antaranya dengan P.E.N. Club International, untuk mengadakan pertukaran *visitorship* para sasterawan.
- mengadakan dana untuk membantu perkembangan karang-mengarang sandiwarawan dan film.
  - a. membentuk suatu badan penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku kebudayaan, sehingga buku-buku yang tidak akan menghasilkan keuntungan *commercieel* tetapi mempunyai nilai kebudayaan dapat juga diterbitkan.
  - b. mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Pustaka dijadikan badan yang otonom, langsung di bawah pimpinan Menteri P.P. dan K. dan dapat bekerja sama dengan LKI.
- mengusahakan berdirinya BALAI SASTERA, baik di Pusat maupun di Daerah-daerah.
- mengusulkan kepada yang berwajib supaya Balai Bahasa dan Pemerintah dengan segera berangsur-angsur menyiarkan hasil-hasil pekerjaannya dan menganjurkan pemakaian bahasa Indonesia seluas-luasnya.

### III. Mengenai Kritik Seni

Seni adalah hasil dari getaran jiwa dan keselarasan perasaan serta pikiran yang mewujudkan sesuatu ciptaan yang indah dan luhur.

1. Kritik seni harus didasarkan atas:
  - a. pengetahuan dalam arti seni.
  - b. pengertian dari tiap-tiap seni yang akan dikritik.
2. Tujuan kritik seni ialah:
  - a. guna membangkitkan minat para seniman untuk memperbaiki dan mempertinggi mutu dari seni yang diciptakan.
  - b. guna memperkembang dan mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap hasil seni.
3. Untuk melaksanakan tercapainya tujuan ini perlu diadakan perluasan kesempatan untuk mempertinggi nilai membanding dari masyarakat terhadap seni, misalnya dengan mengadakan:
  - a. akademi seni.
  - b. mata pelajaran seni dan estetika pada universitas.
  - c. museum hasil kesenian.

Soal-soal yang muncul dalam pertikaian antara lain ialah:

- (1) Tentang Pancasila sebagai dasar atau pedoman seni tidak terdapat persesuaian faham.
- (2) Pada dasar seni ada perbedaan faham antara:
  - a. seni berdasar hukum yang ada.
  - b. seni untuk masyarakat, dan
  - c. seni bebas.
- (3) Sudah atau belum adanya seni Indonesia pada masa ini

### IV. Mengenai Sensor Film.

A.

- I. Menyetujui dengan suara bulat adanya Sensor Film.
- II. Mengajukan agar Pemerintah segera memperbaharui *film-ordonansi*,

*film-verordening, film-besluit 1940* Pedoman Panitia Pengawasan Film dengan memperhatikan anjuran-anjuran sebagai berikut:

Yang bersifat preventif dan negatip:

1. Supaya memperkeras dan memperluas sensor film.
2. Supaya dalam melakukan sensor masalah itu dipandang dari berbagai sudut.
3. Supaya jumlah anggota panitia sensor diperluas.
4. Supaya juga atas poster-poster film dan gambar-gambar reklame untuk film yang akan dipertunjukkan diadakan sensor.
5. Supaya sensor terutama terhadap film-film yang menggambarkan kehidupan masyarakat Timur lebih diperluas.
6. Supaya menolak film-film yang mengandung propaganda perang dan juga yang bersifat merendahkan bangsa atau golongan.
7. Mengajukan kepada Jawatan Kepolisian supaya pengawasan atas kombinasi film pokok (*hoofdilm*), film pendahuluan (*voorfilm*), dan film reklame *trailers* lebih diperkeras.
8. Supaya pembatasan umur yang telah ditentukan ditinjau kembali.
9. Mengadakan pemeriksaan kembali film-film yang kini beredar dan belum diperiksa oleh sensor sekarang.

B.

1. Supaya Pemerintah memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada usaha film nasional untuk berkembang dengan bantuan moril dan materiil.
2. Supaya mengadakan rencana pemasukan film-film dari luar negeri (*invoerquota*).
3. Supaya Pemerintah mengadakan gedung-gedung bioskop sendiri untuk mempertunjukkan film-film yang tinggi mutunya, yang oleh partikelir tidak dipertunjukkan karena tidak menguntungkan baginya.
4. Supaya Pemerintah mengadakan usaha-usaha untuk mendidik kader dengan mempergunakan perusahaan film negara.
5. Supaya Pemerintah berusaha membikin film-film yang tinggi mutunya,

demikian juga film-film untuk anak-anak dan untuk sekolah-sekolah, dengan catatan jangan sampai usaha Pemerintah ini merupakan saingan bagi usaha partikelir.

6. Supaya kepada guru-guru dan pendidikan-pendidikan diberikan tugas memberikan penerangan film.
  7. Supaya teks dan dialog-dialog bahasan Indonesia dalam film diawasi dan diperbaiki.
  8. Mengatur supaya bioskop-bioskop di daerah-daerah selalu ada ilmunya.
  9. Supaya Badan Penasihat yang diadakan oleh kepala daerah tentang film dipertinggi mutunya.
  10. Mengajukan kepada Pemerintah supaya segera mengadakan hubungan yang nyata dengan UNESCO bagian Commission on Technical Needs of the Press, Film, and Radio untuk memperoleh perbaikan-perbaikan seperti tersebut dalam sub B.
- C. Mengusulkan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu Kantor Urusan Film dalam Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, terdiri dari dua bagian, yaitu:
- Badan Sensor.
- Badan yang terdiri dari Wakil-wakil Kementerian-kementerian yang ada hubungannya dengan film dan wakil-wakil organisasi kebudayaan, serta orang-orang yang dipandang ahli, dengan tugas memikirkan dan membantu pelaksanaan yang disebut dalam Pasal BD.
- D. Mengajukan kepada khalayak ramai supaya menginsyafi bahaya yang dapat diakibatkan oleh film dan karena itu diserukan supaya turut membantu segala usaha Pemerintah untuk menghindarkan bahaya-bahaya tersebut.

#### V. Mengenai Organisasi Kebudayaan.

KONGRES memberikan tugas kepada PANITIA KESIMPULAN\*) supaya dengan melalui Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu **2 (dua) bulan** setelah Kongres selesai, memajukan kesimpulan-

kesimpulan kepada semua organisasi Kebudayaan/Kesenian, baik yang turut serta dalam Kongres di Bandung, maupun yang tidak sempat datang untuk dipertimbangkan.

Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima kesimpulan-kesimpulan itu, organisasi tersebut diminta supaya menyatakan pendapatnya terhadap kesimpulan-kesimpulan itu. Kemudian 6 (enam) bulan setelah Kongres selesai, yakni pada tanggal 11 Oktober 1951, Pengurus Lembaga Kebudayaan Indonesia diminta mengusahakan KONFERENSI guna membicarakan dan mengambil putusan tentang kesimpulan-kesimpulan itu, dan kemudian membentuk pengurus baru, (dalam konferensi itu hendaknya diundang semua organisasi Kebudayaan/Kesenian ini di seluruh Indonesia, baik yang menyetujuinya).

Jakarta, Oktober 1951

Pengurus LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA,

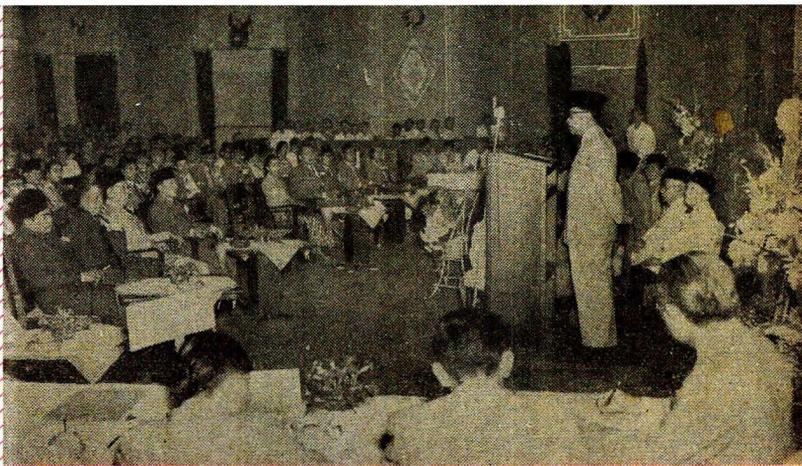
KETUA,

PENULIS UMUM

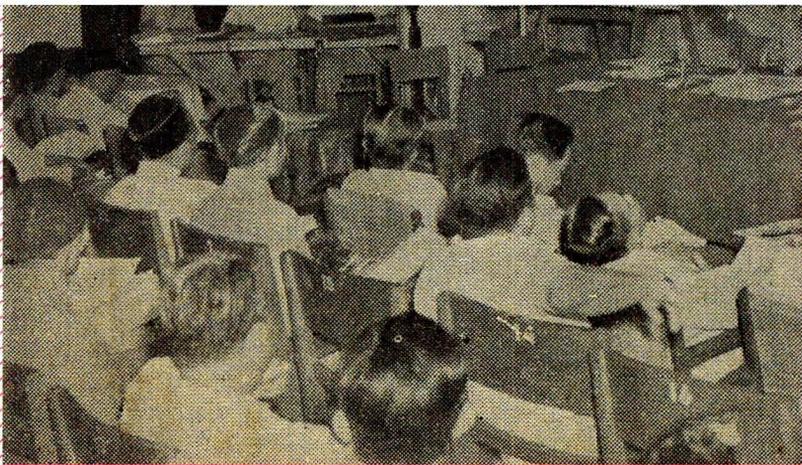
(Dr. Bahder Djohan)

(Soeratno Sastroamidjojo)

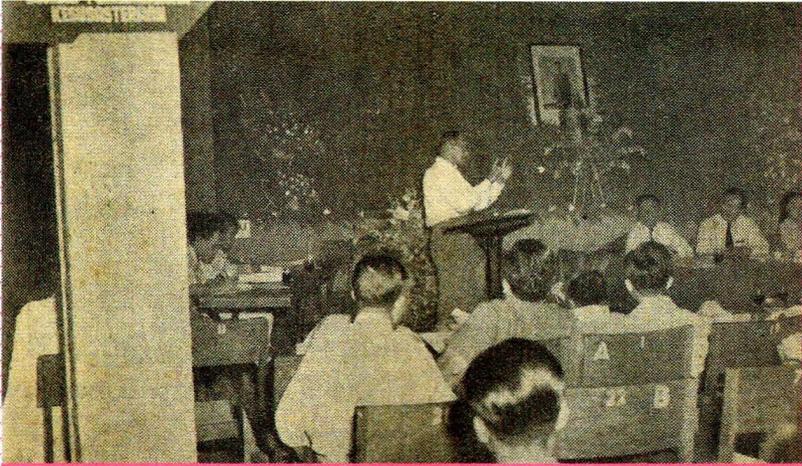
\*) Panitia ini terdiri dari: 1. Dr. Moerdowo (Solo); 2. Moh. Said (Jakarta); 3. M. Nasution (Jakarta); 4. Mr. Moh. Sjah (Jakarta); 5. Ki Mangoensarkoro (Jogyakarta); 6. Mr. Koentjoro Poerbopranoto (Jakarta); 7. Hamka (Jakarta); 8. Dr. Bahder Djohan (Jakarta); 9. Suratno Sastroamidjojo (Jakarta).



Suasana para hadirin peserta Kongres Kebudayaan II di Malam Resepsi di Gedung Concordia. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



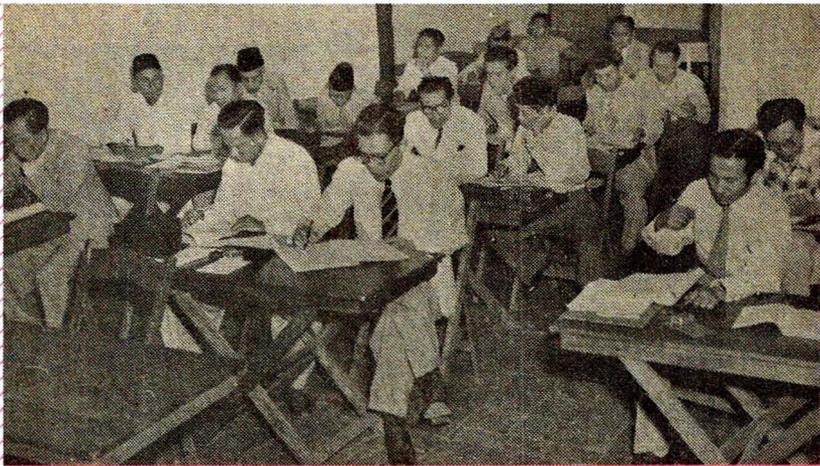
Sidang rapat untuk membahas organisasi kebudayaan di dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan II. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



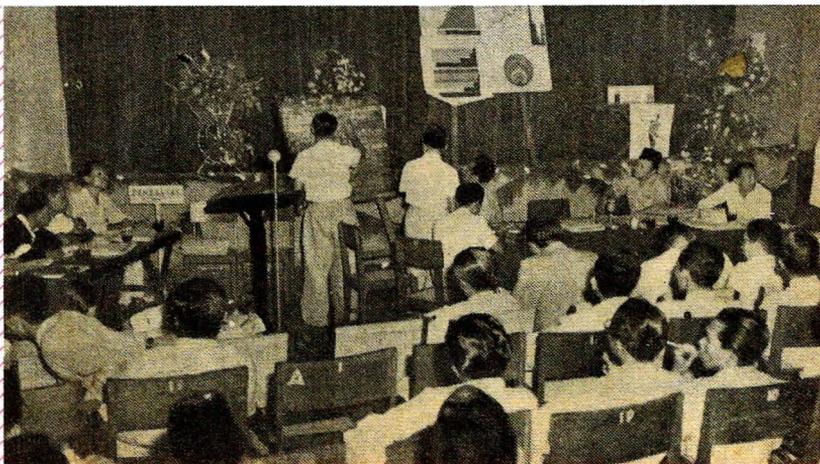
Sidang rapat untuk memperbincangkan perkembangan kesusastraan di dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan II. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



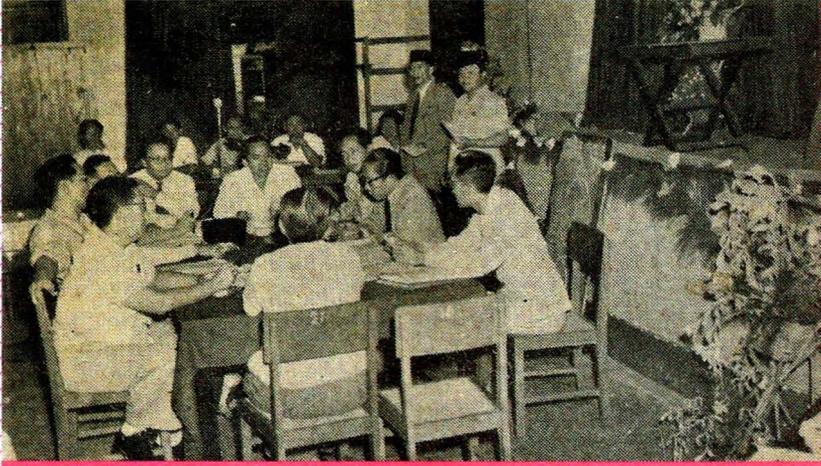
Sidang rapat untuk Seksi Sensor Film di dalam rangkaian acara Kongres Kebudayaan II. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



Suasana para hadirin peserta Kongres Kebudayaan II di Malam Resepsi di Gedung Concordia. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



Rapat pemilihan untuk menentukan anggota dari Panitia Kesimpulan. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)



Rapat anggota Panitia Kesimpulan. (Dari *Indonesia*, Thn. 3, No. 1,2,3, Januari-Maret 1952)

### **Pembentukan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN)**

Sebagai tindak lanjut atas keputusan kongres, pada 9 Desember 1951, di Jakarta, Panitia Kesimpulan mengadakan sidang lanjutan. Enam orang hadir dalam sidang tersebut, yakni: Ki Mangunsarkoro, Dr. Murdowo, Moh. Said, M. Nasution, Dr. Bahder Djohan, Mr. Moh. Sjah, dan Gaos Hardjasoemantri. Anggota Panitia Kesimpulan yang tidak hadir adalah Hamka (berhalangan), Suratno Sastroamidjojo (sakit), dan Mr. Kuntjoro Probopranoto (berada di luar negeri). Sementara itu, dari Sekretariat LKI posisi pencatat (notulis) diemban oleh Sarwedi Sosrosudigdo dan Murasad.

Setelah membaca laporan-laporan stenografis KK 1951 di Bandung mengenai Organisasi Kebudayaan dan mendengar perdebatan-perdebatan mengenai soal tersebut dalam rapat Pleno Kongres tanggal 10 dan 11 Oktober 1951, maka Panitia Kesimpulan menyusun rancangan kesimpulan sementara yang akan dibawa ke dalam Konferensi Kebudayaan yang akan diselenggarakan pada April 1952. Panitia Kesimpulan juga menyusun skema tentang organisasi Gerakan Kebudayaan Indonesia sesuai dengan kesimpulan

kongres. Kesimpulan sementara dan skema itu disampaikan kepada organisasi-organisasi kebudayaan/kesenian, baik yang ikut dalam kongres maupun yang tidak dapat hadir untuk dipelajari. Dalam waktu dua bulan, masing-masing organisasi yang telah menerima kesimpulan sementara itu mesti menyampaikan tanggapan, yang dijadikan bahan perbincangan dalam konferensi.

Konferensi Kebudayaan Indonesia kedua diselenggarakan di Jakarta pada 12-14 April 1952. Pesertanya adalah organisasi kebudayaan dan perorangan. Dari organisasi antara lain: Lembaga Kebudayaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Rakyat, PEN Club, Taman Siswa, Himpunan Budaya Surakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Makassar, ASRI Jogjakarta, Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung, Yayasan Budaya Wongken-Werun Minahasa, Yayasan Kebudayaan Batak, Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Rakyat Suara Timur Padang, dan lebih dari 120 organisasi kesenian dan sebagainya dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Selatan dan Timur, dan Kalimantan.

Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kongres di Bandung, pada 14 April 1952 peserta Konferensi dengan suara bulat memutuskan berdirinya Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN). Pada 12 Mei 1952, LKI yang dibentuk berdasarkan KK 1948 mengambil keputusan untuk meleburkan diri ke dalam BMKN. Maka, badan baru itu dapat memulai aktivitasnya dengan menggunakan pegawai, kantor sekretariat, perlengkapan, dan keuangan yang dimiliki LKI setelah mendapat persetujuan Menteri PP dan K. Sebagai badan hukum, BMKN memilih bentuk perkumpulan, dengan berasaskan "kerakyatan dan kebebasan." Sebagai sebuah perkumpulan, BMKN bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional yang merupakan getaran dan pancaran jiwa rakyat Indonesia, yang hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sewajarnya dan organis dalam masyarakat dan sejarah rakyat Indonesia.

## KONFERENSI KEBUDAYAAN

### BAB I: TENTANG GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan tumbuh dari Rakyat secara bebas.

Gerakan itu bisa bersifat organisasi atau usaha orang-seorang.

Untuk melancarkan kerja sama antara organisasi-organisasi kebudayaan dan orang-seorang, dan juga untuk memberi dorongan kepada gerakan kebudayaan umumnya, perlu diadakan suatu BADAN MUSYAWARAT KEBUDAYAAN NASIONAL. Badan itu berbentuk Badan Hukum. Pengurus Badan itu dibentuk menurut prosedur pemilihan yang telah disahkan oleh Kongres Kebudayaan.

Tugas dan kewajiban badan itu ialah:

- Merapatkan perhubungan dan mengadakan koordinasi antara organisasi-organisasi dan orang-seorang dalam kalangan kebudayaan untuk pembangunan dan perkembangan Kebudayaan Nasional.
- Menyelenggarakan putusan-putusan Kongres.
- Untuk pekerjaan sehari-hari badan itu membentuk BADAN PEKERJA. Badan Pekerja itu mempunyai Sekretariat.

### BAB II: LAPANGAN GERAKAN KEBUDAYAAN

Gerakan Kebudayaan meliputi usaha-usaha di lapangan:

1. Kesenian.
2. Ilmu Pengetahuan.
3. Filsafat.

### BAB III: USAHA KEBUDAYAAN DAN PEMERINTAH

1. Pemerintah mengadakan kesempatan *sebaik*-baiknya untuk perkembangan kebudayaan rakyat.
2. Pemerintah menjaga terjaminnya kebebasan dan kedemokrasian perkembangan usaha-usaha kebudayaan.

### BAB IV: HAL KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL

Pada tiap-tiap waktu yang tertentu diadakan KONGRES KEBUDAYAAN

NASIONAL.

Putusan-putusan KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL yang mengikat hanya diambil dengan suara bulat.

KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL bersifat pengenalan, perbandingan dan pertukaran bentuk-bentuk kebudayaan di Indonesia.

(Sumber: *Warta Kebudayaan/BMKN*, 1954)

Setelah dengan suara bulat semua organisasi kebudayaan/kesenian menyepakati berdirinya BMKN, langkah selanjutnya adalah penetapan sebagai badan hukum. Dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. J.A.5/109/10, usul pembentukan BMKN beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disahkan, dan BMKN diakui sebagai Badan Hukum.

#### PIAGAM PENDIRIAN

Konperensi Kebudayaan di Jakarta, dilangsungkan pada tanggal 12-14 April 1952, sebagai lanjutan Kongres Kebudayaan Indonesia di Bandung pada tanggal 5-11 Oktober 1951 dan telah mendapat kekuasaan penuh dari Kongres Kebudayaan Indonesia tsb. Dalam sidang pada hari Senin tanggal 14 April 1952, dengan suara bulat memutuskan berdirinya suatu:

#### **Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional**

Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional itu dibentuk menurut dasar-dasar seperti tercantum dalam Kesimpulan-kesimpulan Konperensi terse-but di atas, tentang Organisasi Kebudayaan.

Dengan suara bulat telah diputuskan pula, bahwa yang menjadi anggota-anggota Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional pada hari berdirinya adalah organisasi-organisasi dan orang-seorang yang tersebut dalam daftar terlampir.

Jakarta, 14 April 1952

PIMPINAN KONPERENSI TSB.

Ketua,

Sekretaris Umum,

Gaos Hardjasumantri

Suratno Sastroamidjojo

Penetapan Menteri Kehakiman tersebut dimuat dalam Tambahan Berita-Negara RI, tanggal 23 Agustus 1952 Nr.77. Kutipan secara lengkap surat penetapan tersebut adalah sebagai berikut.

Tambahan Berita-Negara RI, tanggal 23 Agustus 1952 Nr.77.

Nr 77 1952

**ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT**

-----  
KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 23 Agustus 1952, No. JA.5/109/10

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 7 Agustus 1952 dari:

1. R. Gaos Hardjasoemantri,
2. Trisno Soemardjo,

Ketua dan Penulis dan bersama-sama menjadi pengurus dan selaku itu dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut di bawah ini:

Mengingat pasal 1 dan 3 dari firman Kerajaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad Indonesia No. 64), sebagaimana terakhir diubah menurut Ordonansi tertanggal 4 Juli 1938 (Staatsblad No. 267) dan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (Staatsblad No. 537);

## Memutuskan :

Mengesahkan anggaran dasar perkumpulan Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional berkedudukan di Jakarta, sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum.

Kutipan dsb;

Sesuai dengan daftar tersebut:  
Kepala Bahagian Badan-badan Hukum,  
Pegawai yang diperbantukan,  
A.J.A. THEIJS

Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa nama lembaga itu adalah Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional Indonesia, bukan “Musyawarah” seperti yang sering disebut dan ditulis orang. BMKN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan usianya. Hingga saat ini belum pernah terdengar pernyataan resmi bahwa lembaga ini dinyatakan bubar. Asasnya adalah kerakyatan dan kebebasan (pasal 2), sifatnya menghubungkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha organisasi-organisasi dan orang-seorang di lapangan kebudayaan (pasal 3). Adapun maksud dan tujuan didirikannya BMKN adalah membangun dan mengembangkan kebudayaan nasional (pasal 4), yaitu di lapangan kesenian, ilmu pengetahuan, dan filsafat (pasal 5).

Mengenai usaha-usaha dalam memajukan kebudayaan bangsa, penyelenggaraan Kongres Kebudayaan merupakan salah satu tugas pokok BMKN, bukan pemerintah. Dalam pasal 6 usaha-usahanya dirinci sebagai berikut:

1. Mengadakan kongres kebudayaan nasional.
2. Membantu usaha dan mendorong pemerintah dan partikelir membangun dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, antaranya dalam:
  - a. memelihara perpustakaan;

- b. mengadakan sayembara dan menyediakan hadiah tahunan dan hadiah kehormatan di salah satu lapangan kebudayaan;
  - c. menyelenggarakan pameran dan pertunjukan serta museum-museum mengenai hasil kebudayaan Indonesia dan daerah di lapangan kebudayaan;
  - d. mengadakan penyelidikan dan menggiatkan usaha penyelidikan di lapangan kebudayaan;
  - e. usaha-usaha mencipta;
  - f. usaha-usaha pendidikan kebudayaan;
  - g. usaha-usaha mendidik semangat kritis di lapangan kebudayaan.
3. Menyelenggarakan hubungan kebudayaan dengan luar negeri;
  4. Dan lain-lain.

Keanggotaan BMKN dibagi menjadi dua macam, yaitu anggota organisasi kebudayaan dan orang perorang. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 7, yang dapat diterima sebagai anggota BMKN ialah: a) tiap-tiap organisasi, baik yang bersifat badan hukum maupun bukan, yang seluruh pengurusnya dan anggotanya terbanyak adalah warga Indonesia, yang anggaran dasarnya berusaha menyelenggarakan kebudayaan Indonesia atau sebagainya; dan b) orang-orang warga Indonesia. Anggota organisasi mempunyai hak dua suara sedangkan anggota perorangan satu suara.

Mengenai pengurus, dalam pasal 10 Anggaran Dasar diatur bahwa pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat umum. Dalam rapat pembentukan BMKN pada 14 April 1952, telah terpilih 20 orang pengurus dan tujuh orang Badan Pekerja sehingga nama-namanya dimasukkan dalam Anggaran Dasar. Nama-nama itu adalah sebagai berikut:

1. S. Mangunsarkoro - Ketua Pengurus
2. R. Gaos Hardjasoemantri - Anggota Pengurus dan Ketua Badan Pekerja
3. Trisno Sumardjo - Penulis I, Pengurus dan Badan Pekerja
4. Anas Ma'ruf - Penulis II, Pengurus dan Badan Pekerja
5. Mohamad Said, anggota Badan Pekerja

6. Intojo, idem,
7. Armijn Pane, idem,
8. J.E. Tatengkeng, idem,
9. Dr. Suharso, idem,
10. Mr. Moh. Syah, Anggota Pengurus
11. Achdiat Kartamihardja, idem,
12. Mr. Wongsonegoro, idem,
13. Suratno Sastroamidjojo, idem,
14. S. Sumardjo, idem,
15. Boejoeng Saleh, idem,
16. Joebaar Ajoeb, idem,
17. Sugito, idem,
18. MA. Salmun, idem,
19. Prof. Mr. Sunarjo Kolopaking, idem,
20. D. Marpaung, idem.

Pengurus dapat membentuk badan-badan istimewa sekaligus menetapkan bahwa Ketua Pengurus akan berganti-ganti, dipilih untuk masa jabatan tiga bulan, tetapi apabila habis masanya boleh dipilih lagi. Setelah S. Mangoensarkoro menjadi Ketua Pengurus pertama, pada giliran kedua terpilih Mr. Wongsonegoro, dan yang ketiga Dr. Bahder Djohan. Sebagai Badan Pekerja dipilih sebagai berikut:

1. Gaos Hardjasoemantri, sebagai Ketua
2. Anas Ma'ruf, sebagai Penulis (hingga Trisno Soemardjo kembali dari perjalanannya di luar negeri dan kemudian digantikan oleh Joebaar Ajoeb).
3. Moh. Said, kemudian digantikan oleh Mr. St. Moh. Sjah.
4. Intojo
5. Armijn Pane
6. Dr. Soeharso, dari Surakarta; kemudian digantikan oleh S. Sumardjo dari Bandung.
7. J.E. Tatengkeng, dari Makassar

Di samping BMKN Pusat, sesuai dengan bunyi pasal 12, dapat dibentuk Badan Musyawarat Daerah dan Badan Musyawarat setempat. Yang dimaksud dengan Badan Musyawarat Setempat adalah badan untuk melaksanakan usaha-usaha seperti tercantum dalam pasal 6. Adapun yang dimaksud dengan Badan Musyawarat Daerah adalah badan yang dibentuk di tiap-tiap lingkungan kebudayaan yang luasnya hampir sama dengan provinsi. Di dalam lingkungan kebudayaan itu dapat pula dibentuk Badan Musyawarat Setempat. Batas-batas geografis Badan Musyawarat Daerah ditentukan oleh rapat umum, sedangkan untuk Badan Musyawarat Setempat oleh rapat Badan Musyawarat Daerah.

Dengan status organisasi berbadan hukum, dilengkapi dengan struktur organisasi dan pengurus serta program kerja yang jelas, keberadaan BMKN memberikan sumbangan besar terhadap upaya pemajuan kebudayaan bangsa. BMKN merupakan satu-satunya organisasi kebudayaan yang mengkoordinasikan berbagai organisasi kebudayaan/kesenian dan anggota perorangan. Organisasi ini terus berkembang, dan berdasarkan catatan BMKN sampai dengan 1956 jumlah anggota BMKN orang-seorang sebanyak 181 orang dan organisasi sebanyak 257, yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara.<sup>65</sup>

#### Kongres Kebudayaan 1954

Kongres Kebudayaan 1954 diselenggarakan pada 18-23 September 1954 di Surakarta. Berbeda dengan kongres sebelumnya, dalam KK kali ini ada dua keistimewaan:

1. Kongres disiapkan oleh lembaga kebudayaan baru, yaitu Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN).
2. Kongres diselenggarakan bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan Rapat Umum BMKN.

Kalau kongres yang pertama di Magelang tahun 1948 baru sampai pada meletakkan dasar-dasar kebudayaan nasional, dan kongres yang kedua di

65. Berdasarkan data/daftar yang dihimpun oleh BMKN tahun 1956.

Bandung tahun 1951 mempersoalkan sekitar kesusastraan, hak cipta, dan film, maka kongres ketiga pada 1954 ini menyoroti pendidikan kebudayaan bagi kaum pelajar, masyarakat kota, buruh, dan tani. Pilihan tema ini diputuskan dalam sidang Pengurus BMKN keduabelas tanggal 18, 19, dan 20 Oktober 1953. Dalam sidang tersebut diputuskan dua hal: 1) Bahwa BMKN akan mengadakan Rapat Umum pada April 1954 di Surakarta; 2) Bersamaan dengan Rapat Umum tersebut akan dilanjutkan dengan simposium dengan tema: "Pendidikan Kebudayaan".

Dalam rapat tersebut juga disepakati kriteria penunjukan *prae-advies*, yaitu:

1. seorang dari kalangan perguruan;
2. seorang dari kalangan seniman yang banyak mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk masyarakat;
3. seorang kalangan masyarakat seniman yang mengetahui soal-soal pendidikan kebudayaan untuk massa buruh dan tani.

Dalam sidang keempat belas, 1-6 Februari 1954, terjadi perkembangan baru, yaitu bahwa rencana penyelenggaraan simposium diganti menjadi KK III. Waktu penyelenggaraan Rapat Umum BMKN dan KK, yang semula direncanakan April 1954, diundur karena dikhawatirkan para peserta masih diliputi rasa cemas akibat ancaman bahaya gunung Merapi yang sedang meletus. Akhirnya, pada sidang kelima belas pada 3 Maret 1954 diputuskan bahwa Rapat Umum BMKN dan KK ditunda dan akan diselenggarakan pada 18-23 September 1954. Kongres diselenggarakan di Hotel Dana, Jl. Slamet Rijadi, Surakarta. Syarat untuk dapat menjadi peserta kongres adalah:

1. Datang ke kongres atau mendaftarkan diri dengan disertai keterangan kegiatan kebudayaan/kesenian atau mandat dari organisasi dengan menerangkan apakah ia wakil organisasi atau peninjau dari instansi-instansi pemerintah.
2. Menyokong sebanyak Rp50 bagi saudara-saudara yang datang dari luar kota Surakarta, guna menyokong biaya kongres. BMKN dan Panitia Penerima Kongres menyediakan penginapan dan makan peserta selama berkongres.

3. Untuk yang datang dari luar Jawa, maka ongkos kapal lautnya akan diganti separo oleh BMKN dan penggantinya akan dilakukan di Sekretariat BMKN.

Tema pokok, yaitu masalah pendidikan kebudayaan, yang ditinjau dari tiga sudut kepentingan bangsa Indonesia, akan dibahas lewat penyajian makalah tokoh-tokoh berikut ini: "Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Sekolah-sekolah di Indonesia," dengan *pre-adviseur* S. Mangunsarkoro dan pendebat utama Bakri Siregar; "Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kota-kota di Indonesia," dengan *pre-adviseur* Rivai Apin dan pendebat utama M.A. Salmun dan Boejoeng Saleh; "Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kaum Buruh dan Tani," dengan *pre-adviseur* A.S. Dharta dan pendebat utama Mr. Kusna Puradiredja dan Sugardo.

Dalam pidato sambutannya, Menteri PP dan K Mr. Muhamad Yamin mengingatkan lagi tentang kondisi bangsa yang telah mengalami penjajahan. Tekanan jiwa itu rupanya melumpuhkan budi dan daya bangsa kita, dan memerosotkan daya cipta dan gaya cipta bangsa Indonesia, yang pada zaman lampau telah dapat mewujudkan ketatanegaraan, seni bangunan dan pahat, kesenian sastra, dan kebudayaan pikiran.<sup>66</sup> Lebih jauh lagi, hilanglah kepercayaan atas diri sendiri dan timbul perasaan kecemasan yang sangat merintangangi perkembangan jiwa dan kemajuan bangsa. M. Yamin prihatin bahwa kini dalam jiwa rakyat Indonesia ada kekaguman terhadap hasil-hasil kebudayaan Barat. Menurutnya, kita harus kembali pada "jiwa bangsa Indonesia yang di zaman dulu terang pendiriannya dan nyata tujuannya, yang memberi gaya kepada kesenian sebagai yang melahirkan fikiran dan tinjauan hidup."<sup>67</sup>

Jiwa bangsa Indonesia yang tertekan berabad-abad itu ternyata masih mempunyai kemampuan terbuka akan pandangan baru dan menampakkan semangat dan kekuatan dalam menghadapi perjuangan, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan. Dalam rangka pembangunan bangsa berbasis budaya, M. Yamin merumuskan cita-cita bangsa untuk menjadi "Bangsa

66. *Budaya*, September/Oktober 1954, hlm. 2.

67. *Ibid*, hlm. 3.

Besar”, “Bangsa Budaya”, dan “Negara (Kesatuan) Budaya”. Untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia, menurut Yamin, kita harus tetap berpegangan pada sifat-sifat kebangsaan, walaupun jiwa kita akan terbuka bagi unsur-unsur kebudayaan Barat. “Setiap warga Negara Indonesia harus menjadi tenaga kebudayaan, sehingga titik tujuan ialah terwujudnya: Bangsa Budaya; Bangsa yang memiliki pikiran budaya, yang mempunyai daya budaya, yang meliputi segenap kehidupan lahir dan batin.” Menurut Yamin, yang dimaksud dengan “Kebesaran Bangsa” dan “Negara Kesatuan Budaya: “adalah kesatupaduan semangat budi dan daya tidak mengenal kepentingan golongan atau daerah, akan tetapi mengarahkan segenap usahanya kepada kebesaran Nusantara sebagai keseluruhan.” Dari rumusan ini jelas bahwa yang dimaksud dengan “kesatuan budaya” bukan seragamnya kebudayaan Indonesia, melainkan kesatupaduan semangat memajukan kebudayaan masing-masing suku bangsa. Ia meyakini bahwa dasar bagi kesatupaduan untuk mewujudkan Negara Budaya dan Bangsa Budaya sudah ada dan mulai tertanam dalam sanubari setiap warga negara. Salah satu pengikat kesatupaduan itu adalah Pancasila, yang menurut Yamin adalah “suatu pikiran budaya dan pendirian hidup nasional yang sesuai dengan sifat-sifat kebangsaan, yang dapat menjadi pedoman hidup berbangsa.” Untuk mewujudkan cita-cita itu, diperlukan peningkatan mutu pendidikan demi “melancarkan dan memperkuat suatu Bangsa Negara Indonesia yang disinari suatu kebudayaan nasional sebagai bangsa yang memiliki peradaban.”<sup>68</sup>

---

68. *Budaya*, September/Oktober 1954, hlm. 5.

## KESIMPULAN KONGRES KEBUDAYAAN 1954

### Kesimpulan Seksi Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Sekolah

1. Agar pendidikan kebudayaan untuk masyarakat sekolah dapat berjalan sebaik-baiknya, maka haruslah jumlah maupun macam sekolah itu sampai cukup meskipun seluruh sektor kebudayaan itu harus mendapat perhatian yang seksama hingga dapatlah terjamin mutu-mutunya.
2. Yang terutama diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan kebudayaan itu ialah potensi kebudayaan yang memberi kemungkinan perkembangan daya kreasi.
3. Jalan pelaksanaan pendidikan kebudayaan ini berdasarkan azas-azas pendidikan nasional yang demokratis.
4. Dengan berkembangnya demokrasi di lapangan sosial ekonomi politik, kebudayaan Indonesia akan merupakan kebudayaan rakyat sebagai manifestasi daripada hidup kerakyatan.
5. Untuk menjamin pertumbuhan kebudayaan yang harmonis sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan kebudayaan tersebut di atas, haruslah diadakan sistem pendidikan sehingga pendidikan kesenian dan pandangan hidup mendapat tempat yang semestinya di samping ilmu pengetahuan dan kecakapan.
6. Tiap-tiap kebudayaan daerah mengandung kemungkinan berkembang menjadi kebudayaan persatuan, jika jiwa penggerak hidupnya tidak lagi bersifat kedaerahan melainkan persatuan dan daerahnya dapat meluas meliputi seluruh Indonesia. Lain daripada itu tiap-tiap kebudayaan daerah itu mengandung unsur-unsur yang dapat disumbangkan kepada pertumbuhan kebudayaan persatuan yang merupakan kebudayaan rakyat.
7. Pendidikan pandangan hidup diberikan secara praktis bersifat tuntutan dalam menghadapi alam dan masyarakat sekitarnya hingga akhirnya dapat menentukan tujuan dan keyakinan hidup dengan teratur dan seksama.

8. Pendidikan agama diberikan dan diterima dalam suasana yang tidak ada paksaan supaya dapat berpengaruh baik dalam pembentukan keyakinan hidup.
9. Untuk menolong tumbuhnya kesadaran hidup batin dan pembentukan keyakinan hidup, diberikan pengajaran ilmu jiwa yang ditujukan pada hidup sosial dan pembentukan watak.
10. Agar pendidikan kesenian buat tiap anak dapat memberi hasil maksimum maka haruslah diberikan dengan mengingat bakat perseorangan. Bagi yang berbakat baik dapatlah diadakan usaha tambahan pendidikan kesenian di luar hubungan kelas.
11. Lembaga pendidikan tinggi kesenian perlu lekas ada berdasarkan kemungkinan dan keadaan yang nyata.
12. Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai bahasan budaya, haruslah mendapat tempat yang sewajarnya dalam rangka pendidikan kebudayaan.
13. Badan-badan kependuan dan organisasi-organisasi pelajar merupakan tempat perkembangan kebudayaan yang penting.

#### Usul-Usul Seksi Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Sekolah

1. Mengajukan kepada organisasi-organisasi kebudayaan untuk mengusahakan adanya Balai Budaya/Gedung Kesenian dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perwakilan-perwakilan Jawatan Kebudayaan.
2. Mengusulkan pada Pemerintah menyatakan sistem Karundeng sebagai sistem Nasional tulis cepat Bahasa Indonesia.
3. a) Mengusulkan kepada pemerintah untuk menyempurnakan susunan dan usaha Panitia Sejarah Nasional.  
b) Mengusulkan pada pemerintah agar supaya selekas mungkin mengusahakan buku-buku pelajaran sejarah yang seragam dan berdasarkan garis Nasional.
4. Mengusulkan kepada pemerintah supaya meletakkan dasar nasional dan

demokratis dalam pendidikan dan menyesuaikan buku-buku pelajaran dengan dasar-dasar ini.

5. Dalam menghadapi masa pembangunan kebudayaan dewasa ini, sudahlah sewajarnya anggaran belanja PPK sedikit-dikitnya harus 25 persen dari anggaran negara.
6. Benda-benda kebudayaan milik negara yang ada di luar negeri harus diminta kembali.
7. Supaya diadakan pendidikan kebudayaan di kalangan tentara dan polisi.
8. Membentuk Dewan Pertimbangan Lektur dan Filem.
9. Supaya diadakan pengawasan peredaran filem, dan reklame-reklame.
10. Mengadakan konservatori kesenian daerah.
11. Mengadakan Biro Penterjemah Negara.
12. Mengadakan Panitia Penyelidikan Buku-buku Lama tentang filsafat.
13. Mengadakan Pekan Raya Kebudayaan.
14. Memperluas Jawatan Kebudayaan sampai ke Kabupaten.
15. Membentuk Lembaga Filem dan Perpustakaan Lektur Filem yang baik di setiap kota.
16. Menggunakan filem sebagai alat pendidikan masyarakat.
17. Supaya soal kebudayaan daerah menjadi acara dalam kongres kebudayaan yang akan datang yaitu tentang hubungan kebudayaan daerah dengan kebudayaan nasional.
18. Menetapkan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pokok di semua sekolah (termasuk sekolah vak).
19. Bahasa dan huruf Jawa supaya diajarkan di daerah-daerah yang berkepentingan.
20. Membuat kode pendidikan bagi guru-guru.
21. Mengadakan rencana pelaksanaan pendidikan intergral yang berbentuk Undang-undang.

## Kesimpulan-Kesimpulan Seksi Pendidikan Kebudayaan untuk Masyarakat Kota

### Bab I

Keadaan ekonomi dan sosial di kota-kota Indonesia dewasa ini yang bermacam-macam sifat dan coraknya, tidak dapat mengembangkan dengan sempurna potensi, dan hubungan kebudayaan yang ada, serta tidak dapat memperkuat gaya hidup yang memupuk daya cipta ke arah manusia bermartabat.

### Bab II

1. Tujuan pendidikan kebudayaan adalah membangun manusia budaya, yang cinta kepada tanah air, bangsa, kemanusiaan, serta memelihara keseimbangan kehidupan rohani dan jasmani.
2. Kebudayaan itu merupakan pernyataan pikiran, kehendak dan perasaan rakyat pada keseluruhannya (buruh, pelajar, pedagang, seniman-seniman dan lain-lain) yang sama kepentingan hidupnya.
3. Kebudayaan itu merupakan gaya hidup yang dinamis kreatif dan nasional demokratis.
4. Kebudayaan itu hendaknya bersifat nasional yang menerima unsur-unsur kebudayaan daerah, kesempatan dan tradisi masa lampau maupun umum kebudayaan luar Indonesia secara kritis.

### Bab III

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas hendaknya kita memperbaiki gejala-gejala kebudayaan yang telah ada, serta meluaskan dan menyediakan kesempatan yang mungkin untuk pembentukan watak dan penyaluran tenaga dan bakat kreatif di lapangannya masing-masing dengan:

- a. Lingkungan hidup (asrama-asrama sosial, rukun tetangga, rukun kampung dan rumah sakit dan sebagainya).
- b. Lingkungan persekutuan: (perhimpunan kesenian, kebudayaan, sosial, politik dan sebagainya).

- c. Lembaga (museum, perpustakaan rakyat, laboratorium, taman-taman hiburan).
- d. Sekolah-sekolah dari segala tingkat.

Penjelasan:

- I. Untuk memperbaiki mutu gejala-gejala kebudayaan yang telah ada dalam lapangan:
  - a. Film:
    - 1) mengadakan perbaikan komposisi Panitia Sensor dengan sebagian besar terdiri dari pendukung-pendukung kebudayaan;
    - 2) meminta perlindungan Pemerintah bagi pengusaha-pengusaha film nasional untuk mempertinggi mutu dan memungkinkan perkembangan seni film.
  - b. Lektur:
    - 1) mengadakan pengawasan terhadap perhatian dan jenis bacaan.
    - 2) penambahan jumlah dan tempat-tempat bacaan.
  - c. Radio:  
Mengadakan pengawasan terhadap mutu siaran dan tersebarnya siaran itu secara luas.
- II. II. Supaya Pemerintah membentuk dewan pembangunan kota dan berkewajiban membimbing dan memberi corak pada kota serta membangkitkan keadaan kolektif dalam alam kehidupan kota.
- III. Mengingat *research* mengenai latar belakang pertumbuhan kota dalam sejarahnya dan urbanisasinya untuk pembentukan pribadi kota.
- IV. Memikirkan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam pergaulan hidup masyarakat kota dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin tenaga kreatif antaranya dengan jalan:
  - a. Menjadikan tempat-tempat penciptaan dan tempat-tempat yang menyalurkan hasil-hasilnya secara luas dan merata dengan mengadakan sanggar-sanggar bekerja, museum-museum, gedung pertunjukan, balai-balai budaya, taman-taman kebudayaan (taman

- untuk anak-anak dan rekreasi).
- b. Memberikan motif-motif baru dan tanggapan-tanggapan yang sesuai terhadap tema-tema yang lama terdapat pada kumpulan-kumpulan kesenian rakyat (drama dan musik).
- V. Untuk mempertinggi kecerdasan berfikir dan pengertian kebudayaan haruslah diadakan bentuk-bentuk pendidikan dalam tempatnya yang leluasa, seperti ceramah-ceramah, kursus, sekolah, akademi, sekolah-sekolah tinggi.
  - VI. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi perkembangan bakat dan tenaga kreatif haruslah diberikan perhatian terhadap: tempat penampungan, pajak, subsidi, dana budaya dan sebagainya.
  - VII. Dalam hubungan ini diserukan pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan negara memperbesar jumlah anggaran belanja, terutama yang mengenai usaha-usaha kebudayaan.

#### Kesimpulan Seksi Pendidikan Kebudayaan untuk Buruh dan Tani

1. Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1954 yang berlangsung di Solo dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 September 1954, setelah melakukan perbincangan mengenai masalah pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani, dapat menarik kesimpulan betapa pentingnya pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani sebagai unsur yang pertama dan utama guna pertumbuhan kebudayaan nasional dan bagi kehidupan kaum buruh dan tani itu sendiri. Kongres dapat menarik kesimpulan, bahwa sesuatu garis pendidikan kebudayaan bagi kaum buruh dan tani yang dapat dilanjutkan kepada masyarakat, para budayawan, organisasi-organisasi kebudayaan dan pemerintah adalah suatu cara pendidikan yang mengubah kejiwaan pikiran, perasaan, kemauan yang meliputi pendidikan kesenian, kecerdasan, pandangan hidup, kesusilaan, kemasyarakatan dan kepribadian.

## II.

### 1. Yang berhubungan dengan Pemerintah:

- a. Anggaran Belanja Kementerian PP dan K diperbesar terutama mengenai kebudayaan.
  - b. Menggiatkan pekerjaan-pekerjaan research di lapangan kebudayaan, dengan di dalam pelaksanaannya menarik sebanyak mungkin para budayawan.
  - c. Memikirkan bantuan bagi kegiatan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani dengan menggunakan saluran-saluran organisasi-organisasi buruh dan tani.
  - d. Memperhebat pekerjaan kebudayaan PBH (Pemberantasan Buta Huruf) dengan memberikan juga peranan kepada para budayawan.
  - e. Untuk mencapai seluas mungkin kaum buruh dan tani, Jawatan Kebudayaan hendaknya diluaskan sampai ke kecamatan-kecamatan seperti halnya dengan Jawatan-Jawatan: Penerangan, Pendidikan Masyarakat dan Pertanian.
- ### 2. Yang berhubungan dengan BMKN:
- a. Supaya mulai melangkahakan usaha-usaha untuk menggiatkan pendidikan kebudayaan di kalangan kaum buruh dan tani.
  - b. Sebagai faktor stimulasi menyelenggarakan Pekan Kesenian untuk kaum buruh dan tani.
  - c. Menerbitkan sendiri lektur-lektur kebudayaan secara populer dan murah bagi kaum buruh dan tani.
  - d. Mendorong berdirinya Balai-balai Budaya secara meluas.
  - e. Supaya BMKN lebih menjelaskan usaha-usahanya di lapangan kebudayaan kepada masyarakat dan memperjuangkan subsidi yang mencukupi.

### Usul-usul:

1. BMKN supaya menuntut kepada pemerintah keringanan terhadap pajak yang dibebankan kepada seniman dan hasil-hasil seni ciptaannya.

2. Masalah perkawinan dan segala konsekuensinya supaya dimasukkan sebagai masalah kehidupan kebudayaan bagi BMKN.
3. Menyambut terbentuknya Dewan Pertimbangan Siaran Radio sebagai langkah baik bagi Pemerintah, maka kongres supaya mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas Pemasukan Lektur dan Film dengan komposisinya yang terdiri dari sebagian besar kaum budayawan.

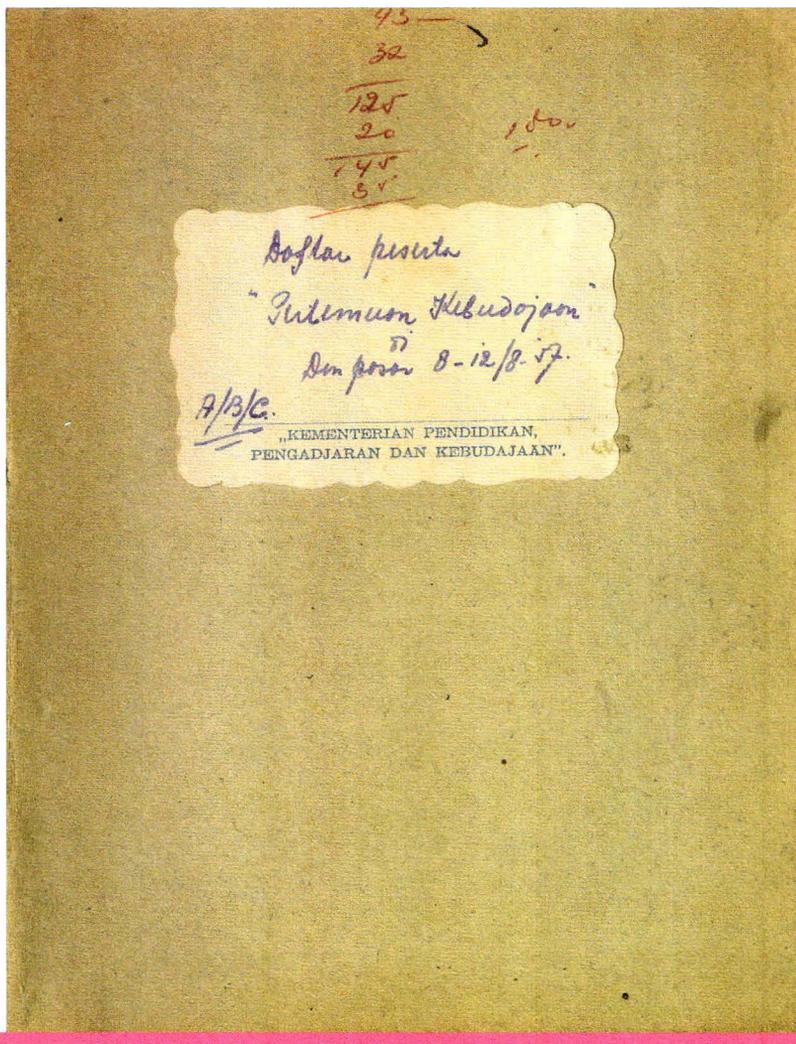
### Kongres Kebudayaan 1957

Sebagaimana diuraikan di atas, penyebutan acara pertemuan budayawan dan seniman di Bali 1957 menyimpan tanda tanya, apakah kegiatan itu Rapat Umum BMKN, Pertemuan Kebudayaan, Kongres BMKN, atau Kongres Kebudayaan? Dalam beberapa terbitan, penyebutan itu tidak konsisten, kadang-kadang disebut “Rapat Umum BMKN,” “Pertemuan Kebudayaan,” “Konferensi Kebudayaan,” “Simposium Kebudayaan,” atau “Kongres BMKN.”

Dalam *Warta Kebudayaan* no. 2, terbit November 1956, pertemuan itu disebut “Rapat Umum BMKN.” Disebut demikian karena pertemuan ini memang sebuah Rapat Umum BMKN sebagaimana terjadi pada 1954, ketika KK diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Rapat Umum BMKN. Di samping itu, para pengurus BMKN juga merasa lebih baik tidak mengadakan kongres dan cukup dengan pertemuan biasa saja. Alasannya, kongres-kongres di Magelang (1948), Bandung (1951), Solo, (1954), dan Konferensi Kebudayaan (1952) telah meletakkan dasar-dasar untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. Mereka beranggapan yang diperlukan adalah usaha yang lebih mengarah pada soal-soal praktis, bukan teoritis. Di samping Rapat Umum BMKN, juga akan diadakan acara lain yang disebut “Simposium Kebudayaan,” di mana akan dibahas dua prasaran, yaitu “Kebudayaan dalam Konstitusi” oleh Boejoeng Saleh dan “Organisasi Koordinan untuk Negara dan Masyarakat” oleh Trisno Sumardjo.<sup>69</sup>

---

69. *Warta Kebudayaan*, no. 2/BMKN, 1956.



Cover buku daftar peserta (tulisan tangan panitia)  
Pertemuan Kebudayaan di Denpasar, Bali, pada 8-12 Agustus 1957.  
(Dari Koleksi Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin, Jakarta)

No	Nama	Alamat	Ket:
1.	Mj. M. Oppen	Dj. Tjilendek 8, Bogor	Bogor
2.	M. Oppen	- idem -	Perindjaja
3.	Ramadlan H. Hb.	. Tjimonidiri 22, Djbl.	Bogor
4.	Sjip Rosidi	. Kramat Pak 20/10	- idem -
5.	Utuy Tulang Antoni	. Pahlilan 03, Djatinegara	- idem -
6.	Go Kien King	. Klati Sugi 2, Djbl.	Perindjaja
7.	Mi S. Wang	. Dj. Djiranda 26, ..	- idem -
8.	Moh. R. Hartohusemeb	. Petjagaln 40, bl. Ponding	Sobagga
9.	R. Utom Muckler	. Kebunhambong 04 Bogor	- idem -
10.	Mj. Roehmsinal Muckler	- idem -	- idem -
11.	Moh. Nief Kabis	. Tjipora 42, Djbl	- idem -
12.	Pawoto	. Gendingda Rone 04 Djbl	Perindjaja

Isi buku daftar peserta (tulisan tangan panitia)  
 Pertemuan Kebudayaan di Denpasar, Bali, pada 8-12 Agustus 1957.  
 (Dari Koleksi Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin, Jakarta)

Rencana penyelenggaraan Rapat Umum itu diperbincangkan hingga akhirnya mencapai kesepakatan.<sup>70</sup> Bertolak dari Anggaran Dasar BMKN, yang menyebut bahwa dua tahun sekali BMKN mengadakan Rapat Anggota Pleno (Rapat Umum), maka ditetapkanlah rapat itu, yang akan diadakan di Makassar pada 14-20 April 1957. Rapat akan dihadiri oleh 170 organisasi dan 201 perseorangan. Acara pokok adalah penyampaian Laporan Pengurus dan Pemilihan Pengurus BMKN tahun 1957/1958. Akan ada pula acara penyerahan Hadiah Kesusastraan BMKN 1955/1956 kepada enam orang pemenang di bidang prosa, puisi, dan esai. Sementara itu, BMKN setempat di Makassar akan meluncurkan kumpulan hasil sastra dan esai oleh para pengarang Sulawesi.

Untuk Simposium Kebudayaan yang akan menyertai Rapat Umum, ditetapkan tiga topik dan pemrasaran, yaitu "Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa" oleh Sjafei Sumardja, "Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat" oleh Trisno Sumardjo, dan "Kebudayaan dan Konstitusi" oleh Bojoeng Saleh dan/atau J.E. Tatengkeng. Pendebat atau penanggapnya terdiri atas para tokoh budayawan dan seniman dari luar Jawa, yaitu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Rencananya, acara itu juga akan diselenggarakan bersamaan dengan Pekan Kesenian. BMKN setempat merencanakan kerja sama dengan Jawatan Pelayaran (Kementerian Perhubungan) untuk mengangkut peserta dengan kapal *Djajadat*. Setiap peserta dari Jakarta dikenakan ongkos sebesar Rp400, dari Surabaya Rp300, sedangkan dari Buleleng Rp200.<sup>71</sup>

Pertemuan kebudayaan di Makassar yang telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh itu ternyata kemudian dipindahkan tempatnya ke Bali karena kesulitan keuangan dan teknis. Karena kesulitan keuangan dan teknis. disebut sebagai Kongres Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional.<sup>72</sup> Dalam surat undangan yang ditandatangani oleh Anas Ma'ruf, Sekretaris

---

70. *Warta Kebudayaan*, no.5/Januari 1957.

71. *Warta Kebudayaan*, no. 5/Januari 1957.

72. *Indonesia*, vol. 4, no. 2, 1958.

I BMKN, tertanggal 1 Juli 1957, diberitahukan bahwa di samping rapat pleno anggota BMKN, akan diselenggarakan Simposium Kebudayaan dan Pertunjukan Kesenian.

Rapat anggota BMKN akan membahas berbagai hal tentang organisasi BMKN, termasuk pemilihan pengurus. Sementara itu, untuk acara Simposium Kebudayaan, topik perbincangan dan pemrasaran yang disepakati adalah “Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa” oleh Sjafei Sumardja (ASRI Bandung), “Penyelenggaraan Kesenian Semasyarakat” oleh Trisno Sumardjo (BMKN Jakarta), dan “Kebudayaan dan Konstitusi” oleh M. Isa (PGRI Jakarta). Akan diselenggarakan juga “Pertunjukan Kesenian” yang ditampilkan oleh seniman-seniman Bali, diisi dengan tari-tarian, berikut pameran seni rupa dan kerajinan Bali.

Dalam pelaksanaannya, kongres ini mendapatkan perhatian cukup besar dari para budayawan, seniman, dan cendekiawan. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta. Sebagian dari mereka menempuh perjalanan jauh dengan alat transportasi yang masih sederhana, membayar sendiri biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi, tetapi mereka tetap bersemangat untuk hadir dan memikirkan masalah kebudayaan bersama-sama.

#### Lembar “Petunjuk” yang Diedarkan oleh Panitia KK 1957

1. Para peserta masing-masing membayar sendiri ongkos perjalanan dan penginapan dalam perjalanan.
2. Untuk para peserta dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin berangkat dalam rombongan akan diusahakan wagon tersendiri, ataupun dapat berangkat sendiri.
3. Yang datang dari luar Jawa dapat pergi sendiri-sendiri ke Denpasar ataupun berhubungan dengan Panitia Jakarta (alamat Sekretariat BMKN, Jalan Nusantara 28, Jakarta) atau dengan Panitia Surabaya.
4. Yang berangkat dari Jakarta supaya menyerahkan uang karcis kereta-api, ongkos penyeberangan (*overvaart*) dan uang penginapan di Surabaya kepada Panitia Jakarta yang akan mengurus di tempat yang dituju.

5. Dianjurkan kepada segenap para peserta Pertemuan Kebudayaan membawa surat-surat keterangan seperti surat penduduk dll., yang diperlukan dalam perjalanan. Para anggota BMKN membawa kartu anggota dan surat mandat dari organisasi.

Perincian Ongkos Perjalanan Peserta dari Jakarta

1.	Jakarta-Surabaya (Gubeng) via Jogja kelas III	Rp. 91,-
2.	Penginapan di Surabaya (losmen dan makan)	Rp. 25,-
3.	Surabaya-Banyuwangi kelas III	Rp. 32,-
4.	Banyuwangi-Gilimanuk (penyeberangan)	Rp. 25,-
5.	Gilimanuk-Denpasar (auto-bus)	Rp. 20,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 193,-</b>

Ongkos pulang-pergi menjadi: Rp. 400,-

(Sumber: Lembar "Petunjuk" KK 1957)

Satu hal yang patut dicatat, dalam KK 1957 perbedaan antara kelompok yang menganut paham humanisme realis (kiri) dengan kelompok humanisme universal (kanan) mulai memanas. Kelompok kiri dimotori oleh Lekra dan LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional, organisasi di bawah Partai Nasional Indonesia) sementara kelompok kanan dimotori oleh seniman dan budayawan Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, di bawah NU) dan kelompok netral. Menurut Ajip Rosidi, yang mengikuti kongres itu bersama Ramadhan KH, ada desas-desus bahwa Sitor Situmorang ingin menjadi Menteri Kebudayaan. Ketika itu Wiratmo Soekito menentang keras, menganggap Sitor tak layak, padahal itu hanya isu.<sup>73</sup>

Koran *Sin Po* (22/8/1957) melaporkan hasil kongres tersebut. Seksi I yang membahas "Hubungan Arsitektur dengan Seni Rupa" antara lain menegaskan bahwa, sebagai cabang kesenian, arsitektur kita mesti berusaha mengemukakan kepribadian Indonesia. Disadari pula bahwa terkait

73. *Tempo*, 27 Oktober 2003.

keindahan arsitektur sepatutnya pemerintah (pusat maupun daerah otonom) menentukan persentase pembiayaan yang berlaku atas bangunan-bangunan partikelir; 2% dari biaya pembikinan gedung-gedung golongan B (kantor, sekolah, dsb) dan 55% dari biaya pembikinan bangunan-bangunan model C (monumental).

Seksi II membahas “Penyelenggaraan Kesenian Masyarakat,” di mana peserta meninjau kehidupan kesenian dan mengemukakan penyelenggaraan kesenian masyarakat yang terbengkalai. Kehidupan bangsa Indonesia sesungguhnya menunjukkan watak yang banyak dan corak kesenian yang kaya. Keterbengkalaiannya itu menimbulkan berbagai kesulitan yang tak perlu ada. Penyelenggaraan kesenian, yaitu pernyataan-pernyataan kreatif bangsa, mesti dikembalikan perannya, sehingga kesenian bangsa bukan hanya mampu bertahan dari pengaruh yang destruktif, melainkan juga membangun. Maka, peserta kongres menuntut agar seluruh perwakilan dan lembaga negara menjalankan tindakan-tindakan demi mendukung penyelenggaraan kesenian semasyarakat.

Selanjutnya, Seksi III membahas “Kebudayaan dan Konstitusi Ditinjau dari Sudut Pendidikan,” di mana disadari bahwa negara sebagai pengatur perlu memimpin dan merangsang kegiatan dalam hidup kebudayaan. Sidang menyepakati bahwa soal-soal yang berhubungan dengan kebudayaan perlu dimasukkan ke dalam konstitusi yang akan datang secara jelas. Mengingat hubungan antara pendidikan dan pengajaran dengan kebudayaan, hendaknya soal-soal pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dimasukkan dalam satu bagian tersendiri. Untuk itu, kongres menganjurkan untuk menggunakan beberapa Pasal UUD 1945 dan UUDS 1950 ditambah dengan “Universal Declaration of Human Rights” sebagai alat pembandingan.

Bagian yang amat menarik dari prasaran Seksi III adalah tinjauan mengenai posisi kebudayaan dan pendidikan dalam UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 31 dan 32 UUD 1945, kedua bidang itu dinaungi oleh Bab XIII yang berjudul “Pendidikan.” Menurut pemrasaran, baik pemberian judul bab maupun penempatan bidang kebudayaan dalam bab itu tidak tepat.

Sebaiknya kebudayaan dibuatkan bab tersendiri, atau judul Bab XIII diganti menjadi BAB XIII “Kebudayaan.” Alasannya, pendidikan adalah alat demi menuju ke kebudayaan yang tinggi.

### Kongres Kebudayaan 1960

Setelah KK 1957, BMKN kembali menyelenggarakan pertemuan yang disebut Kongres BMKN di Bandung pada Juli 1960. Sama seperti halnya KK 1957, data lengkap tentang penyelenggaraan dan kesimpulan yang dihasilkan oleh KK 1960 belum dapat ditemukan. Data yang ditemukan di Pusat Dokumentasi HB Jassin antara lain menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan KK saat itu beban biaya kongres ditanggung oleh para peserta kongres, dengan bukti berupa kuitansi tanda pembayaran biaya kongres. Dari daftar nama yang mengikuti kongres tercatat nama-nama dari etnis Cina, Arab, maupun Barat. Dalam acara ini juga diberikan Hadiah Sastra BMKN antara lain puisi Ramadhan KH mendapatkan hadiah sastra nasional Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN) 1956/1957.

Terbatasnya data hasil KK 1957 dan 1960 dibandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya patut menjadi pertanyaan. Bahkan kedua kongres itu sempat luput dari sejarah pencatatan KK yang pernah diselenggarakan sesudah Indonesia merdeka. Kesaksian Ajip Rosidi yang dicatat *Tempo* menjadi penting: “Masih ada dua kongres lagi setelah kemerdekaan yang menurut Ajip sering dilupakan orang yaitu tahun 1957 di Bali dan 1960 di Bandung.” Pernyataan Ajip diperkuat oleh Ramadhan K.H. dan Saini K.M. yang ikut hadir sebagai peserta. Penelusuran lebih jauh memperlihatkan bahwa kedua pertemuan kebudayaan itu pada hakikatnya merupakan kongres kebudayaan juga, meskipun tidak disebutkan secara resmi demikian.

Beberapa sumber menunjukkan bahwa kedua pertemuan kebudayaan itu memiliki nilai sejarah yang berbeda dengan kongres sebelumnya. Sebelum ini telah dipaparkan bahwa KK 1957 menjadi wahana perdebatan panas antara kelompok humanisme realis dan humanisme universal. Dalam KK 1960, pokok masalah yang diangkat adalah “Fungsi Kebudayaan dalam

Pembangunan Ekonomi,” yang meliputi peranan ilmu dan sarjana, seni dan seniman, dan pendidikan dan pendidik. Yang ditunjuk sebagai pemrasaran adalah Prof. Soediman Kartohadiprodjo, Drs. Sudjoko, dan Sarino Mangoenpranoto. Di sini, sekali lagi gesekan antara kelompok humanisme realis dan humanisme universal memanas dan meledak menjadi peristiwa yang cukup menghebohkan. Sarat dengan aroma politik, kongres ini menjadi apa yang disebut D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail sebagai “sekelumit peristiwa ‘politik’ yang mulai merembesi sektor kebudayaan, yang taktik dan strategi ofensifnya dilancarkan di tengah-tengah berlangsungnya Kongres BMKN.”<sup>74</sup> Mungkin karena politis maka pertemuan itu tidak dianggap Kongres Kebudayaan. Namun, sebagai sebuah “peristiwa budaya” kegiatan ini patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan Kongres Kebudayaan yang pernah terjadi di Republik ini.

Kekisruhan bermula sesuai penyajian prasaran Drs. Sudjoko. Sitor Situmorang yang ditunjuk sebagai salah seorang penyanggah utama, di samping pelukis Baharudin M.S., menyatakan bahwa ia tidak melihat persoalan dalam prasarannya. Jadi, ia minta izin untuk membacakan naskah yang telah disiapkan sembari meminta agar hal itu diakui sebagai prasaran. Akhirnya, didasari toleransi oleh ketua sidang, Dr. Mudijono, permintaan Sitor Situmorang dikabulkan. Baharudin M.S. sendiri dalam pandangannya selaku penyanggah lain menyatakan tanggapan Sitor sebagai “prasaran yang tidak diminta, melainkan ditawarkan” itu sesungguhnya bukan persoalan. Menurut Baharudin, apa yang dikemukakan Sitor sangat bersifat teori dan bermuka politik, sehingga sepantasnya dibahas di Jalan Asia-Afrika (Gedung Depernas [Dewan Perancang Nasional] tempat Sitor Situmorang menjadi salah seorang anggota mewakili seniman) dan tidak di Jalan Surapati (Gedung Pertemuan Ilmu Alam Indonesia) tempat kongres berlangsung.

Suasana kongres menjadi panas dengan adanya desakan Sitor terkait Manipol dan Usdek sebagai landasan BMKN. Manipol, atau Manifesto Politik, bersumber dari pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1959 dengan

74. D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1995, hlm. 34-35.

judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita.” Sesuai dengan TAP MPRS No. I/MPRS/1960, pidato tersebut dikukuhkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara. Manipol mengandung lima unsur, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima unsur itu disingkat menjadi USDEK.

Menurut penilaian Lekra, selama ini belum pernah BMKN secara jelas menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap Manipol/Usdek. Dalam sidang, wakil-wakil dari Lekra (antara lain Joebaar Ajob, Basuki Resobowo, Boejoeng Saleh, dan Rivai Apin) menyampaikan resolusi yang intinya meminta agar BMKN dalam kongres ini menyatakan Manipol/Usdek sebagai landasan kegiatan kerjanya di masa depan. Muncullah reaksi berupa stensilan berbentuk puisi yang beredar dalam sidang pleno terakhir. Isi selebaran itu adalah usul resolusi lain mengenai Manipol/Usdek yang telah diajukan dan ditandatangani oleh lima orang penyair. Kelima penyair itu ialah Dodong Djiwapradja, Ajip Rosidi, Ramadhan KH., Toto Sudarto Bachtiar, dan Saini KM. Sikap Gaos Hardjasoemantri (Ketua BMKN) terhadap kelompok Lekra dalam KK 1960 di Bandung dinilai oleh Ajip toleran. Dalam pembentukan *Steering Committee* kongres, Gaos bukannya mencegah masuknya orang Lekra, malahan memasukkan dua orang, yaitu Rivai Apin dan Gajus Siagian, ke dalam tim bersama Oesman Effendi, Asrul Sani, dan Ilen Soerjanegara.

Atas tuduhan Lekra di atas, kelompok yang tidak sepaham dengan Lekra dan kawan-kawan memberikan perlawanan. Badan Pekerja BMKN mengeluarkan pernyataan bertanggal 13 Oktober 1960, No. 977/III/’60 yang kemudian dikirim kepada Presiden RI. Pernyataan sepanjang empat halaman spasi rangkap itu pada hakikatnya merupakan bantahan atas tuduhan yang disampaikan oleh wakil-wakil Lekra.

#### **Pernyataan BMKN sebagai Bantahan Atas Tuduhan Lekra dalam KK 1960**

1. bahwa BMKN sepanjang usianya telah menjalankan fungsinya sesuai dengan AD-ART, yaitu fungsi menggalang potensi nasional serta menyelesaikan revolusi; fungsi “*samenbundeling van krachten*” secara

- musyawarah atas dasar kemerdekaan bangsa yang diisi dengan nilai-nilai serta usaha-usaha kulturil; mencapai dukungan spontan yang bersemangat dan berdaya dari semua tenaga yang bergerak yang dilatarbelakangi oleh aliran-aliran tertentu atau tidak; dapat mempertahankan hidupnya sejak tahun 1948 hingga sekarang, dengan masih saja mendapat dukungan dari berbagai golongan dan perseorangan, yang jumlahnya makin meningkat.
2. bahwa LKI/BMKN tidak pernah menyimpang dari kepentingan nasional, dari soal memberi isi kemerdekaan, soal menyelesaikan revolusi dan soal menuruti Haluan Negara. Singkatnya, BMKN tidak menyimpang dari Pancasila, dan mendukung Usdek dan Manipol.
  3. bahwa sesuai Pasal 2 AD BMKN, kegiatan-kegiatan BMKN berdasarkan pada azas kebebasan dan kerakyatan. Artinya, kebudayaan sewajarnya tumbuh dan berkembang dari bawah. Kegiatan kebudayaan terpimpin seperti yang dirumuskan oleh Presiden Soekarno pada hakikatnya tidak bertentangan dengan azas BMKN itu. Oleh karena jika ada anggapan seakan-akan kegiatan kebudayaan terpimpin akan mengandung implikasi bahwa kegiatan kebudayaan nasional harus didikte dari atas, maka salah anggapan itu sengaja dipergunakan untuk menunggangi BMKN, guna melaksanakan ideologi segolongan dan melenyapkan eksistensi golongan-golongan lain.
  4. bahwa BMKN adalah organisasi dari Badan-badan dan perseorangan yang mempunyai kedaulatan. Dan meskipun dapat dimengerti bahwa tiap-tiap aliran ingin menyeret BMKN ke dalam orbit masing-masing, namun BMKN dalam sejarahnya telah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan yang ditempuh ialah jalan permufakatan yang terdapat dalam sifat dan nama BMKN, yakni musyawarat.

(Sumber: Arsip BMKN.)

Meski telah mengeluarkan bantahan, BMKN tetap dianggap tidak secara jelas menyatakan persetujuan/penentangan terhadap Manipol/Usdek.

Karena tuduhan tetap beredar, pada Mei 1961 kelompok humanisme universal menerbitkan majalah *Sastra* yang diketuai oleh H.B. Jassin dengan D.S. Moeljanto sebagai redaktur pelaksana. Majalah ini memuat cerpen, sajak, kritik dan esai, serta banyak memuat tangkisan balik terhadap serangan-serangan kelompok humanisme realis.

Beberapa pengarang esai yang banyak menulis di *Sastra* pada masa itu adalah Goenawan Mohamad, Arief Budiman (Soe Hok Djin), D.A. Peransi, Iwan Simatupang, Wiratmo Soekito, Trisno Sumardjo, dll. Boen S. Oemarjati, M.S. Hutagalung, Virga Belan, Salim Said juga menulis kritik-kritik di majalah tersebut. Penulis cerpen yang dimuat antara lain B. Soelarto, Bur Rasuanto, A. Bastari Asnin, Satyagraha Hoerip Soepraba, Kamal Hamzah, Ras Siregar, Sori Siregar, Gerson Poyk, B. Jass, dan lain-lain. Para penyair yang karyanya dimuat antara lain: Isma Sawitri, Goenawan Mohamad, M. Saribi Afn, Poppy Hutagalung, Budiman S. Hartojo, Arifin C. Noer, Sapardi Djoko Danomo, dan lain-lain.

Berikutnya, tidak cukup dengan bantahan dan esai dan kritik melalui majalah, kelompok ini pada 17 Agustus 1963 mengeluarkan “Manifes Kebudayaan” sebagai pernyataan sikap seniman dan budayawan Indonesia tentang cita-cita kebudayaan dan politik nasional. Para penandatangan manifesto itu menyuarakan bahwa kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia, tanpa mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain; dan bahwa Pancasila merupakan falsafah budaya mereka. “Manifes Kebudayaan” disusun dan ditandatangani sejumlah budayawan, pengarang dan pelukis Jakarta, antara lain H.B Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Soekito, Zaini, Goenawan Mohamad, Bokor Hutasuhut, Soe Hok Djin, dan lain-lain.

#### MANIFES KEBUDAYAAN

Kami para seniman dan cendekiawan Indonesia dengan mengumumkan sebuah manifes kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami.

Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan salah satu sektoral kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengahnya masyarakat bangsa-bangsa.

PANCASILA adalah falsafah kebudayaan kami.

Jakarta, 17 Agustus 1963

Usaha kelompok humanis realis untuk mengalahkan lawannya tidak berhenti, bahkan dengan lahirnya Manifes Kebudayaan itu tuduhan dan serangan semakin gencar. Polemik semakin melebar. Pada 8 Mei 1964, Bung Karno melarang Manifes Kebudayaan dengan alasan: "Karena manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis besar haluan Negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap Revolusi dan memberi kesan berdiri di sampingnya."<sup>75</sup> Dengan adanya keputusan itu, akhirnya pada 10 Mei 1964, atas nama para pendukung Manifes Kebudayaan, Wiratmo Sukito, H.B. Jassin, dan Trisno Sumardjo, mengirim surat kawat ke Presiden Soekarno yang menyatakan bahwa mereka "mematuhi larangan tersebut." Tidak hanya itu, atas nama para pendukung Manifes Kebudayaan di seluruh Indonesia, pada 19 Mei 1964 Wiratmo Soekito, H.B. Jassin, dan Trisno Sumardjo mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang isinya "memohon maaf PYM." Wiratmo Soekito memberi penjelasan demikian: "...kami minta maaf, karena telah terlambat memenuhi keinginan Pemimpin Besar Revolusi untuk mengubah Manifes, untuk membuat

75. *Antara*, 9 Mei 1964.

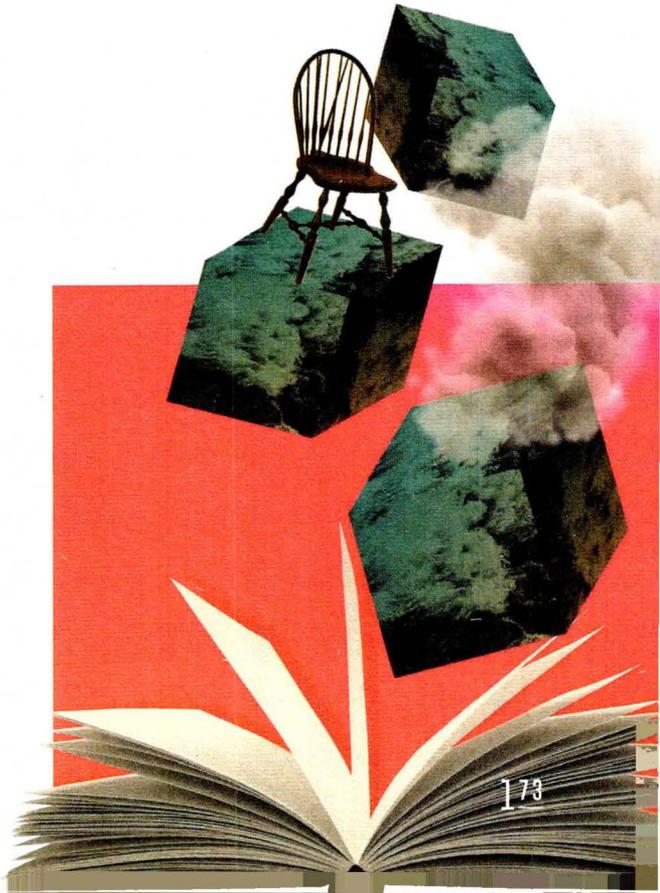
manifesto yang baru. Jadi, jelaslah, bahwa tujuan permintaan maaf itu bukannya untuk mengakhiri larangan Manifes.<sup>76</sup>

Setelah keluar larangan terhadap Manifes Kebudayaan, *Sastra* mengalami kemunduran. Demikian pula dengan keberadaan BMKN yang telah berhasil menyelenggarakan tiga kali KK, setelah KK 1960 aktivitasnya semakin berkurang. Menurut Ajip Rosidi, pada 1963, BMKN merencanakan KK lagi tapi batal karena ketegangan yang memuncak. Kemelut yang dibalut kepentingan politik itu mungkin yang menyebabkan data hasil KK 1957 dan 1960 tidak maksimal dan sulit dilacak.

Keberadaan BMKN semakin surut, meskipun setelah peristiwa pemberontakan G30S pada September 1965 giliran Lekra dan LKN yang dilarang dan dibubarkan. Peluang yang terbuka lebar itu tidak membuat kelompok humanisme universal dan kelompok kanan serta BMKN bangkit. Sebaliknya, BMKN semakin tenggelam, apalagi setelah meninggalnya Gaos Hardjasoemantri selaku Ketua Badan Pekerja BMKN karena mengalami kecelakaan mobil pada awal 1965. Bagaimanapun, periode awal kemerdekaan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kehadiran lembaga kebudayaan sebagai lembaga sosial masyarakat patut dicatat.

---

76. <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/1792>.



BAB

04

**KONGRES**  
**KEBUDAYAAN MASA**  
**PEMBANGUNAN**

---



Setelah meletus kudeta pada 30 September 1965, atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Indonesia memasuki babak sejarah baru. Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah mengembalikan keamanan dan membangun pemerintahan yang bersih dari paham komunis dan jargon-jargon politik seperti “Politik adalah Panglima,” dan “Tujuan Menghalalkan Cara.” Dominasi ideologi politik yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, termasuk kehidupan berkebudayaan dan berkesenian mulai dikikis habis.

Dalam menghadapi perubahan seperti itu, kelompok budayawan, seniman, dan cendekiawan yang ada berupaya mengembalikan kebudayaan ke posisi netral, bebas dari pengaruh ideologi politik manapun. Jika sebelum peristiwa G30S kelompok humanisme sosialis atau sosialisme komunis terus mengganyang kelompok humanisme universal, setelah itu keadaan menjadi berbalik arah. Kelompok humanisme universal bersatu untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk memerangi dan menolak kehadiran paham itu. Diusulkan oleh Harimurti Kridalaksana pada saat itu agar “pemerintah melaksanakan program rehabilitasi kebudayaan” secara terencana dan secara nasional.<sup>77</sup>

---

77. *Sinar Harapan*, 3 April 1968.

W.S. Rendra, salah seorang penyaji materi dalam Kongres Kebudayaan 1991 di TMII, Jakarta. (Dari Hidayat S., *Tempo*)

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan konsep, kebijakan, dan strategi rehabilitasi kebudayaan itu secara optimal? Tampaknya tidak ada pertemuan melalui kongres atau konferensi kebudayaan untuk memperbincangkan masalah itu, padahal saat itu kita sedang mempersiapkan pembangunan nasional di segala bidang, termasuk kebudayaan. Dari pihak budayawan dan seniman, menurut Ajip Rosidi, pada 1963 sebenarnya sudah muncul usul agar diselenggarakan KK. Tetapi dalam situasi tegang dan panas dengan dibubarkannya Manifes Kebudayaan, BMKN tidak mampu merealisasikan usul tersebut. Pada 15 September 1968, bersamaan dengan peresmian pemugaran Balai Budaya, Arief Budiman kembali mengingatkan dan mengusulkan agar BMKN segera menyelenggarakan Kongres Kebudayaan.

Baru pada 1986 diadakan acara “Temu Budaya” di TIM yang dihadiri sejumlah budayawan dan seniman, antara lain: Mochtar Kusumaatmaja, Sayidiman Suryohadiprojo, Sutan Takdir Alisyahbana, Rosihan Anwar, Prof. Sunario, Arief Budiman, EKM Masinambow, dll. Dalam kesempatan itu, mereka menyimpulkan dan mendesak agar pemerintah mengambil inisiatif menyelenggarakan KK. Akhirnya, pada 1991 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta kongres itu dapat terwujud. Jadi, dalam perjalanan sejarah KK selama 95 tahun, semasa periode “Masa Pembangunan” selama 30 tahun lebih, kongres kebudayaan hanya berlangsung satu kali saja, yaitu tahun 1991.

### Tuntutan Masyarakat

Berdasarkan AD-ART BMKN, Kongres Kebudayaan seharusnya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Ini berarti setelah KK 1960 di Bandung seharusnya pada 1963 kembali diselenggarakan kongres. Tetapi KK 1960 merupakan kongres terakhir yang diselenggarakan oleh BMKN. Setelah pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno, BMKN cenderung vakum. Dalam sebuah “Catatan Kebudayaan” di harian *Bintang Timur*, Februari 1964, diturunkan tulisan yang bernada sinis dengan judul, “BMKN itu Apa?” Sebuah pernyataannya berbunyi: “Kongres terakhir BMKN adalah

dalam bulan Juli 1960. Jadi sudah empat tahun, BMKN tidak berkongres. Tetapi siapa tahu, pada suatu hari yang baik, ada terniat bikin kongres, bisa saja bukan? Dan kita tunggulah siapa yang ‘merestui’ kongres tersebut.”<sup>78</sup>

Keinginan kalangan budayawan dan seniman untuk menyelenggarakan kongres muncul beberapa tahun setelah KK 1960. Dalam peresmian purna pugar Balai Budaya atas bantuan Gubernur Ali Sadikin pada 15 September 1968, Arief Budiman mendesak agar BMKN menyelenggarakan suatu sidang pleno atau kongres untuk membahas aktivitas BMKN dan perkembangan kebudayaan bangsa.<sup>79</sup> Desakan itu belum mendapatkan tindak lanjut. Sepuluh tahun kemudian, dalam sebuah artikel di harian *Kompas*, Alfons Taryadi menulis bahwa dalam acara “Debat tentang Seni dan Masyarakat” di TIM pada April 1978 peserta menyatakan “kini sudah waktunya diselenggarakan suatu kongres untuk merumuskan suatu kebijaksanaan kebudayaan.”<sup>80</sup>



Pada kain rentang Temu Budaya 86 di TIM-Jakarta tertulis “Menjelang Kongres Kebudayaan Nasional”. Kata-kata itu menunjukkan bahwa budayawan, seniman dan cendekiawan menghendaki adanya kongres kebudayaan. (Dari Harian Pelita, 5 April 1986)

78. *Bintang Timur*, Februari 1964.

79. *Angkatan Bersenjata*, 27 Oktober 1968.

80. *Kompas*, 23 Mei 1978.

Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri akhirnya mengambil inisiatif mengajak berbagai pihak untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan. Ide itu mendapatkan sambutan dari kalangan budayawan, seniman, dan cendekiawan. Dalam acara memperingati “50 Tahun Polemik Kebudayaan 1936” yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di TIM pada 18-20 Maret 1986, Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, dan H.B. Jassin sependapat dan menyambut baik niat pemerintah. Bahkan menurut Mochtar niat itu sudah terlambat, karena kongres yang terakhir berkisar 20 tahun lalu. H.B. Jassin memuji kepekaan pemerintah pusat terhadap kegelisahan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat hingga mengambil inisiatif tersebut.<sup>81</sup>

Maka, masih pada 1986, diadakan “Temu Budaya” di Teater Tertutup Taman Ismail Mazuki. Saat itu dukungan terhadap rencana penyelenggaraan KK datang dari banyak seniman dan budayawan. “Temu Budaya” berlangsung pada 16-18 Oktober 1986 dan sengaja digelar dalam rangka menyongsong Kongres Kebudayaan Nasional dan datangnya abad 21.<sup>82</sup> Hadir di TIM saat itu antara lain: Mochtar Kusumaatmaja, Sayidiman Suryohadiprojo, Sutan Takdir Alisyahbana, Rosihan Anwar, Prof. Sunario, Arief Budiman, E.K.M. Masinambow, Emha Ainun Nadjib, Hotma Siahaan, Nurcholis Madjid, Satjipto Rahardjo, T. Mulia Lubis, Asrul Sani, Sudjoko, Umar Kayam, Dorodjatun Kuncoro Yakti, Emil Salim, Fachry Ali, dan Kartini Syahrir.

Dengan banyaknya dukungan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan KK dapat saja dilakukan oleh pemerintah. Tidak harus oleh lembaga kebudayaan masyarakat seperti halnya kongres-kongres sebelumnya. Kenyataannya, ketika inisiatif penyelenggaraan KK datang dari lembaga kebudayaan di masyarakat, pemerintah juga ikut terlibat di dalamnya. Sebaliknya, ketika inisiatif penyelenggaraan KK itu dari pihak pemerintah, segala persiapan dan pelaksanaannya tidak meninggalkan budayawan dan seniman serta lembaga kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini, peran Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

81. *Pelita*, 5 April 1986.

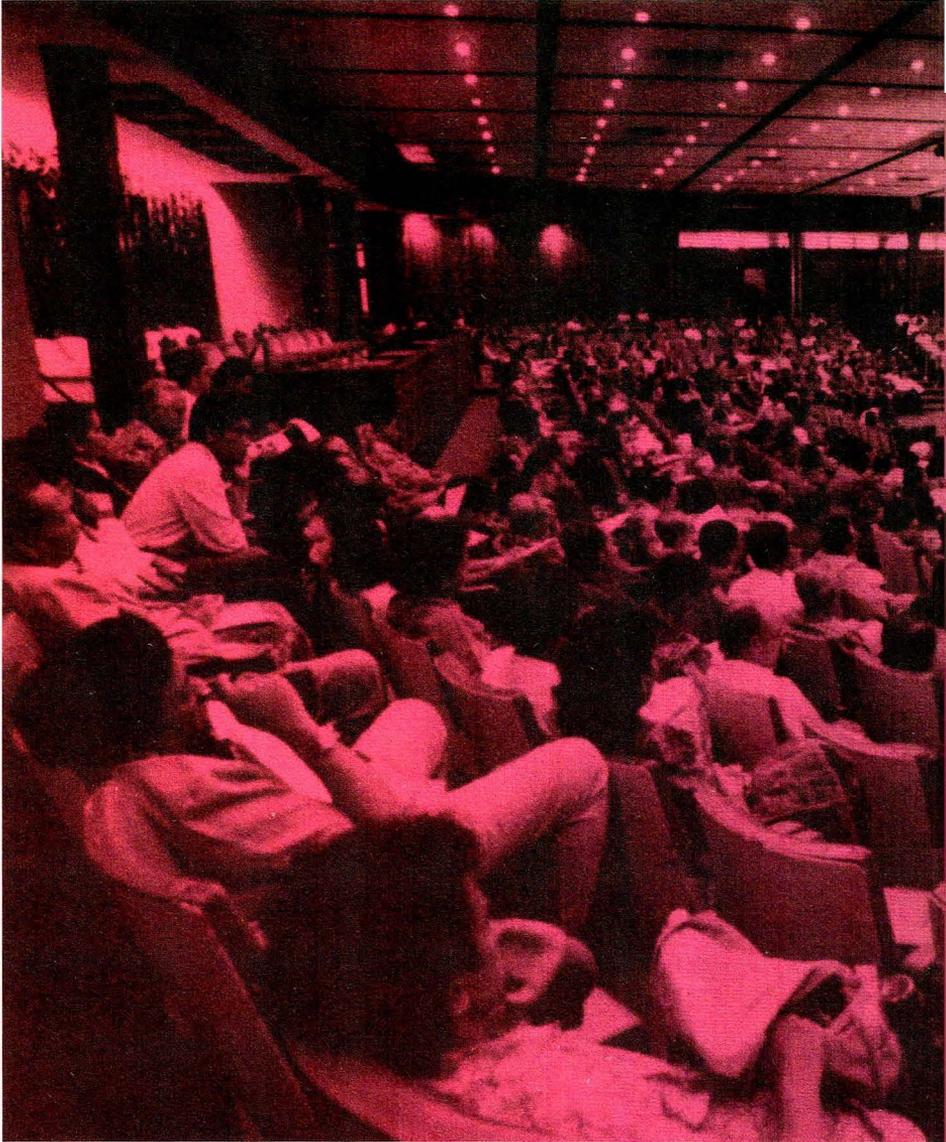
82. *Pandji Masyarakat*, no. 520, 1 November 1986, hlm. 76.

dalam mendorong terwujudnya KK 1991 amat besar. Fuad Hassan sangat menyadari bahwa KK 1991 yang dilaksanakan atas inisiatif pemerintah adalah di luar kebiasaan dari kongres-kongres sebelumnya yang dikoordinasikan oleh BMKN.

### Pelaksanaan Kongres Kebudayaan 1991

Kongres Kebudayaan 1991 sebagai KK VI (urutan versi baru) diselenggarakan setelah hampir 31 tahun lamanya setelah KK V tahun 1960—jarak waktu yang cukup panjang bila dibandingkan dengan penyelenggaraan kongres-kongres kebudayaan sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya yang perlu dicari jawabannya, sementara selama 31 tahun itu banyak permasalahan kebudayaan yang seharusnya dibahas dalam forum kongres. Kongres diselenggarakan pada 29 Oktober-3 November 1991 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dengan menggunakan berbagai anjungan untuk siding kelompok. Sidang pleno diselenggarakan di Sasono Langen Budoyo, TMII.

Suasana sistem politik pemerintahan saat itu dinilai sangat represif dan sentralistik. Meskipun pada 1986 ide itu mendapatkan dukungan dari kalangan budayawan, seniman dan cendekiawan, ketika KK itu dilaksanakan lima tahun kemudian keadaan menjadi berbalik. Pemerintah telah berupaya agar kongres itu tidak memberikan kesan didominasi oleh birokrat saja, dengan cara melibatkan banyak budayawan, seniman, cendekiawan, dan pemangku adat yang bukan birokrat, tetapi tetap saja muncul berbagai komentar bernada sumbang dari sebagian masyarakat. Muncul istilah-istilah yang bernada sinis seperti: “kongresnya baju Korpri, kongresnya baju safari, kongresnya pejabat pemerintah, kongres birokrasi, keputusan kongres sudah siap sebelum kongres dibuka, dan lain-lain.” Suara-suara itu menjadi masukan yang amat berguna bagi Panitia Pengarah. Oleh karena itu, Panitia berupaya agar materi yang diperdebatkan sesuai dengan aspirasi masyarakat secara total dan bebas, dan perdebatan dalam persidangan dapat berlangsung secara bebas. Materi kongres dijaring dari seluruh daerah sebagai pemilik kebudayaan.





*“Kebudayaan Indonesia harus sanggup membangun bangsa Indonesia yang tangguh, tegar, disiplin, dan ulet agar ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat direbut dan dikuasai.”*

*Rumusan hasil Kongres Kebudayaan 1991*

*(Dari Julian Sihombing, Kompas)*

Penjaringan masukan dari daerah dilakukan melalui berbagai acara “Temu Budaya Daerah” dan “Dialog Budaya” di beberapa wilayah. Sementara itu, di tingkat pusat diselenggarakan “Forum Kebudayaan” yang dihadiri oleh para budayawan, seniman, cendekiawan, dan pemangku adat yang memiliki pengaruh luas terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Hasil dari penjaringan masukan itu dibahas bersama dalam acara “Prakongres Kebudayaan 1991” pada April 1991, enam bulan sebelum kongres dilaksanakan. Prakongres diselenggarakan di Perpustakaan Nasional Jakarta, dihadiri oleh Panitia Pengarah, beberapa budayawan, seniman, dan pemangku adat dari pusat maupun daerah. Dalam acara ini dibahas dan disepakati topik-topik makalah, pemakalah, dan peserta kongres serta hal-hal lain yang bersifat teknis penyelenggaraan kongres.

Dalam Prakongres disepakati bahwa tema kongres adalah “Kebudayaan Kita, Kemarin, Kini dan Esok.” Waktu penyelenggaraan adalah tanggal 29 Oktober-3 November 1991, sengaja berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1991 untuk turut memperingatinya juga. Disepakati juga lokasi penyelenggaraan yaitu di TMII, Jakarta. Pokok bahasan dikelompokkan menjadi lima: “Warisan Budaya: Penyaringan dan Pengembangan”, “Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan”, “Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional”, “Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat”, dan “Kebudayaan Nasional dan Dunia (Umat Manusia)”.

#### **Kepanitiaan KK 1991**

Panitia Pengarah (*Steering Committee*):

1. Prof. Dr. Fuad Hassan, Ketua
2. Drs. GBPH Poeger, Wakil Ketua
3. Prof. Dr. S. Budi Santoso, Sekretaris
4. Prof. Dr. Umar Kayam, Anggota
5. Barnabas Suebu, SH, Anggota
6. Dr. Nurcholis Majid, Anggota

7. H. Budiardjo, Anggota
8. A.A. Navis, Anggota
9. Jakob Utama, Anggota
10. Prof. Dr. Mattulada, Anggota
11. Prof. Dr. Harsja Bachtiar, Anggota
12. Goenawan Mohamad, Anggota
13. Ki Suratman, Anggota
14. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Anggota
15. Prof. Ali Hasjmy, Anggota
16. Ny. R.A. Tahir, Anggota
17. Abdurrachman Wahid, Anggota

Panitia Penyelenggara (*Organizing Committee*):

1. Ketua Panitia : Prof. Dr. S. Budhisantoso
2. Ketua I : Drs. Bastomi Ervan
3. Ketua II : Drs. F.X. Soetopo Cokrohamijoyo
4. Sekretaris I : Drs. Nunus Supardi
5. Sekretaris II : Drs. Ahmad Yunus

Panitia Penyelenggara dilengkapi dengan panitia per bidang: Sekretariat, Keuangan, Logistik, Informasi, Teknis, serta Pergelaran Kesenian, dan Pameran Kebudayaan.

Kongres dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Soedharmono, SH, serta dihadiri oleh sejumlah menteri, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dan agama. Dalam pidato pembukaan, Presiden menyinggung tentang pembangunan yang bermatra kebudayaan, "Kita menyadari benar, pentingnya makna kebudayaan, terutama untuk memperkuat jati diri kita sebagai bangsa."<sup>83</sup> Mengenai hubungan kebudayaan dan pembangunan, Soeharto menyatakan:

---

83. Salinan sambutan Presiden Soeharto dalam KK 1991.

“MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat Indonesia juga telah menggariskan dalam GBHN 1988, bahwa: ‘Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cita, rasa, dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.’”<sup>84</sup>

Sementara itu, dalam pidato penutupan, Wakil Presiden Sudharmono menekankan lagi pentingnya pembangunan bermatra kebudayaan dengan menyatakan:

“Sebagai satuan budaya kita harus siap menghadapi perubahan zaman dengan segala konsekuensinya, dan kesiapan itu hendaknya dibangun melalui ikhtiar sadar dalam pembangunan nasional yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan adalah landasan bagi aktualisasi tahap berikutnya, dan pada setiap tahap harus kita hindarkan terjadinya kesenjangan—apalagi keterasingan—terhadap budaya kita sebagai pengukuh identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka apa yang kini menjadi perumusan dalam GBHN 1988, yaitu bahwa ‘pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya’ sesungguhnya merupakan pesan yang semestinya berlaku bukan sementara ini saja, melainkan kelanjutan upaya pembangunan nasional di masa depan. Terlebih lagi mengingat bahwa kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia merupakan amanat konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya.”

Sungguh sangat disayangkan, pendapat Wakil Presiden RI itu tidak mendapatkan perhatian dari pihak MPR dan DPR-RI yang menyusun GBHN untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Rumusan isi kalimat yang amat penting dan mendasar itu hilang sama sekali dalam GBHN 1993, 1998, dan 1999-2004. Forum seperti KK yang strategis untuk mengangkat konsep “pembangunan berwawasan budaya” sesungguhnya memang harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan di tingkat tinggi, agar dapat menetapkan garis kebijakan dan acuan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional.

---

84. *Ibid.*

Di bawah ini adalah agenda KK 1991:

1. Sidang Pleno I: Pembukaan
2. Sidang Pleno II: Laporan tentang penyelenggaraan program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1987-1997 (“The World Decade for Cultural Development 1987-1997”), oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Supardjo Rustam, selaku Ketua Panitia program tersebut. Program ini dicanangkan oleh UNESCO dan berlaku selama 1987-1997. Sebagai anggota PBB Indonesia ikut menyelenggarakan program ini.
3. Sidang Pleno III: Penyajian makalah utama oleh Prof. Dr. Sutan Takdir Alisjahbana, Prof. Dr. Umar Kayam, Nirwan Dewanto, dan Barnabas Suebu.
4. Sidang Kelompok:
  - (1) Kelompok I: “Warisan Budaya: Penyaringan dan Pemeliharaan” dengan Ketua A.A. Navis, Wakil Ketua Dr. Nico L Kana, Sekretaris Ny. Koen Mulyono. Tempat sidang di Anjungan Maluku TMII, membahas 19 makalah.
  - (2) Kelompok II: “Kebudayaan Nasional: Kini dan di Masa Depan” dengan Ketua H. Sutanto Wiryoprasonto, Wakil Ketua Dr. Muchtar Naim, Sekretaris Dr. Riris K. Sarumpaet. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 25 makalah.
  - (3) Kelompok III: “Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan” dengan Ketua Dra. Titi Said, Wakil Ketua Shofwan Karim MA, Sekretaris Drs. Rusdi Saleh. Tempat sidang di Anjungan Sumatra Barat, membahas 17 makalah.
  - (4) Kelompok IV: “Kebudayaan dan Sektor-sektor Masyarakat” dengan Ketua Dr. Harry Chan Silalahi, Wakil Ketua Dr. Fachrurrozie Syarkawi, Sekeratris Dra. Mince D. Rumbiak. Tempat sidang di Anjungan Lampung, membahas 14 makalah.
  - (5) Kelompok V: “Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia)” dengan Ketua Prof. Dr. Daulat P. Tampubolon, Wakil Ketua Dr. Sal

Murgianto, Sekretaris Irid Rachman Agus SS, MA. Tempat sidang di Istana Anak-anak TMII, membahas 12 makalah.

5. Sidang Tim Perumus, terdiri atas beberapa anggota Panitia Pengarah, para Ketua Kelompok dan Sekretaris, dan beberapa tokoh dan pemakalah.
6. Sidang Pleno IV, dipimpin oleh H. Budihardjo, didampingi para Ketua Kelompok, dengan acara pembacaan rumusan hasil KK1991. Untuk membacakan hasil kongres, ditunjuk aktris terkenal Christine Hakim.

### **Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan 1991**

Kongres Kebudayaan 1991, menurut penilaian semua pihak, diselenggarakan pada waktu yang tepat. Dikatakan demikian karena dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai perubahan, baik yang terjadi sebagai akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar. Ini menuntut penyegaran jati diri.

Jati diri bangsa Indonesia dibangun dari pengalaman sejarah dan kerangka acuan nasional yang tercermin dalam dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu secara historis dan ideologis terbuka dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Jati diri yang terbuka itu sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman yang pada gilirannya dapat diubah menjadi kesempatan untuk membangun bangsa yang maju, modern, demokratis, dan tangguh kebudayaannya.

Keterbukaan sangat diperlukan untuk membangkitkan kreativitas, prakarsa, swakarsa, dan partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian hal itu juga akan memperbesar tanggung jawab sosial. Melalui keterbukaan itu pula Kedaulatan Rakyat, yang menjadi prinsip utama UUD 1945, harus semakin dapat diwujudkan.

Kebudayaan Indonesia harus sanggup membangun bangsa Indonesia yang tangguh, tegar, disiplin, dan ulet agar ilmu pengetahuan dan teknologi

modern dapat direbut dan dikuasai. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Dalam kebudayaan Indonesia nilai dan rasa keadilan sangat mempengaruhi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, nilai dan rasa keadilan itu harus diwujudkan dalam segala kehidupan dengan jalan menegakkan azas negara hukum serta mendayagunakan perangkat-perangkat pelaksanaan dan pengawasannya.

Tantangan pembangunan dan perubahan yang kita hadapi itu menuntut agar kita memiliki kebudayaan yang berorientasi ke hari esok. Sehubungan dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai wahana salah satu pokok kebudayaan harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991, menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia, sebagaimana tercantum di dalam hasil kongres sebagai berikut.

Pembicaraan kongres melalui lima kelompok yang diselenggarakan secara bersama-sama menghasilkan pemikiran-pemikiran pokok sebagai berikut:

#### 1. Tentang Warisan Budaya: Penyaringan dan Pemeliharaan

1.1 Pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional dan budaya daerah, yang harus ditanggapi lebih sebagai daya kemampuan yang dapat dimanfaatkan dari pada ancaman yang merugikan harus dilakukan tanpa harus bertahan pada nilai-nilai dan aturan-aturan tradisional yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan negara kita.

1.2 Peranan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya harus tetap dihargai dan dilestarikan tetapi dengan cara pengembangan kebiasaan para pendukungnya demi persatuan bangsa, mewujudkan perilaku yang berpedoman pada kebudayaan nasional

dalam hubungan antargolongan yang berbeda kebudayaan.

- 1.3 Pelestarian kegiatan-kegiatan, barang-barang kesenian dan kerajinan serta peninggalan sejarah harus diusahakan melalui pembangunan prasarana, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan cagar budaya; serta pengembangan kebiasaan untuk bekerja dengan teliti sesuai dengan tuntutan tradisi budaya yang bersangkutan. Pengembangan kegiatan-kegiatan, dan barang-barang kesenian dan kerajinan harus diusahakan melalui penciptaan keadaan yang memungkinkan terwujudnya bentuk baru yang baik dan dapat diterima sebagai bentuk-bentuk kebudayaan yang wajar.
- 1.4 Aturan-aturan adat berkenaan dengan kekuasaan dan pemilikan perlu disesuaikan dengan tuntutan modern tetapi dengan tetap memperhatikan manfaat yang terkait pada aturan-aturan adat yang berkenaan dengan rasa keadilan anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.
- 1.5 Warisan budaya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditafsirkan secara rasional dengan tetap berdasarkan ajaran yang diamanatkan dalam kitab suci agama yang bersangkutan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang berusaha menjadi masyarakat yang lebih modern dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa.

## 2. Tentang Kebudayaan Nasional: Kini dan Masa Depan

- 2.1 Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional harus ditanggapi sebagai dua jenis kebudayaan dengan ciri-ciri khas masing-masing tetapi diharapkan saling mendukung sehingga manusia Indonesia di masa depan memperoleh kepribadian terutama dari kebudayaan daerah asal masing-masing dan juga memperoleh kepribadian sebagai manusia modern terutama dari kebudayaan nasional.
- 2.2 Perkembangan kebudayaan nasional harus diarahkan pada tujuan nasional, yaitu masyarakat yang dalam kenyataan sepenuhnya

berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia yang berbudaya, bebas dari kebodohan dan kemiskinan dan semua jenis tindakan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia, seperti penghinaan dan penindasan.

- 2.3 Kesusastraan Indonesia yang seharusnya merupakan bagian yang amat penting dari kebudayaan nasional, harus dikaji dan diperjelas demi memudahkan usaha mengatasi kelemahan yang kini mewujudkan kemiskinan kritik sastra, serta kandasnya majalah sastra dan ruang sastra di surat kabar.
- 2.4 Media massa harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk menyebarluaskan kebudayaan nasional, yang harus dibedakan dari kebudayaan daerah, di kalangan penduduk di wilayah negara kita. Unsur-unsur kebudayaan daerah tertentu dapat juga diperkenalkan di daerah-daerah lain dengan penggunaan media massa asal saja penduduk di daerah-daerah lain ini tidak menanggapi penyiaran yang bersangkutan sebagai paksaan terhadap mereka.
- 2.5 Karena kebudayaan suatu bangsa sangat menentukan sifat-sifat kepribadian anggota-anggota bangsa yang bersangkutan, maka pendidikan merupakan suatu jenis upaya yang ampuh dalam membentuk kepribadian. Untuk itu perlu diusahakan saling keterikatan yang lebih erat antara kebudayaan nasional, termasuk nilai-nilai yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta penjabaran sistem pendidikan nasional.

### 3. Tentang Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan

- 3.1 Daya cipta para seniman, baik yang menghasilkan karya-karya seni yang bernilai budaya tinggi maupun yang menghasilkan barang-barang yang digunakan sehari-hari yang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa indah, perlu senantiasa dirangsang dan dibantu perkembangannya agar menghasilkan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional yang

berlangsung terus-menerus dan semakin tinggi nilai keindahannya.

- 3.2 Para seniman harus memiliki keleluasaan untuk menghasilkan karya kebudayaan yang bernilai atas dasar keindahan yang diwujudkan dan bukan hanya atas dasar komersial.
- 3.3 Dalam masyarakat modern ilmu pengetahuan dan teknologi menempati bagian yang semakin besar dan penting dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, oleh sebab itu daya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu senantiasa dipupuk dalam pertumbuhan kebudayaan di Indonesia.
- 3.4 Daya cipta budaya perlu sebanyak mungkin memanfaatkan media massa, yang diharapkan dikelola dengan penuh kesadaran sosial dan tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan unsur-unsur baru kebudayaan nasional dan untuk mengurangi kesenjangan antara kebudayaan elite dan kebudayaan rakyat.
- 3.5 Kemampuan generasi muda untuk menghasilkan bentuk-bentuk karya yang baru sebagai sumbangan generasi yang bersangkutan pada perkembangan kebudayaan harus dipupuk dan dibina, yang dimulai sedini mungkin.
- 3.6. Daya cipta dan pertumbuhan kesusastraan daerah dan nasional harus dikembangkan dengan membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukungnya, seperti penyunting, penerbit, percetakan, toko buku dan perpustakaan, serta minat dan kemampuan para anggota masyarakat untuk menjadi pembaca.

#### 4. Tentang Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat

- 4.1. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan ekonomi harus dapat menghasilkan suatu keadaan yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat kita dapat mencari nafkah dengan penghasilan yang layak serta dapat merangsang anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka sebesar-besarnya tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial

masing-masing.

- 4.2 Kebudayaan yang kita kembangkan harus merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, masyarakat setempat, bangsa, dan negara.
- 4.3 Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan politik harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya tidak semata-mata diselenggarakan dengan menggunakan bahasa perundang-undangan melainkan juga menggunakan pendekatan kebudayaan.
- 4.4 Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang tumbuh dari pengalaman dalam masa revolusi nasional dan upaya menegakkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Republik kita, harus dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan tuntutan masalah-masalah yang akan dihadapi di masa depan dan yang akan jauh lebih sulit diatasi daripada tuntutan masalah-masalah yang dihadapi di masa lampau.
- 4.5 Kebudayaan yang dijadikan acuan oleh penduduk di kepulauan kita yang amat luas dalam menentukan hak dan kewajiban antara pria dan wanita harus mengandung azas persamaan derajat yang terutama terwujud sebagai kemitraan antara suami dan istri, dua manusia yang sama-sama bermartabat.
- 4.6 Kebudayaan penduduk di tanah air kita harus kembali mendorong para pendukungnya untuk menanggapi lingkungan alam, tidak hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan melainkan juga sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana ke arah pelestarian dan pemantapan kearifan serta ketangguhan kebudayaan bangsa.

## 5. Tentang Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Umat Manusia)

- 5.1 Kontak-kontak budaya antarbangsa telah meningkat di masa kini dan akan semakin meningkat lagi di masa depan sebagai proses globalisasi. Sikap saling menghargai antarbudaya dan kerjasama kebudayaan perlu ditingkatkan.
- 5.2 Pengembangan kebudayaan di luar negeri perlu ditingkatkan dengan berbagai cara dengan memperhatikan tiga taraf perolehan budaya: pengenalan, pemahaman, serta penghayatan dan pengamalan. Pengadaan pusat informasi budaya, misi kebudayaan, program pertukaran, pengajaran bahasa Indonesia dan pemanfaatan media massa adalah di antara cara-cara yang dapat digunakan.
- 5.3 Pariwisata diharapkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, namun dalam usaha pariwisata, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus selalu diperhatikan. Dalam menghindari dampak negatif pariwisata, masyarakat perlu diikutsertakan, di samping diadakannya peraturan-peraturan pemerintah yang mantap. Demikian pula masyarakat berpendapatan rendah dan kelestarian lingkungan perlu selalu mendapat perhatian.
- 5.4. Usaha-usaha penerjemahan berbagai karya tulis bermutu perlu sungguh-sungguh ditingkatkan, baik dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Usaha-usaha penerjemahan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 5.5. (Sumber: "Laporan Kongres Kebudayaan 1991," 20-26)

### **Beberapa Catatan Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991**

Sebagai evaluasi atas penyelenggaraan KK 1991, telah ditugasi Dr. Andre Hardjana untuk merangkum berbagai tanggapan masyarakat dan media massa yang disampaikan sebelum, selama, dan sesudah kongres. Beberapa hal penting yang dapat dicatat dari catatan Andre Hardjana adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

85. "Laporan Kongres Kebudayaan 1991", Ditjen Kebudayaan.

1. Kongres Kebudayaan 1991 merupakan “peristiwa kebudayaan terbesar sepanjang tahun”, yaitu tahun 1991.
2. Kongres telah memperoleh tanggapan pers yang luar biasa dari semua jenis penerbitan pers, semua jenis surat kabar harian, dan semua penerbitan pers ibu kota maupun daerah secara luas, merata dan teratur.
3. Pencetusan gagasan dan inisiatif penyelenggaraan KK 1991 itu sendiri disambut sebagai “ide dan langkah yang tepat,” meskipun “agak terlambat.”
4. Ide penyelenggaraan KK 1991 telah berhasil memikat perhatian pers, melibatkan berbagai tokoh dan ahli kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Depdikbud dan berhasil menggerakkan partisipasi dan pemikiran masyarakat luas.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinilai telah menunjukkan kembali kesungguhan minatnya pada masalah kebudayaan, meskipun semula dikhawatirkan akan menjadi sebuah “forum kedinasan,” “rapat dinas,” “pertemuan rekayasa birokrasi Depdikbud,” “materi sudah disiapkan sebelum kongres ditutup,” “didominasi oleh para birokrat,” dsb. Semuanya terbukti tidak terjadi.
6. Ada sementara pihak yang merasa tidak puas (Rendra dan Mochtar Lubis) dengan hasil kongres karena “rumusan hasilnya yang kurang menggigit” dan “pembicaraan kebudayaan yang kehilangan konteks dominasi politik,” rumusan yang kurang efektif sebagai suatu “*public policy*.”
7. Beberapa tokoh seniman dan budayawan Jawa Timur menyatakan “Kongres Kebudayaan terkesan pincang,” dan menghendaki suatu kongres yang elitis terbatas pada mereka yang betul-betul kompeten, dan kurang setuju kongres menjadi forum tukar pendapat dari berbagai tingkatan sosial dan aneka macam latar belakang.
8. Yang masih menjadi pergunjingan di kalangan para seniman dan budayawan adalah masalah belum tampaknya sebuah “*cultural policy*,” yang sudah lama ditunggu-tunggu.

9. Di balik rumusannya yang “datar,” KK 1991 sesungguhnya telah menyuarkan kepentingan-kepentingan yang terabaikan, yaitu: demokratisasi, debirokratisasi dan desentralisasi, keterbukaan dan keadilan.
10. Oleh beberapa surat kabar diingatkan agar “operasionalisasi” keputusan kongres tidak semata-mata menjadi tanggung jawab budayawan, seniman atau pejabat, melainkan tanggung jawab semua pihak dan segenap anggota masyarakat.
11. Di samping berbagai catatan penting tentang KK 1991 di atas, menjelang dan selama kongres berlangsung ternyata muncul kelompok-kelompok lain yang memberikan reaksi berbeda.
12. “Simposium Islam,” “Kelompok Bandung,” “Kelompok Surabaya,” bahkan organisasi politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menyelenggarakan diskusi sendiri dan mengeluarkan pernyataan budaya.
13. Berlangsungnya “kongres tandingan” di Ujung Pandang (sekarang Makassar). Yang menarik dari “kongres tandingan” ini adalah desakan yang kuat agar segera dibentuk Kementerian Negara Urusan Kebudayaan, dan nama Departemen Pendidikan diubah menjadi Departemen Pendidikan dan Pengajaran.
14. Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada mengeluarkan pernyataan tentang “Sikap Budaya Kaum Muda,” salah satu di butirnya berbunyi: “partisipasi masyarakat dalam membangun kebudayaan Indonesia menuntut secara aktif setiap pribadi untuk memikirkan dan merencanakan arah kebudayaan yang mampu memberikan alternatif baru pada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh dua orang wakil sebagai peserta kongres.
15. Hal lain yang menarik setelah kongres berlangsung adalah permintaan dari beberapa tokoh yang pernah terlibat dalam BMKN yang menginginkan dibentuknya sebuah badan independen semacam BMKN.

Ada beberapa bagian penting lain yang tidak tertuang dalam rumusan hasil kongres tetapi menjadi bahan diskusi dan di antaranya dirumuskan sebagai hasil sidang kelompok, yang patut menjadi perhatian karena memiliki bobot penting bagi usaha pengembangan kebudayaan. Hal-hal ini di antaranya sudah berkali-kali dibicarakan orang tetapi belum ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Beberapa isu yang penting itu antara lain sebagai berikut:

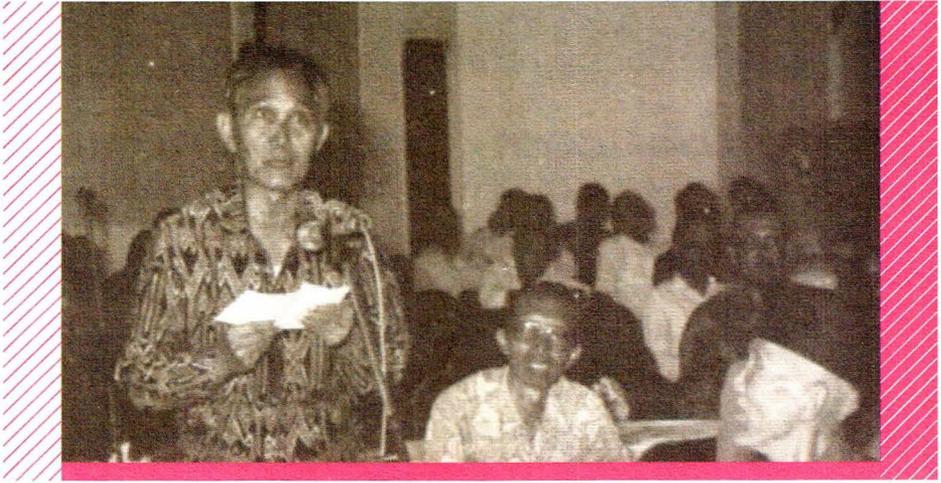
- a. Dalam sidang-sidang kelompok disuarakan kembali usul tentang pembentukan Departemen Kebudayaan yang terpisah dengan Departemen Pendidikan, juga Menteri Muda Kebudayaan dan Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, dan diusulkan pula agar tidak perlu dilakukan pemecahan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Diusulkan agar anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinaikkan menjadi 25% dari APBN.
- c. Kebudayaan tidak perlu Undang-undang karena kebudayaan adalah suatu proses.
- d. Perlu segera didirikan atau diprakarsai oleh Pemerintah adanya Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan lokal di setiap provinsi.
- e. Perlu dibentuknya Lembaga Budaya Nasional sebuah lembaga kebudayaan independen yang akan menjadi penampung aspirasi kebudayaan nasional.
- f. Untuk itu perlu dibentuk semacam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau sejenisnya.
- g. Perlu dibentuk Pusat Informasi Budaya di dalam dan di luar negeri.
- h. Pembuatan film dengan latar belakang etnis agar diperbanyak.
- i. Pariwisata pada 1995 diharapkan dapat menduduki peringkat pertama dalam pengumpulan devisa.
- j. Peserta dalam sidang kelompok mengusulkan agar KK dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan paling lambat sepuluh tahun sekali, jangan terlalu lama jaraknya seperti KK tahun 1954 ke 1991.
- k. Disampaikan oleh peserta dalam sidang kelompok agar setelah kongres

selesai dapat diselenggarakan kongres-kongres lain dari aspek kebudayaan seperti kesenian, kesejarahan, kebudayaan daerah, dan bahasa daerah, kecuali untuk bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini secara rutin telah berlangsung kongres lima tahun sekali.

Setelah hampir 31 tahun tidak diselenggarakan kongres kebudayaan, perhatian masyarakat tergolong luar biasa. Minat untuk menjadi peserta, pemakalah, maupun sebagai undangan amat besar. Pemberitaan melalui media cetak dan elektronik sebelum kongres dilaksanakan telah berperan besar dalam mensosialisasikan kongres. Namun, bahwa selama “Masa Pembangunan,” yang berjalan beriringan dengan masa pemerintahan Orde Baru, hanya berlangsung satu kali KK tetap memunculkan pertanyaan yang kiranya dapat dijawab di masa yang akan datang.



Dr. S. Boedisantoso (Ketua Panitia Penyelenggara) sedang memandu sidang Kongres Kebudayaan 1991 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 1991)



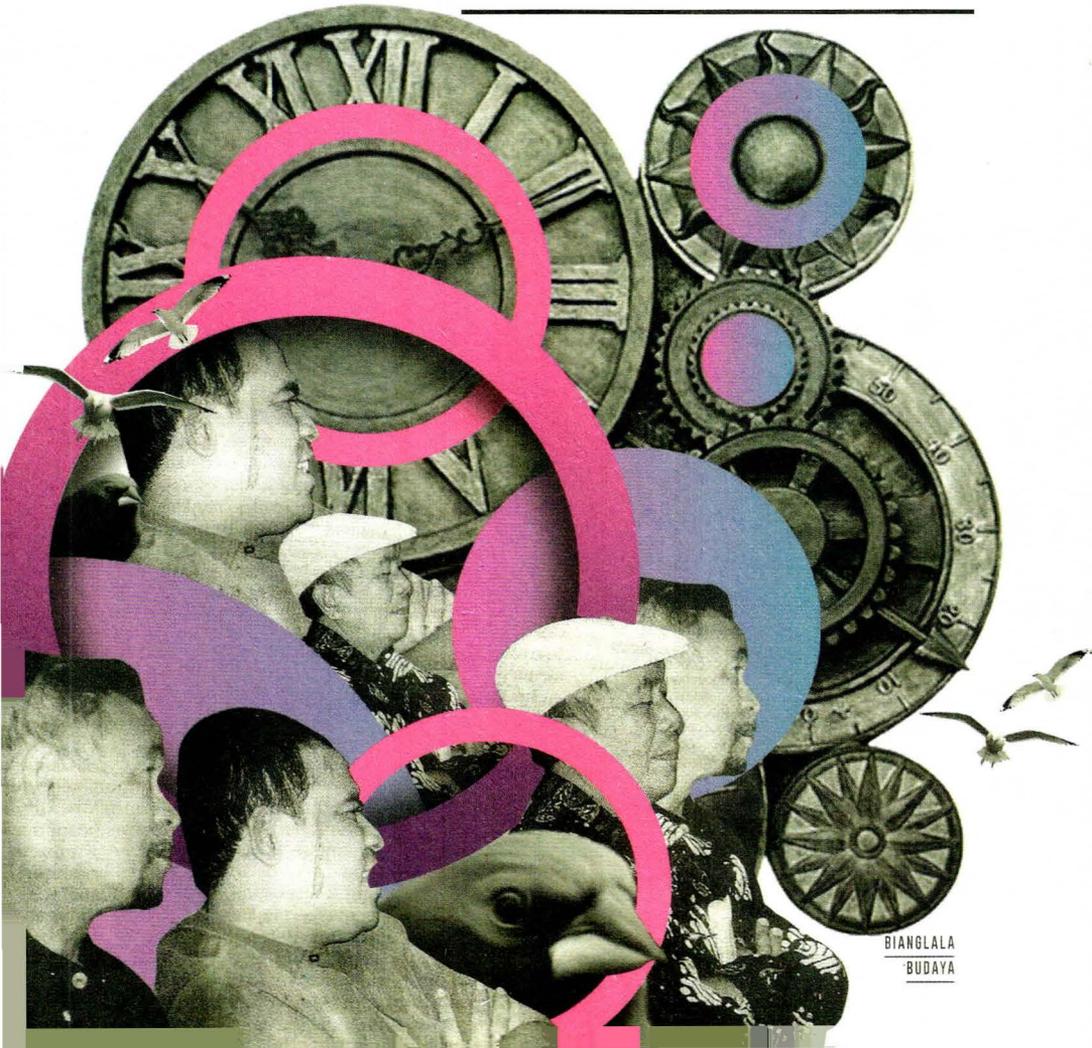
Sagimun MD, seorang peserta Kongres Kebudayaan 1991, menyampaikan pendapatnya, antara lain mengusulkan agar dibentuk Departemen Kebudayaan. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 1991)

BAB

# 05

## KONGRES KEBUDAYAAN MASA REFORMASI

---



BIANGLALA  
BUDAYA

Pada 10 Maret 1998, Presiden Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan didampingi Wakil Presiden B.J. Habibie. Kembali naiknya Soeharto sebagai presiden itu dibarengi dengan krisis ekonomi. Seiring ketidakpuasan akan berbagai aspek kehidupan, krisis itu memicu kemarahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto. Pengumuman susunan kabinet baru, Kabinet Pembangunan VII, pada 14 Maret 1998 membuat suasana politik semakin memanas. Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai kota berunjuk rasa menuntut reformasi politik.

Tekanan dari seluruh penjuru bangsa memuncak dalam tragedi penembakan mahasiswa Trisakti dan penjarahan serta pembakaran toko di beberapa kota. Pada 21 Mei 1998 pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden RI. Mundurnya Soeharto dari jabatannya dapat dikatakan sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru, untuk kemudian digantikan oleh “Era Reformasi”. Sebagai konsekuensi dari penerapan “era bentuk baru” itu telah terjadi berbagai perubahan kebijakan di segala bidang: ekonomi, politik, sosial, budaya, sistem pertahanan dan keamanan.

Setelah Soeharto mundur, ia digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Beberapa langkah reformasi diambil oleh Habibie, yaitu pemberian jaminan kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, liberalisasi partai politik, desentralisasi pemerintahan, dan pencabutan UU yang bertentangan dengan UU tentang Kebebasan Berpendapat dan UU tentang Subversi. Kebijakan baru tentu saja mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Berbagai perubahan datang ibarat air bah yang membanjir tiba-tiba sehingga tidak sempat dipikirkan secara konseptual bagaimana agar air itu mengalir dan menuju arah mana supaya perubahan membawa kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang multifaset itu menyebabkan “keterkejutan budaya” dalam masyarakat. Berbagai perubahan yang sangat mendasar dan berpengaruh besar terhadap perkembangan bangsa dan kebudayaannya itu tidak diawali atau dibarengi dengan pembahasan tentang konsep, kebijakan, dan strategi pemajuan kebudayaan yang serius.

Penyelenggaraan KK pada era Reformasi (mulai 1998) baru diselenggarakan tiga kali KK, yaitu pada 2003, 2008, dan 2013. Keinginan untuk menyelenggarakan KK pada 1996, yang sesuai dengan usul dalam sebuah sidang KK 1991, kurang mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Pada 2000, saya yang saat itu menjadi salah seorang Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menyampaikan usul berikut kerangka acuan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Drs. I Gde Ardika agar segera diselenggarakan KK lagi. Pertimbangannya, di samping telah melampaui batas waktu yang disepakati dalam kongres 1991, juga adanya berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa yang dapat dipastikan akan sangat berpengaruh terhadap kebudayaan, yaitu:

- Katup kehidupan politik pemerintahan yang tertutup menjadi terbuka (demokratis) dan dari keterbukaan itu telah terjadi berbagai perubahan budaya dengan cepat dan menyebar ke seluruh wilayah.
- Perubahan sistem pemerintahan dari bersifat sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik (otonomi daerah).
- Tata pergaulan antarbangsa dan antarbudaya yang makin bebas dan terbuka (globalisasi) yang tidak dapat dielakkan lagi.
- Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia belum dapat diatasi dan berujung pada krisis budaya.

Usul tersebut ditanggapi dengan serius dan selanjutnya dilakukan rapat-rapat persiapan. KK 2003 maka disusul dengan KK 2008 di Bogor, dan yang baru saja berlangsung pada 2013 di Yogyakarta dinamai Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI).

### **Kongres Kebudayaan 2003**

KK 2003 berlangsung dua belas tahun setelah KK 1991. Dalam KK 1991 banyak peserta yang mengusulkan agar KK dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali, seperti halnya Kongres Bahasa Indonesia. Pada 2001 saya menyampaikan usul kepada Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata

agar segera diselenggarakan KK karena beberapa alasan. *Pertama*, waktu vakum penyelenggaraan KK sudah cukup lama, sepuluh tahun lebih. *Kedua*, telah terjadi perubahan sosial politik pemerintahan yang sangat mendasar, sehingga melalui KK dapat disusun konsep, kebijakan dan strategi baru dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke sistem desentralistik, serta berlakunya sistem demokrasi dan keterbukaan membawa pengaruh besar terhadap sistem nilai budaya. *Ketiga*, perubahan tata hubungan antarbangsa dan antarbudaya semakin mengglobal membawa pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan bangsa. Tidak berapa lama Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Drs. I Gde Ardika menginstruksikan agar dilakukan persiapan penyelenggaraan kongres, dan kongres pun dilaksanakan pada 2003 di Bukittinggi, Sumatra Barat.

### **Persiapan**

Langkah pertama yang dilakukan oleh Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyiapkan kongres adalah mengundang sejumlah budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, dan tokoh masyarakat. Setelah itu dilakukan persiapan selanjutnya dengan membentuk Panitia Pengarah setelah mendengar pendapat dan saran dari berbagai seniman, budayawan, cendekiawan, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Dari masukan yang tertampung, diselenggarakanlah Temu Budaya Daerah dan Temu Budaya Regional guna menjangkau permasalahan kebudayaan yang berkembang di setiap lingkungan suku bangsa (prinsip *bottom up*). Terakhir, sebelum KK itu sendiri, diadakanlah Prakongres Kebudayaan yang bertujuan untuk mematangkan tema, judul makalah, dan pemakalah.

Pembentukan Panitia Pengarah ditetapkan dengan Surat Keputusan No. KM.12b/OT.001/MKP/2002 tanggal 21 Juli 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengarah Kongres Kebudayaan. Tugas Panitia Pengarah adalah: mengarahkan hal-hal yang berhubungan dengan substansi kongres, meliputi: (1) arah dan tujuan; (2) topik dan pemakalah; (3) merumuskan

hasil kongres; (4) menyampaikan laporan hasil kongres. Termasuk dalam susunan Panitia Pengarah di antaranya adalah Jusuf Kalla, I Gd Ardika, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Toeti Heraty Roosseno, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Dr. Ignas Kleden, Putu Wijaya, Taufik Rahzen, Garin Nugroho, Prof. Dr. A.D. Pirous, dll. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengarah menghasilkan rumusan bagian-bagian penting dari kongres, yaitu tujuan, tema, logo, tempat, dan waktu pelaksanaan kongres. Guna menjangkau masukan dari bawah terkait bahan penyusunan topik makalah dan pemakalah, Panitia Pengarah melaksanakan Temu Budaya Daerah, Temu Budaya Regional, dan sebuah pertemuan finalisasi bahan dalam bentuk Prakongres.

Panitia Pengarah menetapkan bahwa tujuan KK 2003 adalah:

- 1) menampung persepsi, aspirasi, partisipasi, minat dan perhatian masyarakat luas terhadap penentuan kebijakan publik;
- 2) memberikan kesempatan kepada budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah untuk berdialog, tukar menukar pengalaman, menggali dan merumuskan pemikiran dan upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa;
- 3) menghimpun bahan masukan untuk dipakai sebagai bahan penyempurnaan konsep, kebijakan dan strategi dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

- 1) terselenggarakan Kongres Kebudayaan secara lancar dan mencapai hasil optimal;
- 2) tersusunnya hasil rumusan Kongres Kebudayaan 2003;
- 3) terkomunikasikannya kongres dan bahan konsep, kebijakan dan strategi tentang arah dan tujuan pembangunan kebudayaan nasional Indonesia kepada seluruh pelaku kebudayaan.

Tema yang disepakati adalah: “Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan Indonesia”. **Konsep Kebudayaan Indonesia** adalah gagasan tentang pemahaman dasar kebudayaan Indonesia yang bersifat majemuk (pluralisme). Di dalamnya terdapat keragaman nilai dan tradisi lokal yang telah terlibat dalam dinamika daerah yang panjang. Nasionalisme dan berdirinya negara nasional menimbulkan hasrat dan aspirasi akan terwujudnya kebudayaan yang menjadi milik bersama, yang mungkin bisa dibuat sebagai “kebudayaan nasional Indonesia.” Hal ini melibatkan proses dialog tanpa henti dalam keragaman kebudayaan lokal dan gejala globalisasi yang semakin deras. Dalam hal ini pengertian tentang konsep kebudayaan Indonesia tidak bersifat statis, tetapi dinamis.

**Kebijakan Kebudayaan Indonesia** adalah rangka konsep dan asas yang menjadi garis besar suatu negara untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Dalam UUD 1945 secara eksplisit dikatakan bahwa negara berkewajiban untuk memajukan “kebudayaan nasional”. Karena kebudayaan tidak lepas dari nilai dan masyarakat, kebijakan kebudayaan harus berhadapan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan negara dan masyarakat. Masalah ini bertambah seiring bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam masalah etika kehidupan berbangsa, konflik sosial, penetrasi nilai budaya asing, dan harapan yang semakin meningkat. Selanjutnya kebijakan kebudayaan akan menentukan langkah konkret yang harus diambil (*action plan*).

**Strategi Kebudayaan Indonesia** adalah perencanaan dasar untuk mencapai tujuan normatif yang telah ditetapkan. Strategi ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik, seperti gejala sosial politik yang mengancam disintegrasi bangsa, masalah KKN (yang telah melenyapkan nilai-nilai “malu” dan “salah”) dan sebagainya. Hal ini juga mempertimbangkan adanya kesadaran baru yang merupakan keharusan mendesak, seperti pemberdayaan gender, pemupukan masyarakat madani, dan lain sebagainya.

“Kebijakan Kebudayaan bertolak dari pemikiran bahwa situasi multikultural adalah warisan budaya bangsa yang otentik, suatu keniscayaan dari bangsa yang pluralistic, dan merupakan sumber dinamika yang kreatif.”



*Rumusan hasil Kongres Kebudayaan 2003*



## **Temu Budaya Daerah dan Temu Budaya Regional**

Temu Budaya Daerah diselenggarakan dalam bentuk diskusi tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan di beberapa lingkungan budaya daerah. Pesertanya adalah para budayawan, seniman, cendekiawan, pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pejabat. Acara ini diselenggarakan selama Juni-September 2002 dan berlangsung di 25 kota: Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Mataram, Kendari, Kupang, Bengkulu, Manado, Bukittinggi, Pontianak, Denpasar, Ambon, Ternate, Medan, Batam, Jambi, Semarang, Palembang, Makassar, Palu, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, dan Jayapura.

Pengertian regional dalam Temu Budaya Regional dititikberatkan pada wilayah perkembangan kebudayaan suku bangsa yang memiliki ikatan yang dekat. Misalnya wilayah kebudayaan Melayu di wilayah Sumatra, dan kebudayaan Jawa di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Maka, Temu Budaya Regional hanya dapat diselenggarakan di empat tempat, yaitu di Padang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Manado pada Oktober 2002.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kesimpulan disusun dari masing-masing daerah. Beberapa isu penting muncul, yaitu globalisasi, keberagaman budaya, konflik kemanusiaan, dan kehendak untuk mewujudkan konsep dan strategi kebudayaan yang lebih baik.

## **Prakongres Kebudayaan di Denpasar, Bali**

Dalam rangka menyarikan hasil-hasil Temu Budaya Daerah dan Temu Budaya Regional, diselenggarakan Prakongres yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada 28-30 April 2003. Acara berlokasi tepatnya di Ruang Rapat Wisma Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat, Komplek Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali, sedangkan kegiatan penunjang prakongres diselenggarakan di Taman Budaya, Jalan Nusa Indah, Denpasar.

Prakongres dihadiri oleh 148 orang peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas: pemakalah sebanyak 45 orang, wakil-wakil provinsi, kabupaten/kota, dan peserta umum lainnya dari kalangan perguruan tinggi, asosiasi

keilmuan, lembaga swadaya masyarakat, pemuka, tokoh/pemangku adat.

Hasil diskusi sidang pleno dan sidang kelompok menghasilkan rumusan yang disusun oleh Tim Perumus: Prof. Dr. Toeti Heraty, Dr. Ignas Kleden, Putu Wijaya, Ridwan Saidi, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Garin Nugroho, Taufik Rahzen, Dr. Mochtar Pabottingi, Dr. Anhar Gonggong, Prof. H. K.M.A. Usop, MA, dan Dr. Tom Therik. Ada tiga subtema yang menjadi pembahasan seperti yang dipaparkan di bawah ini, berikut rumusan konsep, strategi, dan kebijakan serta rekomendasinya.

#### 1) Lokalitas Nasionalitas dan Globalitas

1. Pengalaman dalam proses mengindonesia diwarnai dinamika integrasi dan disintegrasi bangsa. Dominasi pada strategi politik dan ekonomi menghasilkan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik telah menimbulkan konflik yang disintegratif.
2. Perlu pengindonesiaan secara terus menerus dengan sebuah “strategi baru” yang menekankan nasion (bukan nasionalisme) dan berwawasan kebudayaan yang tercerahkan.
3. Solidaritas sosiologis yang muncul pada budaya populer adalah wacana potensi multikultural dalam ruang-ruang keluarga Indonesia. Pada sisi lain, potensi multikultur itu berada pada berbagai konflik etnik, yang menuntut adanya transformasi. Baik melalui pengelolaan konflik dan institusionalisasi konflik secara demokratis.

#### 2) Identitas dan Krisis Budaya

##### a. Transisi Identitas

1. Kearifan lokal hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi landasan moral berbangsa. Untuk membangun kembali karakter bangsa perlu dilakukan tindakan bersama, menyeluruh, dan berkesinambungan. (Kasus-kasus perlakuan diskriminatif terhadap suku Dayak, Papua, dan Aceh misalnya, dalam penguasaan penggarapan hutan dan pengelolaan sumber daya,

hendaknya memperhatikan hak-hak dasar masyarakat tempatan.)

2. Masyarakat majemuk akan berhadapan dengan feodalisme dan konformisme kebudayaan dominan, pelanggaran moral, merosotnya kewibawaan hukum, hancurnya otoritas dan legitimasi kepemimpinan.
3. Transisi perubahan kebudayaan melahirkan krisis identitas dan situasi heteronomi. Aspek konservatif dan progresif dalam kebudayaan akan mencari keseimbangannya, untuk menjadi acuan bersama. Pengelolaan krisis pada masa transisi dapat dilakukan melalui pendekatan integratif.
4. Agama dan nilai gotong royong, pada pengalaman bermasyarakat, tidak terbukti digunakan sebagai dasar pembentukan masyarakat budaya plural. Perpecahan dalam agama sering terjadi dan gotong royong hanya efektif dalam budaya agraris, namun tidak tahan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi.

#### b. Konflik dan Kekerasan

Suku-suku bangsa tertentu memiliki keterikatan yang sangat kuat kepada tanah dan hutan, religi dan adat serta kebersamaan, namun tersingkir dan terpinggirkan. Potensi konflik budaya dapat dicairkan lewat pendekatan interaktif dan transformatif dengan menggunakan kreativitas humor, seperti halnya bentuk-bentuk bahasa, dan berbagai bentuk protes sosial. Manipulasi simbol juga ditemukan dalam kesusastraan khususnya untuk kepentingan sistem kolonial di masa lalu serta untuk mendiskreditkan etnik tertentu.

### 3) Perubahan dan Pemberdayaan

#### a. Hukum dan Produktivitas

1. Pengakuan atas hak intelektual menghindari eksploitasi ekonomi dan moral bagi pemegang hak.
2. Mengkaji dan mempertahankan perangkat hukum yang terkait dengan kepentingan umum dalam bidang kebudayaan dan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*). Undang-undang yang terkait dengan HaKI, tanah, adat dan lingkungan hendaknya mengakomodasi perkembangan

dan kepentingan kolektif.

3. Kebijakan dalam pelestarian dan perlindungan bentang-pandang budaya (*cultural landscape*) dikembangkan dalam prinsip: masyarakat sebagai pusat pengelolaan, terciptanya mekanisme kelembagaan yang mampu menyerap apresiasi dan aksi bersama, adanya dukungan legal, serta bersifat berkelanjutan.
4. Diperlukan dukungan hukum terhadap politik pengembangan kesenian dan industri budaya.

#### b. Pendidikan

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti membuat bangsa siap hidup dalam budaya modern dan wahana yang perlu disiapkan adalah satu sistem pendidikan nasional yang berwawasan budaya.
2. Pendidikan di sekolah perlu, karena tidak semua dapat diajarkan di rumah, maka sekolah pun perlu diperbaiki sehingga benar-benar membuat siswa dapat mengalami “*the joy of discovery*” dan tidak lagi menjadi tempat korupsi (tawar-menawar) rundingan tentang nilai.
3. Terbaikannya kewajiban membaca buku dan bimbingan pengarang di dunia pendidikan kita selama 60 tahun berakibat lulusan kita “rabun membaca” dan “pincang mengarang.”
4. Kongres Kebudayaan hendaknya menghasilkan suatu rencana aksi yang antara lain berkenaan dengan sistem persekolahan dan pembelajaran sosial.

#### *Konsep Kebudayaan*

Konsep kebudayaan Indonesia sebagai budaya nasional masih dipertanyakan, bahkan puncak-puncak kebudayaan daerah dalam kaitan dengan budaya nasional perlu diberi relevansi baru. Reformasi memberi harapan terjadinya demokratisasi budaya tetapi yang lebih sering terjadi adalah konflik antara kelompok budaya bukan dalam identitas budaya utuh masing-masing, tetapi dalam variasi unsur-unsur yang terbuka, baik secara lintas budaya maupun lintas generasi.

### *Kebijakan Kebudayaan*

Membangun masyarakat multikultur merupakan keniscayaan—namun tak bisa begitu saja diterima dan tidak dilaksanakan secara otoriter. Kebijakan tersebut diupayakan secara sistematis, programatis, terpadu dan berkesinambungan. Tindakan ini dapat melalui pendidikan multikultur, lewat lembaga-lembaga mediasi interkultural dan kebijakan-kebijakan progresif yang berpihak (*affirmative action*).

### *Strategi Kebudayaan*

Demokratisasi budaya diupayakan terwujud melalui dekonstruksi budaya dominan, seperti feodalisme, otoritarianisme, dan konformisme. Adalah suatu ironi bahwa di satu pihak dirasakan kerinduan terhadap integritas budaya etik, tetapi di lain pihak dirasakan pula keterpasungan lewat adat dan tradisi, sehingga diperlukan reinterpretasi dan reposisi.

### *Rekomendasi*

Dalam penyelenggaraan Prakongres Kebudayaan V di Denpasar belum tercakup beberapa wilayah dan tema-tema yang cukup penting dan perlu diikutsertakan mengingat relevansinya dalam kebudayaan. Rangkaian tema tersebut adalah: ekonomi rakyat, industri budaya (perbukuan, seni populer dll.), religi dan spiritualitas, kesetaraan gender, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan simbol serta lingkungan hidup.

### **Pelaksanaan KK 2003**

KK 2003 diramaikan dengan berbagai acara yang memperlihatkan kekayaan ragam kesenian Indonesia. Festival Nasional Seni Pertunjukan, yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun Deputi Bidang Seni dan Film, pelaksanaannya diselenggarakan bertepatan dengan KK 2003. Ada pula Festival Pedati sekaligus pencanangan “Bulan Budaya” Sumatra Barat dan lomba-lombapantun, tari Poco-poco, rias/busanapengantin, danmembordir.

Ini dilanjutkan dengan Parade Pakaian Anak-anak, Cerdas Cermat Budaya, peragaan busana oleh Edward Hutabarat, Parade Tari Randai, Pawai Budaya Nusantara. Tak hanya itu, diadakan pula Kemah Budaya V yang diikuti oleh sembilan provinsi di Sumatra (Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatra Utara, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka-Belitung selama empat hari di Bumi Perkemahan Minangkabau Village Slaing Bawah, Padang Panjang.

Dalam KK 2003, ada 16 pokok bahasan yang menjadi sorotan:

1. Integrasi dan Disintegrasi
2. Krisis Otoritas
3. Desentralisasi Politik (Otonomi Daerah)
4. Identitas dan Transisi
5. Konflik dan Kekerasan
6. Warisan Budaya (Cagar, Ilmu, Seni, dan Budaya)
7. Kesetaraan Gender
8. Hukum, Produktivitas, dan Korupsi
9. Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi
10. Pendidikan
11. Ekonomi Kerakyatan
12. Bahasa dan Simbol
13. Budaya Pop dan Seni Hiburan
14. Religi dan Spiritualitas
15. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
16. Lingkungan Hidup

Terkait 16 pokok bahasan di atas, disepakati bahwa “Konsep Kebudayaan” adalah kerangka acuan teoretis dalam usaha pengembangan kebudayaan, sedangkan kebudayaan sendiri dipahami sebagai suatu tatanan sistem nilai dan perwujudannya dalam kenyataan material dan perilaku sosial. Identitas kebudayaan bukanlah sosok utuh dan padat melainkan terdiri atas unsur-unsur dengan variasi dan tumpang tindih yang memungkinkan adanya

persamaan di antara perbedaan-perbedaan. Identitas dipahami dalam kelenturannya untuk memperoleh kemampuan integratif yang lebih luas, dengan memahami dialektika perkembangan antara identitas dan integrasi yang berlangsung terus-menerus.

Sementara itu, “Kebijakan Kebudayaan” bertolak dari pemikiran bahwa situasi multikultural adalah warisan budaya bangsa yang autentik, suatu keniscayaan dari bangsa yang pluralistik, dan merupakan sumber dinamika yang kreatif. Pendidikan multikultural melibatkan apresiasi dan peran bahasa dan simbol-simbol budaya yang integratif dan berlangsung lewat demokratisasi berbagai bidang, sehingga demokrasi politik berimbang dengan demokrasi sosial-ekonomi, kesetaraan gender, dan pengembangan masyarakat madani.

Tentang “Strategi Kebudayaan”, disepakati bahwa perlu dilakukan secara terus-menerus dekonstruksi budaya dominan, khususnya feodalisme, otoritarianisme, dan konformisme. Diakui bahwa di satu pihak ada kerinduan terhadap integrasi identitas etnik tetapi di lain pihak ada keinginan bebas dari keterpasungan tradisi/adat yang memerlukan reinterpretasi dan reposisi dengan mempertimbangkan pemberdayaan di segala bidang. Pemberdayaan yang berorientasi kerakyatan dan keadilan harus mengatasi korupsi maupun kekerasan yang dikhawatirkan menjadi sistem-sistem yang membudaya dalam masyarakat kita.

#### **Butir-butir Rekomendasi KK 2003 Bukittinggi, Sumatra Barat**

1. Kongres mendesak agar digali kearifan maupun nilai-nilai yang terdapat di dalam warisan budaya untuk dikembangkan terus dalam masyarakat yang multikultural dengan memperhatikan peraturan dan undang-undang hak cipta, serta mendukung upaya perlindungan hak yang dimiliki secara tradisional.
2. Pengolahan seni tradisi membutuhkan kepakaran, kemampuan kuratorial, dan manajerial. Kongres mengusulkan agar kemampuan

tersebut menjadi bagian pelatihan dalam rangka membekali pelaksana kesenian memasuki industri budaya.

3. Kongres menyarankan reposisi dan reinterpretasi kritis terhadap adat dan tradisi yang mengandung potensi integrasi dan disintegrasi.
4. Kongres mendesak agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya ditingkatkan dengan sungguh-sungguh serta memperhatikan peranan laut sebagai perekat budaya, sumber kekayaan alam, dan budaya.
5. Kongres menyarankan agar pemahaman multikultural dilakukan melalui pendidikan dalam arti luas, baik melalui pendidikan formal, keluarga, media massa, dan pranata sosial lain.
6. Kongres menyarankan agar pendidikan nasional membentuk kesadaran budaya, mendorong penciptaan kebudayaan lebih lanjut, serta mencegah disintegrasi sosial dan kekerasan.
7. Kongres mendesak adanya perhatian yang lebih kritis terhadap tayangan dan publikasi yang merusak budi pekerti yang terbentuk dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
8. Kongres mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengatasi penyakit sosial akibat ketagihan alkohol, nikotin, dan narkoba, serta pornografi dalam bentuk cetakan dan tayangan di seluruh media massa.
9. Fenomena ekonomisme, korupsi, dan kekerasan dalam masyarakat kita berlandaskan pemahaman kekeluargaan yang kontroversial. Paham kekeluargaan ini dapat menjadi landasan ekonomi mutualistis maupun menjadi sumber korupsi yang menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan kekerasan.
10. Kongres menyarankan agar perekonomian nasional tidak lagi berorientasi pada ekonomisme yang hanya mengejar pertumbuhan dan mengakibatkan ketimpangan sosial, tetapi pada pembangunan kemampuan ekonomi rakyat berdasarkan mutualisme.
11. Menyadari bahwa ekonomi rakyat merupakan prasyarat demokrasi,

kongres mendesak agar realisasinya segera dilaksanakan, antara lain dengan mengubah pola pikir berutang dengan pola berpikir mandiri, pemberdayaan desa, dan reorientasi pasar.

12. Kongres menyarankan agar nilai sakral tempat-tempat keagamaan yang masih digunakan untuk peribadatan tidak dicemari oleh kegiatan apa pun yang bercorak desakralisasi.
13. Kongres mendesak agar pemuka agama berperan aktif mencegah manipulasi agama sebagai alat pertentangan.
14. Menyadari pentingnya kemampuan membangun lembaga (*institution building*) untuk keluar dari krisis dewasa ini, kongres menyarankan agar didorong tumbuhnya berbagai percobaan lokal (*local experiment*), dan mengharapkan berkembangnya semangat kedermawanan (*filantropi*) untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tanpa mengurangi aspirasi kemandirian.
15. Kongres menganjurkan kemandirian pengembangan kebudayaan dengan membentuk Departemen Kebudayaan, agar terjamin pemeliharaan warisan bangsa dan pengembangannya ke depan.
16. Kongres menganjurkan agar ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap baik **pengembangan** maupun **pembakuan** bahasa Indonesia sebagai perwujudan daya cipta dan disiplin dalam berbahasa.
17. Menyadari bahwa pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat pemerintahan yang kuat, kongres mendesak agar pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat luas.
18. Kongres mendesak agar Kongres Kebudayaan diselenggarakan lima tahun sekali dan dibentuk lembaga antarkongres yang independen untuk menelusuri perkembangan realisasi berbagai rekomendasi yang memperoleh prioritas perhatian.

Bukittinggi, 22 Oktober 2003

Tim Perumus: 1. Anhar Gonggong; 2. Edi Sedyawati; 3. Eka Budianta; 4. Garin Nugroho; 5. I G.N. Anom; 6. Ignas Kleden; 7. Jos Mansobben; 8. KMA.

Usop; 9. M. Habib Mustopo; 10. Mudji Sutrisno; 11. Nina Lubis; 12. Parakitri T. Simbolon; 13. Putu Wijaya; 14. Rahman Arge; 15. Saini KM; 16. Sri Hastanto; 17. Susanto Zuhdi; 18. Taufik Abdullah; 19. Taufik Rahzen; 20. Taufiq Ismail; 21. Toeti Heraty N. Roosseno; 22. Tony Djubiantono.

Dilaporkan bahwa suasana kongres berlangsung hangat dengan diskusi dan komunikasi terbuka, baik dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang komisinya. Suasana tersebut kondusif bagi kritik diri yang mendalam dan upaya mencari titik-titik terang pemecahan. Peserta juga antusias terhadap butir-butir rekomendasi kongres dan memiliki kehendak untuk melaksanakannya. Butir rekomendasi nomor 17 khususnya dipandang sebagai prioritas.

Muncul pula wacana tentang perlunya satu pusat nasional kebudayaan yang merupakan pusat informasi, penelitian, dan pengembangan. Pusat kebudayaan ini hendaknya berlokasi di ibukota berbagai negara dan berperan sebagai sumber informasi kebudayaan Indonesia di seluruh dunia, seperti Pusat Kebudayaan Perancis (IFI), Pusat Kebudayaan Jepang (Japan Foundation), Pusat Kebudayaan Jerman (Goethe Institut), Pusat Kebudayaan Belanda (Erasmus Huis), dll. Selain itu, dikemukakan perlunya penyikapan yang jelas terhadap perkembangan globalitas dalam kaitannya dengan eksistensi nasionalitas dan lokalitas dalam konteks kebudayaan.

### **Beberapa Catatan Pelaksanaan KK 2003**

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan KK 1991 yang banyak mendapatkan kritikan, dalam penyelenggaraan KK 2003 pihak panitia telah berupaya keras agar kongres dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti diketahui, KK 2003 merupakan kongres pertama yang diselenggarakan pada masa Reformasi. Bila KK 1991 diselenggarakan dalam suasana pemerintahan yang bersifat represif, KK 2003 berlangsung dalam pemerintahan yang demokratis, penuh keterbukaan dan kebebasan sehingga

siapa pun boleh dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan lain untuk menyampaikan pendapatnya. Selama kongres berlangsung, tidak ada peserta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun pendapat itu amat keras menyerang penguasa.

Berdasarkan data yang dapat dihimpun, pemberitaan tentang KK 2003 baik melalui media cetak maupun elektronik cukup banyak. Berbagai stasiun televisi, seperti TVRI, LaTV, ANTEVE, RCTI, SCTV, Metro TV, Indosiar, TV-7, Bali TV, dan BI TV (Bukittinggi) melaporkan KK dalam bentuk sajian berita, bincang-bincang, maupun liputan mendalam. Demikian pula, pemberitaan melalui radio pun semarak lewat RRI, Radio Trijaya, Radio El Shinta, Radio Sonora, dan radio swasta daerah Padang dan Bukittinggi. Media cetak tak kalah pula menurunkan pemberitaan, baik harian maupun majalah, yaitu *Kompas*, *Media Indonesia*, *Sinar Harapan*, *Suara Pembaruan*, *Republika*, *Koran Tempo*, *Suara Medeka*, *Bali Post*, *Terbit*, *Singgalang*, *Padang Ekspres*, *Haluan*, *Gatra*, *Femina*, *Tempo*, *Forum*, dan *Wisata*.

Dilihat dari sisi waktu penyelenggaraan, KK 2003 dianggap tepat karena, setelah 12 tahun (KK 1991), banyak terjadi perubahan besar dalam atmosfer kebudayaan Indonesia. KK 2003 diharapkan dapat menjadi “momentum bagi semua elemen bangsa melakukan otokritik, reposisi nilai, dan kemudian berjabat nurani untuk bersama-sama membangun Indonesia baru yang kita impikan.”<sup>86</sup> KK dipandang berlangsung pada saat yang tepat guna melakukan penilaian atas kekurangan masa lalu dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Dengan demikian, pergeseran nilai budaya yang menyebabkan berlarut-larutnya krisis budaya dapat dikoreksi dan diposisikan pada jalur yang benar.

Mengenai tema, sebagian pihak berpendapat bahwa “Konsep, Kebijakan, dan Strategi Kebudayaan Nasional” dianggap masih terlalu abstrak. Tema itu dinilai hanya membangun kebesaran peristiwa tanpa membongkar akar permasalahan yang tumbuh dan berkembang di jantung publik. Disebut

---

86. *Media Indonesia*, 19 Oktober 2003.

juga KK itu hidup sekaligus mati. Hidup, karena KK selalu saja menawarkan peristiwa baru, meski tanpa tema baru. Mati, karena KK selalu saja membangun stigma tidak mampu melibatkan komunitas seniman secara aktif. Pihak-pihak yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa KK hanya kerutinan, aktivitas pelat merah yang menghabiskan anggaran belanja negara, alias seremoni birokrat semata.<sup>87</sup>

Berkenaan dengan tema, sejumlah seniman Sumatra Barat menilai KK 2003 kurang memberikan kebebasan dan independensi terhadap wilayah kerja kebudayaan secara global, dan hanya merupakan bagian dari penggelembungan isu kekuasaan. Mereka menganggap isu yang dihimpun melalui Temu Budaya di 25 kota tidak masuk ke dalam tema, dan tema dalam KK justru bukan rekonstruksi dari hasil pengembaraan ke daerah-daerah, melainkan isu yang digulirkan dari pusat. Mereka berniat akan menyelenggarakan kongres tersendiri sebagai “KK Tandingan.”<sup>88</sup>

Tanggapan lain muncul lewat *Suara Merdeka* dengan judul berita “Coreng-moreng Rumusan Rekomendasi Kongres Kebudayaan V.”<sup>89</sup> Di dalamnya dikemukakan bahwa rumusan kongres tampak rendah diri, tak memiliki kekuatan, dan berkesan mengiba-iba pada pemerintah. Dipertanyakan, “Mengapa menggunakan kata-kata memohon, menyarankan, atau kata-kata lain yang berkesan pesimistis?”<sup>90</sup> Namun, seperti tertulis di atas, dalam butir-butir rekomendasi KK 2003 tidak ada kata-kata “memohon” kepada pemerintah. Kata “mengharapkan” memang ada, misalnya pada “Catatan Penutup” yang berbunyi “Secara khusus, para peserta *mengharapkan* agar hasil-hasil Kongres Kebudayaan V ini segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.” Selebihnya, kata yang banyak digunakan adalah “mendesak, menyarankan, menganjurkan.”

Para peserta memiliki catatan sendiri menyangkut penyelenggaraan, terutama masalah pelayanan yang dinilai kurang memuaskan, misalnya

87. *Ibid.*

88. *Ibid.*

89. *Suara Merdeka*, 23 Oktober 2003.

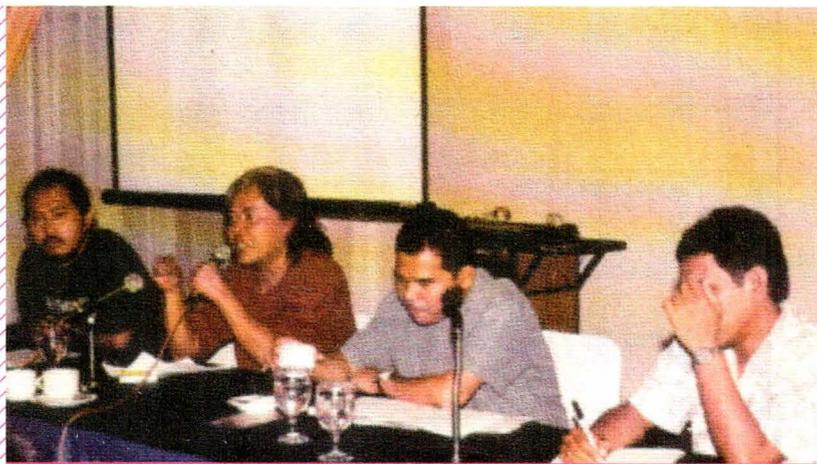
90. *Ibid.*

dalam hal akomodasi dan transportasi yang sejak awal memang sudah diprediksi oleh panitia bakal banyak menghadapi masalah. Tetapi yang paling dikeluhkan dan disayangkan oleh peserta adalah tidak dibagikannya makalah kepada peserta. Wisran Hadi, sebagai peserta yang berasal dari



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gde Ardika meresmikan pembukaan Kongres Kebudayaan 2003 di Bukittinggi ditandai dengan pemotokulan kenthongan.

(Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)



Arswendo Atmowiloto sedang menyampaikan makalahnya.

(Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)

provinsi Sumatra Barat dan dengan demikian menjadi tuan rumah hajatan itu, mengaku malu pada dua orang tamunya dari Malaysia yang telah datang dari tempat jauh tetapi tidak mendapatkan makalah.<sup>91</sup>

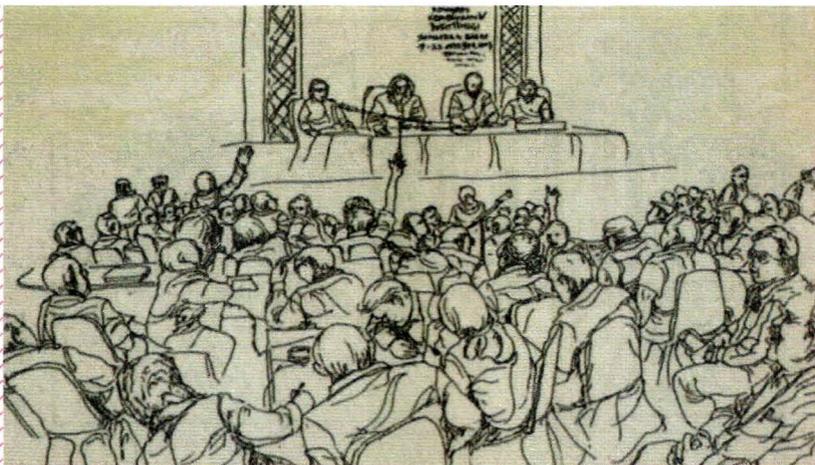
91. *Harian Singgalang*, 20 Oktober 2003.



Penyajian makalah Utusan Daerah, dipandu oleh Restu Kusumaningrum.  
(Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)



Penyajian makalah oleh Nunus Supardi dipandu oleh Taufiq Rahzen. Di sebelahnya Ajip Rosidi sebagai pemakalah. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)



Ilustrasi suasana sidang karya Bodi Darma dari Sumatera Barat. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)



Jumpa Pers setelah dibacakan hasil Kongres Kebudayaan 2003. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan 2003)

### **Kongres Kebudayaan Indonesia 2008**

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008 diselenggarakan sesuai dengan rekomendasi KK 2003 di Bukittinggi yang menyatakan bahawa kongres berikutnya diselenggarakan lima tahun kemudian. Namun, dalam pelaksanaannya nama kongres kali ini adalah Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2008. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi berlangsungnya kongres, yang melibatkan para budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah untuk bersama-sama membahas gagasan, aspirasi, minat, dan partisipasi berbagai elemen bangsa dalam memajukan kebudayaan nasional yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme. Istimewanya, KKI 2008 diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.

### **Kebudayaan dan Industri Kreatif**

Kebudayaan nasional menghadapi tantangan berupa kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, yang menyebabkan perubahan cepat dalam hampir semua aspek kehidupan. Batas antarbangsa dan negara menjadi lebih terbuka dan interaksi lintas budaya kian meningkat. Pada gilirannya hal sangat mempengaruhi eksistensi dan identitas budaya suatu bangsa. Era peradaban umat manusia hari ini, yang disebut sebagai gelombang keempat oleh penulis Herman Maynard dan Susan E. Mehrtens, menempatkan mata budaya sebagai deposit tambang yang harus dikelola dan diciptakan dengan menjadikannya sebagai “mata uang” baru untuk kesejahteraan umat manusia.

Untuk menanggapi arus deras gelombang ekonomi keempat ini Pemerintah RI di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan cetak biru Ekonomi Kreatif Indonesia, yakni konsep ekonomi baru yang berorientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Cetak biru disusun untuk memberi acuan bagi tercapainya visi dan misi industri kreatif Indonesia sampai 2030. Landasan utama industri

kreatif adalah sumber daya manusia Indonesia, yang akan dikembangkan hingga mempunyai peran sentral dibanding dalam sektor produksi lainnya. Penggerak industri kreatif diistilahkan sebagai *triple helix*, yakni cendekiawan, dunia usaha, dan pemerintah. Di dalam cetak biru tersebut dicatat 14 bidang ekonomi kreatif, yakni 1) jasa periklanan, 2) arsitektur, 3) seni rupa, 4) kerajinan, 5) desain, 6) mode (*fashion*), 7) film, 8) musik, 9) seni pertunjukan, 10) penerbitan, 11) riset dan pengembangan 12) perangkat lunak, 13) TV dan radio, dan 14) *video game*.

Dengan adanya segala tantangan hari ini, pengembangan kesadaran bangsa akan kekayaan warisan budaya Indonesia harus dilakukan secara simultan sehingga dapat menyelamatkan, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya melalui inovasi dan kreativitas demi mencapai kesejahteraan. Sebagai modal, bangsa Indonesia beruntung karena memiliki khazanah “deposit budaya” yang sangat kaya dan apabila diolah dan dikemas dengan baik dapat menjadi aset yang mendatangkan devisa dan meningkatkan perekonomian rakyat. Sehubungan dengan itu, yang juga sangat perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat adalah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi karya budaya anak bangsa.

Lebih jauh lagi, dengan adanya gempuran budaya luar secara terus-menerus, bangsa Indonesia dipandang harus memiliki “pertahanan” dan kemampuan untuk mengolah dan menyaring pengaruh-pengaruh budaya luar. Sebuah riset yang disponsori oleh Harvard Academy for International and Area Studies pada akhir 1990-an, yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan sosial seperti Michael E. Porter, Seymour Martin Lipsett, dan Francis Fukuyama, menghasilkan temuan bahwa “Budaya menentukan kemajuan dari setiap masyarakat, negara, dan bangsa di seluruh dunia, baik ditinjau dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Tanpa kecuali.”<sup>92</sup> Jika budaya dimaknai sebagai strategi untuk bertahan dan menang, maka untuk bersaing, bertahan, dan menang dalam gempuran era globalisasi, suatu bangsa harus memiliki budaya yang bermartabat dan bernilai tinggi.

92. *Buku Panduan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008*, Ditjen Kebudayaan.

Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai salah satu kunci sebagai sarana transformasi konsep dan kebijakan guna memupuk identitas dan kesadaran nasional, walaupun lingkungan keluarga dan peran media massa juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan yang berorientasi pada pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme akan mengarah pada kesadaran budaya.

Dalam konteks Reformasi, desentralisasi ditandai dengan kebijakan otonomi daerah yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi wilayah geobudaya yang dinaungi oleh provinsi-provinsi. Peluang untuk mengelola secara mandiri warisan budaya etnik menjadi lebih luas dengan sudut pandang pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan pengelolaan kebijakan pemanfaatan dan perlindungan warisan budayanya, dengan tetap mengacu pada semangat kesatuan kebangsaan, identitas, dan kesadaran nasional. Tantangan bagi pemerintah daerah pada era otonomi adalah kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola kekayaan budaya setempat, dengan segenap sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia. Tantangan lain bisa jadi segelintir kepentingan politik yang memanfaatkan simbol-simbol kebudayaan lokal. Menarik bahwa Sutan Takdir Alisyahbana pernah menolak secara kategoris semua kebudayaan tradisional sebagai dasar masyarakat baru yang akan merdeka. Kembali ke kebudayaan tradisional memang bisa jadi identik dengan masa pra-Indonesia, yang akan membawa gesekan antaretnis yang tak habis-habisnya di antara berbagai kelompok budaya.

Tema yang disepakati oleh Tim Pengarah KKI 2008 adalah “Kebudayaan untuk Kemajuan dan Perdamaian Menuju Kesejahteraan” Pemilihan tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia tengah menghadapi masalah budaya sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah terjadi perubahan sistem nilai budaya yang cenderung mengarah pada degradasi etika, moral, kejujuran, dan kedisiplinan serta keretakan kesatuan dan persatuan bangsa. Kebudayaan sebagai acuan dalam menata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang mempunyai peran besar dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan membangun masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera.

### Tujuan-tujuan yang Ditetapkan untuk KKI 2008

1. Memfasilitasi pemetaan dan pembahasan gagasan, aspirasi, minat dan partisipasi bangsa Indonesia, khususnya tokoh masyarakat, budayawan, pakar budaya, ilmuwan, dan pemerintah, akan orientasi budayanya demi membangun kebudayaan nasional yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme.
2. Menggali berbagai metode pendekatan budaya yang kompeten untuk menjawab tantangan zaman khususnya dalam arus globalisasi serta era gelombang ekonomi keempat.
3. Mencari titik temu dan saling pengertian dari kebersamaan Bangsa Indonesia, dengan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memperkuat jati diri, hingga mampu cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi dan mampu bersaing serta berkiprah di dunia internasional.
4. Membangun keyakinan dan komitmen, bahwa warisan budaya bangsa Indonesia yang luhur dapat menjadi modal utama untuk mengelola kekayaan budaya bangsa demi kesejahteraan rakyat.
5. Merumuskan rekomendasi langkah konkret serta rencana aksi yang terukur bagi para pemangku kepentingan dalam bidang kebudayaan, demi memajukan negeri dan menyejahterakan rakyat.

Dalam menetapkan pokok-pokok bahasan, Tim Perumus bertolak dari pemikiran bahwa kekayaan ragam budaya, manusia, dan alam Indonesia sudah merupakan modal besar untuk bersaing di kancah internasional. Namun, modal besar tersebut belum maksimal karena kurangnya modal lain yang tak kalah penting, yakni karakter dan jati diri bangsa yang kuat. Karenanya, perlu terus dicari formula pengembangan kebudayaan yang berujung pada penguatan identitas dan kesadaran nasional yang berbasis pluralisme. Diharapkan hal itu akan membentuk semangat dan kepercayaan diri yang kuat untuk menyejajarkan diri dengan bangsa-bangsa maju di dunia dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Tim Perumus juga mempertimbangkan bahwa tujuan manusia menciptakan budaya adalah demi kesejahteraan, baik secara material maupun moral dan psikologis. Untuk skala Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk sangat banyak dan multietnik, kesejahteraan rakyat adalah sebuah beban yang cukup berat. Untuk menuju kesejahteraan itu, perlu digali potensi, kreativitas, dan keahlian yang bersumber dari kearifan atau falsafah budaya bangsa yang beragam. Hal ini mesti mengarah pula ke meningkatnya perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya manusia yang kreatif, kekayaan budaya, dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah pokok-pokok bahasan dalam KKI 2008 sebagai berikut: 1. Film/Seni Media; 2. Sastra; 3. Bahasa dan Aksara; 4. Seni Rupa; 5. Media Massa; 6. Seni Pertunjukan; 7. Ekonomi Kreatif/Industri Budaya; 8. HaKI; 9. Diplomasi Kebudayaan; 10. Warisan Budaya; 11. Kebijakan dan Strategi Kebudayaan; 12. Pendidikan; 13. Filantropi Kebudayaan; 14. Identitas Budaya; 15. Etika. Ke-15 pokok bahasan ini nantinya dituangkan ke dalam 102 makalah dari budayawan, seniman, cendekiawan, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

#### **Panitia Pengarah KKI 2008**

<b>Pelindung</b>	: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
<b>Penasihat</b>	: 1. Prof. Dr. Edi Sedyawati 2. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono 3. Prof. Dr. Taufik Abdullah 4. Prof. Dr. Toeti Heraty Nurhadi
<b>Ketua</b>	: Dr. Mukhlis PaEni
<b>Wakil Ketua</b>	: Drs. Cecep Suparman
<b>Sekretaris I</b>	: Eka Budianta
<b>Sekretaris II</b>	: Drs. Junus Satrio Atmojo, M.Hum
<b>Anggota</b>	: 1. Prof. Dr. Azyumardi Azra; 2. Drs. Buntje Harbunangin;

3. Garin Nugroho, S.H.; 4. Prof. Dr. Komarudin Hidayat;
5. Prof. Dr. Mudji Sutrisno; 6. Nano Riantiarno; 7. Dr. Ninuk Kleden; 8. Drs. Nunus Supardi; 9. Dr. Pudentia; 10. Putu Wijaya, S.H.; 11. Prof. Dr. Sardono W. Kusumo; 12. Dr. Serano Sianturi; 13. Prof. Dr. Sri Hastanto; 14. St. Sularto.

### **Pelaksanaan KKI 2008**

KKI 2008 dilaksanakan di Bogor pada 9-12 Desember 2008 dan turut memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional. Ikut meramaikan KKI 2008 adalah “Pentas Budaya” untuk masyarakat di Plaza Balaikota Bogor. Peserta KKI 2008 terdiri atas para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan, baik perorangan maupun lembaga/institusi dari seluruh Indonesia, akademisi, media massa, dan masyarakat umum. Keseluruhan peserta mencapai sekitar 500 orang.

KKI 2008 menghasilkan rumusan hasil kongres yang dikelompokkan menjadi empat bidang dan terdiri atas 14 butir. Selain itu, kongres menyampaikan sembilan rekomendasi yang mencakup pendidikan, peran pemerintah, kelembagaan, regulasi, otonomi daerah, kebijakan, dan filantropi.

### **Butir-butir Rumusan Hasil KKI 2008**

- A. Melanjutkan Pengembangan Kebudayaan Nasional
  1. Membangun kebudayaan berbasis kemajemukan.
  2. Membangun masyarakat multikultural.
  3. Merumuskan kembali strategi kebudayaan.
- B. Menjawab Tantangan Industri Budaya dan Globalisasi
  1. Menumbuhkan apresiasi dan mengembangkan industri budaya berkelanjutan.
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif

3. Menciptakan sistem keuangan yang mendorong industri budaya yang berkualitas.
4. Mengembangkan jaringan kerja yang mendukung produksi dan pemasaran industri budaya.

C. Menggali dan Mengembangkan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa untuk Bersaing di Dunia Internasional

1. Menumbuhkan apresiasi terhadap identitas budaya bangsa yang multikultural.
2. Mendokumentasikan khazanah budaya Indonesia.
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan produk budaya secara mandiri dan bermutu.
4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya yang berakar pada etika universal (demokrasi, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan).

D. Mengelola Warisan Budaya Sebagai Modal Utama Penguatan Peradaban Demi Kesejahteraan Bangsa

1. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mengembangkan sistem kemitraan berbasis masyarakat tempatan.
3. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah untuk penguatan dan penciptaan budaya khas daerah.

*Rekomendasi*

1. Merevitalisasi lembaga, sarana, dan aktivitas kebudayaan.
2. Pendidikan:
  - a. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menghargai keragaman budaya dan menjangkau masyarakat luas dari berbagai lapisan.
  - b. Menanamkan nilai-nilai budaya melalui arena publik dengan menekankan pada penegakan hukum dan peraturan.
  - c. Mengembangkan pemahaman geobudaya.

3. Kemitraan: Meningkatkan peran masyarakat dalam program Pembangunan Kebudayaan.
4. Peran Pemerintah:
  - a. Memfasilitasi upaya pengembangan kebudayaan di tingkat daerah dan nasional.
  - b. Mewujudkan pembentukan pusat-pusat kebudayaan di ranah internasional.
5. Kelembagaan: Mewujudkan terbentuknya Departemen Kebudayaan.
6. Regulasi:
  - a. Melaksanakan Undang-Undang Penyiaran yang mewajibkan televisi berjaringan yang berwawasan budaya.
  - b. Melindungi karya-karya kreatif.
  - c. Memberikan insentif pajak untuk kegiatan kebudayaan.
  - d. Menyelesaikan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dan menyelesaikan revisi UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
  - e. Menciptakan sistem penghargaan pada pelaku budaya.
7. Otonomi Daerah: Memberi peluang yang sebesar-besarnya pada daerah untuk melaksanakan pembangunan kebudayaan lokal.
8. Kebijakan:
  - a. Merumuskan kembali strategi dan diplomasi kebudayaan.
  - b. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan kebudayaan.
8. Filantropi
  - a. Meningkatkan kedermawanan di bidang kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. Memberdayakan kemandirian masyarakat.

Bogor, 12 Desember 2008

Tim Perumus: 1. Al Azhar; 2. Ayu Sutarto; 3. Bambang Kiswanti; 4. Buntje Harbunangin; 5. Edi Sedyawati; 6. Eka Budianta; 7. H. Hardi; 8. Junus Satrio

Atmodjo; 9. Kenedi Nurhan; 10. Laretna T. Adhisakti; 11. Mukhlis PaEni; 12. Nunus Supardi; 13. Pudentia MPSS; 14. Restu Gunawan; 15. Sjafrri Sairin; 16. Susanto Zuhdi.

Pers memberikan perhatian pada KKI 2008. Harian *Kompas* menurunkan berita dengan judul “Kongres Kebudayaan Usulkan Pembentukan Departemen Kebudayaan.”<sup>93</sup> Ketika ditanya mengenai pembentukan Departemen Kebudayaan tersendiri, Jero Wacik mengatakan bahwa pembentukan departemen merupakan hak prerogratif presiden. Perubahan dari kementerian negara menjadi departemen, menurutnya, setidaknya telah menunjukkan komitmen untuk lebih memperhatikan kebudayaan. Hasil rekomendasi itu sendiri akan dibawa ke Presiden. Salah satu anggota tim perumus, Mukhlis PaEni, menyatakan, dengan adanya Departemen Kebudayaan, diharapkan kebudayaan lebih fokus diperhatikan. Selama ini, “kebudayaan masih terpinggirkan.”

**Pembentukan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI)** Menindaklanjuti rekomendasi KK 2003, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membentuk lembaga khusus yang bersifat independen yang beranggotakan budayawan dan cendekiawan. Dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.27/UM.001/MKP/04, tanggal 19 Mei 2004, dibentuklah Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan. Tetapi, dalam kenyataannya, hingga berlangsung KKI 2008 badan ini tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah KKI 2008 di Bogor, dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.02/OT.001/MKP/2009, tanggal 6 Februari 2009, dibentuklah Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI), dan Badan Pekerja Antarkongres Kebudayaan dibubarkan.

Menurut Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (NBSF) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Drs. Tjetjep Suparman, M.Si, Depbudpar membentuk dan memfasilitasi lembaga independen

93. *Kompas*, 13 Desember 2008.



Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ir. Aburizal Bakrie dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik SE, meresmikan pembukaan KKI 2008 dengan memukul gendang. (Dari dokumentasi kepanitiaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008)

dengan anggota dari kalangan budayawan dan cendekiawan untuk mengawal perjalanan keputusan kongres serta mempersiapkan dan turut melaksanakan kongres berikutnya. Hal ini sesuai dengan amanat peserta KK 2003 yang berkeinginan untuk membentuk lembaga yang dapat menjadi motor penggerak semangat berkebudayaan dari masa ke masa. Lembaga ini diharapkan dapat membantu upaya merevitalisasi lembaga, sarana, dan aktivitas kebudayaan. Dialog-dialog multipihak dengan melibatkan unsur budayawan, akademisi, seniman, swasta, lembaga masyarakat, dan media massa pun mendukung terbentuknya lembaga yang dimaksud, hingga disepakatilah berdirinya Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia, disingkat BPKKI.<sup>94</sup>

Berangkat dari aspirasi tersebut, dalam struktur organisasi BPKKI terdapat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pelindung, dengan Pengarah yaitu Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film; Dirjen Sejarah dan Purbakala; Sekretaris Jenderal Depbudpar; dan Inspektur Jenderal.

94. Sambutan lisan Drs. Tjetjep Suparman dalam KKI 2008.

Sementara itu, Badan Pekerja terdiri atas: Mukhlis PaEni (Ketua); Junus Satrio Atmojo (Sekretaris); dengan anggota Bunce Harbunangin, Pudentia, H. Hardi, Susanto Zuhdi, Nunus Supardi, dan Kenedi Nurhan. Sekretariat BPKKI berasal dari staf Sekretariat Direktorat Jenderal NBSF dan Sekretariat Direktorat Jenderal Sejarah Purbakala yang diperbantukan.

### **Kongres Kebudayaan Indonesia 2013**

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2013, atau KK ke-9 dalam perjalanan KK dalam sejarah Indonesia, diselenggarakan di Yogyakarta. KKI ini mengambil tema “Kebudayaan untuk Keindonesiaan” dan berlangsung selama empat hari, 8-11 Oktober 2013. Tema itu dijabarkan menjadi lima subtema, yaitu: 1) Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi; 2) Warisan dan Pewarisan Budaya; 3) Diplomasi Kebudayaan; 4) Pengelolaan Kebudayaan, dan; 5) Sumber Daya Kebudayaan. Kelima subtema tersebut dibahas lewat 100 makalah, 80 di antaranya dipresentasikan dan 20 lainnya tidak dipresentasikan.

Peserta KKI terdiri atas pakar, budayawan, seniman, cendekiawan, tokoh masyarakat, wartawan, dan unsur pemerintah. Mereka menghasilkan rumusan yang pada dasarnya menegaskan sekali lagi keragaman kebudayaan bangsa sebagai kekayaan dan sumber utama dalam pembangunan jati diri, kebanggaan nasional, dan pengukuh kesatuan dan persatuan bangsa, meskipun pada masa pasca-Reformasi perjalanan bangsa diwarnai oleh berbagai konflik horizontal dan vertikal. Kongres menyepakati bahwa sudah saatnya semua potensi budaya harus dipelihara dan terus ditanamkan kepada generasi muda. Diakui pula konsekuensi-konsekuensi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dewasa ini, yang tidak hanya membuat hubungan antarbudaya semakin terbuka dan saling memengaruhi, tetapi juga memperlihatkan kristalisasi kepentingan etnis atau daerah yang dapat mengancam upaya membangun keindonesiaan.

## Rumusan Hasil KKI 2013

### 1. Demokrasi Berkebudayaan dan Budaya Berdemokrasi

Penerapan demokrasi lebih mengedepankan individualisme tanpa diimbangi dengan kapasitas individual dalam pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan hakikatnya telah mengakibatkan menguatnya lokalitas yang cenderung mengganggu keindonesiaan yang kita cita-citakan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi yang mencerminkan kebudayaan sebagai *mainstream* pembangunan keindonesiaan belum tampak jelas ditunjukkan ke dalam perilaku budaya berdemokrasi. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang digali dan dikembangkan dari lokalitas tertentu pada prinsipnya dapat dimanfaatkan untuk perkuatan demokrasi. Penggalan dan pengungkapan kearifan lokal dilakukan dalam konteks sejarah lokal atau daerah dengan perspektif keindonesiaan. Sementara itu pemanfaatan dan penerapannya ke dalam demokrasi harus bertumpu pada landasan konstitusi dan realitas kekinian.

### 2. Warisan dan Pewarisan Budaya

Pewarisan kebudayaan merupakan dasar bagi pengembangan kebudayaan dan tumbuhnya peradapan. Melalui proses pewarisan itulah capaian-capaian dan kemajemukan kebudayaan yang telah dihasilkan oleh suatu generasi dapat dimiliki dan dikembangkan lebih lanjut oleh generasi-generasi selanjutnya. Muncul akulturasi kemajuan kebudayaan yang ketika diwariskan dari generasi ke generasi kemudian menjadi jati diri yang kokoh dari pemilik kebudayaan.

Ketika suatu kebudayaan semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar, proses pewarisan kebudayaan dan unsur-unsur budaya yang diwariskan akan mengalami proses perubahan. Proses pewarisan menuntut adanya proses seleksi, adopsi, dan adaptasi unsur-unsur budaya dari luar sehingga unsur budaya asing dapat diterima dan diadopsi dalam sistem budaya yang ada. Di

sinilah terjadi pertemuan kebudayaan yang melibatkan proses glokalisasi dan menghasilkan pola-pola kebudayaan yang baru.

Keberagaman budaya tradisi yang diwariskan di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan ruang pertumbuhannya secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan kebudayaan Indonesia. Interaksi warisan tradisi lokal dan kebudayaan Indonesia yang setara akan membangun keindonesiaan yang lebih tangguh menghadapi tantangan dalam menggapai masa depan yang bermartabat. Interaksi dan pewarisan budaya tradisi memerlukan ruang khusus di semua bentuk media (khususnya televisi budaya) yang aktual dalam kehidupan masyarakat.

### 3. Diplomasi Budaya

Kebudayaan Indonesia telah memasuki lingkup dunia internasional tanpa batas. Hal ini menuntut adanya kemampuan untuk mengembangkan diplomasi dalam bidang kebudayaan, baik ke dalam maupun keluar dengan cara yang lebih strategis, sistematis, dan terencana. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan peran semua pihak yang lebih aktif, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

### 4. Pengelolaan Budaya

Kebudayaan tidak perlu dikelola dari luar, karena pada dasarnya kebudayaan dapat mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan baru diperlukan dalam hubungannya dengan pembentukan keindonesiaan sesuai dengan semangat zaman.

### 5. Sumber Daya Kebudayaan

Indonesia memiliki sumberdaya kebudayaan, baik *tangible* maupun *intangible* yang sangat beragam. Pada masa kini dan di masa depan kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda sebagai pemangku kebudayaan di masa depan dituntut untuk memiliki kemampuan memanfaatkan keragaman

sumberdaya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan.

#### *Rekomendasi*

1. Menciptakan kehidupan demokrasi yang berwawasan budaya melalui pengungkapan kearifan lokal yang relevan.
2. Pendidikan baik formal maupun non formal harus lebih mampu berperan dalam pewarisan kebudayaan Indonesia dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana.
3. Menyusun “Grand Design Diplomasi Kebudayaan” yang dapat menciptakan keindonesiaan yang unggul dan kompetitif.
4. Menciptakan sistem pengelolaan kebudayaan yang terencana, terintegrasi, dan terkoordinasi serta menguatkan peran segenap pemang-ku kebudayaan.
5. Menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan sumber daya kebudayaan untuk pembentukan keindonesiaan yang bermartabat dan mengembangkan sumber daya kebudayaan secara berkelanjutan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

Tim Perumus: 1. Mukhlis PaEni (Ketua); 2. Nunus Supardi; 3. Pudentia MPSS; 4. Heddy Shri Ahimsa Putra; 5. Susanto Zuhdi; 6. Dendy Sugono; 7. Jabatin Bangun; 8. Anhar Gonggong; 9. Luluk Sumiarso; 10. Eka Budianta; 11. Gufron Ibrahim.

Seperti halnya dengan kongres-kongres sebelumnya, respons masyarakat yang pro dan kontra selalu muncul. Dalam hal KKI di Yogyakarta, muncul penolakan dari sejumlah budayawan dan seniman senior Yogyakarta. Sesudah KKI diselenggarakan, sekitar 17 seniman hadir di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y), di antaranya Ashadi Siregar, Emha Ainun Najib, Suminto A Sayuti, Tanto Mendut, Indra Tranggono, Iman Budi Santosa, Toto Raharjo, Manu, Noe Letto, dan Ons Untoro, untuk

menyampaikan protes karena. Mereka mengungkapkan, sebagai budayawan dan seniman senior Yogyakarta, mereka tidak pernah diajak bicara dan diundang. Dalam kesempatan itu, Ashadi Siregar, yang juga pengajar emeritus di Universitas Gadjah Mada menyatakan, kongres ini mestinya menghasilkan nilai-nilai yang bisa membangun masyarakat berbudaya. Sementara itu, menurut Emha Ainun Najib, pelibatan budayawan dan pelaku budaya sangat menentukan kelayakan sebuah kongres kebudayaan. Menurutnya, kongres kebudayaan seharusnya wajib dihadiri oleh mereka yang berkelas brahmana, yang tidak lagi semata-mata memikirkan duniawi, karena budaya sifatnya rohaniyah yang melahirkan nilai-nilai. Yang lain, sastrawan Indra Tranggono menyatakan, birokrasi telah meninggalkan masyarakatnya, sedangkan Suminto A Sayuti, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, mengatakan bahwa kalangan akademisi di kampus-kampus ilmu budaya tidak tahu-menahu akan adanya kongres kebudayaan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Amal, M. Adnan. 2010. *Portugis dan Spanyol di Maluku*. Depok: Komunitas Bambu.
- Biran, Misbach Yusa Biran. 2009. *Sejarah Film 1900-1950*. Depok: Komunitas Bambu.
- BMKN. 1954. "Laporan BMKN".
- Damono, Sapardi Djoko. 1987. *Catatan Tentang Konggres Kebudayaan Tahun 1948, 1951, dan 1954*. Jakarta: Seminar Budaya Universitas Indonesia.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Kebudayaan*, cetakan II. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. 2003. *Ensiklopedi Jakarta*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Pemprov DKI Jakarta.
- Ditjen Kebudayaan. 1973. "Pokok-pokok Kebijakan Kebudayaan".  
----- . 2008. *Buku Panduan Kongres Kebudayaan Indonesia 2008*.
- Erkelens, Jaap. 2001. *Java Instituut dalam Foto*. Jakarta: KITLV.
- Hardjana, Andre. "Laporan Kongres Kebudayaan 1991".
- Hasse, Helle S. 2006. *Pengantar untuk Vorst Tussen Twee Werelden*, Madelon Djajadiningrat. Groet: Uitgeverij Conserve.
- Ikram, Akhdiati. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kratz, E. Ulrich. 2000. *Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lindsay, Jennifer dan Maya H.T. Liem (Ed). 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1960*. Jakarta: KITLV dan Pustaka Larasan.
- Mangoenwidodo, Soebaryo. 1994. *Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat: Perjalanan Seorang Putra Bangsa*. Jakarta: Yayasan Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
- Milone, Pauline D. "Indische Culture and Its Relationship to Urban Life" dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 9, Juli-Oktober 1967.
- Moekhardi. 1983. *Magelang Berjuang*. Magelang: Akabri Darat.

- Moeljanto, D.S. dan Taufiq Ismail. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Offensif Lekra/PKI Dkk*. Bandung: Mizan.
- Poespoprodjo, W. 1984. *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926: Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Remadja Karya.
- Shiraishi, Takashi. "The Disputes Between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria vs Pandita" dalam *Indonesia*, vol. 32, 1991.
- Soeharto. "Sambutan Kongres Kebudayaan 1991".
- Soekiman, Djoko. 2000. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*. Jakarta: Yayasan Bentang Budaya, Yayasan Adikarya Foundation, dan Ford Foundation.
- Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. 2007. *Mengindonesia: Etnisitas dan Identitas Bangsa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wasino. 1994. "Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menanggapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX – Pertengahan Abad XX)." Tesis tidak diterbitkan, UGM.
- Zuhdi, Susanto (Ed). 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah Vol. 8: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Salinan sambutan Presiden Soeharto dalam KK 1991
- Angkatan Bersenjata*, 27 Oktober 1968
- Antara*, 9 Mei 1964
- Bintang Timur*, Februari 1964
- Budaya*, September/Oktober 1954
- Djawa*, 1925.

Djawa, 1926.  
Djawa, 1927  
Djawa, 1930  
Djawa, 1938  
Harian Singgalang, 20 Oktober 2003  
Indonesia, no. I-II, 1950  
Kompas, 23 Mei 1978  
Jawa Baroe, no. 8, th 2603 (1943).  
Media Indonesia, 19 Oktober 2003  
Pandji Masyarakat, no. 520, 1 November 1986  
Pantja Raja, 15 Januari 1946  
Parahiangan, no. 48, 1929  
Pelita, 5 April 1986  
Sinar Harapan, 3 April 1968  
Sri Poestaka, th. III, 1921, hlm. 189  
Suara Merdeka, 23 Oktober 2003  
Tempo, 2 November 2004  
Warta Kebudayaan, no.5/ Januari 1957

“Teosofi dan Pergerakan Nasional,” diakses dari <https://tirto.id/teosofi-dan-pergerakan-nasional-cl8i> pada 2 Oktober 2018.

“R.A.A. Wiranatakusumah, ‘Raja Sunda’ Terakhir”, diakses dari <https://serbasejarah.wordpress.com/2010/03/01/r-a-a-wiranatakusumah-%E2%80%99Craja-sunda%E2%80%9D-terakhir/> pada 2 Oktober 2018.

<http://www.smaritime.com/SS-Op-Ten-Noort.htm>

<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/1792>

## Tentang Penulis

**N**unus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Setelah lulus sekolah rakyat/SR (1956), sekolah guru bantu/SGB (1959), dan sekolah guru atas/SGA (1962) di kota kelahirannya, ia melanjutkan studi ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang Cabang Madiun. Ia memilih masuk Fakultas Keguruan, Sastra, dan Seni (FKSS) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan meraih gelar sarjana muda pada 1970. Nunus lantas menjadi asisten dosen merangkap Kepala Tata Usaha FKSS (1965–1973). Ia pindah ke Jakarta pada 1973.

Nunus menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain sebagai Kepala Bagian Perencanaan (1985–1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993–1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999–2001). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari–14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND).

Di bidang kebudayaan, Nunus pernah menjabat Sekretaris Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan 1991 dan anggota Panitia Pengarah Kongres Kesenian Indonesia 1995 serta Kongres Kebudayaan 2003, 2008, dan 2013. Sejak 2009 hingga kini ia masih duduk sebagai anggota Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia. Selain itu, ia pernah ditugasi untuk menjadi Koordinator Penyelenggaraan Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (Indonesia-Nihon Yukosai) di Jepang (1996–1997).

Setelah pensiun, Nunus masih aktif, baik sebagai Ketua I Badan Kerjasama Kesenian (BKKI) dan Ketua II Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Ia juga salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Pada 2005–2008 ia menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF), kemudian mulai 2009 menjabat Wakil Ketua LSF 2009–sekarang. Pengalaman lain, namanya

tercatat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Isi Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004–2009). Juga menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012.

Sejumlah karya tulis yang sudah ia terbitkan, antara lain: *Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (1998); *Persahabatan Indonesia–Jepang* (1998); *Pedoman Merehabilitasi Gedung Bersejarah* (terjemahan, 2000); *Kongres Kebudayaan Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka* (2003); *Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Birokrasi* (Ketua Tim, 2004); *Kongres Kebudayaan 1918–2003* (edisi revisi, 2007); *Sejarah Kelembagaan Kebudayaan di Pemerintahan dan Dinamikanya* (Ketua Tim, 2004); *Lima Tahun Otonomi Bidang Kebudayaan* (Ketua Tim, 2006); *Pendidikan Apresiasi Budaya di Lingkungan Pesantren* (Ketua Tim Peneliti, 2007); *50 Tahun Tugu Nasional/Monumen Nasional* (Ketua Tim, 2011); *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: Dari Masa ke Masa* (2013); *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918–2013* (2013); *Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia: Impian Lama yang Belum Terwujud* (2014); *Balai Budaya: Riwayatmu Dulu, Kini, dan Esok* (2015); *Seabad Sensor Gambar Idoep di Nusantara 1916–2016* (2016); *Melacak Jejak Direktur Jenderal Kebudayaan* (2016); *Deklarasi Hari Museum Indonesia* (2016); *Bela Budaya Buku I dan Buku II* (2017).

Beberapa artikel yang ia tulis terbit di berbagai media massa dan antologi, misalnya: *Ranah Ilmu Budaya* (2004); *Archaeology: Indonesian Perspective* (2006). Ia menjadi salah satu penulis buku *Kapal Karam: Abad Ke-10 di Laut Jawa Utara Cirebon* (2008); *Sejarah Permuseuman di Indonesia* (2011); *Indonesia dalam Arus Sejarah* (2011, sembilan jilid); *Sejarah Sensor Film di Indonesia* (2011); *Arkeologi untuk Publik* (2012); dan *77 Tahun Wardiman Djojonegoro* (2013). Selain itu, ia juga menjadi narasumber penulisan buku *Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta 1945–2012* (2013).

Bianglala Budaya Jilid 1-5 merangkul perjalanan bangsa Indonesia dalam berkongres tentang bidang-bidang di bawah payung besar kebudayaan. Perjalanan ini bermula seratus tahun yang lalu, saat Indonesia belum merdeka, dan membuahkkan butir-butir pemikiran putra dan putri bangsa—mulai dari tentang kebudayaan itu sendiri hingga tentang Pancasila, masyarakat adat, ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, dan banyak lagi.

Nunus Supardi, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1998), Direktur Purbakala (1998-2000), Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2000-2001), Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (2001-2003), tak henti mencurahkan perhatian terhadap kebudayaan selepas masa pensiunnya. Ia mengumpulkan data dan arsip yang menakjubkan tentang wajah Indonesia yang kurang mendapat perhatian khalayak. Wajah ini menggambarkan untaian upaya kolektif untuk merawat dan memajukan bangsa lewat kebudayaan, baik oleh kaum pergerakan era kolonial, para bapak pendiri bangsa, kalangan cendekia, budayawan, seniman, maupun lain-lain yang memiliki kepedulian. Bagi generasi kini dan nanti, buku ini menjadi pintu masuk menuju penjelajahan lebih jauh demi kemungkinan-kemungkinan baru untuk memajukan Indonesia.

**Prof. Dr. Djoko Saryono (dosen/penyair):**

Buku ini memberikan suatu mata air yang begitu kaya sehingga bisa menyehatkan kita. Kita bisa melihat bagaimana kebudayaan bisa dibentuk secara intelektual, kita melihat adanya dinamika lokal dan nasional yang dihasilkan melalui berdialog dan bersaing pendapat untuk menghasilkan simpulan-simpulan yang cekatan. Diskursus yang ditemukan dalam buku ini memberikan dampak yang luar biasa. Di sisi lain, semakin lama tampak kongres kebudayaan tidak berpijak sepenuhnya pada kebudayaan. Kalau kongres kebudayaan ingin dihidupkan marilah kita mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan kebudayaan.

